LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
TAHUN ANGGARAN 2026

https://kemendagri.go.id
(021) 3450038
Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat

BAGIAN ANGGARAN 010

LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SEMESTER I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
TAHUN ANGGARAN 2026

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta,
MENTERI DALAM NEGERI,

[redacted]

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	xv
Pernyataan Telah Direviu	xvi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	65
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	109
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	138
F. Pengungkapan Penting Lainnya	143
G. Penutup	147
VI. Lampiran dan Daftar	

DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel 1	:	Pagu dan Realisasi Belanja untuk Pelaksanaan Prioritas Nasional s.d. 30 Juni 2026	11
Tabel 2	:	Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Unit Eselon I	16
Tabel 3	:	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	23
Tabel 4	:	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	25
Tabel 5	:	Kriteria Kualitas Piutang	27
Tabel 6	:	Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Tahun Anggaran 2026	28
Tabel 7	:	Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program	28
Tabel 8	:	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk Tahun yang Berakhir s.d. 30 Juni 2026 per Kode MAP	29
Tabel 9	:	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk Tahun yang Berakhir s.d. 30 Juni 2026 per Eselon I	30
Tabel 10	:	Perbandingan Realisasi PNBP Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 per Eselon I	30
Tabel 11	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	31
Tabel 12	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program s.d. 30 Juni 2026	32
Tabel 13	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bruto s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 per Unit Eselon I	32
Tabel 14	:	Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Eselon I s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	33
Tabel 15	:	Perbandingan Realisasi Belanja Neto s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	33
Tabel 16	:	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	34
Tabel 17	:	Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	35

Tabel 18	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Akun s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	35
Tabel 19	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	36
Tabel 20	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	36
Tabel 21	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	37
Tabel 22	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	37
Tabel 23	:	Rincian Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	37
Tabel 24	:	Perbandingan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi per Eselon I s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	38
Tabel 25	:	Pagu dan Realisasi PLN ILASP periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026	42
Tabel 26	:	Pagu dan Realisasi PLN NUFRep periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026	46
Tabel 27	:	Pagu dan Realisasi PLN FMCPNJP periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026	51
Tabel 28	:	Pagu dan Realisasi PLN *ID For Inclusive Service Delivery and Digital Transformation* periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026	55
Tabel 29	:	Pagu dan Realisasi HLN *Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II* Ditjen Bina Pemdes periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026	56
Tabel 30	:	Pagu dan Realisasi HLN *Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II* Ditjen Bina Bangda periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026	60
Tabel 31	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Per Eselon I untuk masing-masing Fungsi dan Sub Fungsi Tahun 2026	61
Tabel 32	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional I	62
Tabel 33	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional II	62
Tabel 34	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta	63

Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional III

Tabel 35 : Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional IV 63

Tabel 36 : Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VI 63

Tabel 37 : Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VII 64

Tabel 38 : Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VIII 64

Tabel 39 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I 65

Tabel 40 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I 66

Tabel 41 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I 67

Tabel 42 : Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I 71

Tabel 43 : Mutasi Belanja Dibayar Dimuka 71

Tabel 44 : Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I 72

Tabel 45 : Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I 72

Tabel 46 : Mutasi Piutang Bukan Pajak per Jenis Transaksi 73

Tabel 47 : Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak 74

Tabel 48 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak 76

Tabel 49 : Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I 76

Tabel 50 : Mutasi Bagian Lancar TP/TGR sampai dengan 30 Juni 2026 77

Tabel 51 : Rincian Persediaan 78

Tabel 52 : Rincian Persediaan per Unit Eselon I 78

Tabel 53 : Mutasi Persediaan 79

Tabel 54 : Rincian Tanah per Unit Eselon I 80

Tabel 55 : Rincian Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I 81

Tabel 56 : Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 81

Tabel 57	:	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan	83
Tabel 58	:	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Berasal dari Realisasi Belanja	84
Tabel 59	:	Rincian Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I	84
Tabel 60	:	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	85
Tabel 61	:	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan	86
Tabel 62	:	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Berasal dari Realisasi Belanja	86
Tabel 63	:	Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I	87
Tabel 64	:	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	87
Tabel 65	:	Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan	88
Tabel 66	:	Rincian Perhitungan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	88
Tabel 67	:	Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I	89
Tabel 68	:	Mutasi Aset Tetap Lainnya	89
Tabel 69	:	Mutasi Aset Tetap Lainnya yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan	90
Tabel 70	:	Rincian Perhitungan Realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi Aset Tetap Lainnya	90
Tabel 71	:	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I	91
Tabel 72	:	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	91
Tabel 73	:	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	92
Tabel 74	:	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan	94
Tabel 75	:	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	94
Tabel 76	:	Rincian Piutang TP/TGR per Eselon I	95
Tabel 77	:	Mutasi Tagihan TP/TGR sampai dengan 30 Juni 2025	95
Tabel 78	:	Rincian Penyisihan Piutang TP/TGR per Eselon I	97

Tabel 79	:	Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025	98
Tabel 80	:	Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I	98
Tabel 81	:	Mutasi Aset Tak Berwujud	99
Tabel 82	:	Mutasi Aset Tak Berwujud yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan	100
Tabel 83	:	Rincian Perhitungan Realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi Aset Tak Berwujud	100
Tabel 84	:	Mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan	101
Tabel 85	:	Rincian Aset Lain-Lain Menurut Uraian Akun per 30 Juni 2026	102
Tabel 86	:	Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I	102
Tabel 87	:	Mutasi Aset Lain-Lain	102
Tabel 88	:	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	104
Tabel 89	:	Daftar Perbandingan Utang Pihak Ketiga per Unit Eselon I	105
Tabel 90	:	Utang Yang Belum Ditagihkan per Unit Eselon I	106
Tabel 91	:	Pendapatan Diterima di Muka	107
Tabel 92	:	Utang Jangka Pendek Lainnya	108
Tabel 93	:	Perbandingan Rincian PNBP Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025	109
Tabel 94	:	Selisih PNBP antara Basis Kas dan Basis Akrual	110
Tabel 95	:	Perbandingan Beban Pegawai Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025	112
Tabel 96	:	Selisih Beban Pegawai antara Basis Kas dan Basis Akrual	113
Tabel 97	:	Perbandingan Beban Persediaan Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025	119
Tabel 98	:	Penjelasan Hubungan Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan Semester I Tahun 2026	120
Tabel 99	:	Penjelasan Selisih Mutasi Kurang Persediaan Dengan Beban Persediaan	120

Tabel 100	:	Perbandingan Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025	121
Tabel 101	:	Selisih Beban Barang dan Jasa antara Basis Kas dan Basis Akrual	122
Tabel 102	:	Penyajian Beban Aset Ekstrakomtabel	125
Tabel 103	:	Perbandingan Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025	126
Tabel 104	:	Selisih Beban Pemeliharaan antara Basis Kas dan Basis Akrual	127
Tabel 105	:	Penyajian Beban Pemeliharaan	128
Tabel 106	:	Penjelasan Selisih Pemakaian Persediaan dengan Beban Pemeliharaan	128
Tabel 107	:	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025	129
Tabel 108	:	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas antara Basis Kas dan Basis Akrual	129
Tabel 109	:	Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025	131
Tabel 110	:	Penyajian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	131
Tabel 111	:	Penjelasan Selisih Mutasi Persediaan yang Diserahkan dengan Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	132
Tabel 112	:	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025	132
Tabel 113	:	Penjelasan Hubungan Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan	133
Tabel 114	:	Penjelasan Selisih Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan	133
Tabel 115	:	Penjelasan Hubungan Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi	133
Tabel 116	:	Penjelasan Selisih Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi	134

Tabel 117	:	Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025	134
Tabel 118	:	Perbandingan Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I Tahun 2026 dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	135
Tabel 119	:	Penjelasan Selisih Perubahan Penyisishan Piutang Tak Tertagih dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	135
Tabel 120	:	Perbandingan Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025	135
Tabel 121	:	Selisih Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional antara Basis Kas dan Basis Akrual	136
Tabel 122	:	Selisih Realisasi Beban dari Kegiatan Non Operasional antara Basis Kas dan Basis Akrual	137
Tabel 123	:	Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sampai dengan 30 Juni 2026	139
Tabel 124	:	Rincian Transaksi Antar Entitas sampai dengan 30 Juni 2026	140
Tabel 125	:	Rincian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2026	141
Tabel 126	:	Rekapitulasi Jumlah Satker Inaktif yang Dialihkan Saldo Asetnya ke Satker Pusat Tahun 2021 dan Progres Penyelesaiannya sampai dengan Tahun 2025	144
Tabel 127	:	Rekapitulasi Progres Penyelesaiannya Aset Eks. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama per 30 Juni 2026	145
Tabel 128		Rekapitulasi Total Aset Satker Inaktif Bersaldo per 30 Juni 2026	146

DAFTAR GRAFIK

			Hal
Grafik 1	:	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto T.A. 2026 dan T.A 2025	31

DAFTAR LAMPIRAN

A. DAFTAR LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CALK

Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
Lampiran II	:	Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Lampiran III	:	Rekapitulasi Penerimaan Hibah Langsung Sampai Dengan 2026
Lampiran IV	:	Laporan Capaian Output Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026
Lampiran V	:	Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Satker
Lampiran VI	:	Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Modal
Lampiran VII	:	Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran, Kas Di Bendahara Penerimaan, Serta Kas Lainnya dan Setara Kas Per Satker
Lampiran VIII	:	Rekapitulasi Persediaan Per Satker Menurut Akun
Lampiran IX	:	Rincian Mutasi Persediaan Per Eselon I
Lampiran X	:	Rincian Mutasi Persediaan Per Akun
Lampiran XI	:	Daftar Persediaan Tidak Dikuasai Per 30 Juni 2026
Lampiran XII	:	Rekapitulasi Aset Tetap Per Satuan Kerja Per 30 Juni 2026
Lampiran XIII	:	Rincian Mutasi Peralatan Dan Mesin Per Unit Eselon I
Lampiran XIV	:	Rincian Pembelian (101) Peralatan Dan Mesin Per Satker
Lampiran XV	:	Rincian Mutasi Gedung Dan Bangunan Per Unit Eselon I

Lampiran XVI : Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Unit Eselon I

Lampiran XVII : Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I

Lampiran XVIII : Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Unit Eselon I

Lampiran XIX : Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Satuan Kerja

Lampiran XX : Rekapitulasi Saldo Aset Lainnya serta Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Per Satuan Kerja Per 30 Juni 2026

Lampiran XXI : Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I

Lampiran XXII : Rekapitulasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Lampiran XXIII : Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Per Unit Eselon I

Lampiran XXIV : Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga

Lampiran XXV : Rincian Pendapatan Diterima Di Muka Per Satker

Lampiran XXVI : Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Lampiran XXVII : Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Lampiran XXVIII : Rincian Desa yang Belum Lengkap Bukti Pertanggungjawabannya Per 30 Juni 2026

Lampiran XXIX : Rekapitulasi Satker Inaktif yang Saldonya Dialihkan ke Satker Pusat

Lampiran XXX : Transaksi Dalam Konfirmasi Satker Inaktif Kmeenterian Dalam Negeri

Lampiran XXXI : Selisih Rekonsiliasi Internal Piutang Kementerian Dalam Negeri

Lampiran XXXII : Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode BMN Kementerian Dalam Negeri

Lampiran XXXIII : Rekapitulasi Transaksi Resiprokal Kementerian Dalam Negeri

Lampiran XXXIV : Rekapitulasi Pagu Minus (Basis SP2D) Akun 51xxx Kementerian Dalam Negeri

Lampiran XXXV : Daftar Rekening Kementerian Dalam Negeri

B. DAFTAR LAMPIRAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN

Lampiran Neraca Percobaan Akrual Tingkat Kemendagri Per 1 Januari 2026

Lampiran Neraca Percobaan Akrual Tingkat Kemendagri Per 30 Juni 2026

Lampiran Neraca Percobaan Kas Tingkat Kemendagri Per 30 Juni 2026

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2026

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan Untuk Periode Yang Berakhir 30 juni 2026

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Wilayah/Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2026

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Jenis Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2026

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2026

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Sumber Dana/Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2026

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Kelompok Pendapatan/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2026

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Wilayah/Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2026

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2026

Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAPA Semester I TA 2026

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2026 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sepanjang sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan selaku Menteri Dalam Negeri.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,
MENTERI DALAM NEGERI,

[redacted]

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391
Fax. (021) 384 9422 Website: www.itjen.kemendagri.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN BA 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor: 700.1.2.8/3830/IJ

Kami telah mereviu Laporan Keuangan BA 010 Kementerian Dalam Negeri untuk Semester I Tahun Anggaran 2026 berupa Neraca per tanggal 30 Juni 2026, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 27 Juli 2026
Inspektur Jenderal,

[redacted]

S.M. Mahendra Jaya

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2026 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp497.618.998.203,00 atau mencapai 68,02% dari estimasi pendapatan sebesar Rp731.597.008.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp2.231.873.430.921,00 atau mencapai 33,68% dari alokasi anggaran sebesar Rp6.627.003.856.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2026.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp17.321.281.054.939,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp513.348.123.700,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp16.671.881.866.797,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya) sebesar Rp136.051.064.442,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp270.680.505.923,00 dan Rp17.050.600.549.016,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp817.385.919.120,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.465.753.438.974,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp1.648.367.519.854,00). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp13.736.744.437,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp1.634.630.775.417,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp16.926.155.644.156,00, ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp1.634.630.775.417,00), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar (Rp112.566.521,00) dan transaksi antar entitas sebesar Rp1.759.188.246.798,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp17.050.600.549.016,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode pelaporan 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2026		% thd Angg	TA 2025
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Pendapatan Perpajakan		**0**	**0**	**0,00**	**0**
Pajak Dalam Negeri		0	0	0,00	0
Pajak Perdagangan Internasional		0	0	0,00	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**B.1**	**731.597.008.000**	**497.618.998.203**	**68,02**	**557.149.961.952**
Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	0,00	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0	0	0,00	0
Pendapatan BLU		0	0	0,00	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		731.597.008.000	497.618.998.203	68,02	557.149.961.952
Pendapatan Hibah		**0**	**0**	**0,00**	**0**
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		**731.597.008.000**	**497.618.998.203**	**68,02**	**557.149.961.952**
BELANJA NEGARA	**B.2.**				
Belanja Pemerintah Pusat		**6.627.003.856.000**	**2.231.873.430.921**	**33,68**	**1.242.654.345.362**
Belanja Pegawai	B.3	1.096.272.179.000	560.840.280.406	51,16	458.044.456.160
Belanja Barang	B.4	4.355.888.593.000	1.514.552.767.816	34,77	772.630.263.823
Belanja Modal	B.5	1.174.843.084.000	156.480.382.699	13,32	11.979.625.379
Belanja Pembayaran Bunga Utang		0	0	0,00	0
Belanja Subsidi		0	0	0,00	0
Belanja Hibah		0	0	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial		0	0	0,00	0
Belanja Lain-lain		0	0	0,00	0
Transfer ke Daerah dan Dana Desa		0	0	0,00	0
Transfer ke Daerah		0	0	0,00	0
Dana Perimbangan		0	0	0,00	0
Dana Transfer Umum		0	0	0,00	0
Dana Bagi Hasil		0	0	0,00	0
Dana Alokasi Umum		0	0	0,00	0
Dana Transfer Khusus		0	0	0,00	0
Dana Alokasi Khusus Fisik		0	0	0,00	0
Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	0	0,00	0
Dana Insentif Daerah		0	0	0,00	0
Dana Keistimewaan DIY		0	0	0,00	0
Dana Otonomi Khusus		0	0	0,00	0
Dana Desa		0	0	0,00	0
Hibah Kepada Daerah		0	0	0,00	0
JUMLAH BELANJA		**6.627.003.856.000**	**2.231.873.430.921**	**33,68**	**1.242.654.345.362**
PEMBIAYAAN		0	0	0,00	0

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**731.597.008.000**	**497.618.998.203**	**(233.978.009.797)**	**68,02**	**526.735.310.000**	**557.149.961.952**	**30.414.651.952**	**105,77**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	731.597.008.000	497.618.998.203	(233.978.009.797)	68,02	526.735.310.000	557.149.961.952	30.414.651.952	105,77
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I+A.II+A.III)	**731.597.008.000**	**497.618.998.203**	**(233.978.009.797)**	**68,02**	**526.735.310.000**	**557.149.961.952**	**30.414.651.952**	**105,77**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
I. Belanja Pemerintah Pusat	**6.627.003.856.000**	**2.231.873.430.921**	**(4.395.130.425.079)**	**33,68**	**4.710.842.886.000**	**1.242.654.345.362**	**(3.468.188.540.638)**	**26,38**
1. Belanja Pegawai	1.096.272.179.000	560.840.280.406	(535.431.898.594)	51,16	846.332.477.000	458.044.456.160	(388.288.020.840)	54,12
2. Belanja Barang	4.355.888.593.000	1.514.552.767.816	(2.841.335.825.184)	34,77	3.041.097.145.000	772.630.263.823	(2.268.466.881.177)	25,41
3. Belanja Modal	1.174.843.084.000	156.480.382.699	(1.018.362.701.301)	13,32	823.413.264.000	11.979.625.379	(811.433.638.621)	1,45
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6. Belanja Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6. Dana Desa	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Jumlah Belanja Negara (B.I+B.II)	**6.627.003.856.000**	**2.231.873.430.921**	**(4.395.130.425.079)**	**33,68**	**4.710.842.886.000**	**1.242.654.345.362**	**(3.468.188.540.638)**	**26,38**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta,
Menteri Dalam Negeri,

[redacted]

Muhammad Tito Karnavian

NERACA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NERACA
PER 30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2026	31 Desember 2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	20.199.653.871	777.785
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	79.603.100	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	34.972.025.318	14.820.792.658
Belanja Dibayar Dimuka	C.4	-	1.078.586.075
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5	34.616.450	34.616.450
Piutang Bukan Pajak	C.6	12.337.475.105	12.483.563.956
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	(11.598.166.073)	(11.665.928.013)
Bagian Lancar TP/TGR	C.8	368.768.795	375.796.795
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	(1.843.844)	(1.878.984)
Persediaan	C.10	456.955.990.978	371.259.721.410
JUMLAH ASET LANCAR		**513.348.123.700**	**388.386.048.132**
ASET TETAP			
Tanah	C.11	13.259.318.847.812	13.259.318.847.812
Peralatan dan Mesin	C.12	4.719.049.323.405	4.639.205.845.247
Gedung dan Bangunan	C.13	2.966.603.180.955	2.939.685.514.821
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.14	296.510.271.226	295.425.617.843
Aset Tetap Lainnya	C.15	81.168.898.267	80.846.861.744
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.16	70.635.129.685	19.373.327.423
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.17	(4.721.403.784.553)	(4.523.688.502.856)
JUMLAH ASET TETAP		**16.671.881.866.797**	**16.710.167.512.034**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.18	17.850.089.235	17.850.089.235
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.19	(17.850.089.235)	(17.850.089.235)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**-**	**-**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	807.621.463.041	801.986.445.593
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.21	59.999.940	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.22	-	228.247.203.927
Aset Lain-Lain	C.23	361.866.495.279	339.285.684.989
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.24	99.900.000	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(1.033.596.793.818)	(981.997.570.090)
JUMLAH ASET LAINNYA		**136.051.064.442**	**387.521.764.419**
JUMLAH ASET		**17.321.281.054.939**	**17.486.075.324.585**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	187.795.774.678	224.035.968.924
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	62.569.704.029	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	-	335.485.577.077
Uang Muka dari KPPN	C.29	20.199.653.871	777.785
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.30	115.373.345	397.356.643
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**270.680.505.923**	**559.919.680.429**
JUMLAH KEWAJIBAN		**270.680.505.923**	**559.919.680.429**
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.31	17.050.600.549.016	16.926.155.644.156
JUMLAH EKUITAS		**17.050.600.549.016**	**16.926.155.644.156**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**17.321.281.054.939**	**17.486.075.324.585**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2026	2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	20.199.653.871	777.785	20.198.876.086	2.596.974,24
Kas di Bendahara Penerimaan	79.603.100	0	79.603.100	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	34.972.025.318	14.820.792.658	20.151.232.660	135,97
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	1.078.586.075	(1.078.586.075)	(100,00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	34.616.450	34.616.450	0	0,00
Piutang Bukan Pajak	12.337.475.105	12.483.563.956	(146.088.851)	(1,17)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(11.598.166.073)	(11.665.928.013)	67.761.940	(0,58)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	739.309.032	817.635.943	(78.326.911)	(9,58)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	368.768.795	375.796.795	(7.028.000)	(1,87)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1.843.844)	(1.878.984)	35.140	(1,87)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	366.924.951	373.917.811	(6.992.860)	(1,87)
Persediaan	456.955.990.978	371.259.721.410	85.696.269.568	23,08
JUMLAH ASET LANCAR	**513.348.123.700**	**388.386.048.132**	**124.962.075.568**	**32,17**
ASET TETAP				
Tanah	13.259.318.847.812	13.259.318.847.812	0	0,00
Peralatan dan Mesin	4.719.049.323.405	4.639.205.845.247	79.843.478.158	1,72
Gedung dan Bangunan	2.966.603.180.955	2.939.685.514.821	26.917.666.134	0,92
Jalan, Irigasi dan Jaringan	296.510.271.226	295.425.617.843	1.084.653.383	0,37
Aset Tetap Lainnya	81.168.898.267	80.846.861.744	322.036.523	0,40
Konstruksi Dalam Pengerjaan	70.635.129.685	19.373.327.423	51.261.802.262	264,60
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4.721.403.784.553)	(4.523.688.502.856)	(197.715.281.697)	4,37
JUMLAH ASET TETAP	**16.671.881.866.797**	**16.710.167.512.034**	**(38.285.645.237)**	**(0,23)**
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	17.850.089.235	17.850.089.235	0	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(17.850.089.235)	(17.850.089.235)	0	0,00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2026	2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	807.621.463.041	801.986.445.593	5.635.017.448	0,70
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	59.999.940	0	59.999.940	0,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	228.247.203.927	(228.247.203.927)	(100,00)
Aset Lain-lain	361.866.495.279	339.285.684.989	22.580.810.290	6,66
Aset Lainnya yang Belum Diregister	99.900.000	0	99.900.000	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1.033.596.793.818)	(981.997.570.090)	(51.599.223.728)	5,25
JUMLAH ASET LAINNYA	**136.051.064.442**	**387.521.764.419**	**(251.470.699.977)**	**(64,89)**
JUMLAH ASET	**17.321.281.054.939**	**17.486.075.324.585**	**(164.794.269.646)**	**(0,94)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	187.795.774.678	224.035.968.924	(36.240.194.246)	(16,18)
Utang Yang Belum Ditagihkan	62.569.704.029	0	62.569.704.029	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	335.485.577.077	(335.485.577.077)	(100,00)
Uang Muka dari KPPN	20.199.653.871	777.785	20.198.876.086	2.596.974,24
Utang Jangka Pendek Lainnya	115.373.345	397.356.643	(281.983.298)	(70,96)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**270.680.505.923**	**559.919.680.429**	**(289.239.174.506)**	**(51,66)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**270.680.505.923**	**559.919.680.429**	**(289.239.174.506)**	**(51,66)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	17.050.600.549.016	16.926.155.644.156	124.444.904.860	0,74
JUMLAH EKUITAS	**17.050.600.549.016**	**16.926.155.644.156**	**124.444.904.860**	**0,74**
JUMLAH EKUITAS	**17.050.600.549.016**	**16.926.155.644.156**	**124.444.904.860**	**0,74**
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	**17.321.281.054.939**	**17.486.075.324.585**	**(164.794.269.646)**	**(0,94)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta

Menteri Dalam Negeri,

[redacted]

Muhammad Tito Karnavian

LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1	817.385.919.120	678.696.870.631
JUMLAH PENDAPATAN		**817.385.919.120**	**678.696.870.631**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	561.398.012.831	463.419.406.708
Beban Persediaan	D.3	6.842.896.523	7.124.632.133
Beban Barang dan Jasa	D.4	981.562.477.399	573.923.335.838
Beban Pemeliharaan	D.5	66.176.637.157	48.915.462.060
Beban Perjalanan Dinas	D.6	208.524.298.443	78.180.967.852
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	380.087.355.541	114.275.035.576
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	261.218.902.870	204.235.466.711
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(57.141.790)	(42.242.500)
JUMLAH BEBAN		**2.465.753.438.974**	**1.490.032.064.378**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(1.648.367.519.854)**	**(811.335.193.747)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		960.923.249	873.416.726
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		993.278.641	284.706.728
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		13.772.111.764	15.273.125.456
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.011.935	4.418.749
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**13.736.744.437**	**15.857.416.705**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(1.634.630.775.417)**	**(795.477.777.042)**
POS LUAR BIASA	D.11		
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		**(1.634.630.775.417)**	**(795.477.777.042)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2026	2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL	**0**	**0**	**0**	
PENDAPATAN OPERASIONAL	**0**	**0**	**0**	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	**0**	**0**	**0**	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	**0**	**0**	**0**	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	817.385.919.120	678.696.870.631	138.689.048.489	20,435
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	**817.385.919.120**	**678.696.870.631**	**138.689.048.489**	**20,435**
PENDAPATAN HIBAH	**0**	**0**	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	**0**	**0**	0	
JUMLAH PENDAPATAN	**817.385.919.120**	**678.696.870.631**	**138.689.048.489**	**20,435**
BEBAN OPERASIONAL	**0**	**0**	**0**	
Beban Pegawai	561.398.012.831	463.419.406.708	97.978.606.123	21,143
Beban Persediaan	6.842.896.523	7.124.632.133	(281.735.610)	(3,954)
Beban Barang dan Jasa	981.562.477.399	573.923.335.838	407.639.141.561	71,027
Beban Pemeliharaan	66.176.637.157	48.915.462.060	17.261.175.097	35,288
Beban Perjalanan Dinas	208.524.298.443	78.180.967.852	130.343.330.591	166,720
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	380.087.355.541	114.275.035.576	265.812.319.965	232,608
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	261.218.902.870	204.235.466.711	56.983.436.159	27,901
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(57.141.790)	(42.242.500)	(14.899.290)	35,271
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	**2.465.753.438.974**	**1.490.032.064.378**	**975.721.374.596**	**65,483**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**(1.648.367.519.854)**	**(811.335.193.747)**	**(837.032.326.107)**	**103,167**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2026	2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0**	**0**	**0**	
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET	**(32.355.392)**	**588.709.998**	**(621.065.390)**	**(105,496)**
Pendapatan Pelepasan Aset	960.923.249	873.416.726	87.506.523	10,019
Beban Pelepasan Aset	993.278.641	284.706.728	708.571.913	248,878
SURPLUS/DEFISIT PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0**	**0**	**0**	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	**13.769.099.829**	**15.268.706.707**	**(1.499.606.878)**	**(9,821)**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	13.772.111.764	15.273.125.456	(1.501.013.692)	(9,828)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.011.935	4.418.749	(1.406.814)	(31,837)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**13.736.744.437**	**15.857.416.705**	**(2.120.672.268)**	**(13,373)**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**(1.634.630.775.417)**	**(795.477.777.042)**	**(839.152.998.375)**	**105,490**
POS LUAR BIASA	**0**	**0**	**0**	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	**0**	**0**	**0**	
SURPLUS/DEFISIT - LO	**(1.634.630.775.417)**	**(795.477.777.042)**	**(839.152.998.375)**	**105,490**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta
Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2026	2025
EKUITAS AWAL	E.1	16.926.155.644.156	16.905.781.871.164
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.634.630.775.417)	(795.477.777.042)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(112.566.521)	167.722.513
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.2	(101.911.231)	167.722.513
Koreksi Lain-lain	E.3.3	(10.655.290)	-
JUMLAH		**(112.566.521)**	**167.722.513**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.759.188.246.798	711.719.201.119
EKUITAS AKHIR	E.5	**17.050.600.549.016**	**16.822.191.017.754**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2026	2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	**16.926.155.644.156**	**16.905.781.871.164**	**20.373.772.992**	**0,12**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(1.634.630.775.417)**	**(795.477.777.042)**	**(839.152.998.375)**	**105,49**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	**(112.566.521)**	**167.722.513**	**(280.289.034)**	**(167,11)**
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0,00
Selisih Revaluasi Aset	0	0	0	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(101.911.231)	167.722.513	(269.633.744)	(160,76)
Lain-lain	(10.655.290)	0	(10.655.290)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**1.759.188.246.798**	**711.719.201.119**	**1.047.469.045.679**	**147,17**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	**124.444.904.860**	**(83.590.853.410)**	**208.035.758.270**	**(248,87)**
EKUITAS AKHIR	**17.050.600.549.016**	**16.822.191.017.754**	**228.409.531.262**	**1,36**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta

Menteri Dalam Negeri,

[redacted]

Muhammad Tito Karnavian

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Dalam Negeri

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri mengatur tugas Kementerian Dalam Negeri dalam hal menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam

negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi objektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029.

Visi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 yaitu "Kementerian Dalam Negeri yang Berorientasi Kinerja, Adaptif, Kompeten, Sinergi, dan Inovatif (BerAKSI) sebagai Poros Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang inovatif berbasis teknologi.
4. Memperkuat sinergitas dan keselarasan tata kelola pemerintahan dalam negeri, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kewilayahan berbasis otonomi daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang akan dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2025-2029, sebagai berikut:

1. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia. Ketercapaian tujuan diukur melalui pencapaian Indikator Tujuan pada akhir periode Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2029 berupa:
   a. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi, dengan nilai

80,77, dan;

b. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM), dengan nilai 70.

2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri. Ketercapaian tujuan diukur melalui pencapaian Indikator Tujuan pada akhir periode Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2029 berupa:

   a. Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul sebanyak 13 Program Studi (Prodi), dan;

   b. Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN), dengan nilai 100.

3. Menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan. Ketercapaian tujuan diukur melalui pencapaian Indikator Tujuan pada akhir periode Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2029 berupa Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil), dengan nilai 89.

4. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan. Ketercapaian tujuan diukur melalui pencapaian Indikator Tujuan pada akhir periode Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2029 berupa:

   a. Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN), dengan nilai 70;

   b. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK), dengan nilai 70;

   c. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT), dengan nilai 85;

   d. Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDes), dengan nilai 11,5;

   e. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB), dengan nilai 100,01;

   f. Persentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti sebesar 70 persen.

   g. Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan nilai 92; dan

   h. Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Indeks Kinerja GWPP), dengan nilai 85.

Untuk mendukung tujuan di atas, dirumuskan sasaran strategis yang

akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2025-2029 sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tujuan "Meningkatkan implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia" ditetapkan Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional", dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian, meliputi:
    a. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi.
    b. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM)
2. Untuk mewujudkan tujuan "Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri" ditetapkan Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri", dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian, meliputi:
    a. Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul.
    b. Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN).
3. Untuk mewujudkan tujuan "Menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan" ditetapkan Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik", dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian, yaitu Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil).
4. Untuk mewujudkan tujuan "Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan" ditetapkan Sasaran Strategis:
    a. Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian,

meliputi:

1) Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN).
2) Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK).
3) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT).
4) Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDes).
5) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB).
6) Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti.
7) Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

b. Terwujudnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian, yaitu Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Indeks Kinerja GWPP).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menjadi acuan Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional. Rincian alokasi anggaran dan realisasi belanja bruto sampai dengan 30 Juni 2026 dari tujuh Prioritas Nasional yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri disajikan pada tabel 1.

Tabel 1

Pagu dan Realisasi Belanja Bruto untuk Pelaksanaan Prioritas Nasional s.d. 30 Juni 2026

Kode PN	Uraian PN	Pagu Belanja Rupiah	Realisasi Belanja Bruto Rupiah	%
01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	8.950.268.000	7.282.476.373	81,37
02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1.388.734.000	573.717.060	41,31
03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	746.087.000	396.542.997	53,15
04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1.850.984.000	1.034.321.687	55,88
06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	51.115.057.000	11.631.120.619	22,75
07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	395.556.822.000	194.240.164.262	49,11
08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	78.323.708.000	3.413.249.519	4,36
Jumlah		**537.931.660.000**	**218.571.592.517**	**40,63**

Rincian pagu belanja dan realisasi belanja bruto s.d. 30 Juni 2026 untuk masing-masing Prioritas Nasional berdasarkan penanggung jawab Unit Eselon I disajikan pada Catatan Penting Lainnya bagian Laporan Realisasi Anggaran.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2026 disusun untuk tujuan umum dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan diharapkan dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan entitas Kementerian Dalam Negeri.

Laporan keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Laporan keuangan ini disusun dan disajikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat terdapat ketentuan yang mengatur bahwa SAI diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Satker sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga untuk memproses data transaksi keuangan, barang dan transaksi lainnya. Pemrosesan transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga. Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan SAI diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI diterbitkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab melalui sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi, yaitu Sistem SAKTI.

SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

SAKTI diterapkan dalam sembilan modul, yaitu Modul Administrasi, Modul Anggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul GL dan Pelaporan (GLP). Data transaksi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga. Pelaksanaan SAKTI didukung oleh Aplikasi MonSAKTI yang digunakan untuk monitoring data dan transaksi SAKTI.

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Dalam Negeri yang meliputi eselon I, dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri terdiri dari 11 Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal
   Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

   Pada Eselon I Setjen terdapat satuan kerja IPDN yang merupakan Lembaga Pendidikan Kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. IPDN merupakan penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22.701 Tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Struktur Organisasi dan Tata Kerja IPDN mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut

Pemerintahan Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, IPDN Kampus Jakarta tidak berdiri sendiri sebagai satuan kerja. IPDN Kampus Jakarta melebur menjadi bagian dari struktur organisasi satuan kerja IPDN Jatinangor yang berada dibawah Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Peleburan IPDN Kampus Jakarta tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2024. Program studi diselenggarakan di IPDN Kampus Jatinangor dan Kampus Daerah. Terdapat enam IPDN Kampus Daerah yang berdiri sebagai satuan kerja yang mengelola anggaran sendiri, yaitu IPDN Kampus Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa, IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa, IPDN Kampus Sumatera Barat di Kabupaten Agam, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah, IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kabupaten Mempawah, dan IPDN Kampus Papua di Kota Jayapura.

Pada Eselon I Setjen juga terdapat satker Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yaitu lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2025, Eselon I Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki satker Dekonsentrasi dengan status aktif sebanyak 18 satker yang tersebar di 15 provinsi.

4. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan

pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Eselon I Ditjen Bina Pemerintahan Desa membawahi tiga satker daerah, yaitu Balai Besar Pemerintahan Desa Malang, Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta, dan Balai Pemerintahan Desa Lampung.

7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Inspektorat Jenderal
   Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
    Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    Mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2025, Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi Unit Pelaksana Teknis yang terdiri atas:

    a. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang terdiri atas:
        1) Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I;
        2) Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II;

3) Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III; dan

4) Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV.

b. Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang terdiri atas:

1) Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan; dan

2) Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Manajemen Pemerintahan Malang.

c. Loka Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Pelayanan.

Jumlah satuan kerja dengan status aktif di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2026 sebanyak 27 satker. Rincian jumlah satker dengan status aktif pada masing-masing Unit Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Unit Eselon I

NO	KODE ES1	UNIT ESELON I	KP	KD	DK	TP	JUMLAH
1	01	SEKRETARIAT JENDERAL	3	6	-	-	**9**
2	02	INSPEKTORAT JENDERAL	1	-	-	-	**1**
3	03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1	-	-	-	**1**
4	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1	-	-	-	**1**
5	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	1	3	-	-	**4**
6	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1	-	-	-	**1**
7	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	1	-	-	-	**1**
8	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	-	-	-	**1**
9	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	1	-	-	-	**1**
10	11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	1	-	-	-	**1**
11	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	5	-	-	**6**
JUMLAH			**13**	**14**	**-**	**-**	**27**

Kemendagri memiliki satker inaktif bersaldo untuk periode pelaporan Semester I Tahun 2026. Satker yang masih menyajikan saldo pada akun-akun Neraca per 30 Juni 2026 sebanyak enam satker, yaitu Bappeda Provinsi Maluku Utara, Bappeda Provinsi Papua, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Morotai pada Unit Eselon I Ditjen BAK, serta Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Rokan Hilir pada Unit Eselon I BPSDM. Dengan demikian Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri

Tahun 2025 ini merupakan konsolidasi laporan keuangan 11 Unit Eselon I yang berstatus entitas akuntansi dan 33 satker yang berstatus entitas akuntansi.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Dalam Negeri menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan akuntansi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban

atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Dalam hal terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka kas disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas yang dikelola Kementerian Dalam Negeri terdiri atas Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, serta Kas Lainnya dan Setara Kas.
- Piutang Bukan Pajak dan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - Piutang berdasarkan pungutan diakui dengan memperhatikan terpenuhi kriteria telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.
- Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan dalam neraca dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu membentuk penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

  Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian). Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau

harga wajar.

- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Aset Tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan Aset Tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian

dilakukan dengan survei lapangan untuk objek berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisihnya tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah berdasarkan keputusan pertimbangan entitas bahwa BMN tersebut tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional, sehingga tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus disajikan pada pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Transaksi penghentian BMN dari penggunaan akan mereklasifikasi saldo akun Aset Tetap ke akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112) sesuai dengan nomenklatur pada Bagan Akun Standar.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas ke pengelola barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah;
  - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 50 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan dengan memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan tersebut disajikan pada pos tersendiri dalam neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB meliputi *software*, hak paten dan hak cipta, lisensi dan waralaba (*franchise*), hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan ATB lainnya.
- ATB diakui jika memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki oleh entitas, mempunyai potensi manfaat ekonomi dan sosial atau jasa di masa depan, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
- ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya, atau meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi.
- Pengeluaran untuk memperoleh ATB melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas, harus dapat dibedakan antara tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan. Seluruh pengeluaran untuk kegiatan pada tahap penelitian atau riset diakui sebagai beban pada saat terjadi. Seluruh pengeluaran untuk kegiatan pada tahap pengembangan, apabila telah memenuhi kriteria pengakuan, dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan. Dalam hal terdapat tahapan setelah implementasi/ operasionalisasi, umumnya dalam pengembangan *software*

komputer, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

- Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Terhadap kondisi tersebut maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus dikoreksi. Transaksi penghentian BMN dari penggunaan akan mereklasifikasi saldo akun ATB ke akun Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (166113) sesuai dengan nomenklatur pada Bagan Akun Standar.
- ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. ATB memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika ATB memiliki masa manfaat terbatas maka dilakukan amortisasi dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar saldo di

Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas pengeluaran belanja yang belum diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan akhir tahun anggaran atau terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

- Aset Lain-lain dapat berupa Aset Tetap dan ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan. Aset lain-lain tersebut terdiri atas Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112) dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (166113).
- Aset Lain-lain diakui pada saat Aset Tetap dan ATB dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.
- Aset Tetap dan ATB yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap/ATB menjadi objek penyusutan dan amortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan Aset Tetap dan amortisasi Aset Tak Berwujud.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 5
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan berdasarkan Aplikasi *MyIntress*. Kemendagri melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tahun anggaran 2026.

Perubahan estimasi pendapatan dan pagu belanja tersaji pada tabel 6.

Tabel 6

Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Tahun Anggaran 2026

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Perubahan (Rp)
Estimasi Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	731.597.008.000	731.597.008.000
Total Estimasi Pendapatan	**-**	**731.597.008.000**	731.597.008.000
Pagu Belanja			
Belanja Pegawai	1.099.531.885.000	1.096.272.179.000	(3.259.706.000)
Belanja Barang	5.402.980.886.000	4.355.888.593.000	(1.047.092.293.000)
Belanja Modal	1.297.487.229.000	1.174.843.084.000	(122.644.145.000)
Jumlah Pagu Belanja	**7.800.000.000.000**	**6.627.003.856.000**	**(1.172.996.144.000)**

Perubahan pagu belanja berdasarkan program Kemendagri tersaji pada tabel 7.

Tabel 7

Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program

Kode	Program	Anggaran TA 2026	
		Awal	Setelah Revisi
WA	Program Dukungan Manajemen	4.570.704.468.000	3.828.370.163.000
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	896.731.523.000	597.789.332.000
CP	Program Tata Kelola Kependudukan	2.069.744.710.000	2.018.146.486.000
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	262.819.299.000	182.697.875.000
Total Pagu Belanja		**7.800.000.000.000**	**6.627.003.856.000**

Pada TA 2026 pagu Kemendagri sebesar Rp6.627.003.856.000,00, terdapat blokir pagu sebesar Rp339.428.511.000,00 sehingga pagu setelah blokir sebesar Rp6.287.575.345.000,00. Rincian pagu blokir Kemendagri TA 2026 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 hal Tindak Lanjut atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan dalam rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 dilakukan blokir pagu sebesar Rp158.120.413.000,00, yang terdiri dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp157.635.690.000,00, dan PNBP sebesar Rp484.723.000,00.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,

Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdapat pagu blokir yang semuanya berasal dari Rupiah Murni dengan rincian sebagai berikut:

a. Terkait kekurangan data dukung berupa *clearance* untuk pengadaan belanja TIK sebesar Rp170.031.618.000,00.
b. Terkait kesesuaian *Trilateral Meeting* (TM) Pelaksanaan PHLN sebesar Rp11.276.480.000,00.

Realisasi Pendapatan
Rp497.618.998.203,00

B.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp497.618.998.203,00 atau 68,02% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp731.597.008.000,00. Keseluruhan pendapatan Kemendagri merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per tanggal pelaporan berdasarkan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
untuk Tahun yang Berakhir s.d. 30 Juni 2026 per Kode MAP

Kode MAP	Uraian	Estimasi	Realisasi	%
425121	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	65.000.000	-	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	229.700.000	948.609.929	412,98
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	50.000.000	12.313.320	24,63
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.325.933.000	1.521.304.898	114,73
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	177.335.000	205.272.012	115,75
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	25.267.000	35.265.000	139,57
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	187.500.000	135.250.000	72,13
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	18.920.261.000	9.230.272.000	48,79
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	-	2.538.800.000	0,00
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	330.050.000	304.759.000	92,34
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	40.724.196.000	60.581.111.000	148,76
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	4.670.895.000	1.830.079.000	39,18
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	664.890.871.000	402.736.187.000	60,57
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	130.000	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	7.028.000	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	288.848.360	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	324.532.001	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	13.245.419.268	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.191.365.624	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	24.400	0,00
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN	-	2.482.427.391	0,00
Total Pendapatan		**731.597.008.000**	**497.618.998.203**	**68,02**

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per tanggal pelaporan berdasarkan Eselon I tersaji pada tabel 9.

Tabel 9
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
untuk Tahun yang Berakhir s.d. 30 Juni 2026 per Eselon I

No	Eselon I	Estimasi	Realisasi	% Realisasi Pendapatan
1	Setjen	20.806.810.000	17.390.015.359	83,58
2	Itjen	-	37.825.032	0,00
3	Ditjen Polpum	-	69.848.619	0,00
4	Ditjen Bina Adwil	-	358.827.072	0,00
5	Ditjen Bina Pemdes	781.148.000	5.476.225.857	701,05
6	Ditjen Bina Bangda	550.000.000	2.623.917.960	477,08
7	Ditjen Otda	-	7.003.515	0,00
8	Ditjen Dukcapil	664.890.871.000	408.437.049.053	61,43
9	Ditjen Bina Keuda	-	12.498.320	0,00
10	BSKDN	-	201.783.955	0,00
11	BPSDM	44.568.179.000	63.004.003.461	141,37
Jumlah		**731.597.008.000**	**497.618.998.203**	**68,02**

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per satker disajikan pada **Lampiran I** (Rekap Laporan PNBP).

Rincian realisasi pendapatan per tanggal pelaporan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 berdasarkan Eselon I tersaji pada tabel 10.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi PNBP
untuk Tahun yang Berakhir s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 per Eselon I

No	Eselon I	Realisasi Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025	Naik (Turun) %
1	Setjen	17.390.015.359	13.959.301.750	24,58
2	Itjen	37.825.032	41.916.309	(9,76)
3	Ditjen Polpum	69.848.619	272.239.102	(74,34)
4	Ditjen Bina Adwil	358.827.072	232.878.004	54,08
5	Ditjen Bina Pemdes	5.476.225.857	22.084.683.769	(75,20)
6	Ditjen Bina Bangda	2.623.917.960	2.087.862.448	25,67
7	Ditjen Otda	7.003.515	33.541.454	(79,12)
8	Ditjen Dukcapil	408.437.049.053	508.653.970.697	(19,70)
9	Ditjen Bina Keuda	12.498.320	15.910.505	(21,45)
10	BSKDN	201.783.955	34.583.062	483,48
11	BPSDM	63.004.003.461	9.733.074.852	547,32
Jumlah		**497.618.998.203**	**557.149.961.952**	**(10,68)**

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp497.618.998.203,00 mengalami penurunan sebesar 10,68% dibandingkan realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp557.149.961.952,00. Penurunan pendapatan ini karena berkurangnya penerimaan PNBP fungsional berupa Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi yang merupakan pendapatan dari penerapan Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri pasal 1 ayat (1) huruf f, yaitu pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pada Ditjen Dukcapil.

Realisasi Belanja
Rp2.231.873.430.921,00

B.2. BELANJA

Realisasi belanja Kemendagri sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp2.231.873.430.921,00 atau 33,68% dari anggaran belanja sebesar Rp6.627.003.856.000,00. Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar 79,61% dibandingkan realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.242.654.345.362,00. Rincian anggaran belanja dan realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 menurut jenis belanja disajikan pada tabel 11. Kenaikan belanja ini dikarenakan naiknya jumlah pagu Kemendagri dibandingkan tahun 2025.

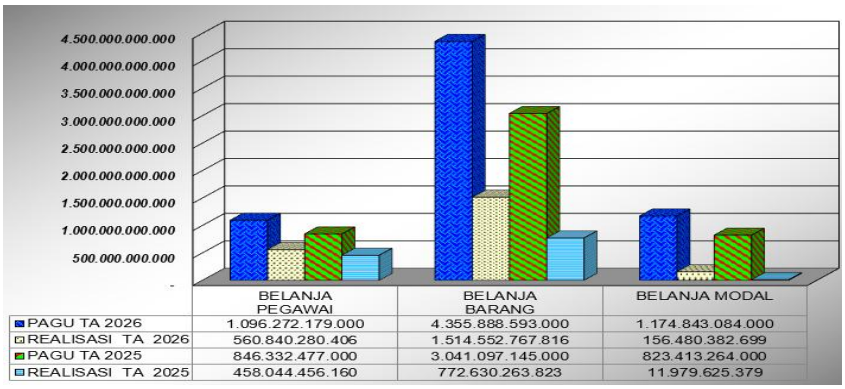
Tabel 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	2026		%	2025		%	Selisih Realisasi Belanja	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Rp	%
Belanja Bruto								
Belanja Pegawai	1.096.272.179.000	560.952.159.493	51,17	846.332.477.000	458.122.465.692	54,13	102.829.693.801	22,45
Belanja Barang	4.355.888.593.000	1.514.801.793.676	34,78	3.041.097.145.000	774.172.917.641	25,46	740.628.876.035	95,67
Belanja Modal	1.174.843.084.000	156.480.382.699	13,32	823.413.264.000	11.979.625.379	1,45	144.500.757.320	1.206,22
Total Belanja Bruto	**6.627.003.856.000**	**2.232.234.335.868**	**33,68**	**4.710.842.886.000**	**1.244.275.008.712**	**26,41**	**987.959.327.156**	79,40
Pengembalian Belanja								
Belanja Pegawai	-	111.879.087	0,00	-	78.009.532	0,00	33.869.555	43,42
Belanja Barang	-	249.025.860	0,00	-	1.542.653.818	0,00	(1.293.627.958)	(83,86)
Belanja Modal	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
Total Pengembalian Belanja	**-**	**360.904.947**	**0,00**	**-**	**1.620.663.350**	**0,00**	**(1.259.758.403)**	**(77,73)**
Belanja Neto	**6.627.003.856.000**	**2.231.873.430.921**	**33,68**	**4.710.842.886.000**	**1.242.654.345.362**	**26,38**	**989.219.085.559**	**79,61**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Satker disajikan pada **Lampiran II** (Rekap Laporan Belanja).

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja disajikan pada Grafik 1.

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto
T.A. 2026 dan T.A. 2025



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan pada tabel 12.

Tabel 12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program
s.d. 30 Juni 2026

Kode	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
WA	Program Dukungan Manajemen	3.828.370.163.000	1.485.982.301.924	38,82
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	597.789.332.000	176.465.116.330	29,52
CP	Program Tata Kelola Kependudukan	2.018.146.486.000	408.861.182.334	20,26
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	182.697.875.000	160.564.830.333	87,89
Jumlah		**6.627.003.856.000**	**2.231.873.430.921**	**33,68**

Rincian anggaran dan realisasi belanja per unit Eselon I sampai dengan 30 Juni 2026 dan realisasi belanja per unit Eselon I sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan pada tabel 13.

Tabel 13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bruto
s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 per Unit Eselon I

No	Eselon I	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja Bruto 2026 (Rp)	%	Realisasi Belanja Bruto 2025 (Rp)
1	Setjen	2.673.916.868.000	926.513.683.693	34,65	464.903.865.019
2	Itjen	114.996.537.000	66.947.663.026	58,22	35.897.148.317
3	Ditjen Polpum	260.863.413.000	204.912.023.100	78,55	175.781.868.855
4	Ditjen Bina Adwil	317.109.670.000	103.265.769.649	32,56	40.676.944.215
5	Ditjen Bina Pemdes	251.879.838.000	97.263.942.485	38,62	58.441.600.794
6	Ditjen Bina Bangda	230.176.524.000	86.714.536.871	37,67	47.600.703.615
7	Ditjen Otda	107.926.687.000	50.266.920.273	46,58	34.463.307.530
8	Ditjen Dukcapil	2.150.060.431.000	457.175.232.914	21,26	234.553.984.868
9	Ditjen Bina Keuda	127.738.920.000	56.280.297.669	44,06	35.760.540.641
10	BSKDN	71.980.289.000	31.823.805.636	44,21	20.598.044.887
11	BPSDM	320.354.679.000	151.070.460.552	47,16	95.596.999.971
Jumlah Keseluruhan		**6.627.003.856.000**	**2.232.234.335.868**	**33,68**	**1.244.275.008.712**

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja transaksi kas yang terjadi pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai kontra pos belanja pada periode pelaporan. Pengembalian belanja atas belanja yang terjadi sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp360.904.947,00. Rincian realisasi pengembalian belanja sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 per Eselon I disajikan pada tabel 14.

Tabel 14
Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Eselon I
s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

No	Eselon I	Pengembalian Belanja 30 Juni 2026 (Rp)	Pengembalian Belanja 30 Juni 2025 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Setjen	102.086.650	94.529.216	7,99
2	Itjen	3.462.030	4.885.580	(29,14)
3	Ditjen Polpum	36.454.298	370.366	9742,78
4	Ditjen Bina Adwil	11.435.561	38.026.473	(69,93)
5	Ditjen Bina Pemdes	19.285.434	9.504.265	102,91
6	Ditjen Bina Bangda	34.394.053	6.019.868	471,34
7	Ditjen Otda	23.415.632	33.967.562	(31,06)
8	Ditjen Dukcapil	6.571.363	4.573.548	43,68
9	Ditjen Bina Keuda	60.480.783	5.640.752	972,21
10	BSKDN	8.769.381	3.155.665	177,89
11	BPSDM	54.549.762	1.419.990.055	(96,16)
Jumlah Pengembalian		**360.904.947**	**1.620.663.350**	**(77,73)**

Realisasi pengembalian belanja sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp1.259.758.403,00 atau sebesar 77,73% dibandingkan dengan pengembalian realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Neto sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 tersaji pada tabel 15.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Neto
s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Jenis Belanja	Realisasi Belanja Neto 30 Juni 2026 (Rp)	Realisasi Belanja Neto 30 Juni 2025 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	560.840.280.406	458.044.456.160	22,44
Belanja Barang	1.514.552.767.816	772.630.263.823	96,03
Belanja Modal	156.480.382.699	11.979.625.379	1.206,22
Jumlah Belanja	**2.231.873.430.921**	**1.242.654.345.362**	**79,61**

Realisasi Belanja Pegawai
Rp560.840.280.406,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp560.840.280.406,00 atau 51,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.096.272.179.000,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar 22,44% dibandingkan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp458.044.456.160,00. Kenaikan Belanja Pegawai ini berasal dari Pngangkatan CPNS menjadi PNS serta PPPK tahap 2 tahun 2025. Realisasi Belanja Pegawai s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan pada tabel 16.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Urian	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	216.747.419.177	216.093.152.980	0,30
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.212.273.404	1.390.363.404	(12,81)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	-	-	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	48.705.573.299	2.881.435.149	1.590,32
Belanja Lembur	5.691.576.000	3.688.779.000	54,29
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	288.595.317.613	234.068.735.159	23,30
Jumlah Belanja Bruto	560.952.159.493	458.122.465.692	**22,45**
Pengembalian Belanja			
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	109.715.118	76.051.557	44,26
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	134	-	0,00
Belanja Lembur	-	-	0,00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	2.163.835	1.957.975	10,51
Jumlah Pengembalian Belanja	**111.879.087**	**78.009.532**	**43,42**
Jumlah Belanja Neto	**560.840.280.406**	**458.044.456.160**	**22,44**

Belanja Barang
Rp1.514.552.767.816,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp1.514.552.767.816,00 atau 34,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.355.888.593.000,00. Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan 96,03% dibandingkan realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp772.630.263.823,00. Kenaikan belanja ini berasal dari kenaikan realisasi belanja Jasa lainnya dibandingkan tahun 2025 pada satker Ditjen Dukcapil serta kenaikan Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada daerah yang berprestasi. Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 pada tabel 17.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Bruto			
Belanja Barang Operasional	117.670.349.012	123.723.822.996	(4,89)
Belanja Barang Non Operasional	247.336.042.170	169.504.140.382	45,92
Belanja Barang Persediaan	18.630.571.461	6.858.260.155	171,65
Belanja Jasa	532.209.581.015	193.624.552.488	174,87
Belanja Pemeliharaan	64.088.401.047	46.631.964.250	37,43
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	199.251.842.681	75.949.163.420	162,35
Belanja Perjalanan Luar Negeri	3.002.788.435	1.033.213.950	190,63
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	9.823.658.730	-	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	322.788.559.125	156.847.800.000	105,80
Jumlah Belanja Bruto	**1.514.801.793.676**	**774.172.917.641**	**95,67**
Pengembalian Belanja			
Belanja Barang Operasional	6.004.668	-	0,00
Belanja Barang Non Operasional	70.258	8.980.500	(99,22)
Belanja Barang Persediaan	-	-	0,00
Belanja Jasa	1.175.000	17.090.000	(93,12)
Belanja Pemeliharaan	21.470.272	53.200.636	(59,64)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	204.870.349	1.463.382.682	(86,00)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	15.435.313	-	0,00
Jumlah Pengembalian Belanja	**249.025.860**	**1.542.653.818**	**(83,86)**
Jumlah Belanja Neto	**1.514.552.767.816**	**772.630.263.823**	**96,03**

Belanja Modal
Rp156.480.382.699,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp156.480.382.699,00 atau 13,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.174.843.084.000,00. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar 1206,22% dibandingkan realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp11.979.625.379,00. Kenaikan belanja modal ini berasal dari kenaikan anggaran tahun 2026 dibandingkan 2025 serta adanya hibah langsung dalam bentuk uang untuk pembangunan di satker IPDN Jatinanggor.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per akun sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 terdapat pada Tabel 18.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Akun
s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

MAK	Uraian	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Naik (Turun) (%)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.698.054.844	9.904.225.729	1068,17
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.976.314.962	1.611.516.500	2008,34
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.009.172.750	-	0,00
5361	Belanja Modal Lainnya	5.796.840.143	463.883.150	1149,63
Jumlah Belanja Bruto		**156.480.382.699**	**11.979.625.379**	**1206,22**
Pengembalian Belanja Modal		**-**	**-**	**0,00**
Jumlah Belanja Neto		**156.480.382.699**	**11.979.625.379**	**1206,22**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp115.698.054.844,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp115.698.054.844,00 dan Rp9.904.225.729,00. Realisasi Belanja

Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar 1068,17% dibandingkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2025. Perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 terdapat pada Tabel 19.

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.875.152.889	9.768.403.920	1.075,99
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	822.901.955	135.821.809	505,87
Pengembalian			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
Jumlah Belanja Neto	**115.698.054.844**	**9.904.225.729**	**1.068,17**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp33.976.314.962,00

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp33.976.314.962,00 dan Rp1.611.516.500,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar 2008,34% dibandingkan realisasi sampai dengan 30 Juni 2025. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 terdapat pada tabel 20.

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.037.686.440	-	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	25.938.628.522	1.611.516.500	1509,58
Jumlah Belanja Bruto	**33.976.314.962**	**1.611.516.500**	**2008,34**
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja Neto	**33.976.314.962**	**1.611.516.500**	**2008,34**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp1.009.172.750,00

B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp1.009.172.750,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami Kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan realisasi sampai dengan 30 Juni 2025. Perbandingan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 terdapat pada tabel 21.

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	96.493.750	-	100,00
Belanja Modal Irigasi	398.006.000	-	100,00
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	514.673.000	-	100,00
Jumlah Belanja	**1.009.172.750**	**-**	**100,00**

Belanja Modal Lainnya Rp5.796.840.143,00

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp5.796.840.143,00 dan Rp463.883.150,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar 1149,63% dibandingkan realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 30 Juni 2025.

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	5.796.840.143	463.883.150	1149,63
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	-	-	0,00
Jumlah Belanja Bruto	**5.796.840.143**	**463.883.150**	**1149,63**
Pengembalian	**-**	**-**	0,00
Jumlah Belanja Neto	**5.796.840.143**	**463.883.150**	**1149,63**

B.6 Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja

Pada T.A. 2026 Kemendagri menerima alokasi anggaran sebesar Rp6.627.003.856.000,00 dan realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp2.231.873.430.921,00 atau 33,68% dari anggarannya dengan rincian menurut jenis satker pada tabel 23.

Tabel 23
Rincian Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja
s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026		30 Juni 2025	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Satuan Kerja Pusat dan Daerah	6.627.003.856.000	2.232.234.335.868	4.686.828.518.000	1.243.259.107.143
Realisasi Pengembalian Belanja	-	360.904.947	-	1.620.663.350
Satker Pusat & Daerah Setelah Pengembalian	**6.627.003.856.000**	**2.231.873.430.921**	**4.686.828.518.000**	**1.241.638.443.793**
Dekonsentrasi	-	-	24.014.368.000	1.015.901.569
Realisasi Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Dekonsentrasi Setelah Pengembalian	-	-	**24.014.368.000**	**1.015.901.569**
Jumlah Belanja	**6.627.003.856.000**	**2.231.873.430.921**	**4.710.842.886.000**	**1.242.654.345.362**

Belanja Dana Dekonsentrasi Rp0,00

1) Dana Dekonsentrasi

Pada T.A. 2026 Kemendagri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi melalui program dan kegiatan yang

terdapat pada Ditjen Bina Adwil sebesar Rp0,00 dan terealisasi sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran, dengan pengembalian belanja sebesar Rp0,00, sehingga realisasi belanja neto sebesar Rp0,00.

Sebagai perbandingan, alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp24.014.368.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.015.901.569,00 atau 4,23% dari anggaran, dengan pengembalian belanja sebesar Rp0,00, sehingga realisasi belanja neto sebesar Rp1.015.901.569,00. Rincian realisasi Dana Dekonsentrasi disajikan pada tabel 24.

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi per Eselon I
s.d. 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

No	Eselon I	Realisasi 30 Juni 2026 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Ditjen Bina Adwil	-	1.015.901.569	(100,00)
Pengembalian		-	-	0,00
Belanja Neto		**-**	**1.015.901.569**	**(100,00)**

B.7 Pengungkapan Lainnya

A. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG.

Pendapatan hibah adalah hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, Pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah langsung berupa kas, barang dan jasa baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri melakukan pengesahan atas pendapatan dan belanja sebagai dokumen sumber pencatatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Satker di Kementerian Negara/Lembaga membukukan dokumen sumber berupa Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) atas belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang dan membukukan dokumen sumber berupa Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) atas belanja yang bersumber dari hibah langsung berupa Barang/Jasa yang diterbitkan KPPN.

Dalam Bab II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah menyebutkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan penatausahaan pendapatan hibah berada pada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang secara struktural dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (EAS). Berdasarkan hal tersebut maka Laporan Realisasi Anggaran Kemendagri tidak menyajikan Pendapatan Hibah-LRA dan Laporan Operasional Kemendagri tidak menyajikan Pendapatan Hibah-LO.

Atas pengeluaran yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang, Kemendagri mencatat belanja pada Laporan Realisasi Anggaran pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sebesar nilai yang disahkan oleh KPPN, dan mencatat beban pada Laporan Operasional pada saat resume tagihan sebesar nilai yang tercantum dalam resume tagihan. Kemendagri mencatat kas atas penerimaan hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Neraca.

Atas hibah dalam bentuk barang, Kemendagri mencatat aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan dari hibah pada saat aset tetap, aset

lainnya, dan/atau persediaan diterima oleh Kemendagri sebesar nilai aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan yang diterima oleh Kemendagri berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Atas hibah dalam bentuk jasa, Kemendagri mencatat beban jasa dari hibah tersebut pada saat resume tagihan sebesar nilai jasa yang diterima oleh Kemendagri berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pada Tahun 2026 Kemendagri melakukan Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk uang/barang/jasa sebesar Rp24.570.027.120,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal menerima hibah langsung berupa Jasa sebesar Rp3.215.733.580,00.
2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri menerima hibah langsung berupa Barang sebesar Rp16.300.000.000,00.
3. Ditjen Bina Pembangunan Daerah menerima hibah langsung berupa Jasa sebesar Rp4.695.037.114,00.
4. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri menerima hibah langsung berupa Jasa sebesar Rp359.256.426,00.

Rincian hibah langsung barang jasa dan uang tahun anggaran 2026 disajikan dalam **Lampiran III**.

Pada periode pelaporan Tahun 2026, Kemendagri memiliki Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu pada satker Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Hibah tersebut berasal dari Pemerintah Australia dalam bentuk Jasa berupa hibah jasa dalam rangka *Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration* atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) sebesar Rp511.657.760,00 dengan Nomor Register 27BMXZ9A. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima nomor 08/BAST-KEMENDAGRI/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025.

Lanjutan Pengelolaan Hibah Langsung Tahun 2023.

Direktorat Bina Pembangunan Daerah menerima hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Uni Emirat Arab untuk *Financing the Regional Development Program* pada Tahun 2023. Pendapatan hibah tersebut sudah disahkan pada Tahun 2023 sebesar USD15.000.000,00 atau Rp235.500.000.000,00 dengan Nomor Register Hibah 27YDNA6A serta Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Nomor GA.10.04.2023 tanggal 10 April 2023. Pengesahan belanja yang bersumber dari hibah langsung Tahun 2023 sebesar Rp4.167.300.475,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp169.102.497.549,00, Tahun 2025 sebesar Rp47.845.293.245,00, dan untuk tahun 2026, sampai dengan bulan Juni belum dilakukan pengesahan belanja.

Dengan demikian total realisasi belanja yang bersumber dari hibah langsung sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp221.115.091.269,00 dan saldo dana hibah per 30 Juni 2026 sebesar Rp14.384.908.731,00.

B. PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI.

Kemendagri Tahun 2026 mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri untuk kegiatan pada satker dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ditjen Bina Pemerintahan Desa mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk kegiatan ***Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP).***

   Integrated Land Administration and Spatial Planning merupakan inisiatif yang dimulai dengan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan data pertanahan dan sistem administrasi yang ada, agar semua lahan di Indonesia dapat terpetakan dengan jelas dan menghindari potensi masalah serupa di masa depan. ILASP juga akan melibatkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi untuk memperkuat implementasinya dan memperluas cakupannya.

   Program ILASP diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penyelesaian berbagai konflik lahan yang seringkali menghambat pembangunan dan investasi di Indonesia. Tumpang tindih lahan, terutama yang terjadi antara kawasan hutan dan perkebunan sawit, transmigrasi, serta perumahan, telah menimbulkan banyak masalah. Dengan adanya integrasi sistem dan data pertanahan yang lebih baik, diharapkan kedepannya masalah tersebut dapat diminimalisir dan pengelolaan lahan bisa lebih efisien.

   Anggaran program ILASP yang dimulai tahun 2025 dan yang akan berakhir pada tahun 2029 bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Bank Dunia dengan jumlah pinjaman sebesar JPY94.877.700.000,00 sebagaimana tercantum dalam *Loan Agreement* 9732-ID. Kementerian Dalam Negeri yang bertindak sebagai *Project Implementation Unit* (PIU). Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2026 untuk program *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASP) sebesar Rp2.494.836.918,00 atau 7,46% dari anggarannya sebesar Rp33.440.000.000,00.

Tabel 25

Pagu dan Realisasi PLN ILASP periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026

Program/Kegiatan/Output					Pagu	Realisasi	%
No	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa					
		CM.1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa				
			UBB.007	Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa	33.440.000.000	2.494.836.918	7,46
TOTAL					**33.440.000.000**	**2.494.836.918**	**7,46**

2. Ditjen Bina Pembangunan Daerah mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp24.923.400.000,00 dan terealisasi sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp11.153.942.319,00 atau 44,75% dari anggarannya yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

   a. ***National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).***

   1) Tujuan NUFReP.

      Tujuan NUFReP adalah mengurangi risiko banjir di kota-kota terpilih di Indonesia melalui peningkatan kapasitas di tingkat nasional dan kota serta investasi untuk pengelolaan risiko banjir perkotaan terpadu. Ketercapaian tujuan dari NUFReP diukur dengan Indikator Utama dan Indikator Antara yang meliputi:

      a) Indikator Utama (*Project Development Objective/PDO Indicators*)

      - Jumlah penduduk yang mendapat manfaat dari upaya ketangguhan banjir perkotaan terpadu di bawah proyek;
      - Program nasional ketangguhan banjir perkotaan terbentuk yang panduannya diadopsi untuk pembiayaan investasi, penguatan kelembagaan, dan pertukaran pengetahuan;
      - Tim koordinasi antar lembaga tingkat kota terkait ketangguhan banjir perkotaan terbentuk dan berfungsi; serta
      - Peraturan perundangan dan/atau kebijakan mengenai ketangguhan banjir perkotaan terpadu yang diadopsi oleh pemerintah kota.

      b) Indikator Antara (*Intermediate Results Indicators*)

      - Kota-kota dengan model dan pemetaan risiko banjir yang diperbarui untuk mengatasi dampak urbanisasi dan perubahan iklim;

- Kota-kota dengan rencana aksi ketangguhan banjir perkotaan tahun jamak yang dikembangkan dengan langkah-langkah terpadu dan pertimbangan risiko iklim;
- Peningkatan atau perbaikan tepi sungai atau drainase;
- Kegiatan subproyek dengan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) dan desain perkotaan yang ramah air (*water sensitive urban design*);
- Kota-kota dengan sistem peringatan dini banjir yang ditingkatkan dan berfungsi;
- Subproyek yang selesai (*completed*) memiliki rencana operasional dan pemeliharaan yang biayanya telah dimasukkan ke dalam anggaran tahunan;
- Individu yang mendapat pelatihan tentang topik-topik pengelolaan risiko banjir yang relevan;
- Keterwakilan perempuan dengan posisi pengambil keputusan dalam tim koordinasi ketangguhan banjir perkotaan di tingkat kota;
- Penerima manfaat (perempuan) yang melaporkan bahwa mereka telah meningkat pengetahuannya untuk mengambil keputusan perihal banjir perkotaan setelah mengikuti pelatihan dan kegiatan kesiapsiagaan;
- Jumlah kota yang mendapatkan dukungan teknis dari platform pengetahuan digital tingkat nasional;
- Jumlah kota yang telah mengadopsi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) program nasional; dan
- Penerima manfaat yang melaporkan bahwa kegiatan proyek telah mencerminkan kebutuhan mereka (dipilah berdasarkan gender).

2) Hasil pencapaian indikator akan dipilah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, apabila relevan, dan sub-indikator akan dikuantifikasi jika memungkinkan untuk memastikan efektivitas pemantauan dan evaluasi proyek. Uraian deskripsi dari masing-masing Indikator Utama dan Indikator Antara yang digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi Proyek dapat dilihat pada POM Buku 2 Kerangka Kerja dan Monitoring Pencapaian Tujuan Proyek.
3) Ruang lingkup kegiatan NUFReP yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2023 sampai Tahun 2028, antara lain:

a) Analisis dan perencanaan risiko banjir perkotaan di 6 (enam) kota dan kajian teknis di IKN;

b) Penanganan banjir perkotaan melalui tindakan struktural dan non-struktural untuk jangka pendek dan menengah yang mencakup integrasi infrastruktur abu-abu (*grey*) dengan biru-hijau (*blue-green),* solusi berbasis alam (*nature-based solutions*), perbaikan ruang publik perkotaan, dan desain perkotaan ramah air (*water-sensitive urban design*);

c) Pembentukan program nasional untuk memperkuat ketangguhan kota-kota di Indonesia terhadap banjir melalui pendekatan terpadu dan untuk meningkatkan mitigasi risiko banjir, investasi, dan tata kelola kota-kota yang berpartisipasi;

d) Peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan risiko banjir termasuk meningkatkan kemitraan lokal dan partisipasi masyarakat yang keberlanjutan; dan

e) Kegiatan pendukung proyek.

4) NUFReP terdiri dari 3 komponen, yakni:

a) Komponen 1: Perencanaan Penanganan dan Analisis Risiko Banjir. Kegiatan pada komponen ini mencakup pemetaan yang terperinci guna menunjukkan kedalaman genangan serta periode ulang (probabilitas) dengan menggunakan model permukaan digital resolusi tinggi/DTM, model hidrologi, dan model hidrodinamika, termasuk pemetaan probabilitas risiko banjir yang mempertimbangkan perubahan penggunaan lahan, penurunan muka tanah, dan dampak perubahan iklim (termasuk kenaikan muka air laut dan perubahan intensitas curah hujan) sehingga dapat disusun rencana penanganan risiko banjir perkotaan jangka pendek dan menengah dengan mengintegrasikan kegiatan prioritas struktural maupun non-struktural.

b) Komponen 2: Peningkatan Ketangguhan Banjir Perkotaan. Kegiatan pada komponen ini mencakup kegiatan fisik (konstruksi) tindakan struktural dan non-struktural termasuk subproyek prioritas yang menunjukkan dampak langsung pada pengurangan risiko banjir dan adaptasi iklim *(no-regret measures*). Komponen ini mengedepankan integrasi *grey infrastructure* (infrastruktur abu-abu) dengan *blue-green infrastructure* (infrastruktur biru-hijau) guna

meningkatkan ketangguhan wilayah perkotaan secara keseluruhan.

c) Komponen 3: Manajemen Program dan Dukungan Pelaksanaan. Kegiatan pada komponen ini mencakup dukungan pelaksanaan NUFReP yang meliputi pembentukan dan operasionalisasi Program Nasional, pengelolaan proyek, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan proyek dalam pengelolaan risiko banjir perkotaan, dan peningkatan koordinasi antar lembaga.

5) Spesifikasi Pinjaman Luar Negeri Program *National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)* adalah sebagai berikut:

Nomor Perjanjian	:	IBRD No.9459-ID
Nomor Register	:	1739NSEA
Tanggal Penandatanganan	:	11 Januari 2023
Tanggal Efektif	:	27 Maret 2023
Closing Date	:	31 Januari 2028
Jumlah Pinjaman Luar Negeri	:	USD2.000.000,00
Executing Agency		Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

6) Penerima Manfaat Proyek.

NUFReP akan memberikan manfaat kepada masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi lokasi sasaran sebagai berikut:

a) Masyarakat yang berpotensi terdampak risiko banjir di Kota Bima, Banjarmasin, Manado, Medan, Gorontalo, Semarang, dan Ibu Kota Negara.

b) Pemerintah pusat dan pemerintah kota yang terlibat dalam pengurangan risiko banjir di Kota Bima, Banjarmasin, Manado, Gorontalo, Medan, Semarang dan Ibu Kota Negara.

Di bawah Komponen 1 dan Komponen 2, Pemerintah Kota, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan mendapatkan manfaat langsung dari dukungan kegiatan perencanaan ketangguhan banjir yang komprehensif serta pembangunan infrastruktur banjir

perkotaan yang terpadu

7) Lokasi Kegiatan Proyek.

Lokasi kegiatan NUFReP tersebar di 6 (enam) kota dan IKN, di wilayah sungai kewenangan pusat, dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, ketersediaan anggaran pembebasan lahan, dan dukungan pemerintah daerah. Adapun lokasi kegiatan NUFReP adalah sebagai berikut:

a) Kota Bima meliputi DAS Rontu.

b) Kota Manado meliputi DAS Tondano, DAS Sario, DAS Bailang, dan DAS Malalayang.

c) Kota Medan meliputi DAS Belawan, DAS Deli, DAS Percut.

d) Kota Banjarmasin meliputi DAS Martapura dan DAS Barito.

e) Kota Semarang meliputi Sistem drainase Semarang Timur, Sistem drainase Semarang Tengah, Sistem drainase Semarang Barat dan Sistem drainase Mangkang.

f) Kota Gorontalo meliputi DAS Limboto dan DAS Bolango-Bone.

g) Ibu Kota Negara (IKN).

Rincian lokasi dan nama paket kegiatan ditetapkan dalam dokumen *Overall Work Plan* dan *Annual Work Plan*. Kegiatan di luar daftar DAS/sungai/kota yang telah disebutkan di atas, dapat diusulkan oleh Kementerian PUPR selaku *Executing Agency* untuk disetujui oleh Bank Dunia.

Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp7.183.278.352,00 atau 47,28% dari anggarannya sebesar Rp15.192.000.000,00.

Tabel 26

Pagu dan Realisasi PLN NUFReP periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026

Program/Kegiatan/Output					Pagu	Realisasi	%
No	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa					
		CM.6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah				
			FBA.801	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam Program Ketangguhan Banjir Perkotaan (NUFReP)	15.192.000.000	7.183.278.352	47,28
TOTAL					**15.192.000.000**	**7.183.278.352**	**47,28**

b. ***Flood Management and Coastal Protection in North Java Project (FMCPNJP)***.

1) **Latar Belakang.**

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa antara tahun 2008 hingga tahun 2021, musibah banjir mengakibatkan 2.813 nyawa hilang, 109.958 orang terluka, 392.000 rumah rusak, dan 6,7 juta rumah terendam di seluruh Indonesia. Kerugian banjir rata-rata tahunan diperkirakan mencapai USD2,4 miliar.

Risiko banjir juga semakin memburuk. Jumlah orang yang tinggal di daerah rendah di pesisir diproyeksikan meningkat dari 39,3 juta (2000) menjadi 93,7 juta di tahun 2060, sedangkan jumlah orang yang hidup di dataran banjir dengan risiko kemungkinan banjir sekali per 100 tahun akan mencapai 14,5 juta orang di tahun 2060 karena naiknya muka air laut. Kerusakan tahunan akibat banjir pesisir diperkirakan akan meningkat 160 kali lipat di tahun 2080 jika tanpa upaya adaptasi. Jumlah kejadian banjir di Indonesia tiap tahunnya cenderung naik sejak tahun 2002 seperti ditunjukkan data BNPB.

Oleh karena itu, penanggulangan banjir melalui pembangunan fisik (*structural approach*), harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (*non-structural approach*), dengan menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya bisa lebih optimal. Hal tersebut sejalan dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana desentralisasi pendelegasian wewenang secara bertahap dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah aliran sungai dimaksudkan untuk meningkatkan pelibatan masyarakat lokal mulai dari tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan.

Atas pertimbangan tersebut, sebagai institusi yang ditugaskan melakukan pembinaan kepada daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya dalam bidang urusan pertanian dan pangan dengan terlibat sebagai *Central Project Implementation Unit (*CPIU) pada *Program Flood Management and Coastal Protection in North Java Project* (FMCPNJP/FMNJP) untuk fokus pada Pengelolaan Risiko Banjir Terpadu (PRBT).

Program Flood Management and Coastal Protection in North Java Project (FMCPNJP/FMNJP) dibiayai dari *Loan* ADB 4410-INO dengan fokus lokasi di Wilayah

Sungai (WS) Cimanuk Cisanggarung dan WS Jratunseluna.

2) Program ini disusun menjadi 2 (dua) output:

a) Operasionalisasi pengelolaan risiko banjir. Output ini akan membangun kapasitas organisasi daerah aliran sungai, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk lebih beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang diantisipasi. Proyek ini akan memperkenalkan EOS untuk memprediksi dan memantau banjir dan penurunan tanah di pantai Jawa Utara. EOS akan mendukung perencanaan FRM yang mengintegrasikan proyeksi perubahan iklim, dan penilaian kerusakan untuk menginformasikan dukungan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir Output ini akan memodernisasi sistem hidrometeorologi untuk meningkatkan akuisisi data real-time di kedua wilayah wilayah sungai (RBT). Proyek ini akan mengembangkan kerangka kerja nasional untuk menyelaraskan teknologi untuk *Flood Forecasting, Early Warning and Flood Evaluation System* (FFEWFES) di seluruh daerah aliran sungai di Indonesia.

b) Meningkatnya infrastruktur ketahanan iklim serta Operasi dan Pemeliharaan (O&P). Kegiatan di bawah output ini akan secara langsung mengurangi risiko iklim fisik melalui pembangunan dan peningkatan perlindungan banjir dan fasilitas penyimpanan air. Output ini akan memperkuat kapasitas lembaga pelaksana dan pelaksana dalam manajemen proyek. Ini akan memperkenalkan lembaga pelaksana dan pelaksana praktik terbaik untuk mengarusutamakan adaptasi dan inovasi perubahan iklim dalam operasi mereka.

3) Penerima Manfaat.

a) Kementerian/Lembaga.

Terlaksananya kebijakan program kegiatan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program perlindungan kawasan pertanian di wilayah rawan bencana.

b) Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

Terfasilitasi dan tersinkronisasinya pelaksanaan kebijakan program kegiatan antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program perlindungan kawasan

pertanian di wilayah rawan bencana.

c) Pemerintah Daerah.

Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam perlindungan kawasan pertanian di wilayah rawan bencana.

d) Masyarakat.

Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam perlindungan kawasan pertanian di wilayah rawan bencana.

4) Strategi Pencapaian Keluaran.

a) Metode pelaksanaan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode swakelola dan kontraktual oleh Sub Direktorat Pertanian dan Pangan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I.

b) Tahapan pelaksanaan.

Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana (FMCPNJP/FMNJP) dilaksanakan melalui kegiatan:

- Rapat Koordinasi yang meliputi Rapat koordinasi Awal program Tahun Anggaran 2025 dan rapat-rapat koordinasi lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Tujuan dan *output*. Tujuan kegiatan ini agar terwujud koordinasi antar pengelola program terkait dengan penyelenggaraan program pada masing-masing tingkatan, sedangkan *output*-nya adalah berupa laporan rapat koordinasi pelaksanaan program perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana.
  - Kegiatan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahap pelaporan.
  - Kegiatan akan melibatkan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan dan Provinsi serta kabupaten yang terlibat program FMCPNJP/FMNJP.
- Dukungan Tenaga Sekretariat CPIU Ditjen Bina Bangda:

  Bertujuan untuk mendukung tugas kesekretariatan CPIU Ditjen Bina Bangda dalam mendukung

terlaksananya program FMCPNJP/FMNJP.

- Supervisi, pengendalian dan pengawasan Program Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana (FMCPNJP/FMNJP) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Tujuan dan output. Meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Manajemen Banjir dan *output*-nya Terlaksananya fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Manajemen Banjir.
  - Lokasi kegiatan dilaksanakan pada 16 Daerah.
  - Pelaksana: Pelaksana supervisi, pengendalian dan pengawasan Program Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana (FMCPNJP/FMNJP) yaitu beberapa Direktorat/Sub Direktorat di lingkungan CPIU Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.
  - Jasa *Technical Assistant Project Management and Technical Support Consulting Services* (CS – 04):
  - Kegiatan bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan pengadaan konsultan (*Technical Assistant*) di CPIU Ditjen Bina Bangda dan menghasilkan output kegiatan berupa terfasilitasinya kebutuhan pengadaan konsultan (*Technical Assistant)* di Ditjen Bina Bangda.

c) Instansi yang dilibatkan.

Instansi yang dilibatkan di tingkat Pemerintah Pusat antara lain Bappenas Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan sedangkan di tingkat daerah yaitu Bappeda dan instansi terkait lainnya di lokasi pelaksanaan program FMCPNJP/FMNJP.

Untuk mendukung Program *Flood Management in North Java Project* (FMNJP), *Asian Development Bank* (ADB) memberikan pinjaman sebesar JPY36.055.200.000 dengan nomor perjanjian Pinjaman 4410-INO dengan Nomor Register 1NPBHBMA yang mulai efektif pada 9 Februari 2024 dan berakhir pada 30 Juni 2029.

Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar

Rp3.970.663.967,00 atau 40,80% dari anggarannya sebesar Rp9.731.400.000,00.

Tabel 27

Pagu dan Realisasi PLN FMCPNJP periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026

Program/Kegiatan/Output					Pagu	Realisasi	%
No	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa					
		CM.6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah				
			FBA.802	Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Risiko Bencana di Kawasan Pertanian	9.731.400.000	3.970.663.967	40,80
TOTAL					**9.731.400.000**	**3.970.663.967**	**40,80**

3. Ditjen Dukcapil mengelola anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp1.365.436.852.000,00 untuk program ***ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation*** **(Identifikasi untuk Penyelenggaraan Layanan yang Inklusif dan Transformasi Digital).**

   Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar USD250.000.000,00 (sekitar Rp 3,7 triliun) kepada Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri. Pinjaman ini untuk memperkuat sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sekaligus meningkatkan penggunaan identifikasi digital. Tujuannya, guna memperkuat pelayanan serta kepercayaan terhadap ekonomi digital di Indonesia. Pinjaman ini akan mendukung proyek *ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation* (Identifikasi untuk Penyelenggaraan Layanan yang Inklusif dan Transformasi Digital). Proyek tersebut akan mendukung Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri meningkatkan sistem kependudukan dan catatan sipil di Indonesia saat ini terutama memperluas cakupannya di 12 Provinsi prioritas dan di kalangan penduduk rentan di seluruh Indonesia.

   Proyek ini akan mendukung pengembangan infrastruktur publik digital prioritas. Termasuk *platform* verifikasi identitas dan *electronic-Know Your Customer* (*e*-KYC), aplikasi identifikasi digital, serta *platform* pertukaran data untuk memfasilitasi proses berbagi informasi antar lembaga pemerintah yang mudah dan aman. Proyek ini akan memodernisasi infrastruktur data pada Ditjen Dukcapil. Selain itu juga meningkatkan kemampuannya dalam menjamin keamanan di dunia maya maupun perlindungan terhadap data pribadi serta kerangka privasi. Proyek ini dapat mendukung peningkatan taraf hidup penduduk Indonesia dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga mereka dapat menggunakan

NIK dengan mudah untuk melakukan transaksi dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, baik secara fisik maupun dalam jaringan (daring/*online*).

Proyek ini dapat membantu Indonesia terus menjaga keselamatan dan keamanan data kependudukan. Sistem identifikasi diketahui sebagai faktor kunci dalam pembangunan, kemampuan untuk memverifikasi identitas legal dapat meningkatkan akses kepada layanan dari pemerintah maupun swasta, seperti perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, layanan keuangan serta niaga elektronik (*e-commerce*). Selain itu, juga meningkatkan berbagai peluang ekonomi, misalnya, akses terhadap pekerjaan formal.

a. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Proyek.
    1) Tujuan

        Memperkuat sistem kependudukan dan pencatatan sipil dan meningkatkan penggunaan identifikasi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan penyampaian layanan sektor publik dan swasta prioritas untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang, tujuan Proyek Digital ID adalah adanya pelayanan pemerintah dan swasta akan menjadi lebih inklusif, efektif, efisien, inovatif, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.

    2) Sasaran
        a) Jumlah penduduk Indonesia di 12 provinsi prioritas yang telah memiliki NIK.
        b) Proporsi anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran.
        c) Jumlah penduduk Indonesia yang telah menginstal aplikasi ID Digital dan melakukan autentikasi minimal satu kali.
        d) Jumlah orang yang telah menggunakan platform e-KYC untuk mengaktifkan layanan terpilih termasuk layanan keuangan.
        e) Selisih proporsi pria dan wanita Indonesia yang memiliki rekening bank.
        f) Jumlah pengguna institusional yang menggunakan verifikasi identitas baru dan platform e-KYC untuk autentikasi.
    3) Manfaat Program
        a) Manfaat Proyek untuk Dukcapil: (a) Cakupan Administrasi Kependudukan (adminduk) yang universal; (b) Peningkatan keamanan data dan

sistem; (c) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ditingkatkan sesuai kebutuhan; (d) Peningkatan jumlah otentikasi dan layanan pemanfaatan data lainnya; (e) Penguatan efisiensi operasional; dan (f) Keberlanjutan Keuangan.

b) Manfaat untuk Masyarakat: (a) Inklusi ekonomi dan sosial, terutama untuk masyarakat Indonesia yang rentan dan masyarakat di daerah tertinggal; (b) mengurangi biaya transaksi; (c) Akses jarak jauh terhadap layanan sektor publik dan swasta; (d) Layanan Adminduk yang lebih mudah diakses dan nyaman; (e) Kontrol yang lebih besar atas data pribadi; dan (f) Respon bencana yang lebih cepat dan lebih baik.

c) Manfaat untuk Pemerintah dan Sektor Swasta: (a) Peningkatan penargetan program sosial; (b) Mengurangi biaya onboarding; (c) Mengurangi penipuan dan kebocoran; (d) Kualitas data yang lebih baik, termasuk statistik vital; (e) Pemberdayaan layanan online; (f) Layanan publik tersedia untuk lebih banyak masyarakat Indonesia; dan (g) Peluang untuk berinovasi produk dan layanan baru.

b. Spesifikasi Proyek (Data Proyek) adalah:

Nomor Pinjaman	:	IBRD Loan No.9520-ID
Nomor Register	:	1F2V2KKA
Tanggal Penandatangan	:	30 Mei 2023
Tanggal efektif	:	12 Mei 2023
Tanggal penutupan	:	31 Desember 2027
Rekening Khusus	:	601.354.411.980
Jumlah Pinjaman	:	USD250.000.000,00 (IBRD 100%)
Pelaksana Proyek (*Executing Agency*)	:	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Komponen

Pinjaman *ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation* (Identifikasi untuk Penyelenggaraan Layanan yang Inklusif dan Transformasi Digital) terdiri dari 5 Komponen sebagai berikut ;

1) Komponen 1 : Kependudukan dan pencatatan sipil.

Komponen ini akan mendukung peningkatan cakupan Adminduk di antara populasi yang ada dengan fokus pada provinsi tertinggal dan populasi rentan dan proses reformasi dan sistem baru untuk membuat sistem Adminduk lebih mudah diakses, tangguh, dan efisien. Keluaran ini terutama akan membantu masyarakat Indonesia dan penduduk yang memenuhi syarat yang belum memiliki NIK, e-KTP atau dokumentasi identitas hukum lainnya (misalnya, akta kelahiran dan pernikahan) atau yang informasinya tidak mutakhir. Penerima manfaat akan dapat mengakses layanan dan menggunakan hak mereka dengan lebih mudah.

2) Komponen 2 : Verifikasi identitas, identifikasi digital, dan infrastruktur TIK. Komponen ini akan mendukung pengembangan platform verifikasi identitas dan e-KYC untuk transaksi tatap muka dan aplikasi ID digital nasional untuk transaksi online/jarak jauh, serta memodernisasi infrastruktur TIK Ditjen Dukcapil dan memperkuat kapabilitas keamanan siber. Keluaran ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, ketahanan, kinerja, keamanan, dan integritas seluruh operasi Dukcapil, mulai dari layanan PR/CR dan pemanfaatan hingga proses internal. Verifikasi identitas dan platform e-KYC dan aplikasi ID digital akan secara signifikan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dan penduduk untuk mengakses layanan sektor publik dan swasta, baik secara langsung maupun daring, serta kemampuan lembaga pemerintah dan bisnis untuk memberikan layanan tersebut.

3) Komponen 3 : Pemanfaatan dan adopsi. Komponen ini akan mempromosikan penggunaan berbagai platform untuk menjadikan pelayanan sektor publik dan swasta lebih inklusif dan efisien, seperti dengan meningkatkan cara mengelola lebih dari 5.400 pengguna institusional, mengembangkan platform pertukaran data yang aman dan transparan, dan mendukung badan Pemerintah Indonesia yang diprioritaskan agar terintegrasi dengan platform utama. Penyempurnaan sistem dan proses untuk mengelola hubungan dan akses pengguna institusional akan memberikan keuntungan efisiensi bagi Ditjen Dukcapil dan akan memberikan peningkatan prediktabilitas dan kemudahan integrasi bagi pengguna institusional.

4) Komponen 4 : Kapasitas kelembagaan dan manusia. Komponen ini akan membantu mendukung transformasi

organisasi Dukcapil, reformasi hukum dan peraturan, dan peningkatan keterlibatan masyarakat untuk memungkinkan, mempertahankan, dan membangun reformasi yang didukung oleh Proyek. Penyederhanaan proses internal dan struktur organisasi akan membuat sistem Adminduk lebih efisien (misalnya, mengurangi biaya dan waktu administrasi) dan memperkuat manajemen sumber daya manusia akan membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja Dinas dan Ditjen Dukcapil, yang dapat meningkatkan layanan garis depan dan mendorong inovasi dari dalam. Menjadi sangat penting yakni peluncuran program petugas perlindungan data akan meningkatkan kapasitas dan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi yang baru, sambil menumbuhkan budaya internal seputar privasi dan keamanan informasi.

5) Komponen 5 : Koordinasi dan pengelolaan proyek. Komponen ini akan mendukung operasional Unit Manajemen Proyek (PMU) untuk mendorong implementasi proyek, melakukan tanggung jawab pelaporan dan fidusia di bawah Proyek, bertindak sebagai sekretariat Komite Pengarah Proyek (PSC) dan Komite Koordinasi dan Konsultasi (CCC), dan meningkatkan teknis keahlian dalam kegiatan yang lebih kompleks. Konsultan manajemen proyek akan dilibatkan untuk membantu mengelola proses pengadaan, vendor, dan kontrak.

Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp16.199.831.736,00 atau 1,19% dari anggarannya sebesar Rp1.365.436.852.000,00.

Tabel 28
Pagu dan Realisasi PLN *ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation* periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026

Program/Kegiatan/Output					Pagu	Realisasi	%
No	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CP	Program Tata Kelola Kependudukan					
		010.08.CP	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital		1.365.436.852.000	16.199.831.736	1,19
TOTAL					**1.365.436.852.000**	**16.199.831.736**	**1,19**

4. Ditjen Bina Pemdes mengelola anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri. Hibah tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan *Investing in Nutrition and Early Years (*INEY) *Phase II*.

INEY merupakan dukungan program bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan gizi untuk remaja putri, ibu hamil, dan anak 0-59 bulan untuk percepatan penurunan *stunting* pada anak di bawah lima tahun. Program ini ditujukan untuk melanjutkan dan memperdalam kepemimpinan nasional dalam upaya pengurangan *stunting*, meningkatkan penyelenggaraan beragam intervensi yang berdampak-tinggi, spesifik-gizi dan peka-gizi, serta memperkuat koordinasi di tingkat daerah–masyarakat dalam konteks penurunan *stunting*. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan dasar hukum yang melandasi Program INEY *Phase II* dimana Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menjadi landasan kebijakan nasional dalam percepatan penurunan *stunting* melalui pendekatan terintegrasi, lintas sektor, dan lintas level pemerintahan. Perpres ini menegaskan bahwa penanganan *stunting* tidak hanya menjadi urusan sektor kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui Perpres 72 Tahun 2021, *stunting* diposisikan sebagai isu strategis pembangunan sumber daya manusia nasional.

Anggaran program INEY *Phase II* bersumber dari Hibah Luar Negeri Bank Dunia dengan Perjanjian Hibah Nomor GFF TF0C1687 IHCATF0C3114 dengan Nomor Register 2HUXN2PA. Pagu anggaran yang diperolah Ditjen Bina Pemerintahan Desa di tahun 2026 sebesar Rp2.949.380.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp751.537.060,00 atau sebesar 25,48% dari total pagu anggaran.

Tabel 29
Pagu dan Realisasi HLN *Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II* Ditjen Bina Pemdes periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026

Program/Kegiatan/Output					Pagu	Realisasi	%
No	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa					
		CM.1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa				
			UBB.006	Desa yang melaksanakan pembinaan kelembagaan Posyandu	2.949.380.000	751.537.060	25,48
TOTAL					**2.949.380.000**	**751.537.060**	**25,48**

5. Ditjen Bina Pembangunan Daerah mengelola anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri. Hibah tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) *Phase II*.

a. Latar Belakang.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2019 s.d. 2024 ditegaskan bahwa target penurunan prevalensi *stunting* sebesar 14% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, telah ditetapkan Strategi Nasional (Stranas) percepatan penurunan *stunting* melalui 5 Pilar yaitu (1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa; (2) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; (3) Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa; (4) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan (5) Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Dalam upaya pelaksanaan Stranas dimaksud Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dari Bank Dunia melalui program *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) dari tahun 2018. Melalui program tersebut, semua *stakeholders* berkolaborasi untuk menurunkan angka prevalensi *stunting* dengan diukur melalui *Disbursement Link Indicator* (DLI). Terdapat 9 DLI yang menjadi tugas masing-masing Kementerian/Lembaga, dimana Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah mendapatkan dana hibah untuk melaksanakan DLI ke-7 yaitu *Increased Predictability and Result-Orientation of Fiscal Transfers that Support Convergence*. Untuk melaksanakan DLI tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan upaya manajerial melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah terkait dan multisektor. Aksi konvergensi penurunan *stunting* merupakan suatu instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi baik spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan *stunting* dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi dengan lebih efektif.

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan *stunting*, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Stranas percepatan penurunan stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018, dimana peran Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina

Pembangunan Daerah berdasarkan Stranas percepatan penurunan *stunting* yang tertuang pada Perpres dimaksud berada pada Pilar 1, Pilar 3 dan Pilar 5.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa program INEY akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2023, maka dalam upaya melakukan percepatan penurunan *stunting* dan untuk melihat program percepatan penurunan *stunting* bisa terlaksana secara berkelanjutan, Bank Dunia kembali memberikan dukungan melalui hibah program INEY *Phase II* yang direncanakan akan efektif pada tahun 2024 s.d. 2028, dimana Kementerian Dalam Negeri akan bertanggung jawab untuk melaksanakan DLI-8 yaitu Kabupaten/Kota yang mencapai kinerja baik dalam percepatan penurunan *stunting* meliputi *Disbursment Linked Result* (DLR) 8.1, 8.2 dan 8.3, dengan rincian sebagai berikut:

a) DLR 8.1: Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan prioritas program penurunan *stunting* dalam RPJMD.
b) DLR 8.2 : Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri menyampaikan laporan tahunan hasil penandaan dan realisasi anggaran pemda kabupaten/kota yang mendukung penurunan *stunting*.
c) DLR 8.3 : Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mencapai kinerja baik dalam percepatan penurunan *stunting*.

b. Peranan.

Peran Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sangat strategis pada penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai implementasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pendampingan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di daerah dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah dari tahun 2020 melalui strategi percepatan penurunan *stunting* dengan melakukan peningkatan kualitas intervensi layanan yang menyasar setiap sasaran prioritas. Namun hal tersebut belum berjalan secara konvergen, dimana pendekatan 8 (delapan) aksi konvergensi masih dalam tahap konsolidasi atas komitmen pelaku, manajemen data dan pelaporan yang belum menyentuh esensi dari konvergensi yang sistemik, terstruktur dan menjamin keberlanjutan penurunan *stunting*.

Dalam rangka menindaklanjuti rencana implementasi program INEY *Phase II* oleh Bank Dunia pada tahun 2024

yang akan dilaksanakan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu *Project Implementing Unit* (PIU) di tingkat pusat sesuai dengan DLI 8 yaitu Kabupaten/Kota yang mencapai kinerja baik dalam percepatan penurunan *stunting*.

c. Tujuan.

Tujuan pelaksanaan hibah *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) *Phase II* di Ditjen Bina Pembangunan Daerah, kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1) Penguatan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengintegrasikan prioritas program penurunan *stunting* ke dalam RPJMD.
2) Peningkatan Pemerintah Daerah dalam melaporkan data hasil penandaan dan penggunaan anggaran daerah terhadap penurunan *stunting*.
3) Penguatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkinerja baik dalam pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan *stunting*.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan hibah *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) *Phase II* di Ditjen Bina Pembangunan Daerah, kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1) Meningkatnya jumlah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan prioritas program penurunan *stunting* dalam RPJMD.
2) Meningkatnya jumlah Pemerintah Daerah yang menyampaikan laporan tahunan hasil penandaan dan realisasi anggaran pemda kabupaten/kota yang mendukung penurunan *stunting*.
3) Meningkatnya jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mencapai kinerja baik dalam pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan *stunting*.

Untuk mendukung Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Program *Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II, International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) atau *World Bank* memberikan hibah sebesar Rp77.000.000.000 dengan nomor perjanjian Hibah GFF TF0C1687 IHCA TF0C3114 dengan Nomor Register 2HUXN2PA yang mulai efektif pada 22 November 2023 dan berakhir pada 31 Agustus 2028.

Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp1.248.085.264,00 atau 2,76% dari anggarannya sebesar Rp45.202.118.000,00.

Tabel 30
Pagu dan Realisasi HLN *Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II* Ditjen Bina Bangda periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026

Program/Kegiatan/Output					Pagu	Realisasi	%
No	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa					
		CM.6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah				
			FBA.900	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Implementasi Konvergensi Penurunan Stunting di Daerah (INEY)	45.202.118.000	1.248.085.264	2,76
TOTAL					**45.202.118.000**	**1.248.085.264**	**2,76**

6. Ditjen Bina Keuangan Daerah mengelola anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri. Hibah tersebut telah berlangsung sejak Tahun 2024. Kegiatan yang dibiayai melalui hibah luar negeri ini merupakan Program *Technical Assistance Grant to Support SINERGIS Implementation Project Letter Agreement* dari *World Bank*. Hibah ini digunakan untuk membiayai Rincian Output Rancangan Standar Redesain Proses Bisnis SIPD RI Bidang Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026. Program ini dirancang untuk dilaksanakan sampai dengan Tahun 2026. Rincian Hibah luar negeri dapat dijabarkan sebagai berikut:

Nomor Pinjaman PHLN	:	TF0C4755
Nomor Registrasi	:	2S9MDU8A
Tanggal Penandatanganan	:	22 Mei 2024
Tanggal Efektif Perjanjian PHLN	:	22 Mei 2024
Clossing Date	:	31 Agustus 2026
Jumlah Pinjaman Luar Negeri	:	Rp160.000.000,00;
Nomor Rekening Khusus	:	602208411980
Executing Agency	:	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Dana Hibah ini digunakan untuk mendukung kegiatan Penyusunan Redesain Proses Bisnis Pengembangan SIPD RI Bidang Keuangan Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.397.182.000,00. Realisasi belanja kegiatan ini sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp1.219.097.347,00 atau 35,89%.

C. CAPAIAN *OUTPUT* PER FUNGSI APBN.

Pelaksanaan APBN pada Kemendagri dapat diklasifikasikan dalam 1 fungsi, yaitu pelayanan umum. Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Per Eselon I untuk masing-masing Fungsi dan Sub Fungsi Tahun 2026.

Tabel 31
Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Per Eselon I untuk masing-masing Fungsi dan Sub Fungsi Tahun 2026

FUNGSI_SUB FUNGSI	ES I	KODE FUNGI_SUB FUNGSI	PAGU	REALISASI	%
Pelayanan Umum_Lembaga Eksekutif Dan Legislatif, Masalah Keuangan Dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri	01	01.01	1.923.986.392.000	576.134.384.511	29,94
	03	01.01	182.697.875.000	160.564.830.333	87,89
	07	01.01	36.283.065.000	14.239.411.394	39,25
	09	01.01	57.612.925.000	17.735.747.929	30,78
SUB TOTAL			**2.200.580.257.000**	**768.674.374.167**	**34,93**
Pelayanan Umum_Pelayanan Umum	01	01.03	749.930.476.000	350.379.299.182	46,72
	02	01.03	114.996.537.000	66.947.663.026	58,22
	03	01.03	78.165.538.000	44.347.192.767	56,73
	04	01.03	91.326.379.000	43.486.932.714	47,62
	05	01.03	159.781.975.000	75.849.416.997	47,47
	06	01.03	125.913.526.000	59.850.039.483	47,53
	07	01.03	71.643.622.000	36.027.508.879	50,29
	08	01.03	2.150.060.431.000	457.175.232.914	21,26
	09	01.03	70.125.995.000	38.544.549.740	54,96
	11	01.03	56.305.935.000	27.529.274.754	48,89
	12	01.03	259.911.933.000	120.880.321.115	46,51
SUB TOTAL			**3.928.162.347.000**	**1.321.017.431.571**	**33,63**
Pelayanan Umum_Pembangunan Daerah	04	01.06	198.481.805.000	52.181.259.638	26,29
	05	01.06	92.097.863.000	21.414.525.488	23,25
	06	01.06	104.262.998.000	26.864.497.388	25,77
	11	01.06	15.674.354.000	4.294.530.882	27,40
	12	01.06	60.442.746.000	30.190.139.437	49,95
SUB TOTAL			**470.959.766.000**	**134.944.952.833**	**28,65**
Pelayanan Umum.Pelayanan Umum Lainnya	04	01.90	27.301.486.000	7.597.577.297	27,83
SUB TOTAL			**27.301.486.000**	**7.597.577.297**	**27,83**
TOTAL			**6.627.003.856.000**	**2.232.234.335.868**	**33,68**

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output dan Target dari Masing-Masing Fungsi dan Sub Fungsi disajikan pada **Lampiran IV** (Rincian Fungsi dan Sub Fungsi APBN).

D. PRIORITAS NASIONAL (PN).

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, pada Kemendagri terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN), yaitu pada PN I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII dari delapan PN yang ditetapkan dalam RKP.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran Bruto dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. PN I Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaannya tersebar pada 3 (tiga) Eselon I dengan pagu mencapai Rp8.950.268.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.282.476.373,00.

Tabel 32
Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional I

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Polpum	7.794.716.000	6.408.399.183	82,21
Ditjen Bina Bangda	197.615.000	104.827.865	53,05
BPSDM	957.937.000	769.249.325	80,30
Total	**8.950.268.000**	**7.282.476.373**	**81,37**

2. PN II Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Pelaksanaannya tersebar pada 2 (dua) Eselon I dengan pagu mencapai Rp1.388.734.000,00 dan realisasi sebesar Rp573.717.060,00.

Tabel 33
Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional II

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Adwil	555.550.000	46.551.229	8,38
Ditjen Bina Bangda	833.184.000	527.165.831	63,27
Total	**1.388.734.000**	**573.717.060**	**41,31**

3. PN III Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. Pelaksanaannya tersebar pada 1 (satu) Eselon I dengan pagu mencapai Rp746.087.000,00 dan realisasi sebesar Rp396.542.997,00.

Tabel 34
Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional III

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Bangda	746.087.000	396.542.997	53,15
Total	**746.087.000**	**396.542.997**	**53,15**

4. PN IV Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Pelaksanaannya tersebar pada 2 (dua) Eselon I dengan pagu mencapai Rp1.850.984.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.034.321.687,00.

Tabel 35
Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional IV

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Bangda	1.527.598.000	735.082.247	48,12
Ditjen Dukcapil	323.386.000	299.239.440	92,53
Total	**1.850.984.000**	**1.034.321.687**	**55,88**

5. PN VI Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Pelaksanaannya tersebar pada pada 4 (empat) Eselon I dengan pagu mencapai Rp51.115.057.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.631.120.619,00.

Tabel 36
Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VI

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Pemdes	49.328.798.000	11.034.595.841	22,37
Ditjen Bina Bangda	110.842.000	68.615.000	61,90
Ditjen Dukcapil	1.212.179.000	510.451.748	42,11
Ditjen Bina Keuda	463.238.000	17.458.030	3,77
Total	**51.115.057.000**	**11.631.120.619**	**22,75**

6. PN VII Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Pelaksanaannya tersebar pada 10 (sepuluh) Eselon I dengan pagu mencapai Rp395.556.822.000,00 dan realisasi sebesar Rp194.240.164.262,00.

Tabel 37
Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VII

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Setjen	56.216.791.000	15.158.001.775	26,96
Ditjen Polpum	137.330.518.000	136.264.375.968	99,22
Ditjen Bina Adwil	64.645.051.000	12.049.939.794	18,64
Ditjen Bina Pemdes	3.740.558.000	274.529.785	7,34
Ditjen Bina Bangda	15.295.630.000	6.208.491.925	40,59
Ditjen Otda	28.209.118.000	11.005.952.089	39,02
Ditjen Dukcapil	54.154.867.000	3.155.702.465	5,83
Ditjen Bina Keuda	29.742.051.000	8.173.843.425	27,48
BSKDN	2.669.960.000	75.335.047	2,82
BPSDM	3.552.278.000	1.873.991.989	52,75
Total	**395.556.822.000**	**194.240.164.262**	**49,11**

7. PN VIII Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Pelaksanaannya tersebar pada 3 (tiga) Eselon I dengan pagu mencapai Rp78.323.708.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.413.249.519,00.

Tabel 38
Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VIII

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Polpum	1.178.469.000	1.163.963.330	98,77
Ditjen Bina Adwil	76.234.964.000	1.867.161.809	2,45
Ditjen Bina Bangda	910.275.000	382.124.380	41,98
Total	**78.323.708.000**	**3.413.249.519**	**4,36**

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output dan Target dari Masing-Masing Kegiatan yang Menjadi Prioritas Nasional disajikan pada **Lampiran V** (Rincian Prioritas Nasional).

E. KESALAHAN PENGANGGARAN.

Pada Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2026 terdapat kesalahan penganggaran berupa Belanja barang menjadi ekstrakomptabel sebesar Rp168.910.923,00, Belanja Barang menjadi aset sebesar Rp28.322.150,00, dan antar Belanja Modal sebesar Rp289.104.400,00. Rincian kesalahan penganggaran disajikan dalam **Lampiran VI**.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp20.199.653.871,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp20.199.653.871,00 dan Rp777.785,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Kas dikelola dalam bentuk mata uang rupiah. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada Tabel 39.

Tabel 39

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I

NO	ESELON I	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	8.108.392.000	-	8.108.392.000
2	Itjen	480.000.000	-	480.000.000
3	Ditjen Polpum	4.157.904.043	-	4.157.904.043
4	Ditjen Bina Adwil	1.200.000.000	777.785	1.199.222.215
5	Ditjen Bina Pemdes	735.000.000	-	735.000.000
6	Ditjen Bina Bangda	300.000.000	-	300.000.000
7	Ditjen Otda	300.000.000	-	300.000.000
8	Ditjen Dukcapil	300.000.000	-	300.000.000
9	Ditjen Keuda	1.604.169.560	-	1.604.169.560
10	BSKDN	210.000.000	-	210.000.000
11	BPSDM	2.804.188.268	-	2.804.188.268
JUMLAH		**20.199.653.871**	**777.785**	**20.198.876.086**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 sebesar Rp20.199.653.871,00 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp14.369.000.000,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran TUP sebesar Rp5.830.653.871,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satker disajikan pada **Lampiran VII**.

Kas di Bendahara Penerimaan Rp79.603.100,00

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp79.603.100,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan belum disetorkan ke kas Negara per tanggal Neraca. Kas dikelola dalam bentuk mata uang Rupiah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I tersaji pada Tabel 40.

Tabel 40

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I

NO	ESELON I	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	BPSDM	79.603.100	-	79.603.100
JUMLAH		**79.603.100**	**-**	**79.603.100**

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Satker disajikan pada **Lampiran VII**.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp79.603.100,00 pada Eselon I BPSDM terdiri dari:

a) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp35.677.000,00 terdapat pada BPSDM Pusat berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2026 atas Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp31.750.000,00 serta Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp3.927.000,00 yang belum disetorkan ke kas negara per tanggal 30 Juni 2026; dan

b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp43.926.100,00 teradapat pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2026 atas Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan yang belum disetorkan ke kas negara per tanggal 30 Juni 2026.

Kas Lainnya dan Setara Kas

Rp34.972.025.318,00

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp34.972.025.318,00 dan Rp14.820.792.658,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas Lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka kementerian negara/lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 terdiri atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.434.987.387,00 dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp30.537.037.931,00. Kas dikelola dalam bentuk mata uang Rupiah. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I tersaji pada Tabel 41.

Tabel 41

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I

NO	ESELON I	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	17.547.438.166	14.722.146	17.532.716.020
2	Ditjen Bina Adwil	166.159.288	409.689.403	(243.530.115)
3	Ditjen Bina Pemdes	248.041.217	-	248.041.217
4	Ditjen Bina Bangda	14.488.434.794	14.385.038.731	103.396.063
5	Ditjen Otda	144.158.300	-	144.158.300
6	Ditjen Dukcapil	1.954.930.625	-	1.954.930.625
7	Ditjen Bina Keuda	255.824.872	-	255.824.872
8	BSKDN	38.250.000	-	38.250.000
9	BPSDM	128.788.056	11.342.378	117.445.678
JUMLAH		**34.972.025.318**	**14.820.792.658**	**20.151.232.660**

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker disajikan pada **Lampiran VII**.

Penjelasan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp34.972.025.318,00 adalah sebagai berikut:

a) Kas Lainnya dan Setara Kas pada Eselon I Setjen sebesar Rp17.547.348.166,00 yang terdiri dari:

   i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran atas Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum diserahkan kepada penerima hak per tanggal 30 Juni 2026 yang terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp765.097.350,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp191.124.200,00, DKPP sebesar Rp90.798.175,00, dan IPDN Kampus Sulut sebesar Rp326.700.898,00;

   ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran per tanggal 30 Juni 2026 yang terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp1.351.551,00 dan IPDN Kampus Sulsel sebesar Rp20.236.792,00;

   iii. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp16.152.129.200,00 yang merupakan saldo kas dari hibah langsung dalam bentuk uang yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada IPDN Jatinangor untuk mendukung Program Pengembangan Kompetensi dan Pembentukan Kader Bagi ASN/Calon ASN Pemerintah Provinsi Bali berupa pembangunan Rumah Singgah/Jagat Bali. Terdapat realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2026 yang bersumber dari hibah tersebut sebesar Rp147.870.800,00 dari saldo awal sebesar Rp16.300.000.000,00 sehingga saldo dana hibah tersisa Rp16.152.129.200,00;

b) Kas Lainnya dan Setara Kas pada Eselon I Ditjen Bina Adwil sebesar Rp166.149.228,00 yang terdiri dari:

   i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa kas yang

berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran atas Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum diserahkan kepada penerima hak per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp159.602.138,00;

ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp6.547.090,00;

iii. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara sebesar Rp60,00 yang terdapat pada Satker Bappeda Provinsi Papua. Telah dilakukan penarikan tunai atas saldo kas tersebut pada Tahun 2026 dari rekening bendahara pengeluaran yang selanjutnya diberikan kepada penerima hak; dan

iv. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.000,00 yang merupakan kas yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran atas uji coba *Cash Management System* (CMS) pada Bappeda Provinsi Maluku Utara. Telah dilakukan penarikan tunai atas saldo kas tersebut pada Tahun 2026 dari rekening bendahara pengeluaran yang selanjutnya diberikan kepada penerima hak;

c) Kas Lainnya dan Setara Kas pada Eselon I Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp248.041.217,00 merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran atas Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum diserahkan kepada penerima hak per tanggal 30 Juni 2026 yang terdapat pada Satker Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp227.162.361,00 dan Balai Pemdes Lampung sebesar Rp20.878.000,00;

d) Kas Lainnya dan Setara Kas pada Eselon I Ditjen Bina Bangda sebesar Rp14.488.434.794,00 terdiri dari sebesar Rp103.526.063,00 yang merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran atas Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum diserahkan kepada penerima hak per tanggal 30 Juni 2026 dan sebesar Rp14.384.908.731,00 yang merupakan saldo kas dari hibah langsung dalam bentuk uang yang tersisa dari *United Arab Emirates* (UAE) atas Program *Financing The Regional Development*;

e) Kas Lainnya dan Setara Kas pada Eselon I Ditjen Otda sebesar Rp144.158.300,00 merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran atas Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum diserahkan kepada penerima hak per tanggal 30 Juni 2026;

f) Kas Lainnya dan Setara Kas pada Eselon I Ditjen Dukcapil sebesar Rp1.954.930.625,00 merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran atas Belanja Perjalanan Dinas yang telah dicairkan dari kas negara namun belum diserahkan kepada penerima hak per tanggal 30 Juni 2026;

g) Kas Lainnya dan Setara Kas pada pada Eselon I Ditjen Bina Keuda sebesar Rp255.824.872,00 merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran atas Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum diserahkan kepada penerima hak per tanggal 30 Juni 2026;

h) Kas Lainnya dan Setara Kas pada pada Eselon I BSKDN sebesar Rp38.250.000,00 merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran atas Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum diserahkan kepada penerima hak per tanggal 30 Juni 2026;

i) Kas Lainnya dan Setara Kas pada Eselon I BPSDM sebesar Rp128.788.056,00 yang terdiri dari:

   i. kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran atas Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum diserahkan kepada penerima hak per tanggal 30 Juni 2026 yang terdapat pada BPSDM Pusat sebesar Rp28.560.000,00 dan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III;

   ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp66.359.056,00 terdapat pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I;

   iii. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp11.390.000,00 pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II yang berasal dari jurnal balik yang terbentuk atas kesalahan penginputan penyerahan kas Bulan Juli yang seharusnya diinput pada Bulan Juni. Kesalahan penginputan penyerahan kas tersebut membentuk jurnal dengan akun Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran di sisi kredit pada Periode Juli, namun jurnal balik atas koreksi tersebut mendebit akun Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Bulan Juni sehingga menyebabkan selisih pembukuan antara saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Neraca Percobaan Akrual; dan

   iv. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp23.000,00 pada Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan yang merupakan pengembalian LS Perjalanan

Dinas yang disetorkan ke kas negara pada Bulan Juli 2026.

Penjelasan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.820.792.658,00 adalah sebagai berikut:

a) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp14.722.146,00 pada Eselon I Setjen merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada penerima hak sampai dengan 31 Desember 2025 pada IPDN Jatinangor;

b) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp409.689.403,00 pada Eselon I Ditjen Bina Adwil terdiri dari:

   i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp397.356.643,00 merupakan pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025 pada Satker Ditjen Bina Adwil. Kas dari pungutan pajak tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2026;

   ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.322.700,00 merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran atas Belanja Perjalanan Dinas yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada penerima hak sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025. Kas tersebut telah diserahkan kepada penerima hak pada Tahun 2026.

   iii. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara sebesar Rp60,00 yang terdapat pada Satker Bappeda Provinsi Papua. Telah dilakukan penarikan tunai atas saldo kas tersebut pada Tahun 2026 dari rekening bendahara pengeluaran yang selanjutnya diberikan kepada penerima hak; dan

   iv. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.000,00 yang merupakan kas yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran atas uji coba *Cash Management System* (CMS) pada Bappeda Provinsi Maluku Utara. Telah dilakukan penarikan tunai atas saldo kas tersebut pada Tahun 2026 dari rekening bendahara pengeluaran yang selanjutnya diberikan kepada penerima hak.

c) Kas Lainnya dan Setara Kas pada Eselon I Ditjen Bina Bangda sebesar Rp14.385.038.731,00 terdiri dari:

   i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp130.000,00 merupakan kas yang tersisa pada rekening Bendahara Pengeluaran Ditjen Bina Bangda atas Hibah Langsung Program UNICEF Tahun Anggaran 2025. Kas tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2026.

ii. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp14.384.908.731,00 yang merupakan saldo kas dari hibah langsung dalam bentuk uang yang tersisa dari *United Arab Emirates* (UAE) atas Program *Financing The Regional Development*. Terdapat realisasi belanja pada Tahun 2025 yang bersumber dari hibah langsung tersebut sebesar Rp47.845.293.245,00 dari saldo awal tahun sebesar Rp62.230.201.976,00 sehingga saldo dana hibah tersisa sebesar Rp14.384.908.731,00.

d) Kas Lainnya dan Setara Kas pada Eselon I BPSDM sebesar Rp11.342.378,00 yang merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas realisasi belanja perjalanan dinas yang belum dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas sampai dengan 31 Desember 2025 pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV.

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Rp0,00

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.078.586.075,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun berjalan, namun barang atau jasa belum diterima. Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I terdapat pada Tabel 42.

Tabel 42

Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I

NO	ESELON I	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	-	1.078.586.075	(1.078.586.075)
	JUMLAH	**-**	**1.078.586.075**	**(1.078.586.075)**

Tabel 43

Mutasi Belanja Dibayar Dimuka

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025	**1.078.586.075**
Mutasi Kurang:	**(1.078.586.075)**
Jurnal balik atas jurnal penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka akhir Tahun 2025 pada IPDN Jatinangor	(1.078.586.075)
Saldo per 30 Juni 2026	**-**

Transaksi pengurangan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp1.078.586.075,00 merupakan jurnal balik atas pengakuan Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2025 berupa Belanja Platform Digital LMS (*Learning Management System*) Bahasa Inggris Berbasis *Common European Framework for Reference for Languages* (CEFR) bagi Praja Angkatan XXXVI dengan nilai sebesar Rp1.109.402.820 yang memiliki masa berlaku 3 tahun atau 36 Bulan sejak pertama kali aktivasi pada bulan Desember 2025, sehingga 35 bulan masa berlaku

yang tersisa diakui sebagai Belanja Barang yang Dibayar Dimuka dengan nilai sebesar Rp1.078.586.075,00.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp34.616.450,00

C.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp34.616.450,00 dan Rp34.616.450,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan, namun belum diterima tagihannya.

Tabel 44

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I

NO	ESELON I	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	34.616.450	34.616.450	-
2	Ditjen Bina Bangda	-	-	-
JUMLAH		**34.616.450**	**34.616.450**	**-**

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar sebesar Rp34.616.450,00 merupakan kelebihan pembayaran belanja tunjangan kinerja pada IPDN Kampus Sulawesi Utara yang terjadi pada Tahun 2022 dan sampai dengan 30 Juni 2026 masih belum terdapat setoran pengembalian.

Piutang Bukan Pajak Rp12.337.475.105,00

C.6 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp12.337.475.105,00 dan Rp12.483.563.956,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayaran. Piutang Bukan Pajak terdiri atas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Lainnya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 tersaji pada Tabel 45.

Tabel 45

Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I

No	Eselon I	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Setjen	12.336.586.223	12.445.738.924	(109.152.701)
2	Itjen	-	37.825.032	(37.825.032)
3	BPSDM	888.882	-	888.882
Jumlah		**12.337.475.105**	**12.483.563.956**	**(146.088.851)**

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp12.337.475.105,00 terdiri dari:

a) Piutang Bukan Pajak pada Eselon I Setjen sebesar Rp12.336.586.223,00 merupakan Piutang Biaya Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana sebesar Rp11.490.993.000,00 yang

terdiri dari Piutang Mahasiswa Program Magister sebesar Rp7.339.575.000,00 dan Program Doktor sebesar Rp4.151.418.000,00, Piutang Biaya Pendidikan Praja IPDN yang diberhentikan dari Tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar Rp844.767.819,00, serta Piutang Lainnya sebesar Rp825.404,00 yang merupakan Pengembalian Belanja Pegawai melalui Potongan SPM Pembayaran Gaji Bulan Juli Tahun 2026 yang SP2D-nya terbit di Bulan Juli pada IPDN Jatinangor; dan

b) Piutang Bukan Pajak pada Eselon I BPSDM sebesar Rp888.882,00 merupakan pembayaran sewa rumah dinas melalui mekanisme potongan SPM yang SP2D-nya terbit pada Bulan Juli sehingga saldo piutang lainnya yang berpentuk saat penerbitan SPP belum tereliminasi pada tanggal pelaporan yang terdapat pada Satker Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I.

Tabel 46

Mutasi Piutang Bukan Pajak per Jenis Transaksi

No	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	30 Juni 2026 (Rp)
	PIUTANG PNBP				
1	Pendapatan Pendidikan	12.445.738.924	-	(109.978.105)	12.335.760.819
	PIUTANG LAINNYA				
1	Pengembalian Belanja Pemeliharaan TA 2025 yang disetorkan pada TA 2026	37.825.032	-	(37.825.032)	-
2	Pengembalian Kelebihan Belanja Pegawai melalui mekanisme potongan SPM	-	825.404	-	825.404
3	Pembayaran Sewa melalui mekanisme potongan SPM	-	888.882	-	888.882
TOTAL PIUTANG BUKAN PAJAK		**12.483.563.956**	**1.714.286**	**(147.803.137)**	**12.337.475.105**

Penambahan sebesar Rp1.714.286,00 terdiri dari:

a) Pengakuan Piutang Lainnya sebesar Rp825.404,00 atas pengembalian kelebihan belanja pegawai yang dibayarkan melalui potongan SPM yang belum terbit SP2D sampai dengan tanggal pelaporan pada IPDN Jatinangor; dan

b) Pengakuan Piutang Lainnya sebesar Rp888.882,00 merupakan pembayaran sewa rumah dinas melalui mekanisme potongan SPM yang SP2D-nya terbit pada Bulan Juli sehingga saldo piutang lainnya yang berpentuk saat penerbitan SPP belum tereliminasi pada tanggal pelaporan pada Satker PPSDM Bukittinggi.

Pengurangan sebesar Rp147.803.137,00 berasal dari:

a) Pelunasan Piutang Biaya Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana Rp69.750.000,00 terdiri dari Program Magister Rp24.000.000,00 dan Program Doktor Rp45.750.000,00, serta Pelunasan Piutang Praja yang diberhentikan Tahun 2013

Rp18.917.525,00 pada IPDN Jatinangor;

b) Koreksi Pencatatan sebesar Rp21.310.580,00 atas Koreksi Piutang Praja yang diberhentikan Tahun 2009 pada IPDN Jatinangor; dan

c) Pelunasan Piutang Lainnya sebesar Rp37.825.032,00 atas setoran pengembalian kelebihan Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 yang disetorkan ke Kas Negara pada Tahun 2026 pada Itjen.

Tabel 47

Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak

No	ANGKATAN	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi+/- karena tagihan dan pembayaran tahun ini		Saldo per 30 Juni 2026 (Rp)
			Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	
1. SEKRETARIAT JENDERAL					
IPDN JATINANGOR					
1	XVII	242.650.000	-	-	242.650.000
2	XVIII	386.850.000	-	-	386.850.000
3	XIX	168.050.000	-	-	168.050.000
4	XX	276.950.000	-	-	276.950.000
5	XXI	860.375.000	-	-	860.375.000
6	XXII	445.925.000	-	-	445.925.000
7	XXIII	862.650.000	-	-	862.650.000
8	XXIV	261.625.000	-	-	261.625.000
9	XXV	436.250.000	-	-	436.250.000
10	XXVI	640.750.000	-	-	640.750.000
11	XXVII	273.750.000	-	-	273.750.000
12	XXVIII	407.000.000	-	-	407.000.000
13	XXIX	265.000.000	-	-	265.000.000
14	XXX	533.500.000	-	-	533.500.000
15	XXXI (I)	144.000.000	-	-	144.000.000
16	XXXI (II)	403.000.000	-	-	403.000.000
17	XXXII	201.750.000	-	-	201.750.000
18	XXXIII (I)	19.500.000	-	-	19.500.000
19	XXXIII (II)	29.500.000	-	-	29.500.000
20	XXXIV	11.500.000	-	-	11.500.000
21	XXXV	294.250.000	-	-	294.250.000
22	XXXVI	34.500.000	-	-	34.500.000
23	XXXVII	122.000.000	-	(13.750.000)	108.250.000
24	XXXVIII	20.750.000	-	(6.500.000)	14.250.000
25	XL	21.500.000	-	(3.750.000)	17.750.000
JUMLAH S2		**7.363.575.000**	**-**	**(24.000.000)**	**7.339.575.000**
1	S3-I	571.000.000	-	-	571.000.000
2	S3-II	377.750.000	-	-	377.750.000
3	S3-III	210.750.000	-	-	210.750.000
4	S3-IV	600.300.000	-	-	600.300.000
5	S3-IV (II)	18.750.000	-	-	18.750.000
6	S3-V (I)	344.993.000	-	(2.750.000)	342.243.000
7	S3- V (II)	229.250.000	-	-	229.250.000
8	S3- VI	237.750.000	-	-	237.750.000
9	S3- VII (I)	111.250.000	-	-	111.250.000
10	S3- VII (II)	208.500.000	-	-	208.500.000
11	S3-VIII	487.250.000	-	-	487.250.000
12	S3-IX	617.250.000	-	(33.500.000)	583.750.000
13	S3-X	145.000.000	-	-	145.000.000
14	S3-XI	37.375.000	-	(9.500.000)	27.875.000
JUMLAH S3		**4.197.168.000**	**-**	**(45.750.000)**	**4.151.418.000**
TOTAL PIUTANG PASCASARJANA		**11.560.743.000**	**-**	**(69.750.000)**	**11.490.993.000**
Piutang Praja		**884.995.924**	**-**	**(40.228.105)**	**844.767.819**
Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Pegawai		**-**	**825.404**	**-**	**825.404**
TOTAL PIUTANG SETJEN		**12.445.738.924**	**825.404**	**(109.978.105)**	**12.336.586.223**
2. INSPEKTORAT JENDERAL					
Pengembalian Belanja Pemeliharaan TA 2025		**37.825.032**	**-**	**- 37.825.032**	**-**
3. BPSDM					
Piutang Lainnya atas Sewa		**-**	**888.882**	**-**	**888.882**
TOTAL		**12.483.563.956**	**1.714.286**	**(147.803.137)**	**12.337.475.105**

Dari Piutang Biaya Pendidikan per 30 Juni 2026 pada IPDN Jatinangor sebesar Rp12.337.475.105,00, sebesar Rp11.190.520.747,00 atau 90,70% dari total piutang tersebut merupakan piutang dengan kualitas macet. Untuk mengelola dan menatausahakan piutang, IPDN telah membentuk tim penatausahaan piutang berdasarkan keputusan Rektor IPDN Nomor 500.10.28.1-30 tanggal 10 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penatausahaan Piutang Negara Bukan Pajak Sekolah Pascasarjana IPDN Tahun Anggaran 2025. Tim penatausahaan piutang pada Sekolah Pascasarjana IPDN telah menindaklanjuti rekomendasi KPKNL Bandung pada kegiatan asistensi PUPN dalam penyelesaian piutang dengan melakukan pemilahan atas Piutang Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Magister angkatan XVII s.d. XXXV dan Piutang Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Doktor angkatan I s.d V dengan hasil sebagai berikut:

a) Sebesar Rp4.775.075.000,00 merupakan Piutang yang timbul akibat dari kesalahan pencatatan administrasi. Terkait piutang ini belum diterbitkan koreksi atas surat tagihan Penerimaan Bukan Pajak dan/atau pembetulan atas dokumen pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

b) Sebesar Rp572.925.000,00 telah ditetapkan PPNTO oleh Direktur Sekolah Pasca Sarjana IPDN. Namun PPNTO tidak dapat diproses lebih lanjut untuk dilakukan usulan penghapusan secara bersyarat kepada Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Dalam Negeri, karena belum direviu oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri;

c) Sebesar Rp4.169.618.000,00 merupakan piutang yang dapat dilimpahkan penagihannya ke PUPN. Namun belum dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan KPKNL terkait pelimpahan penagihan piutang ke PUPN.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak
Rp11.598.166.073,00

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp11.598.166.073,00 dan Rp11.665.928.013,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan piutang tak tertagih PNBP terdapat pada IPDN Jatinangor.

Tabel 48

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

No	Angkatan	Total Piutang 30 Juni 2026 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)				Total Penyisihan 30 Juni 2026 (Rp)
			Macet	Diragukan	Kurang Lancar	Lancar	
SEKRETARIAT JENDERAL							
IPDN JATINANGOR							
1	XVII	242.650.000	242.650.000	-	-	-	242.650.000
2	XVIII	386.850.000	386.850.000	-	-	-	386.850.000
3	XIX	168.050.000	168.050.000	-	-	-	168.050.000
4	XX	276.950.000	276.950.000	-	-	-	276.950.000
5	XXI	860.375.000	860.375.000	-	-	-	860.375.000
6	XXII	445.925.000	445.925.000	-	-	-	445.925.000
7	XXIII	838.050.000	838.050.000	-	-	-	838.050.000
8	XXIV	286.225.000	286.225.000	-	-	-	286.225.000
9	XXV	436.250.000	436.250.000	-	-	-	436.250.000
10	XXVI	640.750.000	640.750.000	-	-	-	640.750.000
11	XXVII	273.750.000	273.750.000	-	-	-	273.750.000
12	XXVIII	407.000.000	407.000.000	-	-	-	407.000.000
13	XXIX	265.000.000	265.000.000	-	-	-	265.000.000
14	XXX	533.500.000	533.500.000	-	-	-	533.500.000
15	XXXI (I)	144.000.000	143.250.000	375.000	-	-	143.625.000
16	XXXI (II)	403.000.000	401.000.000	1.000.000	-	-	402.000.000
17	XXXII	201.750.000	186.250.000	-	1.550.000	-	187.800.000
18	XXXIII (I)	19.500.000	19.500.000	-	-	-	19.500.000
19	XXXIII (II)	29.500.000	12.000.000	-	1.750.000	-	13.750.000
20	XXXIV	11.500.000	11.500.000	-	-	-	11.500.000
21	XXXV	294.250.000	294.000.000	125.000	-	-	294.125.000
22	XXXVI	34.500.000	21.500.000	-	-	65.000	21.565.000
23	XXXVII	108.250.000	6.000.000	10.125.000	8.200.000	-	24.325.000
24	XXXVIII	14.250.000	6.500.000	625.000	650.000	-	7.775.000
25	XXXX	17.750.000	-	3.500.000	1.075.000	-	4.575.000
Jumlah S2		**7.339.575.000**	**7.162.825.000**	**15.750.000**	**13.225.000**	**65.000**	**7.191.865.000**
1	S3-I	571.000.000	571.000.000	-	-	-	571.000.000
2	S3-II	377.750.000	377.750.000	-	-	-	377.750.000
3	S3-III	210.750.000	210.750.000	-	-	-	210.750.000
4	S3-IV	600.300.000	582.550.000	8.625.000	50.000	-	591.225.000
5	S3-IV (II)	18.750.000	18.750.000	-	-	-	18.750.000
6	S3-V (I)	342.243.000	342.243.000	-	-	-	342.243.000
7	S3- V (II)	229.250.000	194.500.000	-	-	173.750	194.673.750
8	S3- VI	237.750.000	201.750.000	18.000.000	-	-	219.750.000
9	S3- VII (I)	111.250.000	111.250.000	-	-	-	111.250.000
10	S3- VII (II)	208.500.000	208.500.000	-	-	-	208.500.000
11	S3-VIII	487.250.000	450.250.000	16.750.000	-	17.500	467.017.500
12	S3-IX	583.750.000	-	284.500.000	1.475.000	-	285.975.000
13	S3-X	145.000.000	-	-	14.500.000	-	14.500.000
14	S3-XI	27.875.000	-	-	2.787.500	-	2.787.500
15	S3-XII	-	-	-	-	-	-
Jumlah S3		**4.151.418.000**	**3.269.293.000**	**327.875.000**	**18.812.500**	**191.250**	**3.616.171.750**
Jumlah Total Pascasarjana		**11.490.993.000**	**10.432.118.000**	**343.625.000**	**32.037.500**	**256.250**	**10.808.036.750**
Piutang Praja		**844.767.819**	**758.402.747**	**30.386.941**	**1.275.452**	**64.183**	**790.129.323**
Piutang Lainnya		**825.404**					**-**
BPSDM							
Piutang Lainnya		**888.882**	-	-	-	**-**	**-**
Total		**12.337.475.105**	**11.190.520.747**	**374.011.941**	**33.312.952**	**320.433**	**11.598.166.073**

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Rp368.768.795,00

C.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp368.768.795,00 dan Rp375.796.795,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 tersaji pada Tabel 49.

Tabel 49

Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I

No	Uraian	Eselon I	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	Bagian Lancar TGR	Setjen	368.768.795	375.796.795
Jumlah			**368.768.795**	**375.796.795**

Mutasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 30 Juni 2026 tersaji pada Tabel 50.

Tabel 50

Mutasi Bagian Lancar TP/TGR sampai dengan 30 Juni 2026

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2025	**375.796.795**
Mutasi Tambah (Penyesuaian Akhir Tahun 2025):	**368.768.795**
Reklasifikasi Masuk dari Piutang TP/TGR pada Setjen (IPDN Kampus Sulawesi Utara)	368.768.795
Mutasi Kurang (Jurnal Balik Awal Tahun):	**(375.796.795)**
Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR pada Setjen (IPDN Kampus Sulawesi Utara)	(375.796.795)
Saldo per 30 Juni 2026	**368.768.795**

Penjelasan mutasi Bagian Lancar TP/TGR sebagai berikut:

Transaksi penambahan sebesar Rp368.768.795,00 merupakan Reklasifikasi Masuk dari Piutang TP/TGR yang kemungkinan dapat diterima/diharapkan untuk diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang merupakan TGR atas kerugian negara berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2023 pada IPDN Kampus Sulawesi Utara.

Transaksi pengurangan sebesar Rp375.796.795,00 merupakan Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR atas jurnal balik awal tahun pada IPDN Kampus Sulawesi Utara.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR Rp1.843.844,00

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp1.843.844,00 dan Rp1.878.984,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan Piutang Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan TP/TGR terdapat pada Satker IPDN Kampus Sulawesi Utara.

Persediaan Rp456.955.990.978,00

C.10 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp456.955.990.978,00 dan Rp371.259.721.410,00.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 tersaji pada Tabel 51.

Tabel 51

Rincian Persediaan

Kode Perkiraan	Uraian	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)
I. Persediaan yang akan menjadi Beban Persediaan pada saat digunakan			
117111	Barang Konsumsi	4.657.028.757	3.505.124.319
117131	Bahan Baku	398.000	-
117199	Persediaan Lainnya	2.040.365.772	1.254.289.814
Total		**6.697.792.529**	**4.759.414.133**
II. Persediaan yang akan menjadi Beban Pemeliharaan pada saat digunakan			
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1.833.082.894	619.739.631
117114	Suku Cadang	64.506.275	81.679.487
Total		**1.897.589.169**	**701.419.118**
III. Persediaan yang akan menjadi Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	16.151.172.954	16.151.172.954
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	54.711.639.195	54.136.639.215
117125	Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	28.585.616.694	28.585.616.694
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	135.560.257.780	135.560.257.780
117127	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	123.155.315.370	121.569.579.244
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	62.521.847.674	8.196.420.722
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	27.674.759.613	1.599.201.550
Total		**448.360.609.280**	**365.798.888.159**
TOTAL PERSEDIAAN		**456.955.990.978**	**371.259.721.410**

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 per Unit Eselon I tersaji pada Tabel 52.

Tabel 52

Rincian Persediaan per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Setjen	5.352.153.513	8.229.987.946	(2.877.834.433)
2	Itjen	184.424.237	127.342.800	57.081.437
3	Ditjen Polpum	49.446.500	5.500.000	43.946.500
4	Ditjen Bina Adwil	75.948.468.243	39.977.444.163	35.971.024.080
5	Ditjen Pemdes	13.267.194.922	13.217.368.956	49.825.966
6	Ditjen Bina Bangda	302.955.484.200	302.779.465.018	176.019.182
7	Ditjen Otda	1.453.113.931	1.488.915.033	(35.801.102)
8	Ditjen Dukcapil	56.729.254.074	4.826.752.463	51.902.501.611
9	Ditjen Keuda	225.668.340	144.973.170	80.695.170
10	BSKDN	340.389.437	243.177.093	97.212.344
11	BPSDM	450.393.581	218.794.768	231.598.813
Jumlah		**456.955.990.978**	**371.259.721.410**	**85.696.269.568**

Rincian Persediaan per Satker disajikan pada **Lampiran VIII**.

Tabel 53

Mutasi Persediaan

Akun Persediaan	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 30 Juni 2026 (Rp)
Barang Konsumsi	3.505.124.319	6.790.250.406	5.638.345.968	4.657.028.757
Bahan untuk Pemeliharaan	619.739.631	2.138.742.394	925.399.131	1.833.082.894
Suku Cadang	81.679.487	343.303.912	360.477.124	64.506.275
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	16.151.172.954	-	-	16.151.172.954
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	54.136.639.215	574.999.980	-	54.711.639.195
Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	28.585.616.694	-	-	28.585.616.694
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	135.560.257.780	-	-	135.560.257.780
Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	121.569.579.244	10.537.421.307	8.951.685.181	123.155.315.370
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	8.196.420.722	197.461.097.312	143.135.670.360	62.521.847.674
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	1.599.201.550	26.075.558.063	-	27.674.759.613
Bahan Baku	-	130.517.438	130.119.438	398.000
Persediaan Lainnya	1.254.289.814	2.016.972.959	1.230.897.001	2.040.365.772
TOTAL	**371.259.721.410**	**246.068.863.771**	**160.372.594.203**	**456.955.990.978**

Rincian Jenis Transaksi Mutasi Persediaan per Eselon I disajikan pada **Lampiran IX**.

Rincian Jenis Transaksi Mutasi Persediaan per Akun disajikan pada **Lampiran X**.

Terdapat Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang tidak berada dalam penguasaan Kementerian Dalam Negeri berupa persediaan yang telah diserahterimakan kepada Pemda namun sampai dengan tanggal Neraca belum terbit SK Penghapusannya sebesar Rp9.404.985.187,00 yang terdiri dari sebesar Rp2.527.445.984,00 pada Ditjen Bina Adwil berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.395.007.844,00 dan Tanah Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.132.438.140,00, sebesar Rp1.878.957.364,00 pada Ditjen Bina Pemdes berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat, sebesar Rp4.990.853.839,00 pada Ditjen Bina Bangda berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat, sebesar Rp7.728.000,00 pada Ditjen Otda berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat dengan rincian terlampir pada **Lampiran XI**.

Transaksi Koreksi Nilai dan Kuantitas pada BSKDN merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan penginputan harga barang per unit dan kuantitas barang.

Transaksi Barang Usang merupakan transaksi dalam rangka mengeluarkan persediaan dengan kondisi using dari Neraca sebesar Rp3.011.935,00 yang terdapat pada:

a) IPDN Kampus Kalimantan Barat sebesar Rp117.260,00 berupa Obat-obatan; dan

b) IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp2.894.675,00 berupa Obat-obatan.

Transaksi Pencatatan Persediaan Tidak Dikuasai sebesar Rp413.834.680,00 merupakan penyelesaian saldo Persediaan Eks Satker Tugas Pembantuan yang telah dipindahkan ke Satker Pusat pada Ditjen Bina Pemdes terdiri dari Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat berupa Bangunan Pasar Desa dan Kantor Desa. Sampai dengan 30 Juni 2026 masih belum terbit SK Penghapusan atas persediaan-persediaan tersebut sehingga masih disajikan pada Daftar Persediaan Tidak Dikuasai.

Terdapat kesalahan penginputan BAST berupa pencatatan ganda yang telah dilanjutkan sampai dengan pendetailan melalui Transaksi Pembelian Barang Konsumsi sebesar Rp29.284.664,00 pada Ditjen Bina Pemdes. Atas kesalahan penginputan tersebut, Ditjen Bina Pemdes telah mengajukan *Void* BAST untuk menghapus BAST tersebut dan selanjutnya akan melakukan koreksi pencatatan atas Barang Konsumsi tersebut.

Terdapat saldo Persediaan Bahan Baku sebesar Rp398.000 pada DKPP yang terbentuk dari kesalahan pemilihan kodefikasi barang pada saat perekaman transaksi perolehan yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan untuk Pemeliharaan. Reklasifikasi ke Persediaan sesuai dengan substansinya akan dilakukan pada periode Juli 2026.

Tanah

Rp13.259.318.847.812,00

C.11 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp13.259.318.847.812,00 dan Rp13.259.318.847.812,00.

Rincian Tanah per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 per Unit Eselon I tersaji pada Tabel 54.

Tabel 54

Rincian Tanah per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Setjen	10.307.883.800.411	10.307.883.800.411	-
2	Itjen	142.267.725.000	142.267.725.000	-
3	Ditjen Pemdes	613.234.134.493	613.234.134.493	-
4	Ditjen Bina Bangda	479.054.657.019	479.054.657.019	-
5	Ditjen Dukcapil	35.098.225.956	35.098.225.956	-
6	BSKDN	224.894.826.500	224.894.826.500	-
7	BPSDM	1.456.885.478.433	1.456.885.478.433	-
Jumlah		**13.259.318.847.812**	**13.259.318.847.812**	**-**

Rincian Tanah per Satker disajikan pada **Lampiran XII**.

Peralatan dan Mesin Rp4.719.049.323.405,00

C.12 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp4.719.049.323.405,00 dan Rp4.639.205.845.247,00.

Rincian Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 55.

Tabel 55

Rincian Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Setjen	1.093.624.638.141	1.056.233.020.029	37.391.618.112
2	Itjen	29.584.970.807	26.437.852.827	3.147.117.980
3	Ditjen Polpum	23.430.566.749	19.041.914.546	4.388.652.203
4	Ditjen Bina Adwil	151.268.130.200	150.741.481.206	526.648.994
5	Ditjen Bina Pemdes	104.220.825.035	104.190.956.230	29.868.805
6	Ditjen Bina Bangda	77.441.251.514	68.715.386.757	8.725.864.757
7	Ditjen Otda	21.308.481.768	18.946.883.882	2.361.597.886
8	Ditjen Dukcapil	2.996.826.417.855	2.995.205.902.037	1.620.515.818
9	Ditjen Keuda	22.807.480.532	20.974.352.229	1.833.128.303
10	BSKDN	25.767.242.424	24.317.018.668	1.450.223.756
11	Badan PSDM	172.769.318.380	154.401.076.836	18.368.241.544
Jumlah		**4.719.049.323.405**	**4.639.205.845.247**	**79.843.478.158**

Rincian Peralatan dan Mesin per Satker disajikan pada **Lampiran XII**.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XIII**.

Tabel 56

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	**4.639.205.845.247**
Mutasi tambah:	**125.188.700.074**
Pembelian	114.125.220.156
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	9.504.534.462
Perolehan Lainnya	389.208.716
Transfer Masuk	1.169.736.740
Mutasi kurang:	**(45.345.221.916)**
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(75.677.833)
Transfer Keluar	(9.504.534.462)
Hibah Keluar	(3.775.955.000)
Koreksi Pencatatan	(354.629.996)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(31.634.424.625)
Saldo per 30 Juni 2026	**4.719.049.323.405**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(3.857.454.450.626)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	**861.594.872.779**

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

a) Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar

Rp114.125.220.156,00 terdiri dari sebesar Rp109.419.286.696,00 yang berasal dari Belanja Modal, sebesar Rp28.322.150,00 yangberasal dari Belanja Barang, dan sebesar Rp4.677.611.310,00 yang belum terbit SP2D.

Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per satker terdapat pada **Lampiran XIV**;

b) Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp1.169.736.740,00 terdiri dari sebesar Rp1.112.884.105,00 yang berasal dari Belanja Modal dan sebesar Rp56.852.635,00 yang belum terbit SP2D;

c) Transaksi penambahan dari Perolehan Lainnya sebesar Rp389.208.716,00 terdiri dari:

   i. Koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan penginputan kuantitas dan nilai barang per unit atas perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp354.629.996,00 pada Ditjen Polpum; dan
   ii. Koreksi untuk mencatat Peralatan dan Mesin yang tidak tercatat melalui transaksi pendetailan karena semula tercatat sebagai beban operasional lainnya sebesar Rp34.578.720,00 pada Setjen;

d) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp9.504.534.462,00 terdapat pada Itjen sebesar Rp1.636.667.257,00, Ditjen Polpum sebesar Rp1.013.013.755,00, Ditjen Bina Bangda sebesar Rp1.263.623.253,00, Ditjen Otda sebesar Rp1.226.183.686,00, Ditjen Bina Keuda sebesar Rp1.231.618.755,00, BSKDN sebesar Rp1.450.223.756,00, dan BPSDM sebesar Rp1.683.204.000,00 berupa Televisi yang diterima dari Setjen;

e) Transaksi pengurangan dari Koreksi Nilai Berkurang sebesar Rp75.677.833,00 merupakan koreksi nilai aset dalam rangka tindak lanjut setoran pengembalian atas temuan Belanja Modal TAYL yang menjadi Aset yang terdapat pada Ditjen Polpum sebesar Rp30.598.570,00 dan IPDN Jatinangor sebesar Rp45.079.263,00;

f) Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp9.504.534.462,00 terdapat Setjen atas Transfer Peralatan dan Mesin berupa Televisi kepada Itjen sebesar Rp1.636.667.257,00, Ditjen Polpum sebesar Rp1.013.013.755,00, Ditjen Bina Bangda sebesar Rp1.263.623.253,00, Ditjen Otda sebesar Rp1.226.183.686,00, Ditjen Bina Keuda sebesar Rp1.231.618.755,00, BSKDN sebesar Rp1.450.223.756,00, dan BPSDM sebesar Rp1.683.204.000,00;

g) Transaksi pengurangan dari Hibah Keluar sebesar

Rp3.775.955.000,00 terdapat pada Setjen;

h) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp354.629.996,00 merupakan koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan penginputan kuantitas dan nilai barang per unit atas perolehan Peralatan dan Mesin Tahun pada Ditjen Polpum;

i) Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp31.634.424.625,00 terdapat pada:

   i. Setjen sebesar Rp26.432.052.421,00;

   ii. DKPP sebesar Rp1.292.632.294,00;

   iii. IPDN Jatinangor sebesar Rp1.400.382.410,00;

   iv. Itjen sebesar Rp897.300.000,00;

   v. Ditjen Bina Adwil sebesar Rp589.600.000,00;

   vi. Balai Pemdes Yogyakarta sebesar Rp393.207.500,00; dan

   vii. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II sebesar Rp629.250.000,00.

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari realisasi belanja tahun anggaran berjalan disajikan pada Tabel 57.

Tabel 57

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Uraian	Nilai (Rp)	Asal Transaksi (Rp)					Keterangan
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kode Akun 532xxx)	Belanja Modal Selain Akun 532xxx	Belanja Barang	Tindak Lanjut Koreksi Kesalahan Perekaman TAB	Transaksi Lainnya	
1. Pencatatan Secara Langsung Menjadi Peralatan dan Mesin							
Pembelian (Mutasi tambah)	114.125.220.156	109.387.635.696	31.651.000	28.322.150		4.677.611.310	Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.677.611.310,00 belum terbit SP2D
Koreksi Pencatatan (Mutasi kurang)	(354.629.996)	-	-	-	(354.629.996)	-	Transaksi Pembelian sebesar dikoreksi sebesar Rp354.629.996,00 untuk memperbaiki kesalahan pencatatan kuantitas dan nilai per unit Peralatan dan Mesin
Pengembangan Nilai Aset (Langsung) (Mutasi tambah)	1.169.736.740	1.112.884.105			-	56.852.635	Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp56.852.635,00 belum terbit SP2D
Subtotal		***110.500.519.801***	***31.651.000***	***28.322.150***			
2. Pencatatan Tidak Secara Langsung Menjadi Peralatan dan Mesin							
Perolehan Lainnya (Mutasi tambah)	389.208.716	34.578.720			354.629.996	-	Perolehan Lainnya terdiri dari: 1. Koreksi untuk mencatat Peralatan dan Mesin yang semula dicatat sebagai Belanja Barang yang kemudian dilakukan Koreksi SPM menjadi Belanja Modal sebesar Rp34.578.720,00 2. Koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan pencatatan kuantitas dan nilai per unit sebesar Rp354.629.996,00
Subtotal		***34.578.720***	-	-			
Total		***110.535.098.521***	***31.651.000***	***28.322.150***			

Rincian perhitungan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdapat pada Tabel 58.

Tabel 58

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Berasal dari Realisasi Belanja

Uraian Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Peralatan dan Mesin		**110.535.098.521**
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak menjadi Peralatan dan Mesin		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Jaringan	*257.453.400*	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tetap Lainnya	*32.190.000*	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi KDP	*4.704.402.000*	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Ekstrakomptabel	*168.910.923*	
Subtotal		**5.162.956.323**
Perhitungan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin		**115.698.054.844**
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA (532xxx)		**115.698.054.844**
Selisih		**-**

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 sebesar Rp4.639.205.845.247,00 tersebut diantaranya terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp31.412.042.896,00. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri mengungkap adanya peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya, yaitu atas LHP LK Tahun 2022 pada tiga satker sebesar Rp2.525.519.691,00 dan Tahun 2023 pada 12 satker sebesar Rp28.886.523.205,00.

Gedung dan Bangunan Rp2.966.603.180.955,00

C.13 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp2.966.603.180.955,00 dan Rp2.939.685.514.821,00. Rincian Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 59.

Tabel 59

Rincian Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I

No	Eselon I	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5=(3-4)**
1	Setjen	2.134.166.600.865	2.108.572.437.456	25.594.163.409
2	Itjen	46.320.276.833	45.925.502.780	394.774.053
3	Ditjen Bina Adwil	1.576.390.000	1.576.390.000	-
4	Ditjen Bina Pemdes	189.538.780.982	189.538.780.982	-
5	Ditjen Bina Bangda	106.281.567.163	105.804.494.380	477.072.783
6	Ditjen Dukcapil	36.606.283.783	36.606.283.783	-
7	BSKDN	32.971.251.829	32.971.251.829	-
8	BPSDM	419.142.029.500	418.690.373.611	451.655.889
Jumlah		**2.966.603.180.955**	**2.939.685.514.821**	**26.917.666.134**

Rincian Gedung dan Bangunan per Satker disajikan pada **Lampiran XII**.

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XV**.

Tabel 60

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	**2.939.685.514.821**
Mutasi tambah:	**27.372.425.844**
Pembelian	375.808.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	25.088.664.237
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	770.666.229
Pengembangan Melalui KDP	1.137.287.378
Mutasi kurang:	**(454.759.710)**
Koreksi Susulan	(343.471.931)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(111.287.779)
Saldo per 30 Juni 2026	**2.966.603.180.955**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(681.889.478.545)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	**2.284.713.702.410**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

a) Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar Rp375.808.000,00 terdapat pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II berasal dari realisasi Belanja Modal;

b) Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp25.088.664.237,00 terdiri dari sebesar Rp21.122.352.258,00 yang berasal dari realisasi belanja modal, dan sebesar Rp3.966.311.979,00 belum terbit SP2D;

c) Transaksi penambahan dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp770.666.229,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar;

d) Transaksi penambahan dari Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp1.137.287.378,00 terdapat pada IPDN Kampus Sulsel;

e) Transaksi pengurangan dari Koreksi Susulan sebesar Rp343.471.931,00 merupakan Koreksi Nilai Aset dalam rangka tindak lanjut setoran pengembalian atas temuan Belanja Modal TAYL yang menjadi Aset yang terdapat pada Setjen sebesar Rp19.955.820,00, pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III sebesar Rp213.199.759,00, dan BPSDM sebesar Rp110.316.352,00

f) Transaksi pengurangan dari Koreksi Nilai Berkurang sebesar

Rp111.287.779,00 yang merupakan Koreksi Nilai Aset dalam rangka tindak lanjut setoran pengembalian atas temuan Belanja Modal TAYL yang menjadi Aset yang terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp87.177.459,00 dan IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp24.110.320,00.

Tabel 61

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Uraian	Nilai (Rp)	Asal Transaksi (Rp)					Keterangan
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Kode Akun 533xxx)	Belanja Modal Selain Akun 533xxx	Belanja Barang	Tindak Lanjut Koreksi Kesalahan Perekaman TAB	Transaksi Lainnya	
1. Pencatatan Secara Langsung Menjadi Gedung dan Bangunan							
Pembelian (Mutasi tambah)	375.808.000	375.808.000				-	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung) (Mutasi tambah)	25.088.664.237	21.122.352.258	-	-		3.966.311.979	Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.966.311.979,00 belum terbit SP2D
Subtotal		***21.498.160.258***	-	-			
2. Pencatatan Tidak Secara Langsung Menjadi Gedung dan Bangunan							
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Mutasi tambah)	770.666.229	633.911.382	-	-	-	136.754.847	Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp136.754.847,00 belum terbit SP2D
Pengembangan Melalui KDP (Mutasi tambah)	1.137.287.378	878.935.703	-	-	-	258.351.675	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp258.351.675,00
Subtotal		***1.512.847.085***	-	-			
Total		***23.011.007.343***	-	-			

Rincian perhitungan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdapat pada Tabel 62.

Tabel 62

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Berasal dari Realisasi Belanja

Uraian Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menjadi Gedung dan Bangunan		**23.011.007.343**
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak menjadi Gedung dan Bangunan		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi ATR	*90.337.300*	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi KDP	*10.874.970.319*	
Subtotal		**10.965.307.619**
Perhitungan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan		**33.976.314.962**
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA (533xxx)		**33.976.314.962**
Selisih		**-**

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp296.510.271.226,00

C.14 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp296.510.271.226,00 dan Rp295.425.617.843,00.

Rincian Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 63.

Tabel 63

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan) (Rp)
1	Setjen	250.311.379.737	250.139.405.354	171.974.383
2	Ditjen Bina Adwil	11.245.442.670	11.245.442.670	-
3	Ditjen Pemdes	3.058.859.874	3.058.859.874	-
4	Ditjen Bina Bangda	4.437.609.690	4.437.609.690	-
5	Ditjen Dukcapil	2.863.933.000	2.863.933.000	-
6	BSKDN	505.733.100	505.733.100	-
7	BPSDM	24.087.313.155	23.174.634.155	912.679.000
Jumlah		**296.510.271.226**	**295.425.617.843**	**1.084.653.383**

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Satker disajikan pada **Lampiran XII**.

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XVI**.

Tabel 64

Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	**295.425.617.843**
Mutasi tambah:	**1.170.132.400**
Pembelian	655.459.400
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	514.673.000
Mutasi kurang:	**(85.479.017)**
Koreksi Susulan	(85.479.017)
Saldo per 30 Juni 2026	**296.510.271.226**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(173.775.459.410)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	**122.734.811.816**

Penjelasan transaksi mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

a) Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar Rp655.459.400,00 berasal dari Realisasi Belanja Modal;

b) Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp514.673.000,00 dari Realisasi Belanja Modal; dan

c) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp85.479.017,00 terdapat pada IPDN Jatinangor atas koreksi nilai aset dalam rangka tindak lanjut setoran pengembalian atas temuan Belanja Modal TAYL yang menjadi aset.

Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari realisasi belanja tahun anggaran berjalan disajikan pada Tabel 70.

Tabel 65

Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Uraian	Nilai (Rp)	Asal Transaksi (Rp)					Keterangan
		Belanja Modal JIJ (Kode Akun 534xxx)	Belanja Modal Selain Akun 534xxx	Belanja Barang	Tindak Lanjut Koreksi Kesalahan Perekaman TAB	Transaksi Lainnya	
1. Pencatatan Secara Langsung Menjadi Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan							
Pembelian (Mutasi tambah)	655.459.400	398.006.000	257.453.400	-	-	-	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung) (Mutasi tambah)	514.673.000	514.673.000	-	-	-	-	
Subtotal		***912.679.000***	***257.453.400***	**-**			
2. Pencatatan Tidak Secara Langsung Menjadi Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan							
-							
Subtotal		-	-	-			
Total		***912.679.000***	***257.453.400***	**-**			

Rincian perhitungan realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan terdapat pada Tabel 66.

Tabel 66

Rincian Perhitungan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	
Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang menjadi Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan		**912.679.000**
Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak menjadi Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan		
Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang menjadi KDP	*96.493.750*	
Subtotal		**96.493.750**
Perhitungan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan		**1.009.172.750**
Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan pada LRA (534xxx)		**1.009.172.750**
Selisih		**-**

Aset Tetap Lainnya

Rp81.168.898.267,00

C.15 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp81.168.898.267,00 dan Rp80.846.861.744,00 merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 67.

Tabel 67

Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I

No	Eselon I	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	31.869.068.531	31.579.222.008	289.846.523
2	Ditjen Polpum	32.190.000	-	32.190.000
3	Ditjen Bina Adwil	17.686.224.808	17.686.224.808	-
4	Ditjen Pemdes	13.467.763.830	13.467.763.830	-
5	Ditjen Bina Bangda	4.951.568.889	4.951.568.889	-
6	Ditjen Dukcapil	7.667.328.361	7.667.328.361	-
7	Ditjen Keuda	2.011.421.358	2.011.421.358	-
8	BSKDN	517.106.736	517.106.736	-
9	BPSDM	2.966.225.754	2.966.225.754	-
Jumlah		**81.168.898.267**	**80.846.861.744**	**322.036.523**

Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker disajikan pada **Lampiran XII**.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XVII**.

Tabel 68

Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	**80.846.861.744**
Mutasi tambah:	**492.054.505**
Pembelian	459.864.505
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	32.190.000
Mutasi kurang:	**(170.017.982)**
Penghentian Aset dari Penggunaan	(170.017.982)
Saldo per 30 Juni 2026	**81.168.898.267**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(8.284.395.972)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	**72.884.502.295**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

a) Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar Rp459.864.505,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp90.337.300,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp189.944.800,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp89.672.405,00, dan IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp89.910.000,00 yang berasal dari Belanja Modal;

b) Transaksi penambahan dari Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp32.190.000,00 terdapat pada Ditjen Polpum; dan

c) Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp170.017.982,00 terdapat pada Setjen.

Mutasi Aset Tetap Lainnya yang berasal dari realisasi belanja tahun anggaran berjalan disajikan pada Tabel 69.

Tabel 69

Mutasi Aset Tetap Lainnnya yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Uraian	Nilai (Rp)	Asal Transaksi (Rp)					Keterangan
		Belanja Modal Lainnya (Kode Akun 536xxx) yang Menjadi ATL	Belanja Modal Selain Akun 536xxx yang Menjadi ATL	Belanja Barang	Tindak Lanjut Koreksi Kesalahan Perekaman TAB	Transaksi Lainnya	
1. Pencatatan Secara Langsung Menjadi Aset Tetap Lainnya							
Pembelian (Mutasi tambah)	459.864.505	369.527.205	90.337.300	-	-	-	
Subtotal		*369.527.205*	*90.337.300*	-			
2. Pencatatan Tidak Secara Langsung Menjadi Aset Tetap Lainnya							
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Mutasi tambah)	32.190.000		32.190.000				
Subtotal		-	*32.190.000*	-			
Total		*369.527.205*	*122.527.300*	-			

Rincian perhitungan realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi Aset Tetap Lainnya terdapat pada Tabel 70.

Tabel 70

Rincian Perhitungan Realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi Aset Tetap Lainnya

Uraian Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	
Realisasi Belanja Modal Lainnya yang menjadi ATL		**369.527.205**
Realisasi Belanja Modal Lainnya yang tidak menjadi ATL		
Belanja Modal Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin	*31.651.000*	
Belanja Modal Lainnya menjadi ATB Dalam Pengerjaan	*59.999.940*	
Belanja Modal Lainnya menjadi ATB	*5.335.661.998*	
Subtotal		**5.427.312.938**
Perhitungan Realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi ATL		**5.796.840.143**
Realisasi Belanja Modal Lainnya pada LRA (536xxx)		**5.796.840.143**
Selisih		**-**

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp70.635.129.685,00

C.16 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp70.635.129.685,00 dan Rp19.373.327.423,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 71.

Tabel 71

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	24.484.400.973	19.348.330.223	5.136.070.750
2	Ditjen Bina Adwil	4.704.402.000	-	4.704.402.000
3	Ditjen Bina Pemdes	24.997.200	24.997.200	-
4	Ditjen Dukcapil	34.571.325.713	-	34.571.325.713
5	BPSDM	6.850.003.799	-	6.850.003.799
Jumlah		**70.635.129.685**	**19.373.327.423**	**51.261.802.262**

Rincian Mutasi KDP per Unit Eselon I terdapat pada Lampiran **XVIII.**

Rincian KDP per Satker disajikan pada **Lampiran XIX**.

Tabel 72

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

ESELON I	SATKER	URAIAN	NILAI (Rp)
Setjen	Setjen (403200)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	99.021.990
	IPDN Jatinangor (448302)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	687.480.617
	IPDN Kampus Sulut (677010)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	82.370.824
		Jalan Dalam Pengerjaan	96.493.750
	IPDN Kampus Sumbar (677045)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	932.423.670
	IPDN Kampus Kalbar (683070)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	20.615.135.645
	IPDN Kampus Papua (683091)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1.971.474.477
Jumlah Setjen			**24.484.400.973**
Ditjen Bina Adwil	Ditjen Bina Adwil (027486)	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	4.704.402.000
Jumlah Ditjen Bina Adwil			**4.704.402.000**
Ditjen Bina Pemdes	Ditjen Bina Pemdes (027753)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	24.997.200
Jumlah Ditjen Bina Pemdes			**24.997.200**
Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil (634082)	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	34.571.325.713
Jumlah Ditjen Bina Pemdes			**34.571.325.713**
BPSDM	Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II (403216)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1.662.759.067
	Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III (027114)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1.042.432.100
	Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV (027177)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1.414.382.943
	Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan (506138)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2.730.429.689
Jumlah BPSDM			**6.850.003.799**
JUMLAH KESELURUHAN			**70.635.129.685**

Tabel 73

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	**19.373.327.423**
Mutasi tambah:	**53.820.439.332**
Perolehan Penambahan KDP	37.906.717.882
Pengembangan KDP	15.295.227.987
Koreksi Nilai KDP Bertambah	568.643.689
Reklasifikasi Masuk KDP	49.849.774
Mutasi kurang:	**(2.558.637.070)**
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(802.856.229)
Pengembangan Melalui KDP	(1.137.287.378)
Reklasifikasi Keluar KDP	(49.849.774)
Koreksi Pencatatan KDP	(568.643.689)
Saldo per 30 Juni 2026	**70.635.129.685**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan KDP sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan dari Perolehan Penambahan KDP sebesar Rp37.906.717.882,00 terdapat pada:
   i. Setjen sebesar Rp99.021.990,00;
   ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp588.427.617,00;
   iii. IPDN Kampus Sulut sebesar Rp37.267.884,00;
   iv. IPDN Kampus Sulsel sebesar Rp878.935.703,00;
   v. IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp120.125.533,00;
   vi. IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp121.323.000,00;
   vii. IPDN Kampus Papua sebesar Rp1.971.474.477,00;
   viii. Ditjen Polpum sebesar Rp32.190.000,00;
   ix. Ditjen Bina Adwil sebesar Rp4.704.402.000,00;
   x. Ditjen Dukcapil sebesar Rp24.199.928.000,00;
   xi. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II sebesar Rp105.981.000,00;
   xii. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III sebesar Rp1.042.432.100,00;
   xiii. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV sebesar Rp1.274.778.889,00; dan
   xiv. Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan sebesar Rp2.730.429.689,00.

b) Transaksi penambahan dari Pengembangan KDP sebesar Rp15.295.227.987,00 terdapat pada:

i. IPDN Jatinangor sebesar Rp99.053.000,00;

ii. IPDN Kampus Sulut sebesar Rp141.596.690,00;

iii. IPDN Kampus Sulsel sebesar Rp258.351.675,00;

iv. IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp812.298.137,00;

v. IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp1.916.148.651,00;

vi. Ditjen Dukcapil sebesar Rp10.371.397.713,00;

vii. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III sebesar Rp139.604.054,00; dan

viii. Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan sebesar Rp1.556.778.067,00.

c) Transaksi Penambahan dari Koreksi Nilai KDP Bertambah sebesar Rp568.643.689,00 terdapat pada IPDN Kampus Sulsesl yang merupakan koreksi atas kesalahan penginputan kuantitas KDP pada saat pendetailan;

d) Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Masuk KDP sebesar Rp49.849.774,00 terdapat pada IPDN Kampus Sulut sebesar Rp17.659.774,00 dan Ditjen Polpum sebesar Rp32.190.000,00;

e) Transaksi Pengurangan dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp802.856.229,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp770.666.229,00 dan Ditjen Polpum sebesar Rp32.190.000,00;

f) Transaksi Pengurangan dari Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp1.137.287.378,00 terdapat pada IPDN Kampus Sulsel;

g) Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi Keluar KDP sebesar Rp49.849.774,00 terdapat pada IPDN Kampus Sulut sebesar Rp17.659.774,00 dan Ditjen Polpum sebesar Rp32.190.000,00;

h) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan KDP sebesar Rp568.643.689,00 terdapat pada IPDN Kampus Sulsel yang merupakan koreksi atas kesalahan penginputan kuantitas KDP pada saat pendetailan.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari realisasi belanja tahun anggaran berjalan disajikan pada Tabel 74.

Tabel 74

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Berasal dari Realisasi Belanja

Tahun Anggaran Berjalan

Uraian	Nilai (Rp)	Asal Transaksi (Rp)							Keterangan
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kode Akun 532xxx)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Kode Akun 533xxx)	Belanja Modal JIJ (Kode Akun 534xxx)	Belanja Modal Lainnya (Kode Akun 536xxx)	Transaksi KDP yang Berasal dari Realisasi Belanja	Tindak Lanjut Koreksi Kesalahan Perekaman TAB	Transaksi Lainnya	
Pencatatan KDP dari Realisasi Belanja									
Perolehan/Penambahan KDP (Mutasi Tambah)	37.906.717.882	4.736.592.000	7.992.166.708	17.659.774	-	12.746.418.482		25.160.299.400	Terdapat Perolehan KDP sebesar Rp960.371.400,00 yang belum terbit SP2D dan sebesar Rp24.199.928.000,00 merupakan perolehan KDP dengan mekanisme RPATA yang Belanjanya telah direalisasikan pada TAYL namun Aset baru dicatat pada Tahun 2026 karena pekerjaan selesai pada Tahun 2026
Pengembangan KDP (Mutasi Tambah)	15.295.227.987		4.395.650.696	78.833.976	-	4.474.484.672		10.820.743.315	Terdapat Pengembangan KDP sebesar Rp449.345.602,00 yang belum terbit SP2D dan sebesar Rp10.371.397.713,00 merupakan perolehan KDP dengan mekanisme RPATA yang Belanjanya telah direalisasikan pada TAYL namun Aset baru dicatat pada Tahun 2026 karena pekerjaan selesai pada Tahun 2026
Subtotal		***4.736.592.000***	***12.387.817.404***	***96.493.750***	-	***17.220.903.154***			
Pencatatan Aset Tetap Definitif dari KDP									
Uraian	**Nilai (Rp)**	**Transaksi KDP yang Berasal dari Realisasi Belanja (Rp)**					**Transaksi Lainnya (Rp)**		**Keterangan**
		Peralatan dan Mesin	**Gedung dan Bangunan**	**Aset Tetap Lainnya**	**Aset Tetap Lainnya**	**Total**			
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Mutasi Kurang)	802.856.229	-	633.911.382	-	32.190.000	666.101.382	136.754.847		Belum terbit SP2D
Pengembangan Melalui KDP (Mutasi Kurang)	1.137.287.378	-	878.935.703	-	-	878.935.703	258.351.675		Belum terbit SP2D
Subtotal		-	***1.512.847.085***	-	***32.190.000***	***1.545.037.085***			
Selisih Pencatatan KDP yang Berasal dari Realisasi Belanja dengan Pencatatan Aset Tetap Definitif		***4.736.592.000***	***13.900.664.489***	***96.493.750***	***32.190.000***	***18.765.940.239***			

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp4.721.403.784.553,00

C.17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp4.721.403.784.553,00 dan Rp4.523.688.502.856,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Satker disajikan pada **Lampiran XII**.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 tersaji pada Tabel 75.

Tabel 75

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5=(3-4)**
1	Peralatan dan Mesin	4.719.049.323.405	(3.857.454.450.626)	861.594.872.779
2	Gedung dan Bangunan	2.966.603.180.955	(681.889.478.545)	2.284.713.702.410
3	Jalan dan Jembatan	77.721.675.554	(62.605.329.030)	15.116.346.524
4	Irigasi	48.042.810.642	(32.937.281.707)	15.105.528.935
5	Jaringan	170.745.785.030	(78.232.848.673)	92.512.936.357
6	Aset Tetap Lainnya	81.168.898.267	(8.284.395.972)	72.884.502.295
Jumlah		**8.063.331.673.853**	**(4.721.403.784.553)**	**3.341.927.889.300**

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp17.850.089.235,00

C.18 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp17.850.089.235,00 dan Rp17.850.089.235,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 tersaji pada Tabel 76.

Tabel 76

Rincian Piutang TP/TGR per Eselon I

No	Eselon I	Per 30 Juni 2026 (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Ditjen Polpum	17.850.089.235	17.850.089.235	-
Jumlah		**17.850.089.235**	**17.850.089.235**	**-**

Mutasi tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2026 tersaji pada Tabel 77.

Tabel 77

Mutasi Tagihan TP/TGR sampai dengan 30 Juni 2026

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2025	**17.850.089.235**
Mutasi Tambah:	**375.796.795**
Reklasifikasi awal tahun dari Bagian Lancar Piutang TGR pada Setjen (IPDN Kampus Sulut)	375.796.795
Mutasi Kurang:	**(375.796.795)**
Pembayaran Tagihan Piutang TGR pada Setjen (IPDN Kampus Sulut)	(375.796.795)
Saldo per 30 Juni 2026	**17.850.089.235**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

a) Transaksi penambahan pada Setjen sebesar Rp300.680.096,00 Transaksi penambahan pada Setjen sebesar Rp375.796.795,00 berasal dari reklasifikasi masuk dari Bagian Lancar Piutang TP/TGR melalui jurnal balik awal tahun atas pengakuan Bagian Lancar Piutang TP/TGR pada Tahun 2026 pada IPDN Kampus Sulut; dan

b) Transaksi pengurangan pada IPDN Kampus Sulut sebesar Rp375.796.795,00 terdiri dari pembayaran Piutang TGR yang

diakui pada Tahun Anggaran 2024 atas temuan pemeriksaan BPK RI pada Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2024.

Terdapat Piutang berupa Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan pada Itjen sebesar Rp492.890.339,00 yang tidak dapat ditagihkan sejak bulan April 2017 telah diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Surat Sekretaris Jenderal yang ditandatangani Kepala Biro Keuangan dan Aset Nomor 956/181/SJ tanggal 10 Januari 2019 hal penyerahan Pengurusan Piutang Negara. Berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-01/PUPNC.10.03/2019 tanggal 11 Januari 2019 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, maka kepengurusan piutang tersebut telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III. Selanjutnya berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor PSBDT-71/PUPNC.10.03/2021 tanggal 11 November 2021 hal Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, maka kepengurusan piutang tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih. Kemendagri telah mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan piutang negara bersyarat melalui Surat Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 953/6675/SJ tanggal 30 November 2021 hal Permohonan Rekomendasi Penghapusan Piutang Negara Bersyarat yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Utama Binbangkum PKN BPK RI. Berdasarkan Surat Wakil Ketua BPK RI Nomor 46/S/II/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 hal Rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara atas Nama Sdri. EI, dinyatakan bahwa BPK RI telah menyetujui permohonan rekomendasi penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama Sdri. EI. Menteri Keuangan telah menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KM.6/2023 tanggal 11 September 2023. Atas dasar Keputusan Menteri Keuangan tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama Sdri. EI. dengan menghapuskan piutang negara tersebut dari pembukuan Inspektorat Jenderal. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan usulan penghapusan secara mutlak melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor x.900/81/SJ tanggal 31 Oktober 2025 hal Penyampaian Usulan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara a.n. EI kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Berdasarkan surat tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/MK/KN/2026 tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara pada Kementerian Dalam Negeri atas nama EI pada tanggal 10 Februari 2026, sehingga Inspektorat Jenderal melakukan penghapusan mutlak atas piutang tersebut.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan pada Ditjen Polpum sebesar Rp17.850.089.235,00 yang tidak dapat ditagihkan sejak bulan Januari 2012 telah diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tanggal 16 September 2020 hal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara. Berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-21/PUPNC.10.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, maka kepengurusan piutang tersebut telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III.

Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp17.850.089.235,00

C.19 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp17.850.089.235,00 dan Rp17.850.089.235,00. Penyisihan piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel 78

Rincian Penyisihan Piutang TP/TGR per Eselon I

No	Komponen	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)
1	Ditjen Polpum	Macet	1	17.850.089.235	17.850.089.235
Total			**1**	**17.850.089.235**	**17.850.089.235**

Aset Tak Berwujud Rp807.621.463.041,00

C.20 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp807.621.463.041,00 dan Rp801.986.445.593,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel 79

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026

No	Uraian	Nilai per 30 Juni 2026 (Rp)	Nilai per 31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	*Software*	709.224.505.413	756.371.780.413	(47.147.275.000)
2	Lisensi	93.841.674.278	69.533.433.080	24.308.241.198
3	Hasil Kajian/Penelitian	2.271.764.600	2.271.764.600	-
4	ATB Lainnya	2.283.518.750	2.333.403.750	(49.885.000)
Total Nilai Perolehan		**807.621.463.041**	**830.510.381.843**	**(22.888.918.802)**
Nilai Amortisasi ATB		(678.671.821.247)	(700.427.422.558)	21.755.601.311
Total Nilai Buku per 30 Juni 2026		**128.949.641.794**	**130.082.959.285**	**(1.133.317.491)**

Rincian Aset Tak Berwujud menurut Eselon I per 31 Desember 2025 tersaji pada Tabel 80.

Tabel 80

Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I

No	ESELON I	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5=(3-4)**
1	Setjen	126.661.161.787	122.461.268.939	4.199.892.848
2	Itjen	1.145.474.320	1.145.474.320	-
3	Ditjen Polpum	8.313.499.230	8.313.499.230	-
4	Ditjen Bina Adwil	3.758.937.210	3.758.937.210	-
5	Ditjen Bina Pemdes	17.583.975.880	17.583.975.880	-
6	Ditjen Bina Bangda	708.280.140	708.280.140	-
7	Ditjen Otda	3.812.370.550	2.487.407.950	1.324.962.600
8	Ditjen Dukcapil	637.227.612.447	637.217.400.447	10.212.000
9	Ditjen Bina Keuda	1.353.050.103	1.353.050.103	-
10	BSKDN	3.911.113.931	3.811.163.931	99.950.000
11	Badan PSDM	3.145.987.443	3.145.987.443	-
Jumlah		**807.621.463.041**	**801.986.445.593**	**5.635.017.448**

Rincian Aset Tak Berwujud per Satker disajikan pada **Lampiran XX**.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXI**.

Tabel 81

Mutasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	**801.986.445.593**
Mutasi tambah:	**6.959.980.048**
Pembelian	288.789.000
Pengembangan Nilai Aset	5.346.228.448
Transfer Masuk	1.324.962.600
Mutasi Kurang:	**(1.324.962.600)**
Transfer Keluar	(1.324.962.600)
Saldo per 30 Juni 2026	**807.621.463.041**
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2026	(678.671.821.247)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	**128.949.641.794**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

a) Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar Rp288.789.000,00 terdapat pada Setjen sebesar Rp89.577.000,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp189.000.000,00, dan Ditjen Dukcapil sebesar Rp10.212.000,00;

b) Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp5.346.228.448,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp5.246.278.448,00 atas *Software* Komputer sebesar Rp5.211.449.998,00 serta perpanjangan Lisensi *Website* PPID Kemendagri sebesar Rp34.828.450,00 dan BSKDN sebesar Rp99.950.000,00 yang berasal dari Belanja Modal;

c) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp1.324.962.600,00 terdapat pada Ditjen Otda berupa *Software* Komputer; dan

d) Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp1.324.962.600,00 terdapat pada Setjen Pusat.

Mutasi Aset Tak Berwujud yang berasal dari realisasi belanja tahun anggaran berjalan disajikan pada Tabel 82.

Tabel 82

Mutasi Aset Tak Berwujud yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Uraian	Nilai (Rp)	Asal Transaksi (Rp)					Keterangan
		Belanja Modal Lainnya (Kode Akun 536xxx) yang Menjadi ATB	Belanja Modal Selain Akun 536xxx yang Menjadi ATB	Belanja Barang	Tindak Lanjut Koreksi Kesalahan Perekaman TAB	Transaksi Lainnya	
1. Pencatatan Secara Langsung Aset Tak Berwujud							
Pembelian (Mutasi tambah)	288.789.000	199.212.000	-	-	-	89.577.000	Pembelian Aset Tak Berwujud sebesar Rp89.577.000,00 belum terbit SP2D
Pengembangan Nilai Aset (Langsung) (Mutasi tambah)	5.346.228.448	5.136.449.998	-	-	-	209.778.450	Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp209.778.450,00 belum terbit SP2D
Subtotal		*5.335.661.998*	-	-			
2. Pencatatan Tidak Secara Langsung Menjadi Aset Tak Berwujud							
Subtotal		-	-	-			
Total		*5.335.661.998*	-	-			

Rincian perhitungan realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi Aset Tak Berwujud terdapat pada Tabel 83.

Tabel 83

Rincian Perhitungan Realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi Aset Tak Berwujud

Uraian Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	
Realisasi Belanja Modal Lainnya yang menjadi ATB		**5.335.661.998**
Realisasi Belanja Modal Lainnya yang tidak menjadi ATB		
Belanja Modal Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin	*31.651.000*	
Belanja Modal Lainnya menjadi ATB Dalam Pengerjaan	*59.999.940*	
Belanja Modal Lainnya menjadi ATL	*369.527.205*	
Subtotal		**461.178.145**
Perhitungan Realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi ATB		**5.796.840.143**
Realisasi Belanja Modal Lainnya pada LRA (532xxx)		**5.796.840.143**
Selisih		**-**

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp59.999.940,00

C.21 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp59.999.940,00 dan Rp0,00. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan Uang Muka Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Akademik dan Pelayanan (SIAP) di IPDN Kampus Jatinangor Tahun 2026 Sesuai Jaminan Uang Muka Nomor: TCK1085/06/26 Tanggal 3 Juni 2026, BAP Nomor: 800.2.2/553/IPDN.18 Tanggal 3 Juni 2026.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari realisasi belanja tahun anggaran berjalan disajikan pada Tabel 84.

Tabel 84
Mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Uraian	Nilai (Rp)	Asal Transaksi (Rp)							Keterangan
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kode Akun 532xxx)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Kode Akun 533xxx)	Belanja Modal JIJ (Kode Akun 534xxx)	Belanja Modal Lainnya (Kode Akun 536xxx)	Transaksi ATBDP yang Berasal dari Realisasi Belanja	Tindak Lanjut Koreksi Kesalahan Perekaman TAB	Transaksi Lainnya	
Pencatatan ATBDP dari Realisasi Belanja									
Perolehan/Penambahan KDP (Mutasi Tambah)	59.999.940	59.999.940	-	-	-	-	-	-	
Subtotal		***59.999.940***	-	-	-	-	-		
Pencatatan Aset Tetap Definitif dari ATBDP									
Subtotal		-	-	-	-	-	-		
Total		***59.999.940***	-	-	-	-	-		

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0,00

C.22 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp0,00 dan Rp228.247.203.927,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pengurangan saldo dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp228.247.203.927,00 terdiri dari:

a. Pembayaran atas penyelesaian pekerjaan sebesar Rp227.929.832.511,00; dan

b. Penihilan atas sisa saldo yang berada di rekening penampungan atas RPATA Tahun 2025 sebesar Rp317.371.416,00.

Rincian pembayaran atas Dana Yang Dibatasi Penggunaannya disajikan pada **Lampiran XXII.**

Aset Lain-Lain Rp361.866.495.279,00

C.23 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp361.866.495.279,00 dan Rp339.285.684.989,00. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kemendagri serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tabel 85

Rincian Aset Lain-Lain Menurut Uraian Akun per 30 Juni 2026

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	205.980.423.849
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	155.886.071.430
Total		**361.866.495.279**

Rincian Aset Lain-Lain menurut Eselon I per 30 Juni 2026 tersaji pada Tabel 86.

Tabel 86

Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I

No	ESELON I	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5=(3-4)**
1	Setjen	64.919.063.516	40.995.979.660	23.923.083.856
2	Itjen	1.207.063.422	309.763.422	897.300.000
3	Ditjen Bina Adwil	2.713.589.380	2.713.589.380	-
4	Ditjen Pemdes	1.058.893.747	1.167.938.997	(109.045.250)
5	Ditjen Bina Bangda	48.544.290.381	48.544.290.381	-
6	Ditjen Otda	98.735.684.048	98.735.684.048	-
7	Ditjen Dukcapil	94.363.611.669	94.363.611.669	-
8	Ditjen Keuda	39.145.611.017	40.043.173.862	(897.562.845)
9	BSKDN	3.129.285.850	4.941.616.321	(1.812.330.471)
10	Badan PSDM	8.049.402.249	7.470.037.249	579.365.000
Jumlah		**361.866.495.279**	**339.285.684.989**	**22.580.810.290**

Rincian Aset Lain-Lain per Satker disajikan pada **Lampiran XX**.

Rincian Mutasi Aset Lain-lain per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXIII**.

Tabel 87

Mutasi Aset Lain-Lain

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	**339.285.684.989**
Mutasi tambah:	**31.804.442.607**
Penghentian Aset dari Penggunaan	31.804.442.607
Mutasi kurang:	**(9.223.632.317)**
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(9.223.632.317)
Saldo per 30 Juni 2026	**361.866.495.279**
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi s.d 30 Juni 2026	(354.924.972.571)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	**6.941.522.708**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain sebagai berikut:

a) Transaksi penambahan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp31.804.442.607,00 terdapat pada:

i. Setjen Pusat sebesar Rp26.602.070.403,00;
ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp1.400.382.410,00;
iii. DKPP sebesar Rp1.292.632.294,00;
iv. Itjen Pusat sebesar Rp897.300.000,00;
v. Ditjen Bina Adwil sebesar Rp589.600.000,00;
vi. Balai Pemdes Yogyakarta sebesar Rp393.207.500,00; dan
vii. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II sebesar Rp629.250.000,00.

b) Transaksi pengurangan dari Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan sebesar Rp9.223.632.317,00 terdapat pada:
i. Setjen Pusat sebesar Rp1.229.685.200,00;
ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp1.493.109.960,00;
iii. DKPP sebesar Rp1.510.951.407,00;
iv. IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp1.138.254.684,00;
v. Ditjen Bina Adwil sebesar Rp589.600.000,00;
vi. Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp21.764.000,00;
vii. Balai Besar PMD Malang sebesar Rp480.488.750,00;
viii. Ditjen Bina Keuda sebesar Rp897.562.845,00;
ix. BSKDN sebesar Rp1.812.330.471,00; dan
x. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II sebesar Rp49.885.000,00.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp99.900.000,00

C.24 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Aset Lainnya yang Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp99.900.000,00 dan Rp0,00. Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister sebesar Rp99.900.000,00 terdapat pada Setjen Pusat yang merupakan nilai pengembangan aplikasi pengelolaan data dan pelaporan SDM berdasarkan BAST Nomor 177/KU.B.SDM/VI/2026. Terdapat kesalahan perekaman atas BAST tersebut karena seharusnya diinput pada bulan Juli. Koreksi telah dilakukan atas kesalahan penginputan tersebut namun jurnal balik terbentuk pada bulan Juli 2026.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp894.964.447.238,00

C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp894.964.447.238,00 dan Rp981.997.570.090,00.

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya tersaji pada tabel 88.

Tabel 88

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	*Software* Komputer	709.224.505.413	(657.610.760.249)	Rp 51.613.745.164
2	Lisensi	93.841.674.278	(21.061.060.998)	Rp 72.780.613.280
3	Hasil Kajian/Penelitian	2.271.764.600	-	Rp 2.271.764.600
4	ATB Lainnya	2.283.518.750	-	Rp 2.283.518.750
Jumlah		**Rp 807.621.463.041**	**Rp (678.671.821.247)**	**Rp 128.949.641.794**
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	205.980.423.849	(202.512.666.991)	Rp 3.467.756.858
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	155.886.071.430	(152.412.305.580)	Rp 3.473.765.850
Jumlah		**Rp 361.866.495.279**	**Rp (354.924.972.571)**	**Rp 6.941.522.708**
Total		**Rp 1.169.487.958.320**	**Rp (1.033.596.793.818)**	**Rp 135.891.164.502**

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per Satker disajikan pada **Lampiran XX**.

Utang kepada Pihak Ketiga

Rp187.795.774.678,00

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp187.795.774.678,00 dan Rp224.035.968.924,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp187.795.774.678,00 terdiri dari:

a) Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp31.388.519.395,00;

b) Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp147.370.402.547,00;

c) Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp4.717.238.694,00;

d) Pengeluaran Transito Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.664.121.293,00;

e) Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp2.655.492.749,00 yang terdiri dari:

   i. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp4.319.614.042,00 berasal dari Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum diserahkan kepada penerima hak sampai dengan tanggal 30 Juni 2026;

   ii. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar

Rp11.390.000,00 terdapat pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II yang merupakan jurnal balik yang terbentuk atas kesalahan penginputan penyerahan kas Bulan Juli yang seharusnya diinput pada Bulan Juni;

iii. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp23.000,00 terdapat pada Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan yang merupakan pengembalian LS Perjalanan Dinas yang disetorkan ke kas negara pada Bulan Juli 2026;

iv. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp60,00 atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara yang terdapat pada Satker Bappeda Provinsi Papua;

v. Sisa saldo pada rekening bendahara pengeluaran sebesar Rp10.000,00 yang merupakan kas yang diterima oleh bendahara pengeluaran atas uji coba *Cash Management System* (CMS); dan

vi. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya terdapat pada Ditjen Polpum sebesar Rp285.282.150,00, Ditjen Bina Keuda sebesar Rp394.266.343,00, Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III sebesar Rp448.007.800,00, dan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV sebesar Rp536.565.000,00 merupakan SPP TUP yang belum terbit SP2D sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.

Perbandingan rincian Utang Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 per Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 89

Daftar Perbandingan Utang Pihak Ketiga per Unit Eselon I

No	ESELON I	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	140.086.079.200	23.299.965.274	116.786.113.926
2	Itjen	1.428.963.131	1.893.034.684	(464.071.553)
3	Ditjen Polpum	1.869.316.315	1.503.900.890	365.415.425
4	Ditjen Bina Adwil	10.135.395.890	1.450.886.359	8.684.509.531
5	Ditjen Pemdes	9.403.634.622	3.779.492.845	5.624.141.777
6	Ditjen Bangda	3.390.113.965	26.070.410.022	(22.680.296.057)
7	Ditjen Otda	1.706.902.199	1.861.409.493	(154.507.294)
8	Ditjen Dukcapil	10.115.045.919	154.527.714.414	(144.412.668.495)
9	Ditjen Keuda	2.394.371.871	1.790.040.312	604.331.559
10	BSKDN	1.353.099.148	-	1.353.099.148
11	BPSDM	5.912.852.418	7.859.114.631	(1.946.262.213)
Jumlah		**187.795.774.678**	**224.035.968.924**	**(36.240.194.246)**

Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga terdapat pada **Lampiran XXIV**.

Utang Yang Belum DItagihkan
Rp62.569.704.029,00

C.27 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp62.569.704.029,00 dan Rp0,00. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan Utang Yang Belum Diterima Tagihannya yang berasal dari penginputan BAST pada Modul Komitmen SAKTI.

Tabel 90

Utang Yang Belum Ditagihkan per Unit Eselon I

No	ESELON I	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	4 = (3-4)
1	Setjen	19.194.756.621	-	19.194.756.621
2	Itjen	127.798.235	-	127.798.235
3	Ditjen Polpum	765.395.237	-	765.395.237
4	Ditjen Bina Adwil	196.067.200	-	196.067.200
5	Ditjen Pemdes	49.572.746	-	49.572.746
6	Ditjen Bangda	1.609.671.028	-	1.609.671.028
7	Ditjen Otda	68.543.269	-	68.543.269
8	Ditjen Dukcapil	38.191.069.192	-	38.191.069.192
9	Ditjen Keuda	193.211.592	-	193.211.592
10	BSKDN	451.669.586	-	451.669.586
11	BPSDM	1.721.949.323	-	1.721.949.323
Jumlah		**62.569.704.029**	**-**	**62.569.704.029**

Terdapat BAST atas perolehan persediaan pada Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp29.284.664,00 yang seharusnya tidak diinput sehingga membentuk saldo Utang Yang Belum Diterima Tagihannya. Atas kesalahan penginputan tersebut telah ditindaklanjuti melalui pengajuan *Void* BAST pada periode Juli 2026 yang akan mengoreksi saldo Utang Yang Belum Diterima Tagihannya.

Pendapatan Diterima Di Muka
Rp0,00

C.28 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan Rp335.485.577.077,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Perbandingan rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 per Unit Eselon I tersaji pada tabel 91.

Tabel 91

Pendapatan Diterima di Muka

NO	ESELON I	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	-	6.454.964.676	(6.454.964.676)
2	Itjen	-	23.909.667	(23.909.667)
3	Ditjen Bina Bangda	-	311.963.334	(311.963.334)
4	Ditjen Dukcapil	-	327.829.555.000	(327.829.555.000)
5	BPSDM	-	865.184.400	(865.184.400)
Jumlah		**-**	**335.485.577.077**	**(335.485.577.077)**

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per Satker terdapat pada **Lampiran XXV.**

Ditjen Dukcapil memiliki jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri. Pengguna jasa layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali Instansi Pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Koperasi, dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sesuai Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, untuk dapat menggunakan jasa layanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, Pengguna layanan wajib memiliki hak akses. Hak akses merupakan hak yang diberikan kepada Pengguna untuk dapat mengakses basis data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. Hak Akses tersebut diberikan kepada Pengguna setelah terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pengguna layanan dengan Ditjen Dukcapil, implementasi petunjuk teknis (juknis) oleh Pengguna, dan pelaksanaan proof of concept oleh Ditjen Dukcapil. Setelah diberikan hak akses, Pengguna layanan dapat melaksanakan pemanfaatan data kependudukan melalui akses aplikasi yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil memperhatikan ketentuan dan jangka waktu berlaku pada PKS serta juknis yang telah disepakati.

Pendapatan Diterima di Muka pada Ditjen Dukcapil sebesar Rp327.829.555.000,00 merupakan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi yang berasal dari voucher jasa layanan kependudukan yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2025. Namun diantaranya terdapat sisa voucher senilai Rp34.045.664.000,00 pada pengguna layanan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah berakhir masa berlakunya.

Dengan mempertimbangkan terpenuhinya aspek pelayanan kepada masyarakat, Kepmen No. 900.1/3.2-5299 Dukcapil Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengelolaan PNBP

dalam Pelayanan Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan lingkup Ditjen Dukcapil belum dilaksanakan secara penuh, baik terhadap PKS yang telah maupun yang belum diajukan untuk perpanjangan. Dengan demikian sisa Voucher yang tidak didukung PKS aktif masih dapat digunakan.

Uang Muka dari KPPN Rp20.199.653.871,00

C.29 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp20.199.653.871,00 dan Rp777.785,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp115.373.345,00

C.30 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp115.373.345,00 dan Rp397.356.643,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pungutan pajak Tahun 2026 yang sampai dengan 30 Juni 2026 belum disetorkan ke kas negara.

Tabel 92

Utang Jangka Pendek Lainnya

NO	ESELON I	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	21.588.343	-	21.588.343
2	Ditjen Bina Adwil	6.547.090	397.356.643	(390.809.553)
3	Ditjen Bina Pemdes	20.878.856	-	20.878.856
4	BPSDM	66.359.056	-	66.359.056
Jumlah		**115.373.345**	**397.356.643**	**(281.983.298)**

Ekuitas Rp17.050.600.549.016,00

C.31 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp17.050.600.549.016,00 dan Rp16.926.155.644.156,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

Rp817.385.919.120

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebesar Rp817.385.919.120,00 dan Rp678.698.870.631,00. Pendapatan-LO terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari PNBP fungsional antara lain pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pada Ditjen Dukcapil, penyelenggaraan pendidikan pascasarjana IPDN dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta PNBP umum yang berasal dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 93

Perbandingan Rincian PNBP Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

KODE AKUN	URAIAN	30 JUNI 2026 (Rp)	30 JUNI 2025 (Rp)	NAIK/TURUN (%) (Rp)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.375.986.731	4.885.559.494	(10,43)
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	210.087.894	52.543.205	299,84
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	35.265.000	24.475.000	44,09
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	134.500.000	134.500.000	0,00
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	13.962.612.244	14.543.338.872	(3,99)
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian	2.538.800.000	-	100,00
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	304.759.000	268.650.000	13,44
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	60.656.787.100	8.200.312.000	639,69
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1.830.079.000	807.975.000	126,50
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	730.565.742.000	649.365.817.000	12,50
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	288.848.360	392.685.455	(26,44)
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN	2.482.427.391	-	100,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	24.400	21.014.605	(99,88)
JUMLAH		**817.385.919.120**	**678.696.870.631**	**20,43**

Jumlah Pendapatan-LO dari kegiatan operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp817.385.919.120,00 sedangkan realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp497.618.998.203,00 diantaranya sebesar Rp481.889.730.061,00 berasal dari kegiatan operasional. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Pendapatan-LO Penerimaan Negara Bukan Pajak (basis akrual) dengan Pendapatan-LRA Penerimaan Negara Bukan Pajak (basis kas) sebesar Rp335.496.189.059,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 94

Selisih PNBP antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.521.304.898	4.375.986.731	2.854.681.833
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	205.272.012	210.087.894	4.815.882
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	35.265.000	35.265.000	-
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	135.250.000	134.500.000	(750.000)
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	9.230.272.000	13.962.612.244	4.732.340.244
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian	2.538.800.000	2.538.800.000	-
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	304.759.000	304.759.000	-
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	60.581.111.000	60.656.787.100	75.676.100
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1.830.079.000	1.830.079.000	-
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	402.736.187.000	730.565.742.000	327.829.555.000
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	130.000	-	(130.000)
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	288.848.360	288.848.360	-
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN	2.482.427.391	2.482.427.391	-
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	24.400	24.400	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		**481.889.730.061**	**817.385.919.120**	**335.496.189.059**

Penjelasan perbedaan pencatatan realisasi PNBP menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2025 atas bagian Tahun 2026 sebesar Rp2.854.681.833,00.
2. Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi Tahun 2026 sebesar Rp4.815.882,00.
3. Pelunasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2025 sebesar Rp750.000,00.
4. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Biaya Pendidikan berbeda sebesar Rp4.732.340.244,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:
    a. Jurnal balik atas penyesuaian Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka Tahun 2025 sebesar Rp4.801.340.244,00; dan

b. Pelunasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Biaya Pendidikan yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2025 sebesar Rp69.000.000,00.

5. Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan yang belum disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Penerimaan sebesar Rp75.676.100,00.
6. Jurnal balik atas pengakuan Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2025 atas Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi berbeda sebesar Rp327.829.555.000,00.
7. Jurnal balik atas penyetoran sisa kas pada tahun 2025 berupa Pendapatan dari Penutupan Rekening senilai Rp130.000,00 yang berasal dari Rekening RPL 133 PDHL BAPPEDA MALUKU.

Beban Pegawai

Rp561.398.012.831

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp561.398.012.831,00 dan Rp463.419.406.708,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 95

Perbandingan Beban Pegawai Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

URAIAN	30 JUNI 2026 (Rp)	30 JUNI 2025 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Gaji Pokok PNS	170.696.255.373	170.119.072.220	0,34
Beban Pembulatan Gaji PNS	2.278.816	2.289.363	(0,46)
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	10.014.913.128	10.081.608.973	(0,66)
Beban Tunjangan Anak PNS	2.634.980.876	2.678.078.486	(1,61)
Beban Tunjangan Struktural PNS	5.851.644.500	5.814.298.950	0,64
Beban Tunjangan Fungsional PNS	16.642.377.000	15.031.352.671	10,72
Beban Tunjangan PPh PNS	2.928.054.735	2.850.267.539	2,73
Beban Tunjangan Beras PNS	7.349.507.490	7.372.935.360	(0,32)
Beban Uang Makan PNS	12.780.278.000	14.016.505.150	(8,82)
Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	43.525.000	38.650.000	12,61
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	157.850.000	141.405.000	11,63
Beban Tunjangan Umum PNS	3.937.407.592	4.241.789.654	(7,18)
Beban Tunjangan Profesi Dosen	5.483.387.100	4.978.242.800	10,15
Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	1.296.398.400	1.419.975.800	(8,70)
Beban Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/Polri	47.500.000	46.400.000	2,37
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.390.363.404	1.568.453.404	(11,35)
Beban Gaji Pokok PPPK	40.470.620.739	2.299.330.700	1.660,10
Beban Pembulatan Gaji PPPK	765.179	40.275	1.799,89
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2.604.162.633	118.367.066	2.100,07
Beban Tunjangan Anak PPPK	757.563.568	30.915.058	2.350,47
Beban Tunjangan Struktural PPPK	49.500.000	40.625.000	21,85
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	689.484.888	330.970.000	108,32
Beban Tunjangan Beras PPPK	2.552.617.915	113.391.615	2.151,15
Beban Uang Makan PPPK	4.539.307.550	261.608.400	1.635,15
Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	22.575.000	875.000	2.480,00
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	73.325.000	2.975.000	2.364,71
Belanja Tunjangan Umum PPPK	2.186.437.268	-	100,00
Beban Uang Lembur	4.635.751.850	3.632.249.000	27,63
Beban Uang Lembur PPPK	1.003.869.500	26.997.000	3.618,45
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	221.152.357.550	213.442.455.680	3,61
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	39.402.952.777	2.717.281.544	1.350,09
TOTAL	**561.398.012.831**	**463.419.406.708**	**21,14**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp561.398.012.831,00, sedangkan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp560.840.280.406,00, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Pegawai (basis akrual) dengan Belanja Pegawai (basis kas) sebesar Rp557.732.425,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 96

Selisih Beban Pegawai antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	152.080.430.883	170.696.255.373	18.615.824.490
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.045.514	2.278.816	233.302
511121	Beban TunjanganSuami/Istri PNS	8.918.344.257	10.014.913.128	1.096.568.871
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	2.346.922.775	2.634.980.876	288.058.101
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	5.207.924.000	5.851.644.500	643.720.500
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	14.824.668.000	16.642.377.000	1.817.709.000
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	2.861.493.958	2.928.054.735	66.560.777
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	6.545.971.380	7.349.507.490	803.536.110
511129	Beban Uang Makan PNS	14.342.164.000	12.780.278.000	(1.561.886.000)
511135	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	37.325.000	43.525.000	6.200.000
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	135.350.000	157.850.000	22.500.000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	3.514.980.092	3.937.407.592	422.427.500
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	4.689.988.600	5.483.387.100	793.398.500
511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	1.090.195.600	1.296.398.400	206.202.800
511194	Beban Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/Polri	39.900.000	47.500.000	7.600.000
511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.212.273.404	1.390.363.404	178.090.000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	35.659.396.339	40.470.620.739	4.811.224.400
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	675.404	765.179	89.775
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2.292.967.033	2.604.162.633	311.195.600
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	667.032.158	757.563.568	90.531.410
511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	44.000.000	49.500.000	5.500.000
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	609.754.888	689.484.888	79.730.000
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2.248.309.075	2.552.617.915	304.308.840
511628	Beban Uang Makan PPPK	5.177.296.000	4.539.307.550	(637.988.450)
511631	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	19.350.000	22.575.000	3.225.000
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	62.850.000	73.325.000	10.475.000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1.923.942.268	2.186.437.268	262.495.000
512211	Beban Uang Lembur	4.670.710.000	4.635.751.850	(34.958.150)
512212	Beban Uang Lembur PPPK	1.020.866.000	1.003.869.500	(16.996.500)
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	245.324.735.962	221.152.357.550	(24.172.378.412)
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	43.268.417.816	39.402.952.777	(3.865.465.039)
BEBAN PEGAWAI		**560.840.280.406**	**561.398.012.831**	**557.732.425**

Perbedaan pencatatan beban pegawai menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Gaji Pokok PNS berbeda sebesar Rp18.615.824.490,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
    a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp19.705.340,00; dan
    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Gaji Pokok PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp18.635.529.830,00.
2. Beban-LO untuk akun Beban Pembulatan Gaji PNS berbeda sebesar Rp233.302,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
    a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp4.409,00 dan
    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Pembulatan Gaji PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp237.711,00.
3. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Suami/Istri PNS berbeda sebesar Rp1.096.568.871,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
    a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp714.630,00; dan
    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Suami/Istri PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp1.097.283.501,00.
4. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Anak PNS berbeda sebesar Rp288.058.101,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
    a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp234.334,00; dan
    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Anak PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp288.292.435,00.
5. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Struktural PNS berbeda sebesar Rp643.720.500,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp540.000,00; dan

b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Struktural PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp644.260.500,00.

6. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Fungsional PNS berbeda sebesar Rp1.817.709.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

   a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp26.537.000,00 dan

   b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Fungsional PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp1.844.246.000,00.

7. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan PPh PNS berbeda sebesar Rp66.560.777,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

   a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp935.383,00; dan

   b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan PPh PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp67.496.160,00.

8. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Beras PNS berbeda sebesar Rp803.536.110,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

   a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp72.420,00; dan

   b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Beras PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp803.608.530,00.

9. Beban-LO untuk akun Beban Uang Makan PNS berbeda sebesar Rp1.561.886.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026.

10. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS berbeda sebesar Rp6.200.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

11. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Khusus Papua PNS berbeda sebesar Rp22.500.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

12. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Umum PNS berbeda sebesar Rp422.427.500,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

    a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp15.000,00; dan

    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Umum PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp422.442.500,00.

13. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Profesi Dosen berbeda sebesar Rp793.398.500,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

    a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp27.747.200,00; dan

    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Profesi Dosen yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp821.145.700,00.

14. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Kehormatan Profesor berbeda sebesar Rp206.202.800,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

15. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/Polri berbeda sebesar Rp7.600.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

16. Beban-LO untuk akun Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara berbeda sebesar Rp178.090.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
17. Beban-LO untuk akun Beban Gaji Pokok PPPK berbeda sebesar Rp4.811.224.400,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
18. Beban-LO untuk akun Beban Pembulatan Gaji PPPK berbeda sebesar Rp89.775,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
19. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK berbeda sebesar Rp311.195.600,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
20. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Anak PPPK berbeda sebesar Rp90.531.410,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
21. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Struktural PPPK berbeda sebesar Rp5.500.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
22. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Fungsional PPPK berbeda sebesar Rp79.730.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
23. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Beras PPPK berbeda sebesar Rp304.308.840,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
24. Beban-LO untuk akun Beban Uang Makan PPPK berbeda sebesar Rp637.988.450,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026.

25. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK berbeda sebesar Rp3.225.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

26. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK berbeda sebesar Rp10.475.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

27. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Umum PPPK berbeda sebesar Rp262.495.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

28. Beban-LO untuk akun Beban Uang Lembur berbeda sebesar Rp34.958.150,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

    a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp47.427.150,00; dan

    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Uang Lembur yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp12.469.000,00.

29. Beban-LO untuk akun Beban Uang Lembur PPPK berbeda sebesar Rp16.996.500,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

    a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp18.079.500,00; dan

    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Uang Lembur PPPK yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp1.083.000,00.

30. Beban-LO untuk akun Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja) berbeda sebesar Rp24.172.378.412,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

    a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp24.938.669.834,00; dan

b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp766.291.422,00.

31. Beban-LO untuk akun Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja PPPK berbeda sebesar Rp3.865.465.039,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp4.381.783.644,00; dan

b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp516.318.605,00.

Beban Persediaan Rp6.842.896.523

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp6.842.896.523,00 dan Rp7.124.632.133,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Pemakaian/konsumsi atas persediaan dinilai menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini beban persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing persediaan yang terpakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 97

Perbandingan Beban Persediaan Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

URAIAN	30 JUNI 2026 (Rp)	30 JUNI 2025 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Persediaan Konsumsi	5.636.271.328	6.079.234.535	(7,29)
Beban Persediaan bahan baku	297.000	3.052.500	(90,27)
Beban Persediaan Lainnya	1.206.328.195	1.042.345.098	15,73
TOTAL	**6.842.896.523**	**7.124.632.133**	**(3,95)**

Penjelasan hubungan mutasi kurang persediaan dengan beban persediaan sebagai berikut:

Tabel 98

Penjelasan Hubungan Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan Semester I Tahun 2026

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL (Rp)	PEMBELIAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	PEMAKAIAN (Rp)	BEBAN PERSEDIAAN (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) + (d) - (e)	(g)	(h) = (f) - (g)
117111	Barang Konsumsi	3.505.124.319		4.657.028.757	(1.151.904.438)	5.636.271.328	(6.788.175.766)
117131	Bahan Baku	-		398.000	(398.000)	297.000	(695.000)
117199	Persediaan Lainnya	1.254.289.814		2.040.365.772	(786.075.958)	1.206.328.195	(1.992.404.153)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		18.630.571.461		18.630.571.461		18.630.571.461
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya		-		-		-
JUMLAH		**4.759.414.133**	**18.630.571.461**	**6.697.792.529**	**16.692.193.065**	**6.842.896.523**	**9.849.296.542**

Saldo Persediaan per 1 Januari 2026 (saldo awal) sebesar Rp4.759.414.133,00 dan saldo Persediaan per 30 Juni 2026 (saldo akhir) sebesar Rp6.697.792.529,00. Selama Tahun Anggaran 2026 terdapat realisasi belanja barang persediaan sebesar Rp18.630.571.461,00 sehingga perhitungan pemakaian persediaan sebesar Rp16.692.193.065,00. Perbedaan sebesar Rp9.849.296.542,00 antara pemakaian persediaan sebesar Rp16.692.193.065,00 dengan Beban Persediaan sebesar Rp6.842.896.523,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 99

Penjelasan Selisih Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	BELANJA PERSEDIAAN MENJADI BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN (117113)	588.205.810
2	BELANJA PERSEDIAAN MENJADI SUKU CADANG (117114)	25.260.000
3	BELANJA PERSEDIAAN MENJADI ASET LAIN-LAIN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (117127)	10.537.421.307
4	JURNAL ANTAR BEBAN	85.747.037
5	REKLASIFIKASI KELUAR	41.815.041
6	REKLASIFIKASI MASUK	(26.974.640)
7	BELANJA BARANG PERSEDIAAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN (523112) MENJADI PERSEDIAAN	(434.447.072)
8	BELANJA BARANG PERSEDIAAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN (523123) MENJADI PERSEDIAAN	(464.395.838)
9	BELANJA PERSEDIAAN BELUM TERBIT SP2D PER 30 JUNI 2026	(506.347.038)
10	USANG	3.011.935
JUMLAH		**9.849.296.542**

Beban Barang Dan Jasa Rp981.562.477.399

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp981.562.477.399,00 dan Rp573.923.335.838,00. Beban Barang dan Jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 100

Perbandingan Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

URAIAN	30 JUNI 2026 (Rp)	30 JUNI 2025 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Keperluan Perkantoran	61.695.029.918	93.861.667.486	(34,27)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	16.067.443.803	18.381.017.068	(12,59)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.240.400.779	569.899.203	117,65
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	207.540.406	125.761.195	65,03
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3.893.632.000	3.646.059.000	6,79
Beban Barang Operasional Lainnya	41.402.567.327	22.477.057.935	84,20
Beban Bahan	59.609.017.815	28.213.703.417	111,28
Beban Honor Output Kegiatan	5.798.110.000	3.002.850.000	93,09
Belanja dalam Rangka Refund Dana PHLN	2.482.427.391	-	100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	182.261.844.491	139.628.343.593	30,53
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	226.036.673	514.934.581	(56,10)
Beban Langganan Listrik	18.366.297.100	17.760.817.518	3,41
Beban Langganan Telepon	134.785.569	164.169.126	(17,90)
Beban Langganan Air	2.051.237.967	2.051.222.219	0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	584.212.186	539.742.995	8,24
Beban Jasa Konsultan	40.453.327.870	7.149.181.858	465,85
Beban Sewa	140.524.929.712	86.887.687.015	61,73
Beban Jasa Profesi	18.670.237.561	4.867.346.000	283,58
Beban Jasa Lainnya	385.893.398.831	144.081.875.629	167,83
TOTAL	**981.562.477.399**	**573.923.335.838**	**71,03**

Jumlah Beban Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional secara normal untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp981.562.477.399,00, sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional secara normal sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp897.208.722.271,00. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Beban Barang dan Jasa (basis akrual) dengan Belanja Barang dan Jasa (basis kas) untuk kegiatan operasional secara normal sebesar Rp84.353.755.128,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 101

Selisih Beban Barang dan Jasa antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	56.710.883.123	61.695.029.918	4.984.146.795
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	15.883.015.143	16.067.443.803	184.428.660
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.227.687.979	1.240.400.779	12.712.800
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	206.416.006	207.540.406	1.124.400
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3.755.757.000	3.893.632.000	137.875.000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	39.858.585.093	41.402.567.327	1.543.982.234
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	22.000.000	-	(22.000.000)
521211	Beban Bahan	57.317.593.900	59.609.017.815	2.291.423.915
521213	Beban Honor Output Kegiatan	5.758.160.000	5.798.110.000	39.950.000
521218	Belanja dalam Rangka Refund Dana PHLN	2.482.427.391	2.482.427.391	-
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	181.736.934.871	182.261.844.491	524.909.620
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	40.855.750	226.036.673	185.180.923
522111	Beban Langganan Listrik	18.764.411.080	18.366.297.100	(398.113.980)
522112	Beban Langganan Telepon	134.674.569	134.785.569	111.000
522113	Beban Langganan Air	1.974.270.645	2.051.237.967	76.967.322
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	582.652.186	584.212.186	1.560.000
522131	Beban Jasa Konsultan	33.181.172.066	40.453.327.870	7.272.155.804
522141	Beban Sewa	135.631.975.569	140.524.929.712	4.892.954.143
522151	Beban Jasa Profesi	17.150.009.561	18.670.237.561	1.520.228.000
522191	Beban Jasa Lainnya	324.789.240.339	385.893.398.831	61.104.158.492
BEBAN BARANG DAN JASA		**897.208.722.271**	**981.562.477.399**	**84.353.755.128**

Perbedaan pencatatan beban barang dan jasa dalam kegiatan operasional secara normal menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Keperluan Perkantoran berbeda sebesar Rp4.984.146.795,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
   a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp37.445.430,00; dan
   b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Keperluan Perkantoran yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp5.021.592.225,00.
2. Beban-LO untuk akun Beban Pengadaan Bahan Makanan berbeda sebesar Rp184.428.660,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

3. Beban-LO untuk akun Beban Penambah Daya Tahan Tubuh berbeda sebesar Rp12.712.800,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
4. Beban-LO untuk akun Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat berbeda sebesar Rp1.124.400,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
5. Beban-LO untuk akun Beban Honor Operasional Satuan Kerja berbeda sebesar Rp137.875.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
6. Beban-LO untuk akun Beban Barang Operasional Lainnya berbeda sebesar Rp1.543.982.234,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
    a. Koreksi SPM akibat kesalahan penggunaan akun belanja sebesar Rp34.578.720,00;
    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Barang Operasional Lainnya yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp1.578.560.954,00.
7. Beban-LO untuk akun Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 berbeda sebesar Rp22.000.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena koreksi atas kesalahan penggunaan akun beban untuk pengadaan layanan *Video Conference*.
8. Beban-LO untuk akun Beban Bahan berbeda sebesar Rp2.291.423.915,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
9. Beban-LO untuk akun Beban Honor Output Kegiatan berbeda sebesar Rp39.950.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
10. Beban-LO untuk akun Beban Barang Non Operasional Lainnya berbeda sebesar Rp524.909.620,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

11. Beban-LO untuk akun Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel berbeda sebesar Rp185.180.923,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

    a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (kode akun 532111) sebesar Rp168.910.923,00.

    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp16.270.000,00.

12. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Listrik berbeda sebesar Rp398.113.980,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

    a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp475.105.726,00; dan

    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Langganan Listrik yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp76.991.746,00.

13. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Telepon berbeda sebesar Rp111.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

    a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp127.872,00.

    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Langganan Telepon yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp238.872,00.

14. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Air berbeda sebesar Rp76.967.322,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

    a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp21.203.160,00.

    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Langganan Air yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp98.170.482,00.

15. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya berbeda sebesar Rp1.560.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

16. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Konsultan berbeda sebesar Rp7.272.155.804,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

17. Beban-LO untuk akun Beban Sewa berbeda sebesar Rp4.892.954.143,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

    a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp8.722.000,00.

    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Sewa yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp4.901.676.143,00.

18. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Profesi berbeda sebesar Rp1.520.228.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

19. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Lainnya berbeda sebesar Rp61.104.158.492,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

    a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2026 sebesar Rp56.640.706,00.

    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Jasa Lainnya yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp61.160.799.198,00.

Penjelasan hubungan mutasi aset ekstrakomtabel periode berjalan dengan beban aset ekstrakomtabel sebagai berikut:

Tabel 102

Penyajian Beban Aset Ekstrakomtabel

AKUN BEBAN			MUTASI ASET EKSTRAKOMTABEL PADA LBMN					PERBEDAAN ANTARA BEBAN DENGAN MUTASI ASET EKSTRAKOMTABEL (Rp)
BEBAN PERALATAN DAN MESIN - EKSTRAKOMTABEL (521252) (Rp)	BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN (595112) (Rp)	BEBAN GEDUNG DAN BANGUNAN - EKSTRAKOMTABEL (521253) (Rp)	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG		MUTASI NETTO EKSTRAKOMPTABEL PADA LBMN (Rp)	
			URAIAN TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (Rp)	URAIAN TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (Rp)		
226.036.673			Pembelian	226.036.673			226.036.673	-
226.036.673	-	-		**226.036.673**		-	**226.036.673**	-

Mutasi tambah dan mutasi kurang aset ekstrakomtabel sampai dengan 30 Juni 2026 masing-masing sebesar Rp226.036.673,00 dan Rp0,00 sehingga perhitungan mutasi neto aset ekstrakomtabel sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp226.036.673,00. Beban aset ekstrakomtabel untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 terdiri dari Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel sebesar Rp226.036.673,00, Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan

Mesin sebesar Rp0,00 dan Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel sebesar Rp0,00. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan antara mutasi aset ekstrakomtabel dengan beban aset ekstrakomtabel.

Beban Pemeliharaan
Rp66.176.637.157

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp66.176.637.157,00 dan Rp48.915.462.060,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 103
Perbandingan Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

URAIAN	30 JUNI 2026 (Rp)	30 JUNI 2025 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.369.147.592	28.259.763.114	32,23
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4.026.011.903	2.318.056.282	73,68
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.608.948.945	14.181.841.680	24,17
Beban Pemeliharaan Jaringan	4.489.926.326	2.039.605.896	120,14
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.310.979.099	693.942.000	88,92
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	1.011.146.168	1.278.820.098	(20,93)
Beban Persediaan Suku Cadang	360.477.124	143.432.990	151,32
TOTAL	**66.176.637.157**	**48.915.462.060**	**35,29**

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp66.176.637.157,00, sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp64.066.930.775,00 sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Pemeliharaan (basis akrual) dengan Belanja Pemeliharaan (basis kas) sebesar Rp2.109.706.382,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 104

Selisih Beban Pemeliharaan antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.401.433.695	37.369.147.592	1.967.713.897
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.910.319.955	-	(1.910.319.955)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3.908.533.703	4.026.011.903	117.478.200
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.275.327.509	17.608.948.945	1.333.621.436
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	776.520.488	-	(776.520.488)
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	4.483.816.326	4.489.926.326	6.110.000
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1.310.979.099	1.310.979.099	-
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	1.011.146.168	1.011.146.168
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	-	360.477.124	360.477.124
BEBAN PEMELIHARAAN		**64.066.930.775**	**66.176.637.157**	**2.109.706.382**

Perbedaan pencatatan Beban Pemeliharaan menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berbeda sebesar Rp1.967.713.897,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
2. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya berbeda sebesar Rp117.478.200,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
3. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berbeda sebesar Rp1.333.621.436,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
4. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Jaringan berbeda sebesar Rp6.110.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

Penjelasan Perbedaan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.910.319.955,00, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp776.520.488,00, Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp1.011.146.168,00 dan Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp360.477.124,00 secara lebih rinci digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 105

Penyajian Beban Pemeliharaan

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL (Rp)	PEMBELIAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	PEMAKAIAN (Rp)	BEBAN PEMELIHARAAN (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) + (d) - (e)	(g)	(h) = (f) - (g)
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	619.739.631	-	1.833.082.894	(1.213.343.263)	1.011.146.168	(2.224.489.431)
117114	Suku Cadang	81.679.487	-	64.506.275	17.173.212	360.477.124	(343.303.912)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		1.910.319.955		1.910.319.955		1.910.319.955
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		776.520.488		776.520.488		776.520.488
JUMLAH		**701.419.118**	**2.686.840.443**	**1.897.589.169**	**1.490.670.392**	**1.371.623.292**	**119.047.100**

Saldo Persediaan Barang Pemeliharaan per 1 Januari 2026 (saldo awal) sebesar Rp701.419.118,00 dan saldo Persediaan Barang Pemeliharaan per 30 Juni 2026 (saldo akhir) sebesar Rp1.897.589.169,00. Selama Tahun Anggaran 2025 terdapat realisasi Belanja Barang Pemeliharaan sebesar Rp2.686.840.443,00 sehingga perhitungan pemakaian persediaan barang pemeliharaan sebesar Rp1.490.670.392,00. Perbedaan sebesar Rp119.047.100,00 antara pemakaian persediaan barang pemeliharaan sebesar Rp1.490.670.392,00 dengan Beban Pemeliharaan dari pemakaian persediaan sebesar Rp1.371.623.292,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 106

Penjelasan Selisih Pemakaian Persediaan dengan Beban Pemeliharaan

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	BELANJA PEMELIHARAAN MENJADI PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI (117111)	759.779.232
2	BELANJA PEMELIHARAAN MENJADI PERSEDIAAN BAHAN BAKU (117131)	24.320.000
3	BELANJA PEMELIHARAAN MENJADI PERSEDIAAN LAINNYA (117199)	14.942.240
4	BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI (521811) MENJADI PERSEDIAAN PEMELIHARAAN	(623.236.872)
5	REKLASIFIKASI MASUK	(4.256.000)
6	BELANJA PERSEDIAAN PEMELIHARAAN BELUM TERBIT SP2D PER 30 JUNI 2026	(52.501.500)
JUMLAH		**119.047.100**

Beban Perjalanan Dinas
Rp208.524.298.443

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp208.524.298.443,00 dan Rp78.180.967.852,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk kegiatan operasional secara normal untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 107

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

URAIAN	30 JUNI 2026 (Rp)	30 JUNI 2025 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	156.295.367.725	67.578.152.813	131,28
Beban Perjalanan Dinas Tetap	769.628.199	252.477.638	204,83
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.175.385.211	2.232.900.000	176,56
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.878.009.059	2.634.594.150	692,46
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.383.003.175	4.449.629.301	380,56
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3.022.905.074	764.860.602	295,22
Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	-	268.353.348	(100,00)
TOTAL	**208.524.298.443**	**78.180.967.852**	**166,72**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp208.524.298.443,00, sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp202.034.325.454,00, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Perjalanan Dinas (basis akrual) dengan Belanja Perjalanan Dinas (basis kas) sebesar Rp6.489.972.989,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 108

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	150.690.212.588	156.295.367.725	5.605.155.137
524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	763.788.199	769.628.199	5.840.000
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.059.723.211	6.175.385.211	115.662.000
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.581.714.059	20.878.009.059	296.295.000
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20.951.534.275	21.383.003.175	431.468.900
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2.987.353.122	3.022.905.074	35.551.952
BEBAN PERJALANAN DINAS		**202.034.325.454**	**208.524.298.443**	**6.489.972.989**

Perbedaan pencatatan Beban Perjalanan Dinas menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Biasa berbeda sebesar Rp5.605.155.137,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
    a. Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas Biasa menjadi Beban Bahan sebesar Rp1.650.000,00; dan
    b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Perjalanan Dinas Biasa yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp5.606.805.137,00.

2. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Tetap berbeda sebesar Rp5.840.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
3. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota berbeda sebesar Rp115.662.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
4. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota berbeda sebesar Rp296.295.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
5. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berbeda sebesar Rp431.468.900,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
6. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri berbeda sebesar Rp35.551.952,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp380.087.355.541

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp380.087.355.541,00 dan Rp114.275.035.576,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan Barang Milik Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 109

Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

URAIAN	30 JUNI 2026 (Rp)	30 JUNI 2025 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang	-	250.000.000	(100,00)
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	228.000.000.000	-	100,00
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	-	1.410.000.000	(100,00)
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat	8.951.685.181	5.812.659.000	54,00
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	143.135.670.360	106.802.376.576	34,02
TOTAL	**380.087.355.541**	**114.275.035.576**	**232,61**

Penjelasan hubungan mutasi kurang Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dengan beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 110

Penyajian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL (Rp)	PEMBELIAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	PENYERAHAN (Rp)	BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN		SELISIH (Rp)
						AKUN	SALDO (Rp)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) + (d) - (e)	(g)	(h)	(i) = (f) - (h)
117122	Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	16.151.172.954		16.151.172.954	-	593122	-	-
117124	Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	54.136.639.215		54.711.639.195	(574.999.980)	593124	-	(574.999.980)
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	28.585.616.694		28.585.616.694	-	593125	-	-
117126	Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	135.560.257.780		135.560.257.780	-			-
117127	Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat	121.569.579.244		123.155.315.370	(1.585.736.126)	593127	8.951.685.181	(10.537.421.307)
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat	8.196.420.722		62.521.847.674	(54.325.426.952)	593128	143.135.670.360	(197.461.097.312)
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses	1.599.201.550		27.674.759.613	(26.075.558.063)			(26.075.558.063)
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		9.823.658.730		9.823.658.730			9.823.658.730
526311	Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		206.788.559.125		206.788.559.125			206.788.559.125
JUMLAH		**365.798.888.159**	**216.612.217.855**	**448.360.609.280**	**134.050.496.734**		**152.087.355.541**	**(18.036.858.807)**

Saldo Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat per 1 Januari 2026 (saldo awal) sebesar Rp365.798.888.159,00 dan saldo Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat per 30 Juni 2026 (saldo akhir) sebesar Rp448.360.609.280,00. Selama Tahun Anggaran 2025 terdapat realisasi Belanja Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp216.612.217.855,00 sehingga perhitungan penyerahan Persediaan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp134.050.496.734,00. Perbedaan sebesar Rp18.036.858.807,00 antara perhitungan penyerahan Persediaan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp134.050.496.734,00 dengan Beban Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp152.087.355.541,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 111

Penjelasan Selisih Mutasi Persediaan yang Diserahkan dengan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	BELANJA PERSEDIAAN MENJADI ASET LAIN-LAIN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (117127)	(10.537.421.307)
2	BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA BELUM TERBIT SP2D PER 30 JUNI 2026	(7.499.437.500)
JUMLAH		**(18.036.858.807)**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp261.218.902.870

D8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp261.218.902.870,00 dan Rp204.235.466.711,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 112

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

URAIAN	30 JUNI 2026 (Rp)	30 JUNI 2025 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	186.773.922.699	137.944.757.763	35,40
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	40.202.563.211	39.706.004.158	1,25
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.433.279.872	2.343.624.898	3,83
Beban Penyusutan Irigasi	553.247.895	562.598.070	(1,66)
Beban Penyusutan Jaringan	2.288.631.456	2.401.977.269	(4,72)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	40.480.750	28.540.304	41,84
Beban Amortisasi Software	24.009.224.312	17.458.572.639	37,52
Beban Amortisasi Lisensi	4.751.548.391	3.519.926.422	34,99
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	166.004.284	269.465.188	(38,39)
TOTAL	**261.218.902.870**	**204.235.466.711**	**27,90**

Penjelasan hubungan penyusutan periode berjalan dengan beban penyusutan sebagai berikut:

Tabel 113

Penjelasan Hubungan Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan

AKUN	URAIAN AKUN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 30 JUNI 2026 (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2025 (Rp)	PENYUSUTAN PERIODE BERJALAN (Rp)	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2026 (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)	(f)	(g) = (e) - (f)
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.857.454.450.626	3.705.153.139.089	152.301.311.537	186.773.922.699	(34.472.611.162)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	681.889.478.545	641.689.526.713	40.199.951.832	40.202.563.211	(2.611.379)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	62.605.329.030	60.173.907.946	2.431.421.084	2.433.279.872	(1.858.788)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	32.937.281.707	32.384.637.603	552.644.104	553.247.895	(603.791)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	78.232.848.673	75.944.217.217	2.288.631.456	2.288.631.456	-
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	8.284.395.972	8.343.074.288	(58.678.316)	40.480.750	(99.159.066)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	202.512.666.991	178.776.653.121	23.736.013.870	166.004.284	23.570.009.586
JUMLAH		**4.923.916.451.544**	**4.702.465.155.977**	**221.451.295.567**	**232.458.130.167**	**(11.006.834.600)**

Terdapat perbedaan sebesar Rp11.006.834.600,00 antara penyusutan periode berjalan dengan beban penyusutan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 114

Penjelasan Selisih Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI HIBAH KELUAR	(2.853.733.654)
2	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI KOREKSI PENCATATAN NILAI BERKURANG	(13.786.641)
3	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI PENCATATAN BARANG YANG MAU DIHAPUSKAN	(8.139.314.305)
JUMLAH		**(11.006.834.600)**

Penjelasan hubungan amortisasi periode berjalan dengan beban amortisasi sebagai berikut:

Tabel 115

Penjelasan Hubungan Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi

AKUN	URAIAN AKUN	AKUMULASI AMORTISASI PER 30 JUNI 2026 (Rp)	AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2025 (Rp)	AMORTISASI PERIODE BERJALAN (Rp)	BEBAN AMORTISASI TAHUN 2026 (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)	(f)	(g) = (e) - (f)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	657.610.760.249	633.601.535.937	24.009.224.312	24.009.224.312	-
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	21.061.060.998	16.309.512.607	4.751.548.391	4.751.548.391	-
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	152.412.305.580	153.309.868.425	(897.562.845)	-	(897.562.845)
JUMLAH		**831.084.126.827**	**803.220.916.969**	**27.863.209.858**	**28.760.772.703**	**(897.562.845)**

Terdapat perbedaan sebesar Rp897.562.845,00 antara amortisasi periode berjalan dengan beban amortisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 116

Penjelasan Selisih Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	MUTASI TAMBAH AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN TRANSAKSI TRANSFER MASUK	496.860.975
2	MUTASI KURANG AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN TRANSAKSI TRANSFER KELUAR	(496.860.975)
3	MUTASI KURANG AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN TRANSAKSI PENCATATAN BARANG YANG MAU DIHAPUSKAN	(897.562.845)
JUMLAH		**(897.562.845)**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp57.141.790

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp57.141.790,00 dan Rp42.242.500,00.

Tabel 117

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

URAIAN	30 JUNI 2026 (Rp)	30 JUNI 2025 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Penyisihan Piutang PNBP	(56.917.525)	(42.192.500)	34,90
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(189.125)	-	100,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-TP/TGR	(35.140)	(50.000)	(29,72)
TOTAL	**(57.141.790)**	**(42.242.500)**	**35,27**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban yang timbul sebagai akibat pembentukan cadangan piutang agar piutang dapat disajikan sesuai dengan tingkat ketertagihannya.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2026 sebesar Rp29.450.099.152,00 dan per 1 Januari 2026 sebesar Rp29.517.896.232,00 atau terdapat perubahan sebesar Rp67.797.080,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp57.141.790,00 sehingga terdapat perbedaan antara perubahan penyisihan piutang tak tertagih dengan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp10.655.290,00.

Tabel 118

Perbandingan Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I Tahun 2026 dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH					BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH			
AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AKHIR (PER 30 JUNI 2026) (Rp)	SALDO AWAL (PER 31 DESEMBER 2025) (Rp)	PERUBAHAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2026 (Rp)	AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AKHIR (PER 30 JUNI 2026) (Rp)	PERUBAHAN PENYISIHAN PIUTANG DENGAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e) - (h)
116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	11.598.166.073	11.665.738.888	(67.572.815)	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	(56.917.525)	(10.655.290)
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	-	189.125	(189.125)	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(189.125)	-
116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.843.844	1.878.984	(35.140)	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-	(35.140)
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	17.850.089.235	17.850.089.235	-	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(35.140)	35.140
JUMLAH		**29.450.099.152**	**29.517.896.232**	**(67.797.080)**	**JUMLAH**		**(57.141.790)**	**(10.655.290)**

Penjelasan perbedaan perubahan penyisihan piutang tak tertagih dengan beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp10.655.290,00 sebagai berikut:

Tabel 119

Penjelasan Selisih Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Koreksi Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang PNBP menjadi Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang Lainnya atas koreksi Hapus Piutang	(10.655.290)
JUMLAH		**(10.655.290)**

Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp13.736.744.437

D.10 Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 120

Perbandingan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Semester I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

KODE AKUN	URAIAN	30 JUNI 2026 (Rp)	30 JUNI 2025 (Rp)	NAIK/TURUN (%) (Rp)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	888.600	100,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	948.609.929	650.322.034	45,87
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	12.313.320	222.206.092	(94,46)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	325.357.405	67.271.374	383,65
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	13.132.155.295	15.055.425.803	(12,77)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	314.599.064	150.428.279	109,14
Total Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		**14.733.035.013**	**16.146.542.182**	**(8,75)**
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	993.278.641	284.706.728	248,88
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	3.011.935	4.418.749	(31,84)
Total Beban dari Kegiatan Non Operasional		**996.290.576**	**289.125.477**	**244,59**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**13.736.744.437**	**15.857.416.705**	**(13,37)**

Jumlah Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp14.733.035.013,00, sedangkan realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp497.618.998.203,00, diantaranya sebesar Rp15.729.268.142,00 berasal dari kegiatan non operasional. Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional sebesar Rp14.733.035.013,00 yang diantaranya merupakan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp13.132.155.295,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp314.599.064,00. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional (basis akrual) dengan Pendapatan-LRA Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari kegiatan non operasional (basis kas) sebesar Rp996.233.129,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 121

Selisih Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	948.609.929	948.609.929	-
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	12.313.320	12.313.320	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	7.028.000	-	(7.028.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yg Lalu	324.532.001	325.357.405	825.404
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yg Lalu	13.245.419.268	13.132.155.295	(113.263.973)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yg Lalu	1.191.365.624	314.599.064	(876.766.560)
PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		**15.729.268.142**	**14.733.035.013**	**(996.233.129)**

Penjelasan perbedaan pencatatan realisasi pendapatan dari kegiatan non operasional menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Pelunasan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi atas Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO Tahun 2025 sebesar Rp7.028.000,00.
2. Pengakuan Pendapatan-LO yang berasal dari potongan SPM atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp825.404,00.
3. Pendapatan-LO untuk akun Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL berbeda sebesar Rp113.263.973,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:
    a. Pelunasan piutang lainnya yang berasal dari pengembalian biaya pendidikan praja yang diberhentikan sebesar Rp18.917.525,00;
    b. Pelunasan piutang lainnya atas pengembalian kelebihan Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp37.825.032,00;

c. Jurnal balik atas Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu yang berasal dari penihilan RPATA karena perbedaan nilai SPM RPATA dengan nilai realisasi kontrak pada SPM pembayaran sebesar Rp52.552.343,00; dan

d. Jurnal balik atas Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu yang berasal dari penihilan RPATA karena perbedaan nilai SPM RPATA dengan nilai realisasi kontrak pada SPM pembayaran sebesar Rp3.969.073,00.

4. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi atas pengembalian belanja modal TAYL sebesar Rp876.766.560,00.

Jumlah Beban dari kegiatan non operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp996.290.576,00, sedangkan LRA tidak menyajikan kegiatan non operasional, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban dari kegiatan non operasional antara basis kas dan basis akrual dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 122
Selisih Realisasi Beban dari Kegiatan Non Operasional
antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	993.278.641	993.278.641
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	-	3.011.935	3.011.935
TOTAL		-	**996.290.576**	**996.290.576**

Penjelasan perbedaan pencatatan beban dari kegiatan non operasional menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Beban-LO untuk akun Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp993.278.641,00 berasal dari transaksi Hibah Keluar sebesar Rp922.221.346,00, Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp71.057.295,00.

2. Beban-LO untuk akun Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp3.011.935,00 karena usang.

Terhadap transaksi tersebut tidak terjadi arus kas keluar atau masuk sehingga realisasi belanja tidak tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

Pos-Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.11 POS-POS LUAR BIASA

Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 nihil.

`

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp16.926.155.644.156

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada Tahun 2026 dan Tahun 2025 masing-masing sebesar Rp16.926.155.644.156,00 dan Rp16.905.781.871.164,00.

Defisit LO Rp1.634.630.775.417

E.2 Surplus (Defisit) - LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah defisit sebesar Rp1.634.630.775.417,00 dan Rp795.477.777.042,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (Rp101.911.231)

E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar (Rp101.911.231,00) dan Rp167.722.513,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar (Rp101.911.231,00) dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp0,00. Penjelasan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut.

E.3.1.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan nilai perolehan atas aset tetap yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Akun ini juga menampung koreksi kuantitas dan/atau jenis barang milik negara, koreksi perhitungan akumulasi penyusutan, dan koreksi nilai aset tetap yang disebabkan adanya pengembalian realisasi belanja modal.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar (Rp101.911.231,00) terdapat pada satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302) sebesar Rp5.314.309,00, IPDN Kampus Kalimantan Barat (683070) sebesar Rp241.103,00 Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (027210) sebesar Rp5.895.229,00, Balai Besar Pemerintahan Desa Malang (028830) sebesar (Rp63.476.872,00), dan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II (403216) sebesar (Rp49.885.000,00).

Penjelasan terkait Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terdapat pada tabel 123.

Tabel 123

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sampai dengan 30 Juni 2026

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	Koreksi kurang Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan yang berasal dari koreksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan pada satker IPDN Jatinangor	(2.336.000)
2	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena pengembalian belanja modal TAYL pada satker IPDN Jatinangor	2.817.454
3	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena pengembalian belanja modal TAYL pada satker IPDN Jatinangor	2.370.276
4	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena pengembalian belanja modal TAYL pada satker IPDN Jatinangor	1.858.788
5	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Irigasi yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena pengembalian belanja modal TAYL pada satker IPDN Jatinangor	603.791
6	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena pengembalian belanja modal TAYL pada satker IPDN Kampus Kalimantan Barat	241.103
7	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	5.895.229
8	Koreksi kurang Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan yang berasal dari koreksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan pada satker Balai Besar Pemerintahan Desa Malang	(79.698.000)
9	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan yang berasal dari koreksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan pada satker I Balai Besar Pemerintahan Desa Malang	16.221.128
10	Koreksi kurang Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan yang berasal dari koreksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan pada satker Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II	(49.885.000)
JUMLAH		**(101.911.231)**

Rincian pada **Lampiran XXVI** (Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi).

Koreksi Lain-Lain (Rp10.655.290)

E.3.2 Koreksi Lain - Lain

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi atas akun tersebut untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebesar (Rp10.655.290,00) dan Rp0,00.

Koreksi Lain-Lain sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar (Rp10.655.290,00) terdapat pada satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri (408302) yang merupakan Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya atas Koreksi pencatatan piutang Praja Yang diberhentikan.

Transaksi Antar Entitas Rp1.759.188.246.798

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp1.759.188.246.798,00 dan Rp711.719.201.119,00. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terdapat pada tabel 124.

Tabel 124
Rincian Transaksi Antar Entitas sampai dengan 30 Juni 2026

Akun	Uraian	Nominal
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.231.725.560.121
313121	Diterima dari Entitas Lain	(497.618.998.203)
313211	Transfer Keluar	(10.332.636.087)
313221	Transfer Masuk	10.332.636.087
391131	Pengesahan Hibah Langsung	24.570.027.120
391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	511.657.760
JUMLAH		**1.759.188.246.798**

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026, DDEL sebesar (Rp497.618.998.203,00) sedangkan DKEL sebesar Rp2.231.725.560.121,00.

E.4.2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp10.332.636.087,00 terdapat pada satker Inspektorat Jenderal (027203), Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (027210), Ditjen Bina Pembangunan Daerah (039729), Ditjen Otonomi Daerah (621892), Ditjen Bina Keuangan Daerah (662766), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (403222), dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (403231).

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar (Rp10.332.636.087,00) terdapat pada satker Sekretariat Jenderal (403200).

Rincian transaksi transfer masuk dan transfer keluar pada **Lampiran XXVII** (Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk).

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp24.570.027.120,00 dengan rincian pada tabel 125 sebagai berikut.

Tabel 125
Rincian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2026

Akun	Uraian	Nominal
403200	Sekretariat Jenderal	3.215.733.580
448302	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	16.300.000.000
039729	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	4.695.037.114
403222	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	359.256.426
JUMLAH		**24.570.027.120**

Hibah langsung tersebut sudah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung yang diterima pada Tahun 2026 dan/tahun-tahun sebelumnya namun baru disahkan pada tahun anggaran berjalan. Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp551.657.760,00 terdapat pada satker Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (403222).

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri menerima hibah langsung dalam bentuk jasa sebesar Rp551.657.760,00 dari Pemerintah Australia dalam rangka *Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration* atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) dalam BAST Hibah Jasa dari Pemerintah Australia kepada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Nomor 08/BAST-KEMENDAGRI/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Nomor Register Hibah 27BMXZ9A.

Ekuitas Akhir
Rp17.050.600.549.016

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp17.050.600.549.016,00 dan Rp16.822.191.017.754,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada Kemendagri.

F.2 CATATAN PENTING LAINNYA

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mengatur perlakuan khusus terhadap Belanja Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial dan Belanja BLU yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang, yaitu Belanja Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial dan Belanja BLU yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang yang sudah dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara ke penerima manfaat, namun belum dipertanggungjawabkan, tidak disajikan dalam Neraca sebagai Beban/Belanja Dibayar di Muka. Belanja yang belum dipertanggungjawabkan tersebut cukup diungkapkan dalam CaLK dan disajikan dalam daftar belanja yang belum dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang sebesar Rp250.000.000,00 pada Unit Eselon I Ditjen Bina Pemdes tidak disajikan sebagai Belanja Dibayar di Muka pada Neraca per 30 Juni 2026. Belanja tersebut merupakan belanja bantuan Pemerintah untuk rehabilitasi bangunan kantor desa pada Tahun 2019 yang belum lengkap bukti pertanggungjawabannya. Informasi rincian desa yang belum lengkap bukti pertanggungjawabannya disajikan pada **Lampiran XXVIII**.

2. Terdapat Aset Tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak yang sudah tidak berhak menghuni/pihak lain yaitu:
   a. Tanah Balai PMD Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Melati Kab. Sleman Yogyakarta yang diatasnya berdiri satu unit rumah ditempati oleh masyarakat eks Timor-Timur tanpa didukung perjanjian pinjam pakai. Langkah awal penyelesaian permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan pengamanan secara fisik berupa pemasangan papan kepemilikan Kemendagri di depan Asrama Eks Timor-Timur.
   b. Tanah seluas 258 m^2 beserta bangunan seluas 45 m^2 senilai Rp66.273.500,00 yang terletak di lingkungan perkantoran Ditjen Bina Pemdes dan awalnya merupakan kantor Ditjen Bina Pemdes dikuasai oleh pensiunan pegawai Ditjen Bina Pemdes dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4304/Kelurahan Pejaten Barat, tanggal 28 Maret 2022. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/4853/SJ tanggal 22 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hal Pembatalan atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4304/Kelurahan Pejaten Barat, tanggal 28 Maret 2022, seluas 258 m^2. Penyelesaian permasalahan tersebut masih menunggu keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. DKI Jakarta atas permohonan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pembatalan Sertifikat Hak Milik dimaksud.
   c. Terdapat hunian warga (semi permanen) yang dibangun tanpa izin di atas

sebidang tanah eks-rumah dinas milik Setjen yang terletak di Jalan Danau Indah XVI Blok B-6 Nomor 27 s.d. 30 Sunter Jaya. Kepala Biro Umum memberikan izin kepada petugas penjaga untuk menempati tanah tersebut sekaligus untuk mengawasi aset tanah Kemendagri berdasarkan Surat Izin Penghunian Nomor 012.7/4356/BU tanggal 2 Agustus 2019. Namun demikian, izin yang diberikan kepada petugas penjaga tidak termasuk pemberian izin dan/atau kewenangan kepada petugas penjaga untuk mengelola tanah maupun pembangunan hunian semi permanen untuk warga lainnya.

3. Terdapat satu bidang tanah milik Kemendagri yang masih bersertifikat atas nama PT. SAC Nusantara. Tanah tersebut terletak di Komplek Perumahan SAC Nusantara Blok I Kav. Nomor 34 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Kemendagri telah mendirikan pagar sebagai upaya pengamanan dan memproses balik nama sertipikat tanah menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Dalam Negeri.

4. Kementerian Dalam Negeri telah menindaklanjuti kebijakan pencatatan Barang Milik Negara pada satker inaktif bersaldo yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun 2021 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-286/PB/2021 tanggal 21 November 2021 hal Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo (SIB). Kebijakan tersebut berupa penyelesaian hingga tuntas proses likuidasi Satker Inaktif Bersaldo (SIB) menjadi Satker Inaktif Tidak Bersaldo (SITB). Satker inaktif bersaldo dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun 2021, dilikuidasi dengan cara mengalihkan aset satker inaktif bersaldo tersebut ke satker pusat pada Unit Eselon I yang menjadi penanggung jawab proses likuidasi.

   Rincian jumlah satker dan saldo aset berupa barang milik negara yang dialihkan ke satker pusat per Unit Eselon I pada Tahun 2021 dan progres penyelesaian aset tersebut sampai dengan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 126
Rekapitulasi Jumlah Satker Inaktif yang Dialihkan Saldo Asetnya ke Satker Pusat Tahun 2021 dan Progres Penyelesaiannya sampai dengan Tahun 2025

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2021	Aset Tetap per 31 Desember 2021		Aset Lainnya per 31 Desember 2021	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	25	23.449.827.140	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	348	14.722.362.945	2.793.319.365	(2.793.319.365)	-	-
3	Ditjen Bangda	97	191.707.612.750	597.752.000	(597.752.000)	17.881.146.014	(17.881.146.014)
4	Ditjen Otda	21	10.937.697.046	85.208.189.815	(85.208.189.815)	16.539.054.977	(16.539.054.977)
Jumlah		**491**	**240.817.499.881**	**92.834.265.629**	**(92.834.265.629)**	**34.420.200.991**	**(34.420.200.991)**

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2025	Aset Tetap per 31 Desember 2025		Aset Lainnya per 31 Desember 2025	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	12	13.124.828.581	4.116.109.449	(4.116.109.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	326	12.603.972.761	2.653.191.865	(2.653.191.865)	-	-
3	Ditjen Bangda	59	113.626.787.322	-	-	11.325.460.879	(11.325.460.879)
4	Ditjen Otda	10	1.088.228.700	28.212.791.277	(28.212.791.277)	11.112.802.473	(11.112.802.473)
Jumlah		**407**	**140.443.817.364**	**34.982.092.591**	**(34.982.092.591)**	**22.438.263.352**	**(22.438.263.352)**
Perubahan		**(84)**	**(100.373.682.517)**	**(57.852.173.038)**	**57.852.173.038**	**(11.981.937.639)**	**11.981.937.639**

Penyelesaian aset eks. satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang disajikan sebagai persediaan berpedoman pada:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Selanjutnya;
b. Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 25 Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak Dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan; dan
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mengatur perlakuan khusus terhadap persediaan yang tidak dikuasai, yaitu persediaan yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan telah diusulkan permohonan persetujuan pemindahtanganan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN, namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan BMN, tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK dan disajikan dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai.

Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk menyelesaikan aset eks. satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama tersebut. Progres penyelesaian aset eks. satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama selama periode pelaporan Semester I Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 127
Rekapitulasi Progres Penyelesaiannya Aset Eks. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama per 30 Juni 2026

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2025	Aset Tetap per 31 Desember 2025		Aset Lainnya per 31 Desember 2025	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	12	13.124.828.581	4.116.109.449	(4.116.109.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	326	12.603.972.761	2.653.191.865	(2.653.191.865)	-	-
3	Ditjen Bangda	59	113.626.787.322	-	-	11.325.460.879	(11.325.460.879)
4	Ditjen Otda	10	1.088.228.700	28.212.791.277	(28.212.791.277)	11.112.802.473	(11.112.802.473)
Jumlah		**407**	**140.443.817.364**	**34.982.092.591**	**(34.982.092.591)**	**22.438.263.352**	**(22.438.263.352)**

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 30 Juni 2026	Aset Tetap per 30 Juni 2026		Aset Lainnya per 30 Juni 2026	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	12	13.124.828.581	4.116.109.449	(4.116.109.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	323	12.190.138.081	2.653.191.865	(2.653.191.865)	-	-
3	Ditjen Bangda	58	108.635.933.483	-	-	10.996.365.879	(10.996.365.879)
4	Ditjen Otda	10	1.088.228.700	28.212.791.277	(28.212.791.277)	11.112.802.473	(11.112.802.473)
Jumlah		**403**	**135.039.128.845**	**34.982.092.591**	**(34.982.092.591)**	**22.109.168.352**	**(22.109.168.352)**
Perubahan		**(4)**	**(5.404.688.519)**	**-**	**-**	**(329.095.000)**	**329.095.000**

Sampai dengan 30 Juni 2026, Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan aset tersebut yang disajikan pada akun Persediaan sebesar Rp5.404.688.519,00, Aset Tetap sebesar Rp0,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp0,00) dan Aset Lainnya sebesar Rp329.095.000,00 dengan akumulasi penyusutan/amortisasi sebesar (Rp329.095.000,00).

Rincian Aset Eks. Satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

per 30 Juni 2026 disajikan pada Lampiran XXIX**.**

5. Kementerian Dalam Negeri memiliki sebanyak enam Satker Inaktif Bersaldo yang dikonsolidasi dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode pelaporan Semester I Tahun 2026 melalui Aplikasi SAKTI. Satker Inaktif Bersaldo tersebut terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Bina Adwil sebanyak dua satker Dekonsentrasi, dan tiga satker Tugas Pembantuan, serta Unit Eselon I BPSDM sebanyak satu satker UPT dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 128
Rekapitulasi Total Aset Satker Inaktif Bersaldo per 30 Juni 2026

No	BAES1	Kode Satker	Nama Satker	JK	Akun	Uraian Akun	Saldo per 30 Juni 2026
1	01004	484205	Bappeda Provinsi Maluku Utara	DK	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	10.000
2	01004	484208	Bappeda Provinsi Papua	DK	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	60
3	01004	240270	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Belu	TP	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	865.762.700
4	01004	356000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau	TP	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.570.910.000
5	01004	417936	Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai	TP	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.879.281.000
6	'01012	352588	Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	KD	133111	Gedung dan Bangunan	75.632.942.000
					137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(14.762.198.772)
Jumlah							**65.186.706.988**

Total nilai aset sebesar Rp65.186.706.988,00 tersebut masih dalam proses likuidasi.

6. Indikator kualitas data laporan keuangan yang perlu dijelaskan berdasarkan menu-menu pada Aplikasi MyIntress disajikan pada lampiran sebagai berikut:
   a. Transaksi Dalam Konfirmasi Satker Inaktif (Lampiran XXX);
   b. Selisih Rekonsiliasi Internal Piutang (Lampiran XXXI);
   c. Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode BMN (Lampiran XXXII);
   d. Transaksi Resiprokal sampai dengan 30 Juni 2026 (Lampiran XXXIII); dan
   e. Pagu Minus (Basis SP2D) Akun 51XXX (Lampiran XXXIV).
7. Daftar Rekening Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2026 disusun berdasarkan data Aplikasi Sprint dan hasil konfirmasi dengan Unit Eselon I terkait. Daftar rekening tersebut disajikan pada Lampiran XXXV.

G. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan. Penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan dan pengungkapan lainnya diperoleh berdasarkan dokumen sumber dan/atau laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) di lingkungan Kemendagri yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang diberikan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan, semoga tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pengguna laporan keuangan dapat tercapai.

Jakarta,

MENTERI DALAM NEGERI,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CALK:

LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

ESELON I	SATKER	NAMA SATKER	JK	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	% REALISASI PENDAPATAN
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	820.693.000	2.310.931.577	-	2.310.931.577	281,58
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	19.986.117.000	14.084.313.738	-	14.084.313.738	70,47
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	KP	-	521.801.344	-	521.801.344	0,00
01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	KD	-	204.761.554	-	204.761.554	0,00
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	-	82.388.770	-	82.388.770	0,00
01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	-	2.285.192	-	2.285.192	0,00
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	-	106.087.408	-	106.087.408	0,00
01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	KD	-	13.242.000	-	13.242.000	0,00
01	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	KD	-	64.203.776	-	64.203.776	0,00
		KP :		**20.806.810.000**	**16.917.046.659**	**-**	**16.917.046.659**	**81,31**
		KD :		**-**	**472.968.700**	**-**	**472.968.700**	**0,00**
		Total Setjen :		**20.806.810.000**	**17.390.015.359**	**-**	**17.390.015.359**	**83,58**
02	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	KP	-	37.825.032	-	37.825.032	0,00
		KP :		**-**	**37.825.032**	**-**	**37.825.032**	**0,00**
		Total Itjen :		**-**	**37.825.032**	**-**	**37.825.032**	**0,00**
03	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	-	69.848.619	-	69.848.619	0,00
		KP :		**-**	**69.848.619**	**-**	**69.848.619**	**0,00**
		Total Ditjen Polpum :		**-**	**69.848.619**	**-**	**69.848.619**	**0,00**
04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	KP	-	358.827.072	-	358.827.072	0,00
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	242.601.000	5.377.269.967	-	5.377.269.967	2216,51
05	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	KD	171.890.000	36.243.050	-	36.243.050	21,09

LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

ESELON I	SATKER	NAMA SATKER	JK	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	% REALISASI PENDAPATAN
		KP :		**-**	**358.827.072**	**-**	**358.827.072**	**0,00**
		DK :		**414.491.000**	**5.413.513.017**	**-**	**5.413.513.017**	**1306,06**
		Total Ditjen Bina Adwil :		**414.491.000**	**5.772.340.089**	**-**	**5.772.340.089**	**1392,63**
05	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	191.352.000	46.544.100	-	46.544.100	24,32
05	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	KD	175.305.000	16.168.740	-	16.168.740	9,22
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	550.000.000	2.623.917.960	-	2.623.917.960	477,08
07	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	KP	-	7.003.515	-	7.003.515	0,00
		KP :		**191.352.000**	**46.544.100**	**-**	**46.544.100**	**24,32**
		KD :		**725.305.000**	**2.647.090.215**	**-**	**2.647.090.215**	**364,96**
		Total Ditjen Bina Pemdes :		**916.657.000**	**2.693.634.315**	**-**	**2.693.634.315**	**293,85**
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	664.890.871.000	408.437.049.053	-	408.437.049.053	61,43
		KP :		**664.890.871.000**	**408.437.049.053**	**-**	**408.437.049.053**	**61,43**
		Total Ditjen Bina Bangda :		**664.890.871.000**	**408.437.049.053**	**-**	**408.437.049.053**	**61,43**
09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	-	12.498.320	-	12.498.320	0,00
		KP :		**-**	**12.498.320**	**-**	**12.498.320**	**0,00**
		Total Ditjen Otda :		**-**	**12.498.320**	**-**	**12.498.320**	**0,00**
11	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	KP	-	201.783.955	-	201.783.955	0,00
		KP :		**-**	**201.783.955**	**-**	**201.783.955**	**0,00**
		Total Ditjen Dukcapil :		**-**	**201.783.955**	**-**	**201.783.955**	**0,00**
12	027114	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEME	KD	5.457.930.000	7.012.025.685	-	7.012.025.685	128,47
		KP :		**5.457.930.000**	**7.012.025.685**	**-**	**7.012.025.685**	**128,47**

LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

ESELON I	SATKER	NAMA SATKER	JK	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	% REALISASI PENDAPATAN
		Total Ditjen Bina Keuda :		**5.457.930.000**	**7.012.025.685**	**-**	**7.012.025.685**	**128,47**
12	027177	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEME	KD	5.490.655.000	15.851.296.000	-	15.851.296.000	288,70
		KP :		**5.490.655.000**	**15.851.296.000**	**-**	**15.851.296.000**	**288,70**
		Total BSKDN :		**5.490.655.000**	**15.851.296.000**	**-**	**15.851.296.000**	**288,70**
12	403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	KD	8.326.570.000	15.568.310.759	-	15.568.310.759	186,97
12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KP	21.377.376.000	11.808.310.475	-	11.808.310.475	55,24
12	506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	KD	2.625.248.000	11.912.588.542	-	11.912.588.542	453,77
12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI	KD	1.290.400.000	851.472.000	-	851.472.000	65,99
		KP :		**8.326.570.000**	**15.568.310.759**	**-**	**15.568.310.759**	**186,97**
		KD :		**25.293.024.000**	**24.572.371.017**	**-**	**24.572.371.017**	**97,15**
		Total BPSDM :		**33.619.594.000**	**40.140.681.776**	**-**	**40.140.681.776**	**119,40**
		KP :		**705.164.188.000**	**464.513.055.254**	**-**	**464.513.055.254**	**65,87**
		KD :		**26.018.329.000**	**27.692.429.932**	**-**	**27.692.429.932**	**106,43**
		DK :		**414.491.000**	**5.413.513.017**	**-**	**5.413.513.017**	**1306,06**
		Total Kementerian :		**731.597.008.000**	**497.618.998.203**	**-**	**497.618.998.203**	**68,02**

LAMPIRAN II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

LAMPIRAN II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	2.310.809.594.000	1.844.206.433.000	546.608.213.638	63.651.636	546.544.562.002	29,64	1.297.661.870.998
01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	544.546.595.000	501.005.805.000	231.706.133.798	18.350.774	231.687.783.024	46,25	269.318.021.976
01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	105.160.634.000	79.779.959.000	29.526.170.873	19.527.581	29.506.643.292	37,01	50.273.315.708
01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	57.360.865.000	48.087.980.000	13.376.908.824	78	13.376.908.746	27,82	34.711.071.254
01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	40.637.259.000	38.454.587.000	21.831.047.863	127	21.831.047.736	56,77	16.623.539.264
01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	42.067.055.000	36.690.920.000	17.354.179.836	556.075	17.353.623.761	47,30	19.337.296.239
01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	44.111.550.000	40.822.656.000	19.979.458.043	-	19.979.458.043	48,94	20.843.197.957
01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	39.144.041.000	37.367.271.000	16.915.057.313	379	16.915.056.934	45,27	20.452.214.066
01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	50.192.396.000	47.501.257.000	29.216.513.505	-	29.216.513.505	61,51	18.284.743.495
	KP :			**2.960.516.823.000**	**2.424.992.197.000**	**807.840.518.309**	**101.529.991**	**807.738.988.318**	**33,31**	**1.617.253.208.682**
	KD :			**273.513.166.000**	**248.924.671.000**	**118.673.165.384**	**556.659**	**118.672.608.725**	**47,67**	**130.252.062.275**
		Total Setjen :		**3.234.029.989.000**	**2.673.916.868.000**	**926.513.683.693**	**102.086.650**	**926.411.597.043**	**34,65**	**1.747.505.270.957**
02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	135.906.008.000	114.996.537.000	66.947.663.026	3.462.030	66.944.200.996	58,22	48.052.336.004
	KP :			**135.906.008.000**	**114.996.537.000**	**66.947.663.026**	**3.462.030**	**66.944.200.996**	**58,22**	**48.052.336.004**
		Total Itjen :		**135.906.008.000**	**114.996.537.000**	**66.947.663.026**	**3.462.030**	**66.944.200.996**	**58,22**	**48.052.336.004**
03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	359.205.948.000	260.863.413.000	204.912.023.100	36.454.298	204.875.568.802	78,55	55.987.844.198
	KP :			**359.205.948.000**	**260.863.413.000**	**204.912.023.100**	**36.454.298**	**204.875.568.802**	**78,55**	**55.987.844.198**
		Total Ditjen Polpum :		**359.205.948.000**	**260.863.413.000**	**204.912.023.100**	**36.454.298**	**204.875.568.802**	**78,55**	**55.987.844.198**
04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	362.032.974.000	317.109.670.000	103.265.769.649	11.435.561	103.254.334.088	32,56	213.855.335.912
	KP :			**362.032.974.000**	**317.109.670.000**	**103.265.769.649**	**11.435.561**	**103.254.334.088**	**32,56**	**213.855.335.912**
		Total Ditjen Bina Adwil :		**362.032.974.000**	**317.109.670.000**	**103.265.769.649**	**11.435.561**	**103.254.334.088**	**32,56**	**213.855.335.912**
05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	250.229.069.000	203.318.307.000	69.294.663.125	1.416.941	69.293.246.184	34,08	134.025.060.816
05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	22.402.719.000	16.801.984.000	9.357.896.132	555.403	9.357.340.729	55,70	7.444.643.271
05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	35.664.381.000	16.010.584.000	9.526.735.449	16.757.910	9.509.977.539	59,50	6.500.606.461
05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	23.808.784.000	15.748.963.000	9.084.647.779	555.180	9.084.092.599	57,68	6.664.870.401
	KP :			**250.229.069.000**	**203.318.307.000**	**69.294.663.125**	**1.416.941**	**69.293.246.184**	**34,08**	**134.025.060.816**
	KD :			**81.875.884.000**	**48.561.531.000**	**27.969.279.360**	**17.868.493**	**27.951.410.867**	**57,60**	**20.610.120.133**
		Total Ditjen Bina Pemdes :		**332.104.953.000**	**251.879.838.000**	**97.263.942.485**	**19.285.434**	**97.244.657.051**	**38,62**	**154.635.180.949**
06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	295.514.771.000	230.176.524.000	86.714.536.871	34.394.053	86.680.142.818	37,67	143.496.381.182
	KP :			**295.514.771.000**	**230.176.524.000**	**86.714.536.871**	**34.394.053**	**86.680.142.818**	**37,67**	**143.496.381.182**
		Total Ditjen Bina Bangda :		**295.514.771.000**	**230.176.524.000**	**86.714.536.871**	**34.394.053**	**86.680.142.818**	**37,67**	**143.496.381.182**
07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	148.250.900.000	107.926.687.000	50.266.920.273	23.415.632	50.243.504.641	46,58	57.683.182.359
	KP :			**148.250.900.000**	**107.926.687.000**	**50.266.920.273**	**23.415.632**	**50.243.504.641**	**46,58**	**57.683.182.359**
		Total Ditjen Otda :		**148.250.900.000**	**107.926.687.000**	**50.266.920.273**	**23.415.632**	**50.243.504.641**	**46,58**	**57.683.182.359**

LAMPIRAN II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.241.806.537.000	2.150.060.431.000	457.175.232.914	6.571.363	457.168.661.551	21,26	1.692.891.769.449
	KP :			**2.241.806.537.000**	**2.150.060.431.000**	**457.175.232.914**	**6.571.363**	**457.168.661.551**	**21,26**	**1.692.891.769.449**
		Total Ditjen Dukcapil :		**2.241.806.537.000**	**2.150.060.431.000**	**457.175.232.914**	**6.571.363**	**457.168.661.551**	**21,26**	**1.692.891.769.449**
09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	189.391.793.000	127.738.920.000	56.280.297.669	60.480.783	56.219.816.886	44,06	71.519.103.114
	KP :			**189.391.793.000**	**127.738.920.000**	**56.280.297.669**	**60.480.783**	**56.219.816.886**	**44,06**	**71.519.103.114**
		Total Ditjen Bina Keuda :		**189.391.793.000**	**127.738.920.000**	**56.280.297.669**	**60.480.783**	**56.219.816.886**	**44,06**	**71.519.103.114**
11	403222	KP	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	91.594.938.000	71.980.289.000	31.823.805.636	8.769.381	31.815.036.255	44,21	40.165.252.745
	KP :			**91.594.938.000**	**71.980.289.000**	**31.823.805.636**	**8.769.381**	**31.815.036.255**	**44,21**	**40.165.252.745**
		Total BSKDN :		**91.594.938.000**	**71.980.289.000**	**31.823.805.636**	**8.769.381**	**31.815.036.255**	**44,21**	**40.165.252.745**
12	027114	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	38.293.117.000	34.220.679.000	16.856.275.065	42.713.887	16.813.561.178	49,26	17.407.117.822
12	027177	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	56.465.525.000	47.971.166.000	15.417.198.176	2.765.934	15.414.432.242	32,14	32.556.733.758
12	403216	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	55.784.832.000	47.798.968.000	20.588.669.491	370.996	20.588.298.495	43,07	27.210.669.505
12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	201.684.003.000	137.793.451.000	70.807.838.647	3.885.144	70.803.953.503	51,39	66.989.497.497
12	506137	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	31.005.252.000	27.833.350.000	13.919.954.218	1.305.251	13.918.648.967	50,01	13.914.701.033
12	506138	KD	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI	26.928.460.000	24.737.065.000	13.480.524.955	3.508.550	13.477.016.405	54,50	11.260.048.595
	KP :			**38.293.117.000**	**34.220.679.000**	**16.856.275.065**	**42.713.887**	**16.813.561.178**	**49,26**	**17.407.117.822**
	KD :			**371.868.072.000**	**286.134.000.000**	**134.214.185.487**	**11.835.875**	**134.202.349.612**	**46,91**	**151.931.650.388**
		Total BPSDM :		**410.161.189.000**	**320.354.679.000**	**151.070.460.552**	**54.549.762**	**151.015.910.790**	**47,16**	**169.338.768.210**
	KP :			**7.072.742.878.000**	**6.043.383.654.000**	**1.951.377.705.637**	**330.643.920**	**1.951.047.061.717**	**32,29**	**4.092.336.592.283**
	KD :			**727.257.122.000**	**583.620.202.000**	**280.856.630.231**	**30.261.027**	**280.826.369.204**	**48,12**	**302.793.832.796**
		Total Kementerian :		**7.800.000.000.000**	**6.627.003.856.000**	**2.232.234.335.868**	**360.904.947**	**2.231.873.430.921**	**33,68**	**4.395.130.425.079**

LAMPIRAN III

REKAPITULASI PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG SAMPAI DENGAN 2026

REKAPITULASI PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG SAMPAI DENGAN 2026

LAMPIRAN III

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	ESELON 1	Kode Satker	SATKER	DONOR	JENIS HIBAH LANGSUNG	KETERANGAN HIBAH	NOMOR REGISTER HIBAH	NILAI HIBAH	NOMOR NASKAH PENJANJIAN HIBAH	TANGGAL NPH	NOMOR BAST	TANGGAL BAST
1	01	403200	Sekretariat Jenderal	Pemerintah Australia	Jasa	hibah jasa dalam rangka Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)	27BMXZ9A	86.240.000			15/BAST-KEMENDAGRI/2/2026	3 Februari 2026
2	01	403200	Sekretariat Jenderal	Pemerintah Australia	Jasa	hibah jasa dalam rangka Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)	27BMXZ9A	3.129.493.580			16/BAST-KEMENDAGRI/2/2026	3 Februari 2026
3	01	448302	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Pemerintah Provinsi Bali	Uang	Hibah uang dari Pemerintah Provinsi Bali untuk Mendukung Program Pengembangan Kompetensi dan Pembentukan Kader Bagi ASN/Calon ASN Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk pembangunan Rumah Singgah/Jagat Bali	2SR6LGRA	16.300.000.000	29.U/04-C/2026 dan 008.8.7.1/150/IPDN	5 Maret 2026		
4	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Pemerintah Australia	Jasa	Synergies And Collaboration For Basic Service Delivery Acceleration Atau Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)	27BMXZ9A	4.695.037.114			13/BAST-KEMENDAGRI/2/2026	3 Februari 2026
5	11	403222	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Pemerintah Australia	Jasa	Synergies And Collaboration For Basic Service Delivery Acceleration Atau Sinergi Dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)	27BMXZ9A	359.256.426			14/BAST-KEMENDAGRI/2/2026	3 Februari 2026
TOTAL								**24.570.027.120**				

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026

Fungsi Pelayanan Umum

Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.403200.SEKRETARIAT JENDERAL										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal								
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	1.187.092.000	404.528.751	34,08	15	Kesepakatan	13	86,67
			RO_Kerjasama Luar Negeri	2.317.093.000	708.739.167	30,59	18	Kesepakatan	17	94,44
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Hukum	901.196.000	349.012.761	38,73	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Pusat Fasilitasi Kerja Sama	1.029.222.000	604.183.779	58,70	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Fasilitasi Penyusunan Peraturan PerundangUndangan	2.326.429.000	1.250.717.191	53,76	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Fasilitasi Telaahan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Daerah	1.645.717.000	815.464.527	49,55	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Hukum	1.008.332.000	333.904.395	33,11	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Non Litigasi Hukum	872.285.000	78.679.000	9,02	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Rekomendasi Perjalanan Luar Negeri	282.609.000	275.962.292	97,65	1	layanan	0	0,00
			RO_Layanan Umum	1.395.484.000	1.091.028.630	78,18	1	Layanan	0	0,00
			RO_Penanganan Perkara Litigasi	1.969.311.000	848.303.272	43,08	80	Perkara	115	143,75
		Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal								
			RO_Bantuan Pemerintah Penghargaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	689.887.560.000	124.119.315.760	17,99	200	Lembaga	71	35,50
			RO_Fasilitasi Perumusan Kebijakan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kemendagri	1.514.163.000	588.086.635	38,84	1	Layanan	0	0,00
			RO_Fasilitasi Perumusan Kebijakan Program dan Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal	82.215.259.000	394.202.184	0,48	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Administrasi Pimpinan	2.346.073.000	929.727.545	39,63	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Keuangan dan Aset	764.603.000	550.780.159	72,03	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Perencanaan	352.698.000	230.485.018	65,35	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Umum	496.665.000	358.430.366	72,17	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Ketatausahaan dan Koordinasi Tugas Pimpinan	26.093.376.000	13.047.334.156	50,00	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan Kementerian Dalam Negeri	191.642.000	94.699.770	49,41	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.299.477.000	593.874.886	45,70	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Penyerasian Kebijakan Anggaran Kementerian Dalam Negeri	971.432.000	472.094.656	48,60	3	Layanan	1	33,33
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Implementasi SAKIP, Manajemen Kinerja dan Penugasan Lainnya Bidang Monitoring dan Evaluasi lingkup Kemendagri	1.646.433.000	808.542.291	49,11	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko lingkup Kemendagri	196.920.000	65.168.800	33,09	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Sekretariat Jenderal	76.460.000	34.282.080	44,84	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen SPIP lingkup Kemendagri	972.620.000	25.527.600	2,62	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) untuk Kementerian/Lembaga dengan Jumlah di atas 6 unit	98.835.000	98.613.125	99,78	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	703.712.000	161.147.220	22,90	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	358.038.940.000	171.518.542.951	47,90	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	54.256.660.000	20.040.500.712	36,94	5	Unit	1	20,00
			RO_Layanan Protokoler	4.534.045.000	2.108.461.070	46,50	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	81.652.858.000	44.228.186.757	54,17	570	Unit	462	81,05
			RO_Layanan Umum	5.241.683.000	3.383.218.756	64,54	1	Layanan	0	0,00
			RO_Pelaksanaan Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Direktif Presiden Lingkup Penugasan Kemendagri	681.545.000	170.823.000	25,06	1	Layanan	0	0,00
			RO_Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	147.599.241.000	122.727.102.609	83,15	1	Paket	0	0,00
			RO_Penata Kelolaan Aset	1.251.008.000	731.105.348	58,44	1	Layanan	0	0,00
			RO_Pengelolaan Administrasi, Pelaporan, dan Kinerja Keuangan	1.301.120.000	840.439.858	64,59	1	Layanan	0	0,00
			RO_Penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Tata Kelola Keuangan Sekretariat Jenderal	834.662.000	568.809.426	68,15	1	Layanan	0	0,00
			RO_Penyusunan Dokumen Capaian Pelaksanaan Prioritas Kementerian dan Nasional lingkup Sekretariat Jenderal	426.142.000	127.773.162	29,98	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Permendagri mengenai Penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Daerah lingkup Kemendagri	70.303.000	-	0,00	1	PerMen	0	0,00

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026

Fungsi Pelayanan Umum

Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal								
			RO_Layanan Data dan Informasi	1.628.150.000	72.474.240	4,45	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Pusat Data dan Sistem Informasi	1.644.840.000	888.378.826	54,01	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Pusat Penerangan	1.125.190.000	369.772.850	32,86	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	451.650.000	68.710.500	15,21	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Komunikasi Publik Kementerian Dalam Negeri	47.234.860.000	12.860.624.327	27,23	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Pengaduan	3.278.076.000	705.901.455	21,53	1	layanan	0	0,00
			RO_Layanan Umum	1.789.313.000	364.312.658	20,36	1	Layanan	0	0,00
			RO_Optimalisasi Penerapan SIPD sebagai Platform Tunggal Pemerintahan di Daerah	22.094.991.000	5.178.655.026	23,44	1	Sistem Informasi	0	0,00
			RO_Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID Kemendagri	2.404.176.000	415.522.951	17,28	1	Layanan	0	0,00
			RO_Pengadaan Data Center	115.209.371.000	-	0,00	1	Unit	0	0,00
			RO_Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4.632.665.000	1.779.397.876	38,41	1	Unit	0	0,00
			RO_Pengelolaan Aplikasi Situs Web ULA	148.039.000	1.774.790	1,20	1	Sistem Informasi	0	0,00
			RO_Pengelolaan dan Implementasi SI Manajemen	225.930.000	33.200.000	14,69	1	Sistem Informasi	0	0,00
			RO_Pengelolaan Implementasi SDPDN dan SIPD HUB	4.906.641.000	627.389.826	12,79	2	Sistem Informasi	0	0,00
			RO_Pengelolaan Infrastruktur Tik dan Keamanan Informasi SIPD	128.289.376.000	164.814.900	0,13	3	Unit	0	0,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal								
			RO_Asistensi dan Supervisi Kelembagaan Sekretariat Daerah	690.352.000	224.147.840	32,47	38	Provinsi	18	47,37
			RO_Asistensi dan Supervisi Ketatalaksanaan Pemda	202.961.000	171.266.000	84,38	38	Provinsi	19	50,00
			RO_Asistensi dan Supervisi Reformasi Birokrasi Pemda	672.038.000	289.689.273	43,11	38	Provinsi	15	39,47
			RO_Layanan Administrasi dan Konsultasi Pemda	163.302.000	141.801.000	86,83	38	Provinsi	38	100,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Organisasi dan Tata Laksana	579.493.000	326.318.959	56,31	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Sumber Daya Manusia	1.166.842.000	364.418.848	31,23	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	21.598.699.000	4.542.910.410	21,03	3.831	Orang	1.272	33,20
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.632.492.000	688.698.746	42,19	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi	1.081.098.000	435.059.672	40,24	1	layanan	0	0,00
			RO_Penilaian Kompetensi di Lingkungan Instansi Pemerintah	395.775.000	115.173.000	29,10	215	Orang	110	51,16
			RO_Penilaian Kompetensi Jabatan administrator, pengawas dan fungsional di Lingkungan Kemendagri	18.645.000	-	0,00	15	Orang	0	0,00
			RO_Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri	19.023.000	-	0,00	15	Orang	0	0,00
			RO_Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri	271.540.000	-	0,00	81	Orang	0	0,00
01.483005.DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU										
	Program Dukungan Manajemen									
		Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu								
			RO_Layanan Bantuan Hukum	17.025.000	-	0,00	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Data dan Informasi	2.175.429.000	234.435.900	10,78	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	139.446.000	22.335.000	16,02	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Hukum	128.969.000	-	0,00	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	28.811.830.000	9.154.596.639	31,77	1	layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penilaian Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu	5.309.970.000	824.750.110	15,53	76	Lembaga	40	52,63
			RO_Layanan Perkantoran	37.150.239.000	16.050.542.357	43,20	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Protokoler	89.566.000	27.160.760	30,32	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.181.524.000	1.981.769.170	90,84	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Umum	3.775.961.000	1.230.580.937	32,59	1	Layanan	0	0,00
03.027210.DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM										
		Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum								
		Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan								
			RO_Bantuan Keuangan ke Partai Politik	134.489.125.000	134.489.125.000	100,00	8	Lembaga	8	100,00
			RO_Daerah dengan Indeks Kinerja Ormas berkategori "Baik"	300.367.000	31.279.000	10,41	9	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Daerah	4.130.215.000	3.331.079.267	80,65	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026

Fungsi Pelayanan Umum

Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Fasilitasi kelengkapan administrasi dan pengelolaan bantuan keuangan partai politik	222.578.000	136.510.194	61,33	8	Lembaga	4	50,00
			RO_Fasilitasi Penguatan Demokrasi Bagi Masyarakat di daerah	481.432.000	400.724.178	83,24	38	Daerah (ProvKabKota)	33	86,84
			RO_Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	433.538.000	387.118.977	89,29	38	Daerah (ProvKabKota)	30	78,95
			RO_Fasilitasi Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	500.192.000	432.408.400	86,45	38	Daerah (ProvKabKota)	30	78,95
			RO_Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Partai Politik	226.668.000	100.588.422	44,38	8	Lembaga	0	0,00
			RO_Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	671.581.000	139.139.000	20,72	2	Rekomendasi Kebijakan	1	50,00
			RO_Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Penanganan Isu-Isu Strategis/Aktual Bidang Organisasi Kemasyarakatan	846.331.000	578.444.954	68,35	10	forum	3	30,00
			RO_Konsolidasi Nasional Guna Menciptakan Stabilitas Politik untuk Mendukung Pelaksanaan Asta Cita	2.047.005.000	496.796.850	24,27	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait isu strategis aktual bidang Politik Dalam Negeri	608.296.000	373.957.618	61,48	3	forum	2	66,67
			RO_Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	2.094.406.000	827.115.407	39,49	30	Kelompok Masyarakat	0	0,00
			RO_Pembinaan Kesbangpol Daerah dalam Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.070.212.000	624.497.111	58,35	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	19	50,00
			RO_Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	350.000.000	245.298.194	70,09	350	Orang	300	85,71
			RO_Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	899.883.000	602.196.491	66,92	7	forum	6	85,71
			RO_Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Manajemen Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	1.068.595.000	879.559.476	82,31	1.300	Orang	850	65,38
			RO_Penyusunan Rekomendasi Kebijakan UU Ormas dan Pengaturan Turunannya	285.426.000	14.405.900	5,05	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Rekomendasi Kebijakan Pertimbangan Urgensi terhadap Dana Abadi Organisasi Kemasyarakatan	200.209.000	-	0,00	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Rekomendasi, Proyeksi dan Refleksi Perkembangan Politik Dalam Negeri	943.607.000	595.120.038	63,07	3	Rekomendasi Kebijakan	2	66,67
			RO_Seleksi Anggota Penyelenggara Pemilu	5.568.241.000	55.490.677	1,00	12	orang	0	0,00
		Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya								
			RO_Daerah dengan Indeks Harmoni Indonesia berkategori "Bagus"	332.620.000	108.036.440	32,48	9	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2	22,22
			RO_Fasilitasi Ketahanan Ekonomi dan kerjasama intelijen ekonomi	356.223.000	288.839.311	81,08	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	39,47
			RO_Fasilitasi Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	304.408.000	88.822.711	29,18	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18	47,37
			RO_Fasilitasi Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Rawan Konflik Sosial	2.115.446.000	702.866.623	33,23	6	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar dan Intra Suku , Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan, Ras dan Golongan	1.178.469.000	1.163.963.330	98,77	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (PKS) di daerah melalui Tim terpadu yang efektif	884.868.000	825.467.606	93,29	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	30	78,95
			RO_Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.	693.261.000	688.028.861	99,25	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Fasilitasi Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam Membangun Harmoni Kebangsaan untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1.028.226.000	724.506.300	70,46	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20	52,63
			RO_Fasilitasi Penguatan Nilai Sejarah Kebangsaan serta Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara Bagi Generasi Muda dalam rangka Menyongsong Indonesia Emas 2045	777.433.000	743.385.574	95,62	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Fasilitasi penguatan seni dan budaya Indonesia serta produk dalam negeri dalam rangka ketahanan identitas bangsa	257.073.000	133.927.628	52,10	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Fasilitasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Bagi Aparatur	630.423.000	434.129.580	68,86	550	Orang	0	0,00
			RO_Internalisasi Nilai Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam Menggelorakan Nilai Pancasila serta Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	980.486.000	779.129.786	79,46	980	Orang	0	0,00

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026

Fungsi Pelayanan Umum

Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Komunikasi Sosial dan Penanganan Isu-Isu Strategis/Aktual bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	886.507.000	881.949.494	99,49	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan pembahasan isu strategis/aktual Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI	682.356.000	444.786.717	65,18	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	28	73,68
			RO_Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)	553.748.000	181.262.774	32,73	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	22	57,89
			RO_Peningkatan Kapasitas Aparatur Pusat dan Daerah di Bidang Intelijen Ekonomi	381.486.000	363.558.976	95,30	60	Orang	60	100,00
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional								
			RO_Daerah dengan Indeks Kewaspadaan Nasional berkategori "Baik"	322.001.000	36.510.000	11,34	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	26,32
			RO_Deteksi Dini melalui Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	913.511.000	357.888.473	39,18	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20	52,63
			RO_Fasilitasi kewaspadaan nasional	993.132.000	740.706.504	74,58	38	Daerah (ProvKabKota)	28	73,68
			RO_Fasilitasi Pelayanan dan Perizinan Penelitian Orang Asing	104.839.000	49.577.362	47,29	300	Orang	180	60,00
			RO_Fasilitasi Penanganan Konflik Pemerintahan	262.419.000	197.740.682	75,35	9	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8	88,89
			RO_Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	2.068.179.000	1.946.079.058	94,10	150	Orang	100	66,67
			RO_Kebijakan / Regulasi Bidang Kewaspadaan Nasional	148.626.000	112.555.000	75,73	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Kewaspadaan nasional berbasis kewaspadaan informasi	3.691.080.000	1.389.703.998	37,65	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	39,47
			RO_Komunikasi Sosial Bidang Kewaspadaan Nasional	696.688.000	562.462.542	80,73	4	forum	3	75,00
			RO_Pembinaan dan monev forkopimda	488.805.000	316.069.104	64,66	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20	52,63
			RO_Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme	260.435.000	204.290.282	78,44	4	forum	3	75,00
			RO_Penggalangan dan Cipta Kondisi terhadap Ancaman, Hambatan Gangguan Stabilitas Sosial dan Politik Dalam Negeri	1.267.220.000	1.252.922.963	98,87	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM)	2.000.000.000	104.807.500	5,24	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
07.621892.DITJEN OTONOMI DAERAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								
			RO_Daerah yang difasilitasi penerapan SPBE-nya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	395.946.000	83.743.473	21,15	30	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	154.317.000	65.428.382	42,40	60	Kab/Kota	0	0,00
			RO_Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kapasitas Daerah	137.720.000	97.640.000	70,90	1	PerPres	0	0,00
			RO_Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	2.630.473.000	1.177.335.949	44,76	11	Provinsi	0	0,00
			RO_Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Kab/Kota Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	102.736.000	35.336.000	34,39	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Provinsi Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	627.487.000	107.685.126	17,16	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
		Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa								
			RO_Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penguatan Kapasitas dan Kinerja Daerah Bersifat Kekhususan dan Keistimewaan	9.785.877.000	3.989.539.086	40,77	10	Daerah (ProvKabKota)	6	60,00
			RO_Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	331.817.000	69.799.611	21,04	1	RUU	0	0,00
			RO_Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Aglomerasi	279.460.000	-	0,00	1	RPP	0	0,00
			RO_Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Kawasan Aglomerasi	131.807.000	-	0,00	1	R.Perpres	0	0,00
			RO_Rekomedasi Kebijakan Terkait DPOD	839.681.000	444.960.278	52,99	4	Rekomendasi Kebijakan	1	25,00
			RO_Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa di DOB	2.988.833.000	828.687.000	27,73	4	Rekomendasi Kebijakan	1	25,00
			RO_Rekomendasi Model Ideal Penataan Daerah dalam rangka Revisi UU No. 23 Tahun 2014	125.772.000	78.595.666	62,49	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Review Kebijakan Penataan Daerah dalam rangka Pemutakhiran RPP Penataan Daerah dan RPP Desartada	2.452.224.000	885.352.745	36,10	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026

Fungsi **Pelayanan Umum**

Sub Fungsi **Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri**

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa								
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kualitas Rancangan Perda dan Perkada yang telah sesuai dengan hasil review Kemendagri	1.634.553.000	761.189.461	46,57	38	Daerah (ProvKabKota)	4	10,53
			RO_Daerah yang memiliki Skor Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Perda berkategori Sangat Baik	1.196.331.000	829.649.960	69,35	17	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Database Peraturan Daerah yang terintegrasi	2.239.771.000	263.488.019	11,76	1	Data	0	0,00
			RO_Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perizinan di daerah	1.177.783.000	768.683.740	65,27	2	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
		Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah								
			RO_Asosiasi Pemerintahan Daerah dan DPRD yang optimal	236.761.000	42.772.900	18,07	7	Lembaga	2	28,57
			RO_Daerah Yang Difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KDh dan DPRD	1.107.422.000	578.139.300	52,21	38	Provinsi	4	10,53
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Pensiun KDH serta PAW Anggota DPRD	523.626.000	313.478.700	59,87	200	Daerah (ProvKabKota)	8	4,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penyelesaian permasalahan KDH dan DPRD dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah	870.520.000	327.295.800	37,60	38	Daerah (ProvKabKota)	17	44,74
			RO_Daerah yang Kepala Daerah dan DPRD nya yang Menyampaikan LKPJ dan Rekomendasi LKPJ Tepat Waktu	461.164.000	268.979.000	58,33	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	26,32
			RO_Daerah yang memiliki skor Indeks Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah dengan kategori Baik	537.074.000	419.006.100	78,02	5	Provinsi	0	0,00
			RO_Evaluasi Efektivitas Perangkat Daerah berdasarkan PP Perangkat Daerah eksisting	1.798.313.000	631.275.920	35,10	38	Daerah (ProvKabKota)	26	68,42
			RO_Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	1.003.150.000	274.250.128	27,34	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah dalam rangka Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	653.236.000	497.710.800	76,19	2	Rekomendasi Kebijakan	1	50,00
			RO_Rekomendasi Model Ideal Perangkat Daerah dalam rangka Revisi UU No. 23 Tahun 2014	1.701.568.000	395.157.700	23,22	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Sistem E-mutasi	157.643.000	4.230.550	2,68	1	Sistem Informasi	0	0,00
09.662766.DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah								
			RO_Daerah Yang Difasilitasi Dalam Memanfaatkan Pinjaman Daerah	1.108.812.000	277.027.845	24,98	38	Daerah (ProvKabKota)	20	52,63
			RO_Daerah Yang Difasilitasi Dalam Menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah	339.405.000	85.860.781	25,30	38	Daerah (ProvKabKota)	15	39,47
			RO_Daerah yang Optimal Dalam Memanfaatkan Dana Transfer	4.768.104.000	2.234.773.549	46,87	496	Daerah (Prov/Kab/Kota)	250	50,40
			RO_Data dan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	618.837.000	101.949.052	16,47	1	Data	0	0,00
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah								
			RO_Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3.566.555.000	1.063.779.907	29,83	1	Data	0	0,00
			RO_Daerah Dengan Proporsi Kontribusi BUMD Meningkat Dalam APBD	7.809.575.000	1.363.384.395	17,46	360	Daerah (ProvKabKota)	247	68,61
			RO_Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD Meningkat	2.510.591.000	1.461.460.816	58,21	360	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Daerah Dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat	1.308.148.000	616.457.370	47,12	360	Daerah (ProvKabKota)	292	81,11
			RO_Daerah Yang Difasilitasi Dalam Pemenuhan dan Penginputan Data Perhitungan IPKD	1.898.936.000	199.492.530	10,51	546	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan LKPD	434.530.000	243.340.779	56,00	500	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Daerah yang Difasilitasi Dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai atas Penerimaan Daerah	1.442.475.000	733.539.430	50,85	220	Daerah (ProvKabKota)	165	75,00
			RO_Daerah yang Difasilitasi Dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai atas Pengeluaran Daerah	1.286.585.000	551.486.242	42,86	220	Daerah (ProvKabKota)	100	45,45
			RO_Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)	886.140.000	194.597.973	21,96	420	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Daerah Yang Melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah Secara Wajar	3.756.088.000	729.150.806	19,41	510	Daerah (ProvKabKota)	150	29,41

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026

Fungsi Pelayanan Umum

Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Daerah yang Menerapkan PPK BLUD	2.954.089.000	533.361.571	18,06	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	251	45,97
			RO_Daerah Yang Menerapkan SIPD Bidang Keuangan Daerah	6.790.065.000	3.784.863.360	55,74	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	250	45,79
			RO_Data dan Informasi Publik Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	438.520.000	134.910.744	30,77	1	Data	0	0,00
			RO_Data dan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	152.482.000	56.736.220	37,21	1	Data	0	0,00
			RO_Data dan Informasi Publik Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	529.433.000	160.826.789	30,38	1	Data	0	0,00
			RO_Fasilitasi Isu Aktual Pengelolaan Keuangan Daerah	2.071.508.000	48.929.528	2,36	38	Provinsi	0	0,00
			RO_Kepmendari Bidang Pengelolaan BUMD	154.840.000	14.457.225	9,34	6	peraturan	0	0,00
			RO_Permendagri Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	106.324.000	16.945.300	15,94	1	PerMen	0	0,00
			RO_Permendagri Bidang Pendapatan Daerah	89.350.000	17.000.000	19,03	1	PerMen	0	0,00
			RO_Permendagri Bidang Pengelolaan BLUD	106.324.000	-	0,00	1	PerMen	0	0,00
			RO_Permendagri Bidang Pengelolaan BMD	106.324.000	79.618.500	74,88	1	PerMen	0	0,00
			RO_PERMENDAGRI BIDANG PENGELOLAAN BUMD	108.766.000	9.640.000	8,86	1	PerMen	0	0,00
			RO_Permendagri Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	87.400.000	42.175.899	48,26	1	PerMen	0	0,00
			RO_Permendagri Pembinaan BUMD	97.401.000	6.434.500	6,61	1	PerMen	0	0,00
			RO_Permendagri Pinjaman BUMD	97.401.000	6.397.800	6,57	1	PerMen	0	0,00
			RO_Permendagri Restrukturisasi BUMD	97.401.000	6.435.000	6,61	1	PerMen	0	0,00
			RO_Peta Jalan Belanja Pegawai Di Daerah	2.842.356.000	285.970.281	10,06	1	Data	0	0,00
			RO_Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Pencapaian Realisasi Belanja secara Optimal	750.502.000	228.520.258	30,45	38	Provinsi	1	2,63
			RO_Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan APBD	889.273.000	274.943.783	30,92	38	Provinsi	0	0,00
			RO_Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	395.135.000	99.262.784	25,12	38	Provinsi	0	0,00
			RO_Provinsi Yang Memenuhi Anggaran SPM	267.509.000	24.333.956	9,10	38	Provinsi	21	55,26
			RO_Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	2.256.927.000	796.850.179	35,31	29	Provinsi	10	34,48
			RO_Rancangan Standar Redesain Proses Bisnis SIPD RI Bidang Keuangan Daerah	3.397.182.000	1.219.097.347	35,89	1	NSPK	0	0,00
			RO_Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Masukan Revisi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	628.394.000	14.277.400	2,27	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Rekomendasi Penyusunan Rancangan Undang-Undang BUMD	463.238.000	17.458.030		1	Rekomendasi Kebijakan	0	
Total Sub Fungsi: Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri				**2.200.580.257.000**	**768.674.374.167**	**34,93**	**16.034**		**6.105**	**38,08**

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.448302.INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN								
			RO_Fasilitasi Penyelesaian Perkara Lingkup IPDN	279.710.000	86.168.319	30,81	2	Layanan	0	0,00
			RO_Peraturan Lainnya Terkait IPDN	8.251.000	2.807.000	34,02	2	peraturan	1	50,00
			RO_Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait IPDN	24.155.000	-	0,00	2	PerMen	0	0,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN								
			RO_Layanan Pengelolaan Keuangan	457.228.000	167.551.357	36,65	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Kebijakan Program dan Belanja Kegiatan Lingkup IPDN	513.417.000	207.849.880	40,48	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	361.118.398.000	176.970.567.504	49,01	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	19.155.532.000	687.480.617	3,59	4	Paket	0	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	26.942.557.000	24.866.674.677	92,30	6.494	Unit	6.487	99,89
			RO_Layanan Umum	4.692.373.000	1.219.465.930	25,99	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN								
			RO_Layanan Data dan Informasi	371.332.000	140.280.092	37,78	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Kehumasan dan Informasi	224.325.000	121.314.000	54,08	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Protokoler	55.928.000	54.708.913	97,82	1	Layanan	1	100,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN								
			RO_Akreditasi Institusi	442.611.000	98.214.347	22,19	1	produk	0	0,00
			RO_Akreditasi Program Studi	60.883.000	-	0,00	1	produk	0	0,00
			RO_Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	60.838.000	-	0,00	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	174.812.000	104.324.452	59,68	11	Kesepakatan	6	54,55
			RO_Kerjasama Luar Negeri	2.230.815.000	895.634.590	40,15	2	Kesepakatan	0	0,00
			RO_Layanan Audit Internal	383.209.000	130.427.010	34,04	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Kepegawaian Lingkup IPDN	917.027.000	305.550.494	33,32	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen Risiko Lingkup IPDN	120.216.000	38.477.800	32,01	2	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen SDM Internal	3.192.450.000	1.291.468.235	40,45	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	272.683.000	130.442.500	47,84	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	135.561.000	45.222.500	33,36	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penjaminan Mutu Internal	319.127.000	39.188.880	12,28	1	Layanan	0	0,00
			RO_Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Lulusan IPDN	149.080.000	78.965.505	52,97	2	Laporan	0	0,00
		Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN								
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	32.331.739.000	12.089.854.117	37,39	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Pendidikan Program Pasca Sarjana	11.998.372.000	3.284.044.178	27,37	160	Orang	0	0,00
			RO_Layanan Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan	2.063.750.000	706.927.146	34,25	100	Orang	0	0,00
			RO_Layanan Penerimaan Praja IPDN	18.490.872.000	560.225.782	3,03	1.410	Orang	0	0,00
			RO_Monitoring dan Rencana Aksi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1.613.314.000	236.136.125	14,64	6	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Naskah Kebijakan Aktual Strategis	511.303.000	97.997.169	19,17	5	Kajian	0	0,00
			RO_Pengabdian Masyarakat	1.809.449.000	673.660.796	37,23	18	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan Inovasi	9.884.488.000	6.374.503.883	64,49	21	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
01.677010.IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN								
			RO_Layanan Pengelolaan Keuangan	81.021.000	41.468.000	51,18	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan Kebijakan Program dan Belanja Kegiatan Lingkup IPDN	96.117.000	24.099.000	25,07	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	33.430.492.000	11.991.960.449	35,87	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	11.166.720.000	178.864.574	1,60	2	Paket	0	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	884.218.000	328.940.001	37,20	29	Unit	29	100,00
			RO_Layanan Umum	414.998.000	57.529.341	13,86	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN								
			RO_Layanan Data dan Informasi	17.290.000	6.750.000	39,04	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN								
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	24.179.000	22.599.000	93,47	1	Kesepakatan	1	100,00
			RO_Layanan Kepegawaian Lingkup IPDN	19.480.000	19.480.000	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen Risiko Lingkup IPDN	9.774.000	9.278.000	94,93	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen SDM Internal	171.070.000	108.602.000	63,48	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	138.326.000	19.733.901	14,27	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	12.870.000	12.757.000	99,12	1	Layanan	1	100,00
		Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN								
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.621.425.000	554.847.558	34,22	1	Layanan	0	0,00
01.677024.IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN								
			RO_Layanan Pengelolaan Keuangan	41.041.000	5.000.000	12,18	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Kebijakan Program dan Belanja Kegiatan Lingkup IPDN	304.165.000	253.307.003	83,28	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	33.603.658.000	18.492.190.169	55,03	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	1.255.350.000	878.935.703	70,02	1	Paket	0	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.395.128.000	1.394.148.900	99,93	152	Unit	152	100,00
			RO_Layanan Umum	233.402.000	22.106.341	9,47	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN								
			RO_Layanan Data dan Informasi	15.208.000	-	0,00	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN								
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	15.032.000	-	0,00	1	Kesepakatan	0	0,00
			RO_Layanan Kepegawaian Lingkup IPDN	14.837.000	5.918.220	39,89	1	Layanan	0	0,00

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Manajemen Risiko Lingkup IPDN	4.125.000	4.125.000	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen SDM Internal	83.152.000	-	0,00	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	116.603.000	-	0,00	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5.645.000	-	0,00	1	Layanan	0	0,00
		Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN								
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.367.241.000	775.316.527	56,71	1	Layanan	0	0,00
01.677045.IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN								
			RO_Layanan Pengelolaan Keuangan	106.541.000	28.646.500	26,89	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Kebijakan Program dan Belanja Kegiatan Lingkup IPDN	140.050.000	100.503.524	71,76	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	29.894.801.000	15.565.899.488	52,07	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	4.066.744.000	911.386.670	22,41	4	Paket	2	50,00
			RO_Layanan Sarana Internal	90.000.000	89.672.405	99,64	607	Unit	0	0,00
			RO_Layanan Umum	412.200.000	91.394.000	22,17	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN								
			RO_Layanan Data dan Informasi	13.533.000	2.000.000	14,78	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN								
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	12.636.000	12.326.000	97,55	1	Kesepakatan	0	0,00
			RO_Layanan Kepegawaian Lingkup IPDN	12.804.000	5.046.601	39,41	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen Risiko Lingkup IPDN	6.182.000	5.651.000	91,41	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen SDM Internal	84.555.000	11.151.243	13,19	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	147.751.000	6.564.653	4,44	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	16.628.000	-	0,00	1	Layanan	0	0,00
		Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN								
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.686.495.000	523.937.752	31,07	1	Layanan	0	0,00
01.683070.IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN								
			RO_Layanan Pengelolaan Keuangan	2.862.000	2.810.427	98,20	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Kebijakan Program dan Belanja Kegiatan Lingkup IPDN	39.538.000	39.340.784	99,50	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	33.587.143.000	15.911.641.418	47,37	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	4.135.540.000	1.900.716.804	45,96	8	Paket	1	12,50
			RO_Layanan Sarana Internal	1.589.787.000	1.589.786.400	100,00	601	Unit	601	100,00
			RO_Layanan Umum	243.401.000	218.484.900	89,76	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN								
			RO_Layanan Data dan Informasi	51.000	-	0,00	1	Layanan	0	0,00

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN								
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	300.000	300.000	100,00	1	Kesepakatan	1	100,00
			RO_Layanan Kepegawaian Lingkup IPDN	3.870.000	3.869.525	99,99	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen Risiko Lingkup IPDN	50.000	-	0,00	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen SDM Internal	10.900.000	10.850.000	99,54	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	92.574.000	60.802.466	65,68	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4.779.000	4.778.493	99,99	1	Layanan	0	0,00
		Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN								
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.111.861.000	236.076.826	21,23	1	Layanan	0	0,00
01.683084.IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN								
			RO_Layanan Pengelolaan Keuangan	33.442.000	114.000	0,34	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Kebijakan Program dan Belanja Kegiatan Lingkup IPDN	290.406.000	100.684.092	34,67	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	33.254.878.000	14.493.529.874	43,58	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.626.964.000	1.519.420.000	93,39	35	Unit	31	88,57
			RO_Layanan Umum	525.097.000	245.753.070	46,80	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN								
			RO_Layanan Data dan Informasi	27.432.000	6.452.441	23,52	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN								
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	23.790.000	-	0,00	1	Kesepakatan	0	0,00
			RO_Layanan Kepegawaian Lingkup IPDN	17.832.000	6.294.764	35,30	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen Risiko Lingkup IPDN	6.840.000	-	0,00	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen SDM Internal	6.000.000	-	0,00	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	51.296.000	-	0,00	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	11.420.000	-	0,00	1	Layanan	0	0,00
		Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN								
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.491.874.000	542.809.072	36,38	1	Layanan	0	0,00
01.683091.IPDN KAMPUS PAPUA										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN								
			RO_Layanan Pengelolaan Keuangan	41.378.000	11.237.000	27,16	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Kebijakan Program dan Belanja Kegiatan Lingkup IPDN	25.164.000	-	0,00	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	42.091.214.000	25.906.646.928	61,55	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	3.285.791.000	1.971.474.477	60,00	8	Paket	0	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	184.383.000	184.382.100	100,00	10	Unit	10	100,00
			RO_Layanan Umum	176.742.000	176.738.000	100,00	1	Layanan	1	100,00

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi **Pelayanan Umum**
Sub Fungsi **Pelayanan Umum**

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN								
			RO_Layanan Kepegawaian Lingkup IPDN	20.628.000	20.628.000	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen SDM Internal	27.435.000	-	0,00	1	Layanan	0	0,00
		Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN								
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.648.522.000	945.407.000	57,35	1	Layanan	0	0,00
02.027203.INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah								
			RO_Peraturan Menteri terkait Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyele	482.567.000	-	0,00	1	PerMen	0	0,00
		Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD								
			RO_Penguatan Kapasitas PPUPD	1.045.373.000	563.905.361	53,94	600	Orang	300	50,00
			RO_Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Jabatan Fungsional PPUPD	172.109.000	91.734.846	53,30	1	PerMen	0	0,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah								
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	382.181.000	220.451.476	57,68	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	176.995.000	74.026.576	41,82	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal (SBKU)	16.436.000	9.480.500	57,68	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker Eselon I tanpa s	48.029.000	18.922.725	39,40	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	197.915.000	46.481.145	23,49	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	63.309.510.000	34.681.333.391	54,78	2	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	1.527.162.000	394.774.053	25,85	1	Paket	0	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	5.242.000.000	2.407.750.723	45,93	1	Unit	0	0,00
			RO_Layanan Umum	554.140.000	324.110.270	58,49	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah								
			RO_Layanan Data dan Informasi	373.414.000	195.377.428	52,32	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	378.171.000	370.257.982	97,91	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah								
			RO_LAYANAN FASILITASI KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGAWASAN	584.379.000	309.576.029	52,98	3	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	994.917.000	222.461.400	22,36	317	Orang	65	20,50
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	230.418.000	49.288.117	21,39	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus								
			RO_Audit Kinerja Audit Kinerja BPSDM	21.290.000	-	0,00	1	Laporan	0	0,00
			RO_Audit Kinerja BNPP	21.242.000	-	0,00	1	Laporan	0	0,00
			RO_Audit Kinerja BSKDN	25.700.000	-	0,00	1	Laporan	0	0,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen Bina ADWIL	31.158.000	-	0,00	1	Laporan	0	0,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen Bina BANGDA	27.899.000	-	0,00	1	Laporan	0	0,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen Bina KEUDA	31.685.000	-	0,00	1	Laporan	0	0,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen Bina PEMDES	31.158.000	-	0,00	1	Laporan	0	0,00

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi **Pelayanan Umum**
Sub Fungsi **Pelayanan Umum**

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Audit Kinerja Ditjen Bina POLPUM	23.716.000	173.000	0,73	1	Laporan	0	0,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen DUKCAPIL	31.158.000	-	0,00	1	Laporan	0	0,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen OTDA	21.242.000	-	0,00	1	Laporan	0	0,00
			RO_Audit Kinerja DKPP	24.040.000	197.600	0,82	1	Laporan	0	0,00
			RO_Audit Kinerja Inspektorat Jenderal	1.264.000	-	0,00	1	Laporan	0	0,00
			RO_Audit Kinerja IPDN	137.862.000	1.573.700	1,14	1	Laporan	0	0,00
			RO_Audit Kinerja Sekretariat Jenderal	27.800.000	-	0,00	1	Laporan	0	0,00
			RO_KOORDINASI PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH	762.662.000	213.314.741	27,97	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8	21,05
			RO_Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	173.895.000	116.700.116	67,11	1	Laporan	0	0,00
			RO_Pembangunan Integritas Lingkup Kemendagri dan Pemda	1.826.893.000	751.016.310	41,11	1	Lembaga	0	0,00
			RO_PEMERIKSAAN INTERNAL LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL	1.380.792.000	327.317.455	23,71	1	Dokumen	1	100,00
			RO_PENANGANAN PEMERIKSAAN KHUSUS KEMENDAGRI DAN BNPP	1.105.380.000	691.387.543	62,55	2	Dokumen	0	0,00
			RO_PENGAWASAN INTERNAL LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL	2.873.643.000	962.695.995	33,50	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Pengawasan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di D	1.861.518.000	1.075.447.608	57,77	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	17	44,74
			RO_PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH INSPEKTOR	9.770.159.000	5.518.585.517	56,48	38	Pemerintah Daerah	23	60,53
			RO_PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KH	2.664.289.000	1.175.455.097	44,12	8	Pemerintah Daerah	3	37,50
			RO_Pengelolaan Bersama Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) K	533.285.000	276.897.612	51,92	38	Pemerintah Daerah	10	26,32
			RO_PENINGKATAN KAPASITAS INSPEKTORAT DAERAH	15.871.091.000	15.856.968.710	99,91	38	Pemda	38	100,00
03.027210.DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum								
			RO_Layanan Hukum	1.241.861.000	679.805.833	54,74	3	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum								
			RO_Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	10.890.000	-	0,00	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Dokumen RKA Satker Eselon I tanpa satker vertikal (SBKU)	28.275.000	1.215.000	4,30	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan BMN	613.126.000	108.121.000	17,63	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	246.514.000	131.318.110	53,27	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	112.676.000	-	0,00	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Pengelolaan Keuangan UKE I	919.716.000	552.209.727	60,04	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.009.665.000	733.241.870	72,62	3	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	61.863.413.000	35.524.181.360	57,42	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	3.624.250.000	3.438.427.018	94,87	270	Unit	234	86,67
			RO_Layanan Umum	2.457.588.000	488.020.523	19,86	1	Layanan	0	0,00
			RO_Pembinaan Teknis Politik dan Pemerintahan Umum	1.866.874.000	1.136.722.655	60,89	38	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum								
			RO_Layanan Data dan Informasi	1.096.685.000	263.300.000	24,01	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.129.259.000	429.598.363	38,04	1	Layanan	0	0,00

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum								
			RO_Layanan Manajemen SDM	846.233.000	72.422.400	8,56	287	Orang	0	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	813.340.000	741.298.408	91,14	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko Lingkup Ditjen Politik dan	285.173.000	47.310.500	16,59	1	Dokumen	0	0,00
04.027486.DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah								
			RO_Layanan Hukum	1.085.142.000	278.688.756	25,68	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah								
			RO_Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	13.176.000	13.116.000	99,54	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker V	15.960.000	-	0,00	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	255.566.000	196.359.690	76,83	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	215.336.000	47.220.000	21,93	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	510.440.000	69.938.240	13,70	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	69.603.704.000	34.950.273.875	50,21	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.306.554.000	294.029.010	22,50	26	Unit	19	73,08
			RO_Layanan Umum	15.258.137.000	6.715.126.980	44,01	1	Layanan	0	0,00
			RO_Pengelolaan Keuangan Satker Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	801.347.000	356.242.143	44,46	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah								
			RO_Layanan Data dan Informasi	529.190.000	213.930.000	40,43	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	297.790.000	36.700.000	12,32	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah								
			RO_Layanan Manajemen SDM	558.371.000	82.660.000	14,80	355	Orang	90	25,35
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	699.347.000	167.113.320	23,90	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Ditjen Bina Adwil	176.319.000	65.534.700	37,17	1	Layanan	0	0,00
05.027753.DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa								
			RO_Layanan Bantuan Hukum	27.500.000	-	0,00	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Hukum	305.241.000	39.841.000	13,05	1	Layanan	0	0,00
			RO_Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Badan Permusyawaratan Desa	194.286.000	-	0,00	1	PerMen	0	0,00
			RO_Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Data dan Evaluasi Desa	1.300.000	-	0,00	1	PerMen	1	100,00
			RO_Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Kewenangan Desa	12.960.000	-	0,00	1	PerMen	1	100,00
			RO_Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa da	1.300.000	-	0,00	1	PerMen	1	100,00
			RO_Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perencanaan Desa	192.986.000	-	0,00	1	PerMen	1	100,00
			RO_Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Kerja Sama di Bidang Pe	192.986.000	-	0,00	1	PerMen	0	0,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa								

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi **Pelayanan Umum**
Sub Fungsi **Pelayanan Umum**

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	766.930.000	585.238.276	76,31	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan penyusunan kebijakan program dan belanja kegiatan lingkup Ditjen B	1.777.776.000	1.639.654.835	92,23	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.950.000	4.926.957	99,53	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	96.272.303.000	48.185.580.357	50,05	2	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	8.460.000.000	-	0,00	1	Paket	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	2.848.406.000	94.240.110	3,31	158	Unit	8	5,06
			RO_Layanan Umum	923.525.000	374.989.280	40,60	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa								
			RO_Layanan Data dan Informasi	702.775.000	486.654.075	69,25	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	411.004.000	195.595.000	47,59	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Protokoler	4.405.343.000	1.216.814.186	27,62	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa								
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	75.242.000	-	0,00	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Pengelolaaan Kepegawaian	711.671.000	248.997.066	34,99	565	Layanan	280	49,56
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Ditjen Bina Pemerintahan	98.705.000	48.441.620	49,08	1	Dokumen	1	100,00
05.028449.BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa								
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	60.969.000	7.310.000	11,99	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	45.239.000	31.932.467	70,59	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7.369.000	-	0,00	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	14.267.146.000	7.332.153.878	51,39	2	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	192.554.000	191.269.095	99,33	26	Unit	26	100,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa								
			RO_Layanan Manajemen SDM	156.531.000	86.400.000	55,20	100	Orang	100	100,00
05.028830.BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa								
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	51.525.000	6.314.000	12,25	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.160.000	4.155.500	99,89	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	12.518.277.000	6.871.839.864	54,89	2	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	128.000.000	126.551.100	98,87	15	Unit	15	100,00
			RO_Layanan Umum	122.443.000	27.418.534	22,39	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa								
			RO_Layanan Manajemen SDM	150.073.000	131.872.800	87,87	52	Orang	52	100,00
05.613629.BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG										
	Program Dukungan Manajemen									

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa								
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	73.123.000	37.299.000	51,01	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	97.341.000	38.357.664	39,41	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.400.000	-	0,00	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	13.339.981.000	7.732.400.637	57,96	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	12.000.000	11.016.000	91,80	3	Unit	2	66,67
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa								
			RO_Layanan Manajemen SDM	91.505.000	21.523.696	23,52	10	Orang	8	80,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	71.150.000	70.630.000	99,27	1	Layanan	0	0,00
06.039729.DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH										
	Program Dukungan Manajemen									
		Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah								
			RO_fasilitasi koordinasi isu aktual strategis pembangunan daerah	1.229.721.000	488.917.904	39,76	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Pelaksanaaan dan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1.450.000.000	271.055.300	18,69	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	705.000.000	76.368.000	10,83	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah								
			RO_Layanan Hukum	1.011.995.000	546.661.659	54,02	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah								
			RO_Layanan BMN	73.467.000	39.910.000	54,32	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	975.689.000	795.731.902	81,56	7	Dokumen	5	71,43
			RO_Layanan Manajemen Kinerja -SBKU	15.932.000	-	0,00	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	56.590.000	8.270.000	14,61	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	224.580.000	99.834.000	44,45	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	95.178.487.000	46.733.517.588	49,10	2	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	11.928.000.000	477.072.783	4,00	1	Paket	0	0,00
			RO_Layanan Protokoler	705.901.000	121.095.700	17,15	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	7.696.213.000	7.462.241.504	96,96	111	Unit	0	0,00
			RO_Layanan Umum	1.652.506.000	519.012.175	31,41	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah								
			RO_Layanan Data dan Informasi	422.747.000	242.071.932	57,26	1	Layanan	0	0,00
			RO_Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.470.000.000	1.469.998.530	100,00	2	Unit	2	100,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah								
			RO_Layanan Manajemen SDM	577.342.000	375.068.996	64,96	302	Orang	261	86,42
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	248.212.000	66.297.410	26,71	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	148.546.000	38.054.100	25,62	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko Ditjen Bina Pembangunar	142.598.000	18.860.000	13,23	1	Dokumen	0	0,00
07.621892.DITJEN OTONOMI DAERAH										

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah								
			RO_Layanan Hukum	1.123.382.000	391.034.132	34,81	4	Layanan	1	25,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah								
			RO_Layanan BMN	69.675.000	39.766.000	57,07	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	283.338.000	94.315.700	33,29	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen Kinerja	211.000.000	164.358.700	77,90	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	408.000.000	201.545.900	49,40	2	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	810.000.000	343.642.800	42,43	6	Dokumen	1	16,67
			RO_Layanan Perkantoran	62.725.862.000	31.971.976.997	50,97	12	Layanan	6	50,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.158.828.000	1.135.414.200	97,98	176	Unit	114	64,77
			RO_Layanan Umum	1.507.090.000	585.974.800	38,88	1	Layanan	0	0,00
			RO_Pengelolaan Keuangan Ditjen Otonomi Daerah	223.020.000	152.063.500	68,18	1	Dokumen	0	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah								
			RO_Layanan Data dan Informasi	1.802.097.000	297.530.050	16,51	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	216.000.000	15.000.000	6,94	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah								
			RO_Layanan Manajemen SDM	622.264.000	297.028.900	47,73	293	Orang	40	13,65
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	145.116.000	9.750.000	6,72	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko lingkup Ditjen Otonomi Da	337.950.000	328.107.200	97,09	1	Layanan	0	0,00
08.634082.DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
			RO_Layanan Hukum	1.326.026.000	113.034.363	8,52	4	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
			RO_Layanan BMN	107.750.000	64.585.404	59,94	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Koordinasi Isu Aktual lingkup Ditjen Dukcapil	4.876.694.000	1.584.834.696	32,50	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan koordinasi penyelesaian aset dukcapil di daerah	539.300.000	535.841.325	99,36	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	293.728.000	184.063.324	62,66	5	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen Kinerja	10.156.000	2.298.600	22,63	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	126.205.000	9.198.200	7,29	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan Pengelolaan Keuangan Ditjen Dukcapil	1.339.118.000	755.204.943	56,40	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	194.062.000	59.142.435	30,48	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	79.514.782.000	41.124.697.457	51,72	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	32.502.200.000	-	0,00	1	Paket	0	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.481.000.000	298.992.819	20,19	60	Unit	0	0,00
			RO_Layanan Umum	4.357.490.000	2.149.779.180	49,34	1	Layanan	0	0,00

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi **Pelayanan Umum**
Sub Fungsi **Pelayanan Umum**

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Pemeliharaan Perangkat KTP-el	2.116.892.000	364.189.683	17,20	55	Unit	0	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
			RO_Layanan Data dan Informasi	2.391.128.000	832.168.860	34,80	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Protokoler	166.430.000	43.398.294	26,08	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
			RO_Layanan Manajemen SDM	310.550.000	169.656.197	54,63	500	Orang	0	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko Lingkup Ditjen Dukcapil	260.434.000	22.964.800	8,82	1	Layanan	0	0,00
	Program Tata Kelola Kependudukan									
		Pembinaan Administrasi Kependudukan								
			RO_Akta Kelahiran yang diterbitkan	166.691.000	110.789.938	66,46	745.000	Akta	745.000	100,00
			RO_Akta Kematian yang diterbitkan	72.985.000	56.180.847	76,98	425.000	Akta	425.000	100,00
			RO_Akta Perceraian yang diterbitkan	145.489.000	144.701.433	99,46	50.487	Akta	50.487	100,00
			RO_Akta Perkawinan yang diterbitkan	104.912.000	98.357.160	93,75	1.360.364	Akta	119.400	8,78
			RO_Blangko KTP-el untuk daerah	224.944.280.000	168.359.766.422	74,85	22.000.000	Keping	16.500.000	75,00
			RO_Daerah Yang Difasilitasi Dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Penca	444.382.000	374.064.451	84,18	552	Daerah (Prov/Kab/Kota)	16	2,90
			RO_Daerah Yang Difasilitasi Dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependud	8.407.064.000	763.017.499	9,08	552	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (G	497.612.000	482.332.673	96,93	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5	33,33
			RO_Kepmendagri Mengenai Penyusunan Pedoman Pelayanan Pencatatan Perkaw	5.370.000	1.200.000	22,35	1	Surat Keputusan	0	0,00
			RO_Pembangunan 3 Juta Rumah	2.044.645.000	596.874.541	29,19	552	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Penerbitan Kartu Identitas Anak Dalam Layanan Adminduk	35.230.000	10.376.207	29,45	372.927	Orang	30.000	8,04
			RO_Rekomendasi Kebijakan masukan Revisi undang - undang Nomor 23 tahun 20	388.007.000	16.177.723	4,17	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Rekomendasi Kebijakan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kepen	31.189.000	12.233.832	39,22	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Rekomendasi Kebijakan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kepen	42.900.000	17.800.000	41,49	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Revisi Permendagri No.14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas	13.500.000	-	0,00	1	PerMen	0	0,00
			RO_Revisi Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Pr	108.067.000	6.129.166	5,67	1	PerMen	0	0,00
		Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil								
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Penca	892.947.000	678.453.472	75,98	552	Daerah (ProvKabKota)	414	75,00
			RO_Fasilitasi dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dengan Perguruan	36.745.000	18.397.835	50,07	2	Daerah (ProvKabKota)	2	100,00
			RO_Fasilitasi Penerapan Inovasi Pelayanan Adminduk di daerah	172.756.000	69.407.137	40,18	552	Daerah (ProvKabKota)	450	81,52
			RO_Fasilitasi penerapan zona integritas Dinas Dukcapil	479.750.000	421.779.880	87,92	552	Daerah (ProvKabKota)	422	76,45
		Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan								
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Integrasi data kependudukan Daerah	1.812.506.000	393.374.833	21,70	552	Daerah (ProvKabKota)	276	50,00
			RO_Daerah Yang Difasilitasi Dalam Pembentukan Data Kelahiran, Kematian, Perk	241.397.000	-	0,00	45	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Integrasi Data Sosial Ekonomi dengan Adminduk dan Statistik Hayati	473.170.000	28.119.075	5,94	1	Data	0	0,00
			RO_Jaringan komunikasi data online	191.940.470.000	152.213.489.885	79,30	552	Titik/Lokasi	0	0,00
			RO_Lembaga pengguna yang memberikan Data Balikan Daerah	74.050.000	61.793.418	83,45	400	Lembaga	29	7,25
			RO_Lembaga pengguna yang memberikan Data Balikan Nasional	1.140.751.000	-	0,00	1.015	Lembaga	0	0,00

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi **Pelayanan Umum**
Sub Fungsi **Pelayanan Umum**

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama Data Kependudukan Da	145.113.000	108.555.259	74,81	360	Lembaga	293	81,39
			RO_Lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama Data Kependudukan Na	1.848.813.000	233.074.206	12,61	1.015	Lembaga	176	17,34
			RO_Lembaga pengguna yang terkoneksi dengan data warehouse kependudukan b	12.446.001.000	273.847.304	2,20	1.375	Lembaga	19	1,38
			RO_Lembaga yang difasilitasi dalam Integrasi Data Kependudukan Nasional	278.704.000	195.437.450	70,12	100	Lembaga	18	18,00
			RO_Sarpras SIAK serta DC dan DRC Kependudukan	4.994.510.000	154.750.001	3,10	3	Unit	0	0,00
			RO_Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	92.657.312.000	25.287.943.658	27,29	1	Sistem Informasi	0	0,00
			RO_Sistem Informasi Aplikasi SIAK Terpusat	4.556.826.000	150.212.000	3,30	1	Sistem Informasi	0	0,00
			RO_Sistem Informasi Integrasi Data dan Dokumen Kependudukan Nasional	7.422.726.000	2.542.460.899	34,25	1	Sistem Informasi	0	0,00
			RO_Sistem Informasi pengelolaan KTP-el berbasis NIK dan Biometrik	93.425.420.000	38.780.252.394	41,51	1	Sistem Informasi	0	0,00
		Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital								
			RO_Aplikasi ID digital	40.936.824.000	2.754.887.500	6,73	1	Sistem Informasi	0	0,00
			RO_Capacity Building, Conference, dan Training (Benchmarking) terkait data utilisa	12.400.400.000	-	0,00	506	Orang	0	0,00
			RO_Daerah yang di Fasilitasi dalam Pemeriksaan Sarpras	2.403.343.000	-	0,00	522	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Daerah Yang Di Fasilitasi Dalam Penyelenggaraan Dan Monitoring Program J	48.000.000.000	-	0,00	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Daerah Yang Difasilitasi Dalam Pendaftaran Penduduk Melalui Layanan Jemp	9.600.000.000	841.540.676	8,77	15	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Grand Desain Penyelenggaraan Adminduk	777.962.000	-	0,00	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Layanan Manajemen PMU ID Digital	58.391.971.000	10.625.549.536	18,20	1	layanan	0	0,00
			RO_Penguatan Infrastruktur TIK Dukcapil	851.737.874.000	-	0,00	4	Unit	0	0,00
			RO_Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Dalam Rangka Pelayanan Pendaftara	7.813.398.000	-	0,00	2.208	Orang	0	0,00
			RO_Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam penyelenggaraan layanan adminduk	34.610.000.000	-	0,00	1.580	Orang	0	0,00
			RO_Peningkatan pemanfaatan data kependudukan/IKD bagi Dinas Dukcapil dan C	2.300.000.000	284.697.000	12,38	552	Orang	0	0,00
			RO_Penyusunan Bisnis Proses Reengineering untuk pemanfaatan data dan dokun	5.000.000.000	100.237.000	2,00	1	NSPK	0	0,00
			RO_Penyusunan Grand Design Digital ID, eKYC, Biometrik, Platform Pertukaran D	21.010.000.000	-	0,00	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Penyusunan Strategi Kelola Kinerja Adminduk Pusat Dan Daerah	1.213.894.000	-	0,00	2	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Perangkat dan Jaringan Layanan Adminduk di daerah perbatasan dan 3T (Ter	11.500.000.000	11.424.425	0,10	50	Unit	0	0,00
			RO_Peraturan Presiden mengenai Identitas Kependudukan Digital	217.344.000	-	0,00	1	PerPres	0	0,00
			RO_Platform untuk berbagi dan pertukaran data Dukcapil	10.000.000	-	0,00	1	Sistem Informasi	0	0,00
			RO_Promosi interoperabilitas dan pengakuan ID digital skala nasional maupun inte	5.967.600.000	-	0,00	1	Kegiatan	0	0,00
			RO_Rebranding Dukcapil	23.868.000.000	1.250.000.000	5,24	1	layanan	0	0,00
			RO_Rekomendasi Mekanisme Sistem Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pen	4.500.000.000	3.106.599	0,07	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk	5.772.600.000	175.149.000	3,03	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Rekomendasi Penegakan Hukum Penyelenggaraan Adminduk	1.100.000.000	-	0,00	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Sarana dan Prasarana Digitalisasi Dokumen Kependudukan	442.798.000	-	0,00	514	Unit	0	0,00
			RO_Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sip	15.287.158.000	-	0,00	180	Unit	0	0,00
			RO_Sistem baru dan implementasi proses pemanfaatan data dan dokumen kepe	85.379.202.000	153.240.000	0,18	5	Sistem Informasi	0	0,00
			RO_Sistem kemanan siber	77.913.828.000	-	0,00	1	Sistem Informasi	0	0,00
			RO_Sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM)	9.200.000.000	-	0,00	1	Sistem Informasi	0	0,00

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi **Pelayanan Umum**
Sub Fungsi **Pelayanan Umum**

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Tanda tangan elektronik dan standardisasi data alamat	28.300.000.000	-	0,00	2	Sistem Informasi	0	0,00
09.662766.DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah								
			RO_Layanan Hukum	563.468.000	297.422.429	52,78	0	Layanan	0	
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah								
			RO_Dokumen Manajemen Keuangan	257.142.000	161.312.160	62,73	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	298.565.000	291.536.700	97,65	1	Dokumen	0	0,00
			RO_Layanan BMN	81.105.000	39.890.110	49,18	0	Layanan	0	
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	250.330.000	216.058.820	86,31	0	Dokumen	0	
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	123.956.000	75.882.340	61,22	0	Dokumen	0	
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	280.638.000	112.221.755	39,99	0	Dokumen	0	
			RO_Layanan Perkantoran	63.610.418.000	35.119.340.054	55,21	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.404.800.000	601.509.548	42,82	32	Unit	0	0,00
			RO_Layanan Umum	1.754.202.000	945.276.475	53,89	1	Layanan	0	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah								
			RO_Layanan Data dan Informasi	398.276.000	163.825.548	41,13	1	Layanan	0	0,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	195.085.000	58.664.511	30,07	0	Layanan	0	
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah								
			RO_Layanan Manajemen SDM	233.248.000	150.274.737	64,43	0	Orang	0	
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	287.180.000	82.720.080	28,80	0	Layanan	0	
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko	387.582.000	228.614.473	58,98	1	Dokumen	0	0,00
11.403222.Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri								
			RO_Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	70.520.000	40.744.139	57,78	0	Layanan	0	
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri								
			RO_Dokumen Lakin Satker - Eselon I Tanpa Satker Vertikal	5.960.000	5.960.000	100,00	0	Dokumen	0	
			RO_Dokumen Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan	152.166.000	56.065.897	36,85	0	Dokumen	0	
			RO_Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker - Eselon I Tanpa Satker	270.558.000	147.712.961	54,60	0	Dokumen	0	
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	695.681.000	653.972.600	94,00	0	Dokumen	0	
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	124.500.000	-	0,00	0	Dokumen	0	
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	46.194.000	42.924.200	92,92	0	Dokumen	0	
			RO_Layanan Perkantoran	53.275.116.000	25.428.736.736	47,73	0	Layanan	0	
			RO_Layanan Umum	1.012.989.000	571.400.645	56,41	0	Layanan	0	
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri								
			RO_Layanan Data dan Informasi	5.670.000	-	0,00	0	Layanan	0	

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri								
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	467.485.000	426.510.339	91,24	0	Layanan	0	
			RO_Layanan Pendidikan dan Pelatihan	133.121.000	111.433.137	83,71	0	Orang	0	
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko BSKDN Kemendagri	45.975.000	43.814.100	95,30	0	Dokumen	0	
12.027114.BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia								
			RO_Koordinasi, dan sinergitas program pengembangan kompetensi Aparatur Pem	166.713.000	116.708.824	70,01	0	kegiatan	0	
			RO_Layanan Perkantoran	21.956.593.000	12.694.412.666	57,82	0	Layanan	0	
			RO_Layanan Sarana Internal	5.843.908.000	522.116.104	8,93	0	Unit	0	
			RO_Layanan Umum	93.381.000	46.183.000	49,46	0	Layanan	0	
			RO_Pengelolaan keuangan	32.518.000	2.517.500	7,74	0	Dokumen	0	
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia								
			RO_Layanan Manajemen SDM	52.750.000	52.746.630	99,99	0	Orang	0	
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi								
			RO_Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam mendukung Program Direktif Presiden	487.476.000	462.899.997	94,96	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	
			RO_Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan	341.494.000	61.693.788	18,07	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
12.027177.BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia								
			RO_Koordinasi, dan sinergitas program pengembangan kompetensi Aparatur Pem	8.889.000	8.888.774	100,00	0	kegiatan	0	
			RO_Layanan Manajemen Keuangan Lingkup Regional	18.610.000	18.608.086	99,99	0	Layanan	0	
			RO_Layanan Perkantoran	17.897.753.000	9.877.161.581	55,19	0	Layanan	0	
			RO_Layanan Sarana Internal	24.570.000.000	2.178.790.233	8,87	0	Unit	0	
			RO_Layanan Umum	31.220.000	7.371.339	23,61	0	Layanan	0	
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia								
			RO_Layanan Manajemen SDM	59.957.000	54.955.230	91,66	0	Orang	0	
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi								
			RO_Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan	188.247.000	14.034.142	7,46	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
12.403216.BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia								
			RO_Koordinasi, dan sinergitas program pengembangan kompetensi Aparatur Pem	49.325.000	29.324.459	59,45	0	kegiatan	0	
			RO_Layanan Manajemen Keuangan Lingkup Regional	44.202.000	20.688.259	46,80	0	Layanan	0	
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi Lingkup Regional	13.640.000	13.591.800	99,65	0	Layanan	0	

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi **Pelayanan Umum**
Sub Fungsi **Pelayanan Umum**

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.296.000	3.272.000	99,27	0	Dokumen	0	
			RO_Layanan Perkantoran	19.046.933.000	10.604.562.380	55,68	0	Layanan	0	
			RO_Layanan Sarana Internal	20.338.336.000	5.763.032.431	28,34	0	Unit	0	
			RO_Layanan Umum	92.518.000	69.022.271	74,60	0	Layanan	0	
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia								
			RO_Layanan Manajemen SDM	48.950.000	48.949.136	100,00	0	Orang	0	
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi								
			RO_Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam mendukung Program Direktif Presiden	174.079.000	154.272.140	88,62	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	
			RO_Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan	386.460.000	64.829.762	16,78	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
12.403231.BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia								
			RO_Layanan Hukum	247.985.000	169.424.007	68,32	0	Layanan	0	
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia								
			RO_Koordinasi, dan sinergitas program pengembangan kompetensi Aparatur Pem	1.373.535.000	1.288.614.370	93,82	0	kegiatan	0	
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	291.014.000	107.387.401	36,90	0	Dokumen	0	
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	434.288.000	277.813.034	63,97	0	Dokumen	0	
			RO_Layanan Penyusunan LAKIN untuk Unit Eselon I dengan jumlah satker 6	77.849.000	51.651.650	66,35	0	Dokumen	0	
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	118.209.000	81.526.500	68,97	0	Dokumen	0	
			RO_Layanan Perkantoran	81.093.558.000	40.905.933.846	50,44	0	Layanan	0	
			RO_Layanan Sarana Internal	15.031.355.000	11.718.820.083	77,96	0	Unit	0	
			RO_Layanan Umum	1.252.962.000	686.134.083	54,76	0	Layanan	0	
			RO_Pengelolaan keuangan	658.540.000	328.326.843	49,86	0	Dokumen	0	
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia								
			RO_Layanan Data dan Informasi	635.388.000	140.449.462	22,10	0	Layanan	0	
			RO_Layanan Integrasi Sistem Informasi	546.392.000	2.082.000	0,38	0	Layanan	0	
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia								
			RO_Layanan Manajemen SDM	476.678.000	188.956.536	39,64	0	Orang	0	
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	366.103.000	279.737.096	76,41	0	Layanan	0	
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi								
			RO_NSPK Standarisasi dan Sertifikasi	184.431.000	133.114.250	72,18	0	NSPK	0	
			RO_Penguatan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri	70.003.000	70.002.116	100,00	0	Lembaga	0	
			RO_Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam mendukung Program Direktif Presiden	300.000.000	9.334.300	3,11	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	
			RO_Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan	251.054.000	89.162.990	35,52	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
			RO_Sertifikasi Jabatan Aparatur Kementerian Dalam Negeri	1.964.500.000	618.180.875	31,47	0	Orang	0	

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Standarisasi Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri	563.100.000	406.172.050	72,13	0	NSPK	0	
12.506137.BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia								
			RO_Koordinasi, dan sinergitas program pengembangan kompetensi Aparatur Pem	10.000.000	-	0,00	0	kegiatan	0	
			RO_Layanan Manajemen Keuangan Lingkup Regional	50.000.000	-	0,00	0	Layanan	0	
			RO_Layanan Perkantoran	18.843.778.000	8.729.183.722	46,32	0	Layanan	0	
			RO_Layanan Sarana Internal	529.164.000	508.232.875	96,04	0	Unit	0	
			RO_Layanan Umum	10.000.000	-	0,00	0	Layanan	0	
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia								
			RO_Layanan Manajemen SDM	214.555.000	16.700.000	7,78	0	Orang	0	
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi								
			RO_Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam mendukung Program Direktif Presiden	352.025.000	-	0,00	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	
			RO_Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan	369.221.000	-	0,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
12.506138.BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia								
			RO_Koordinasi, dan sinergitas program pengembangan kompetensi Aparatur Pem	97.312.000	79.249.860	81,44	0	kegiatan	0	
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi Lingkup Regional	2.167.000	2.167.000	100,00	0	Layanan	0	
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9.847.000	9.809.300	99,62	0	Dokumen	0	
			RO_Layanan Perkantoran	13.765.795.000	6.711.784.049	48,76	0	Layanan	0	
			RO_Layanan Sarana Internal	7.661.734.000	4.336.488.060	56,60	0	Unit	0	
			RO_Layanan Umum	82.370.000	24.121.500	29,28	0	Layanan	0	
			RO_Pengelolaan keuangan	13.871.000	3.777.400	27,23	0	Dokumen	0	
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia								
			RO_Layanan Manajemen SDM	15.902.000	15.351.325	96,54	0	Orang	0	
TOTAl SUB FUNGSI: PELAYANAN UMUM				**3.928.162.347.000**	**1.321.017.431.571**	**33,63**	**24.983.323**		**17.881.077**	**71,57**

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi **Pelayanan Umum**
Sub Fungsi **Pembangunan Daerah**

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04.027486.DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penguatan peran kecamatan dalam koordinasi vertikal dan horizontal	621.497.000	290.404.815	46,73	207	Daerah (ProvKabKota)	51	24,64
			RO_Daerah yang dikuatkan SDM dan Kelembagaan DTMPTSP nya untuk mendukung iklim investasi yang kondusif	738.204.000	61.297.250	8,30	143	Daerah (ProvKabKota)	14	9,79
			RO_Daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan	935.732.000	319.620.718	34,16	4	Daerah (ProvKabKota)	3	75,00
			RO_Daerah yang ditingkatkan pelimpahan kewenangan perizinan kepada DPMPTSP	735.721.000	415.688.400	56,50	155	Daerah (ProvKabKota)	104	67,10
			RO_Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam penyediaan pelayanan publik	504.543.000	358.480.294	71,05	17	Daerah (ProvKabKota)	8	47,06
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	6.268.616.000	1.049.733.784	16,75	20	Provinsi	0	0,00
			RO_Daerah yang menerapkan PTSP berbasis OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) dalam perizinan berusaha	1.485.505.000	148.215.200	9,98	136	Daerah (ProvKabKota)	32	23,53
			RO_Dukungan Penguatan Terhadap Tata Kelola Koperasi Merah Putih Kelurahan/Desa	3.147.946.000	539.162.900	17,13	38	Daerah (ProvKabKota)	2	5,26
			RO_Rekomendasi atas usulan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan kementerian/lembaga	1.232.715.000	597.801.537	48,49	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Rekomendasi Pelaksanaan Model Ideal Kewenangan dan Kelembagaan GWPP	3.291.778.000	339.738.302	10,32	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
		Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
			RO_Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pasca bencana	29.847.595.000	504.899.333	1,69	38	Daerah (ProvKabKota)	21	55,26
			RO_Daerah yang menerapkan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	1.162.971.000	57.152.000	4,91	38	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Bencana berdasarkan Tipologi Daerah	5.054.881.000	808.612.723	16,00	546	Daerah (ProvKabKota)	164	30,04
			RO_Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Kebakaran berdasarkan Tipologi Daerah	45.224.398.000	1.305.110.476	2,89	546	Daerah (ProvKabKota)	44	8,06
			RO_Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Trantibum berdasarkan Tipologi Daerah	12.929.672.000	2.858.428.743	22,11	546	Daerah (ProvKabKota)	184	33,70
			RO_Fasilitasi Administrasi kewilayahan dalam rangka implementasi kegiatan 3 juta rumah	1.452.962.000	201.467.742	13,87	38	Daerah (ProvKabKota)	8	21,05
			RO_Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat	848.920.000	521.947.061	61,48	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	31	81,58
			RO_Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	73.194.120.000	41.134.521.900	56,20	1	Paket	0	0,00
			RO_Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Administrasi Kewilayahan Dalam Mendukung Satu Data Indonesia Bidang Trantibumlinmas	9.804.029.000	668.976.460	6,82	1	Sistem Informasi	0	0,00
05.027753.DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa								
			RO_Kebijakan/Pedoman/Modul Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa	125.427.000	109.546.913	87,34	3	NSPK	0	0,00
		Penataan kelembagaan Desa								
			RO_Fasilitasi Implementasi Tugas dan Fungsi BPD	478.660.000	40.386.000	8,44	400	Lembaga	200	50,00

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi **Pelayanan Umum**
Sub Fungsi **Pembangunan Daerah**

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Fasilitasi Lembaga Posyandu dalam Ketahanan Sosial	1.499.698.000	78.858.956	5,26	2.395	Lembaga	350	14,61
			RO_Fasilitasi lembaga posyandu dalam pelaksanaan 6 bidang SPM	3.740.558.000	274.529.785	7,34	4.500	Lembaga	1.000	22,22
			RO_Fasilitasi Pembentukan dan Penataan Lembaga Linmas	312.808.000	34.571.050	11,05	35	Lembaga	15	42,86
			RO_Lembaga PKK yang tertata	13.486.606.000	3.856.963.459	28,60	5.000	Lembaga	300	6,00
			RO_LKAD dan MHA yang tertata dan berdaya	593.540.000	-	0,00	250	Lembaga	0	0,00
		Penataan sistem pelayanan administrasi desa								
			RO_Desa dengan Nilai Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	1.925.000.000	-	0,00	3.500	Desa	500	14,29
			RO_Desa dengan status kategori "Cepat Berkembang"	667.141.000	95.314.684	14,29	5.000	Desa	150	3,00
			RO_Desa yang difasilitasi dalam Inisiasi Kerja Sama Desa	616.018.000	194.842.688	31,63	300	Desa	75	25,00
			RO_Desa yang difasilitasi dalam Inisiasi Kerja Sama Koperasi Desa/Kel Merah Putih	491.700.000	232.031.692	47,19	2.500	Desa	300	12,00
			RO_Desa yang difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	272.534.000	107.899.070	39,59	300	Desa	75	25,00
			RO_Desa yang difasilitasi dalam penetapan Kewenangan Desa	339.599.000	194.409.450	57,25	500	Desa	0	0,00
			RO_Desa yang difasilitasi dalam Pengembangan Koperasi Desa/Kel Merah Putih	2.690.842.000	1.080.362.918	40,15	1.300	Desa	300	23,08
			RO_Desa yang difasilitasi Dalam Rangka Evaluasi Penataan Desa	234.601.000	126.208.256	53,80	450	Desa	105	23,33
			RO_Desa yang dokumen perencanaannya diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional	346.637.000	244.163.500	70,44	400	Desa	123	30,75
			RO_Desa yang melaksanakan pembinaan kelembagaan Posyandu	2.949.380.000	751.537.060	25,48	2.100	Desa	150	7,14
			RO_Desa yang mempublikasikan inovasi dan keunggulan desa	582.471.000	576.781.724	99,02	500	Desa	0	0,00
			RO_Desa yang menerapkan pelayanan administrasi pemerintahan desa dan Standar pelayanan Minimal Desa	473.938.000	273.231.277	57,65	5.132	Desa	753	14,67
			RO_Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	1.061.356.000	493.656.703	46,51	20.000	Desa	2.500	12,50
			RO_Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dalam perencanaan dan Pelaporan	37.078.000	8.910.000	24,03	20.000	Desa	0	0,00
			RO_Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa	33.440.000.000	2.494.836.918	7,46	1.500	Desa	0	0,00
			RO_Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	637.745.000	185.520.167	29,09	700	Desa	150	21,43
			RO_Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Penerapan Smart Village	17.666.484.000	4.719.128.093	26,71	868	Desa	68	7,83
			RO_Rekomendasi Penguatan Teknis Perkembangan Kemajuan Desa terhadap Isu Strategis Aktual	261.297.000	-	0,00	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100,00
05.028449.BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa								
			RO_Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	2.072.176.000	1.708.830.692	82,47	660	Orang	600	90,91
05.028830.BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa								
			RO_Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	3.036.106.000	2.358.583.651	77,68	720	Orang	660	91,67
05.613629.BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG										

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi **Pelayanan Umum**
Sub Fungsi **Pembangunan Daerah**

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa								
			RO_Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	2.058.463.000	1.173.420.782	57,00	900	Orang	588	65,33
06.039729.DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah								
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Evaluasi Manajemen Risiko dalam Dokumen Perencanaan Daerah	239.744.000	104.640.000	43,65	38	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	25.018.000	19.300.000	77,14	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di Daerah	878.581.000	658.503.892	74,95	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Daerah yang menerapkan SIPD bidang perencanaan pembangunan daerah	1.696.176.000	727.160.633	42,87	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	146.487.000	145.487.000	99,32	1	PerMen	0	0,00
			RO_Rekomendasi Hasil Fasilitasi keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah	406.867.000	276.920.527	68,06	38	Rekomendasi Kebijakan	37	97,37
			RO_Rekomendasi Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	891.767.000	712.240.882	79,87	38	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
			RO_Rekomendasi perencanaan pembangunan daerah yang menerapkan partisipasi masyarakat	166.985.000	102.707.900	61,51	38	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
		Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah								
			RO_Daerah yang di Fasilitasi dalam Pengembangan Budaya Tertib Arsip	50.690.000	14.228.500	28,07	38	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Daerah yang di fasilitasi dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi untuk mendukung penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	394.482.000	196.481.100	49,81	18	Daerah (ProvKabKota)	8	44,44
			RO_Daerah yang dievaluasi dalam penerapan Prov/Kabupaten/Kota Layak Anak	197.615.000	104.827.865	53,05	38	Daerah (ProvKabKota)	27	71,05
			RO_Daerah yang dievaluasi rancangan Perda Tata Ruangnya	408.515.000	252.682.642	61,85	38	Daerah (ProvKabKota)	21	55,26
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam dokrenda	315.840.000	245.839.300	77,84	38	Daerah (ProvKabKota)	37	97,37
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan Inpres Irigasi	192.210.000	144.341.125	75,10	38	Daerah (ProvKabKota)	37	97,37
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Perhutanan Sosial	242.356.000	139.272.300	57,47	27	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Reforma Agraria dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	33.671.000	3.180.000	9,44	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih	765.970.000	515.932.315	67,36	38	Daerah (ProvKabKota)	37	97,37
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Pembentukan sekolah rakyat	391.232.000	152.216.990	38,91	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	14	36,84
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Ketenagakerjaan	233.756.000	68.974.822	29,51	28	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Daerah	14.682.000	10.117.000	68,91	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	39,47
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi	14.350.000	-	0,00	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Rencana Induk Urusan Pemuda dan Olahraga	300.145.000	195.646.055	65,18	38	Daerah (ProvKabKota)	14	36,84
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah	217.489.000	82.695.000	38,02	546	Daerah (ProvKabKota)	125	22,89

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi **Pelayanan Umum**
Sub Fungsi **Pembangunan Daerah**

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah	174.562.000	97.735.000	55,99	546	Daerah (ProvKabKota)	273	50,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah	374.218.000	215.070.178	57,47	546	Daerah (ProvKabKota)	273	50,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah	355.830.000	166.195.493	46,71	546	Daerah (ProvKabKota)	150	27,47
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Sosial berdasarkan Tipologi Daerah	308.010.000	231.002.567	75,00	546	Daerah (ProvKabKota)	204	37,36
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah	459.513.000	110.942.926	24,14	546	Daerah (ProvKabKota)	512	93,77
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Pengembangan Potensi dan Kerjasama di Bidang Kelautan dan Perikanan	53.687.000	43.056.020	80,20	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2	100,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam pengendalian penyakit dan Peningkatan Kesehatan	250.424.000	-	0,00	38	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	78.817.000	57.996.480	73,58	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3	7,89
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan tata kelola digitalisasi pemerintah daerah	351.230.000	174.070.042	49,56	38	Daerah (ProvKabKota)	10	26,32
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	602.205.000	168.708.400	28,02	38	Daerah (ProvKabKota)	37	97,37
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Budaya Gemar Membaca	222.106.000	113.619.250	51,16	38	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Daerah yang diFasilitasi dalam Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	381.416.000	251.099.312	65,83	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	350	68,09
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penyusunan dan Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS ke dalam RPJMD	134.563.000	25.478.000	18,93	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1	6,67
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian pelaksanaan PBG berketahanan bencana	228.656.000	157.562.204	68,91	38	Daerah (ProvKabKota)	9	23,68
			RO_Daerah yang kapasitas kelembagaan pengelolanya meningkat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)	59.633.000	43.618.000	73,14	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7	70,00
			RO_Daerah yang melaksanakan pengembangan UMKM, Seni dan Kerajinan Nasional (DEKRANAS)	6.000.000.000	297.147.000	4,95	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Daerah yang melaksanakan Peningkatan mutu dan layanan SPM	1.693.090.000	1.031.980.054	60,95	38	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Daerah yang melaksanakan program kelapa sawit berkelanjutan	16.472.000	1.360.000	8,26	26	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Daerah yang mendukung kebijakan tata kelola program tiga juta rumah	1.227.855.000	432.525.063	35,23	38	Daerah (ProvKabKota)	17	44,74
			RO_Daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman	110.842.000	68.615.000	61,90	38	Daerah (ProvKabKota)	37	97,37
			RO_Daerah yang menerapkan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di daerah	157.891.000	53.681.466	34,00	546	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Daerah yang menerapkan layanan perlindungan Perempuan dan Anak serta perlindungan dari kekerasan dan TPPO	203.755.000	50.259.000	24,67	38	Daerah (ProvKabKota)	1	2,63
			RO_Daerah yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan SPM	411.299.000	117.678.858	28,61	38	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Daerah yang Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Energi Baru Terbarukan (EBT)	231.025.000	99.708.416	43,16	38	Daerah (ProvKabKota)	5	13,16
			RO_Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	192.111.000	88.388.292	46,01	38	Daerah (ProvKabKota)	1	2,63
			RO_Daerah yang menerapkan tata kelola persampahan	602.159.000	427.457.415	70,99	38	Daerah (ProvKabKota)	9	23,68
			RO_Daerah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi	407.628.000	122.770.434	30,12	38	Daerah (ProvKabKota)	4	10,53
			RO_Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah tentang Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif (HI)	12.128.000	-	0,00	11	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	266.068.000	224.337.000	84,32	11	Daerah (ProvKabKota)	10	90,91
			RO_Daerah yang menyusun rencana Aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	487.681.000	252.926.159	51,86	9	Daerah (ProvKabKota)	8	88,89
			RO_Daerah yang terfasilitasi kerjasama bidang pengawasan kelautan dan perikanan	89.663.000	79.031.467	88,14	10	Daerah (ProvKabKota)	10	100,00
			RO_Fasilitasi Integrasi Perubahan Iklim ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah	124.164.000	50.720.500	40,85	15	Daerah (ProvKabKota)	5	33,33
			RO_Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	133.141.000	23.260.000	17,47	10	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Jalan	258.406.000	143.616.838	55,58	33	Daerah (ProvKabKota)	6	18,18
			RO_Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam Program Ketangguhan Banjir Perkotaan (NUFReP)	15.192.000.000	7.183.445.072	47,28	6	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5	83,33
			RO_Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Implementasi Konvergensi Penurunan Stunting di Daerah (INEY)	45.202.118.000	1.248.085.264	2,76	200	Daerah (ProvKabKota)	20	10,00
			RO_Fasilitasi Penyelenggaraan MBG di Daerah	410.813.000	147.093.457	35,81	38	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Risiko Bencana di Kawasan Pertanian	9.731.400.000	3.970.663.967	40,80	16	Daerah (ProvKabKota)	15	93,75
			RO_Provinsi yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) lingkup urusan kelautan dan perikanan yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional	90.568.000	35.005.000	38,65	38	Daerah (ProvKabKota)	34	89,47
			RO_Provinsi yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (RenstraPD/RenjaPD) lingkup urusan kelautan dan perikanan yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional	10.630.000	-	0,00	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	3.928.893.000	560.782.926	14,27	3	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Rekomendasi Hasil Fasilitasi perencanaan urusan pemerintah daerah I (Bidang Pertanahan Penataan Ruang Pangan Lingkungan Hidup Energi dan Sumber Daya Mineral Kehutanan dan Pertanian)	997.004.000	792.584.741	79,50	7	Rekomendasi Kebijakan	5	71,43
			RO_Rekomendasi Hasil Fasilitasi perencanaan urusan pemerintah daerah II (Bidang pekerjaan umum perumahan rakyat dan kawasan permukiman komunikasi dan informatika statistik persandian perhubungan dan kelautan dan perikanan)	941.522.000	844.057.403	89,65	7	Rekomendasi Kebijakan	7	100,00
			RO_Rekomendasi Hasil Fasilitasi perencanaan urusan pemerintah daerah III (kesehatan ketenteraman ketertiban umum dan pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) sosial administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) pemberdayaan masyarakat dan desa (p	612.391.000	530.047.355	86,55	1		0	0,00
			RO_Rekomendasi Hasil Fasilitasi perencanaan urusan pemerintah daerah IV (bidang pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dalduk kb) kepemudaan dan olahraga (pora) perpustakaan kearsipan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (ppa) tenag	488.536.000	407.900.801	83,49	1		0	0,00
			RO_Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Pilihan	616.691.000	379.339.132	61,51	8	Rekomendasi Kebijakan	1	12,50
			RO_Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar	825.769.000	360.691.986	43,68	10	Rekomendasi Kebijakan	5	50,00
			RO_Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib Pelayanan Dasar	252.937.000	105.387.602	41,67	6	Rekomendasi Kebijakan	3	50,00
			RO_Rekomendasi penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah	76.850.000	4.400.000	5,73	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
11.403222.Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembinaan inovasi daerah								
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik	387.533.000	-	0,00	0	Daerah (ProvKabKota)	0	
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	1.443.178.000	16.320.375	1,13	0	Daerah (ProvKabKota)	0	
		Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri								
			RO_Advokasi Kebijakan Program Direktif Presiden Lingkup Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik	1.060.717.000	132.495.547	12,49	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
			RO_Advokasi Kebijakan Program Direktif Presiden Lingkup Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa	755.770.000	10.968.608	1,45	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
			RO_Cek Kesehatan Gratis	149.252.000	20.624.748	13,82	0	Daerah (ProvKabKota)	0	
			RO_Daerah dengan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri berkategori "Baik"	839.249.000	59.014.672	7,03	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	
			RO_Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	149.252.000	63.737.700	42,70	0	Daerah (ProvKabKota)	0	
			RO_Makan Bergizi Gratis	299.252.000	-	0,00	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	
			RO_Pembangunan 3 Juta Rumah	149.252.000	-	0,00	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	
			RO_Penanganan Sampah	298.504.000	244.728.925	81,99	0	Daerah (ProvKabKota)	0	
			RO_Pengembangan Layanan Digital IPKD	100.000.000	-	0,00	0	Sistem Informasi	0	
			RO_Pengendalian Inflasi	880.753.000	108.361.240	12,30	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	
			RO_Penguatan Kapasitas Kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB)	531.133.000	402.202.900	75,73	0	Daerah (ProvKabKota)	0	
			RO_Pengukuran dan Penilaian Pengelolaan Keuangan Daerah	453.705.000	16.060.000	3,54	0	Provinsi	0	
			RO_Peraturan Menteri	73.182.000	7.571.400	10,35	0	PerMen	0	
			RO_Pertumbuhan Ekonomi	6.395.110.000	2.501.653.409	39,12	0	Daerah (ProvKabKota)	0	
			RO_Rekomendasi Strategi Kebijakan lingkup Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik .	155.970.000	123.140.650	78,95	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
			RO_Rekomendasi Strategi Kebijakan lingkup Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa	76.695.000	66.484.100	86,69	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
			RO_Rekomendasi strategi kebijakan lingkup Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri.	1.043.407.000	243.192.124	23,31	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
			RO_Swasembada dan Lumbung Pangan	432.440.000	277.974.484	64,28	0	Daerah (ProvKabKota)	0	
12.027114.BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri								
			RO_Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	5.116.287.000	2.772.407.492	54,19	0	Orang	0	
			RO_Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	129.559.000	124.589.064	96,16	0	Orang	0	
12.027177.BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri								
			RO_Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	5.051.741.000	3.112.641.449	61,62	0	Orang	0	
			RO_Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	144.749.000	144.747.342	100,00	0	Orang	0	

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.403216.BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri								
			RO_Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	7.469.172.000	3.817.124.853	51,11	0	Orang	0	
			RO_Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	132.057.000	-	0,00	0	Orang	0	
12.403231.BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri								
			RO_Aparatur Mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	8.314.446.000	3.343.929.137	40,22	0	Orang	0	
			RO_Aparatur mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	5.718.274.000	1.309.724.150	22,90	0	Orang	0	
			RO_Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	500.000.000	467.463.480	93,49	0	Orang	0	
			RO_Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Manajemen Kepemimpinan	315.184.000	282.575.400	89,65	0	Orang	0	
			RO_Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan	14.648.763.000	6.226.346.812	42,50	0	Orang	0	
			RO_Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah	715.776.000	644.049.000	89,98	0	Orang	0	
			RO_Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada	236.388.000	169.701.992	71,79	0	Orang	0	
			RO_Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	393.980.000	386.876.919	98,20	0	Orang	0	
			RO_Camat yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pembangunan	260.306.000	203.688.265	78,25	0	Orang	0	
			RO_Pejabat Fungsional Penata Perizinan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	240.232.000	220.660.000	91,85	0	Orang	0	
			RO_Sertifikasi Jabatan Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	513.158.000	-	0,00	0	Orang	0	
12.506137.BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri								
			RO_Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	7.297.015.000	4.552.801.621	62,39	0	Orang	0	
			RO_Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	157.592.000	113.036.000	71,73	0	Orang	0	
12.506138.BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri								
			RO_Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	3.088.067.000	2.297.776.461	74,41	0	Orang	0	
TOTAl SUB FUNGSI: PEMBANGUNAN DAERAH				**470.959.766.000**	**134.944.952.833**	**28,65**	**88.605**		**12.040**	**13,59**

LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi **Pelayanan Umum**
Sub Fungsi **Pelayanan Umum lainnya**

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04.027486.DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi								
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian batas daerah	2.531.315.000	1.241.555.628	49,05	50	Rekomendasi Kebijakan	33	66,00
			RO_Daerah yang dikuatkan tata kelola Smart City-nya di Wilayah Metropolitan	3.967.562.000	627.546.698	15,82	10	Daerah (ProvKabKota)	4	40,00
			RO_Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan	3.251.370.000	318.370.646	9,79	10	Daerah (ProvKabKota)	8	80,00
			RO_Daerah yang melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan	1.705.500.000	-	0,00	10	Daerah (ProvKabKota)	0	0,00
			RO_Fasilistasi Kegiatan Strategis Program Percepatan Direktif Presiden	8.550.422.000	3.542.405.705	41,43	38	Daerah (ProvKabKota)	8	21,05
			RO_K/L yang mengintegrasikan kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau	1.642.945.000	521.799.169	31,76	16	Kesepakatan	0	0,00
			RO_Penanganan Konflik Pertanahan	521.549.000	18.507.900	3,55	25	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3	12,00
			RO_Penataan kewilayahan dalam Negeri dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8%	1.000.000.000	270.428.777	27,04	38	Daerah (ProvKabKota)	2	5,26
			RO_Penataan kewilayahan kawasan perbatasan dan wilayah metropolitan dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8%	924.492.000	525.752.015	56,87	38	Daerah (ProvKabKota)	19	50,00
			RO_Penguatan Kerja Sama Pembangunan lintas batas negara di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	1.433.681.000	86.828.800	6,06	2	Kesepakatan	1	50,00
			RO_Penyelesaian permasalahan segmen batas wilayah negara, penegasan, dan pemeliharan batas negara	555.550.000	46.551.229	8,38	3	Kesepakatan	0	0,00
			RO_Rekomendasi penyelesaian batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi	1.217.100.000	397.830.730	32,69	9	Rekomendasi Kebijakan	1	11,11
TOTAl SUB FUNGSI: PELAYANAN UMUM LAINNYA				**27.301.486.000**	**7.597.577.297**	**27,83**	**249**		**79**	**31,73**
TOTAl FUNGSI: PELAYANAN UMUM				**6.627.003.856.000**	**2.232.234.335.868**	**33,68**	**25.088.211**		**17.899.301**	**71,35**

LAMPIRAN V

RINCIAN PAGU ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, OUTPUT, TARGET, DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PER SATKER

LAMPIRAN V

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I Per Satker

Kementerian Dalam Negeri

Periode 1 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	DESKRIPSI KODE PRIORITAS NASIONAL	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	%
1	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	1233	QDC	001	Internalisasi Nilai Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam Menggelorakan Nilai Pancasila serta Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	980	0	85	980.486.000	779.129.786	79,46
2	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	1233	UAC	001	Fasilitasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Bagi Aparatur	Orang	550	0	77	630.423.000	434.129.580	68,86
3	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	6145	UBA	001	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	Daerah (ProvKabKota)	38	30	89.3	433.538.000	387.118.977	89,29
4	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	1234	UAC	001	Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	Orang	150	100	90	2.068.179.000	1.946.079.058	94,10
5	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	6145	UBA	002	Fasilitasi Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	Daerah (ProvKabKota)	38	30	86.46	500.192.000	432.408.400	86,45
6	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	6145	PBC	002	Rekomendasi Kebijakan Pertimbangan Urgensi terhadap Dana Abadi Organisasi Kemasyarakatan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	10	200.209.000	-	-
7	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	6145	QDC	002	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Manajemen Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	Orang	1300	850	82.31	1.068.595.000	879.559.476	82,31
8	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	1233	UBA	003	Fasilitasi Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam Membangun Harmoni Kebangsaan untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	20	75	1.028.226.000	724.506.300	70,46
9	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	1233	UBA	004	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (PKS) di daerah melalui Tim terpadu yang efektif	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	30	93.29	884.868.000	825.467.606	93,29
10	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	403	Daerah yang dievaluasi dalam penerapan Prov/Kabupaten/Kota Layak Anak	Daerah (ProvKabKota)	38	27	56	197.615.000	104.827.865	53,05
11	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	027114	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	CM	6144	UAC	002	Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	Orang	60	60	95.5	129.559.000	124.589.064	96,16
12	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	027177	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	CM	6144	UAC	002	Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	Orang	60	60	100	144.749.000	144.747.342	100,00
13	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	CM	6144	UAC	002	Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	Orang	60	0	6	132.057.000	-	-
14	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	CM	6144	UAC	002	Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	Orang	150	150	100	393.980.000	386.876.919	98,20
15	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	CM	6144	UAC	002	Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	Orang	60	60	71.94	157.592.000	113.036.000	71,73
16	02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1241	PEC	002	Penyelesaian permasalahan segmen batas wilayah negara, penegasan, dan pemeliharan batas negara	Kesepakatan	3	0	8.38	555.550.000	46.551.229	8,38
17	02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	003	Daerah yang menerapkan tata kelola persampahan	Daerah (ProvKabKota)	38	9	75	602.159.000	427.457.415	70,99
18	02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	101	Daerah yang Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Energi Baru Terbarukan (EBT)	Daerah (ProvKabKota)	38	5	45	231.025.000	99.708.416	43,16
19	03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	202	Daerah yang menyusun rencana Aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Daerah (ProvKabKota)	9	8	55	487.681.000	252.926.159	51,86
20	03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	203	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Jalan	Daerah (ProvKabKota)	33	6	60	258.406.000	143.616.838	55,58
21	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	305	Daerah yang menerapkan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di daerah	Daerah (ProvKabKota)	546	0	35	157.891.000	53.681.466	34,00
22	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	401	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	Daerah (ProvKabKota)	11	10	85	266.068.000	224.337.000	84,32
23	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	404	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	Daerah (ProvKabKota)	38	1	47	192.111.000	88.388.292	46,01
24	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	405	Daerah yang menerapkan layanan perlindungan Perempuan dan Anak serta perlindungan dari kekerasan dan TPPO	Daerah (ProvKabKota)	38	1	25	203.755.000	50.259.000	24,67
25	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	406	Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Rencana Induk Urusan Pemuda dan Olahraga	Daerah (ProvKabKota)	38	14	70	300.145.000	195.646.055	65,18
26	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	407	Daerah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi	Daerah (ProvKabKota)	38	4	35	407.628.000	122.770.434	30,12
27	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	CP	1269	QAA	002	Akta Kematian yang diterbitkan	Akta	425000	425000	100	72.985.000	56.180.847	76,98
28	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	CP	1269	QAA	003	Akta Perkawinan yang diterbitkan	Akta	1360364	119400	94.1	104.912.000	98.357.160	93,75
29	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	CP	1269	QAA	004	Akta Perceraian yang diterbitkan	Akta	50487	50487	100	145.489.000	144.701.433	99,46
30	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	CM	1244	UBB	001	Desa yang difasilitasi dalam Inisiasi Kerja Sama Desa	Desa	300	75	31.6	616.018.000	194.842.688	31,63
31	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	CM	1244	UBB	002	Desa yang difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Desa	300	75	39.6	272.534.000	107.899.070	39,59

LAMPIRAN V

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I Per Satker

Kementerian Dalam Negeri

Periode 1 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	DESKRIPSI KODE PRIORITAS NASIONAL	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	%
32	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	CM	1244	UBB	003	Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	20000	2500	46.51	1.061.356.000	493.656.703	46,51
33	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	CM	1244	UBB	005	Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dalam perencanaan dan Pelaporan	Desa	20000	0	24.04	37.078.000	8.910.000	24,03
34	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	CM	1244	UBB	006	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	Desa	700	150	29.1	637.745.000	185.520.167	29,09
35	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	CM	1244	UBB	008	Desa yang dokumen perencanaannya diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional	Desa	400	123	70.45	346.637.000	244.163.500	70,44
36	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	CM	1244	UBB	009	Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa	Desa	1500	0	9.41	33.440.000.000	2.494.836.918	7,46
37	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	CM	1244	UBB	010	Desa yang melaksanakan pembinaan kelembagaan Posyandu	Desa	2100	150	25.48	2.949.380.000	751.537.060	25,48
38	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	CM	1244	UBB	011	Desa yang difasilitasi dalam Pengembangan Koperasi Desa/Kel Merah Putih	Desa	1300	300	40.16	2.690.842.000	1.080.362.918	40,15
39	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	CM	1244	UBB	012	Desa yang difasilitasi dalam Inisiasi Kerja Sama Koperasi Desa/Kel Merah Putih	Desa	2500	300	47.19	491.700.000	232.031.692	47,19
40	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	CM	1248	UAC	004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Orang	600	600	100	1.945.864.000	1.708.830.692	87,82
41	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	CM	1248	UAC	004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Orang	660	660	100	2.911.825.000	2.358.583.651	81,00
42	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	CM	1248	UAC	004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Orang	840	588	61.03	1.927.819.000	1.173.420.782	60,87
43	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	204	Daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman	Daerah (ProvKabKota)	38	37	65	110.842.000	68.615.000	61,90
44	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	CP	1268	UBA	001	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Pembentukan Data Kelahiran, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian Yang Terintegrasi Antar Lembaga	Daerah (Prov/Kab/Kota)	45	0	24	241.397.000	-	-
45	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	CP	1268	QMA	001	Integrasi Data Sosial Ekonomi dengan Adminduk dan Statistik Hayati	Data	1	0	19	473.170.000	28.119.075	5,94
46	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	CP	1269	UBA	001	Fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	5	97	497.612.000	482.332.673	96,93
47	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	CM	6141	PBL	002	Rekomendasi Penyusunan Rancangan Undang-Undang BUMD	Rekomendasi Kebijakan	1	0	7	463.238.000	17.458.030	3,77
48	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	01	Sekretariat Jenderal	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	WA	6085	UAB	001	Optimalisasi Penerapan SIPD sebagai Platform Tunggal Pemerintahan di Daerah	Sistem Informasi	1	0	41.65	22.094.991.000	5.178.655.026	23,44
49	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	01	Sekretariat Jenderal	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	WA	4255	QAB	001	Layanan Penilaian Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu	Lembaga	76	40	21.59	5.309.970.000	824.750.110	15,53
50	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	01	Sekretariat Jenderal	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	WA	4255	QAH	001	Layanan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	layanan	1	0	31.71	28.811.830.000	9.154.596.639	31,77
51	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	6145	PEB	001	Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	forum	7	6	66.93	899.883.000	602.196.491	66,92
52	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	1233	UBA	001	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	38	100	693.261.000	688.028.861	99,25
53	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	6145	QEI	001	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	Lembaga	8	8	100	134.489.125.000	134.489.125.000	100,00
54	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	6145	PBC	001	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	Rekomendasi Kebijakan	2	1	20.72	671.581.000	139.139.000	20,72
55	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	6145	QDC	001	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	Orang	350	300	70.1	350.000.000	245.298.194	70,09
56	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	6145	QDB	001	Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Partai Politik	Lembaga	8	0	44.39	226.668.000	100.588.422	44,38
57	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1241	PEC	001	Penguatan Kerja Sama Pembangunan lintas batas negara di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	Kesepakatan	2	1	6.06	1.433.681.000	86.828.800	6,06
58	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	6136	UAB	001	Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Administrasi Kewilayahan Dalam Mendukung Satu Data Indonesia Bidang Trantibumlinmas	Sistem Informasi	1	0	6.82	9.804.029.000	668.976.460	6,82
59	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1237	PBL	001	Rekomendasi Pelaksanaan Model Ideal Kewenangan dan Kelembagaan GWPP	Rekomendasi Kebijakan	1	0	10.32	3.291.778.000	339.738.302	10,32
60	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	6136	UBA	001	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Bencana berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (ProvKabKota)	546	164	16	5.054.881.000	808.612.723	16,00
61	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	20	0	16.74	6.268.616.000	1.049.733.784	16,75
62	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1241	PBL	001	Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian batas daerah	Rekomendasi Kebijakan	50	33	49.05	2.531.315.000	1.241.555.628	49,05
63	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1241	UBA	001	Daerah yang melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan	Daerah (ProvKabKota)	10	0	0.6	1.705.500.000	-	-

LAMPIRAN V

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I Per Satker

Kementerian Dalam Negeri

Periode 1 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	DESKRIPSI KODE PRIORITAS NASIONAL	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	%
64	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1241	PBL	002	Rekomendasi penyelesaian batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi	Rekomendasi Kebijakan	9	1	32.69	1.217.100.000	397.830.730	32,69
65	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1241	UBA	002	Daerah yang dikuatkan tata kelola Smart City-nya di Wilayah Metropolitan	Daerah (ProvKabKota)	10	4	15.82	3.967.562.000	627.546.698	15,82
66	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1237	UBA	002	Daerah yang difasilitasi dalam penguatan peran kecamatan dalam koordinasi vertikal dan horizontal	Daerah (ProvKabKota)	207	51	46.73	621.497.000	290.404.815	46,73
67	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1241	UBA	003	Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan	Daerah (ProvKabKota)	10	8	9.79	3.251.370.000	318.370.646	9,79
68	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1237	UBA	003	Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Daerah (ProvKabKota)	17	8	71.16	504.543.000	358.480.294	71,05
69	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1241	PEC	003	K/L yang mengintegrasikan kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau	Kesepakatan	16	0	31.76	1.642.945.000	521.799.169	31,76
70	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	6136	UBA	003	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Trantibum berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (ProvKabKota)	546	184	22.11	12.929.672.000	2.858.428.743	22,11
71	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1241	UBA	004	Penataan kewilayahan dalam Negeri dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8%	Daerah (ProvKabKota)	38	2	27.04	1.000.000.000	270.428.777	27,04
72	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1237	UBA	004	Daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan	Daerah (ProvKabKota)	4	3	34.16	935.732.000	319.620.718	34,16
73	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1241	UBA	005	Penataan kewilayahan kawasan perbatasan dan wilayah metropolitan dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8%	Daerah (ProvKabKota)	38	19	56.87	924.492.000	525.752.015	56,87
74	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1237	UBA	005	Daerah yang menerapkan PTSP berbasis OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) dalam perizinan berusaha	Daerah (ProvKabKota)	136	32	10.19	1.485.505.000	148.215.200	9,98
75	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	6136	UBA	006	Fasilitasi Administrasi kewilayahan dalam rangka implementasi kegiatan 3 juta rumah	Daerah (ProvKabKota)	38	8	14.08	1.452.962.000	201.467.742	13,87
76	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1237	UBA	006	Daerah yang dikuatkan SDM dan Kelembagaan DTMPTSP nya untuk mendukung iklim investasi yang kondusif	Daerah (ProvKabKota)	143	14	8.3	738.204.000	61.297.250	8,30
77	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1237	UBA	007	Daerah yang ditingkatkan pelimpahan kewenangan perizinan kepada DPMPTSP	Daerah (ProvKabKota)	155	104	56.5	735.721.000	415.688.400	56,50
78	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	1237	UBA	008	Dukungan Penguatan Terhadap Tata Kelola Koperasi Merah Putih Kelurahan/Desa	Daerah (ProvKabKota)	38	2	17.13	3.147.946.000	539.162.900	17,13
79	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	CM	6138	QDB	001	Fasilitasi lembaga posyandu dalam pelaksanaan 6 bidang SPM	Lembaga	4500	1000	22.22	3.740.558.000	274.529.785	7,34
80	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	1254	UBA	001	Daerah yang menerapkan SIPD bidang perencanaan pembangunan daerah	Daerah (Provi/Kab/Kota)	38	0	45	1.696.176.000	727.160.633	42,87
81	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	PBL	001	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Rekomendasi Kebijakan	6	3	45	252.937.000	105.387.602	41,67
82	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	1254	PBL	001	Rekomendasi perencanaan pembangunan daerah yang menerapkan partisipasi masyarakat	Rekomendasi Kebijakan	38	0	65	166.985.000	102.707.900	61,51
83	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	001	Daerah yang melaksanakan Peningkatan mutu dan layanan SPM	Daerah (ProvKabKota)	38	0	65	1.693.090.000	1.031.980.054	60,95
84	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	002	Daerah yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan SPM	Daerah (ProvKabKota)	38	0	33	411.299.000	117.678.858	28,61
85	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	1254	UBA	002	Daerah yang difasilitasi dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di Daerah	Daerah (Provi/Kab/Kota)	38	0	75	878.581.000	658.503.892	74,95
86	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	PBL	002	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar	Rekomendasi Kebijakan	10	5	46	825.769.000	360.691.986	43,68
87	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	PBL	003	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Pilihan	Rekomendasi Kebijakan	8	1	65	616.691.000	379.339.132	61,51
88	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	005	Fasilitasi Penyelenggaraan MBG di Daerah	Daerah (ProvKabKota)	38	0	35	410.813.000	147.093.457	35,81
89	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	100	Daerah yang dievaluasi rancangan Perda Tata Ruangnya	Daerah (ProvKabKota)	38	21	65	408.515.000	252.682.642	61,85
90	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	200	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (ProvKabKota)	546	273	60	174.562.000	97.735.000	55,99
91	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	201	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (ProvKabKota)	546	150	50	355.830.000	166.195.493	46,71
92	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	205	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan tata kelola digitalisasi pemerintah daerah	Daerah (ProvKabKota)	38	10	50	351.230.000	174.070.042	49,56
93	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	206	Daerah yang mendukung kebijakan tata kelola program tiga juta rumah	Daerah (ProvKabKota)	38	17	40	1.227.855.000	432.525.063	35,23
94	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	300	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (ProvKabKota)	546	125	40	217.489.000	82.695.000	38,02
95	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	301	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Sosial berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (ProvKabKota)	546	204	75	308.010.000	231.002.567	75,00

LAMPIRAN V

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I Per Satker

Kementerian Dalam Negeri

Periode 1 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	DESKRIPSI KODE PRIORITAS NASIONAL	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	%
96	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	303	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	Daerah (ProvKabKota)	3	0	15	3.928.893.000	560.782.926	14,27
97	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	304	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Daerah (ProvKabKota)	38	37	30	602.205.000	168.708.400	28,02
98	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	400	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (ProvKabKota)	546	273	60	374.218.000	215.070.178	57,47
99	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	409	Daerah yang di fasilitasi dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi untuk mendukung penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	Daerah (ProvKabKota)	18	8	50	394.482.000	196.481.100	49,81
100	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	Ditjen Otonomi Daerah	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	CM	6140	UBA	001	Evaluasi Efektivitas Perangkat Daerah berdasarkan PP Perangkat Daerah eksisting	Daerah (ProvKabKota)	38	26	35.15	1.798.313.000	631.275.920	35,10
101	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	Ditjen Otonomi Daerah	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	CM	1261	UBA	001	Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	Provinsi	11	0	44.7	2.630.473.000	1.177.335.949	44,76
102	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	Ditjen Otonomi Daerah	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	CM	3991	QMA	001	Database Peraturan Daerah yang terintegrasi	Data	1	0	11.8	2.239.771.000	263.488.019	11,76
103	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	Ditjen Otonomi Daerah	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	CM	1259	PAC	001	Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Aglomerasi	RPP	1	0	11.02	279.460.000	-	-
104	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	Ditjen Otonomi Daerah	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	CM	1259	PBL	001	Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa di DOB	Rekomendasi Kebijakan	4	1	27.76	2.988.833.000	828.687.000	27,73
105	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	Ditjen Otonomi Daerah	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	CM	6140	PBL	001	Rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah dalam rangka Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Rekomendasi Kebijakan	2	1	76.3	653.236.000	497.710.800	76,19
106	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	Ditjen Otonomi Daerah	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	CM	3991	UBA	001	Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kualitas Rancangan Perda dan Perkada yang telah sesuai dengan hasil review Kemendagri	Daerah (ProvKabKota)	38	4	46.6	1.634.553.000	761.189.461	46,57
107	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	Ditjen Otonomi Daerah	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	CM	3991	PBL	001	Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perizinan di daerah	Rekomendasi Kebijakan	2	0	65.3	1.177.783.000	768.683.740	65,27
108	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	Ditjen Otonomi Daerah	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	CM	1259	UBA	001	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penguatan Kapasitas dan Kinerja Daerah Bersifat Kekhususan dan Keistimewaan	Daerah (ProvKabKota)	10	6	40.8	9.785.877.000	3.989.539.086	40,77
109	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	Ditjen Otonomi Daerah	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	CM	3991	UBA	002	Daerah yang memiliki Skor Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Perda berkategori Sangat Baik	Daerah (ProvKabKota)	17	0	69.4	1.196.331.000	829.649.960	69,35
110	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	Ditjen Otonomi Daerah	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	CM	1259	PBL	002	Rekomendasi Model Ideal Penataan Daerah dalam rangka Revisi UU No. 23 Tahun 2014	Rekomendasi Kebijakan	1	0	62.56	125.772.000	78.595.666	62,49
111	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	Ditjen Otonomi Daerah	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	CM	1261	UBA	002	Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	Kab/Kota	60	0	42.45	154.317.000	65.428.382	42,40
112	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	Ditjen Otonomi Daerah	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	CM	1259	PBL	003	Rekomedasi Kebijakan Terkait DPOD	Rekomendasi Kebijakan	4	1	52.95	839.681.000	444.960.278	52,99
113	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	Ditjen Otonomi Daerah	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	CM	6140	PBL	003	Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Rekomendasi Kebijakan	1	0	27.4	1.003.150.000	274.250.128	27,34
114	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	Ditjen Otonomi Daerah	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	CM	6140	PBL	004	Rekomendasi Model Ideal Perangkat Daerah dalam rangka Revisi UU No. 23 Tahun 2014	Rekomendasi Kebijakan	1	0	23.3	1.701.568.000	395.157.700	23,22
115	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	CP	6997	UAB	001	Aplikasi ID digital	Sistem Informasi	1	0	24	40.936.824.000	2.754.887.500	6,73
116	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	CP	1269	PBM	001	Rekomendasi Kebijakan masukan Revisi undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	19	388.007.000	16.177.723	4,17
117	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	CP	1269	QAA	001	Akta Kelahiran yang diterbitkan	Akta	745000	745000	100	166.691.000	110.789.938	66,46
118	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	CP	1268	QAB	001	Lembaga pengguna yang terkoneksi dengan data warehouse kependudukan berbasis NIK Nasional	Lembaga	1375	19	29	12.446.001.000	273.847.304	2,20
119	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	CP	6997	PAD	S01	Peraturan Presiden mengenai Identitas Kependudukan Digital	PerPres	1	0	24	217.344.000	-	-
120	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	CM	1276	UBA	001	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah	Daerah (ProvKabKota)	38	15	26	339.405.000	85.860.781	25,30
121	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	CM	6141	PBL	001	Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Masukan Revisi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Rekomendasi Kebijakan	1	0	7	628.394.000	14.277.400	2,27
122	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	CM	6141	QMA	001	Peta Jalan Belanja Pegawai Di Daerah	Data	1	0	10.5	2.842.356.000	285.970.281	10,06
123	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	CM	6141	QMA	002	Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Data	1	0	30	3.566.555.000	1.063.779.907	29,83
124	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	CM	1276	UBA	002	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Memanfaatkan Pinjaman Daerah	Daerah (ProvKabKota)	38	20	26	1.108.812.000	277.027.845	24,98
125	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	CM	6141	UBA	011	Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Provinsi	29	10	35	2.256.927.000	796.850.179	35,31
126	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	CM	6141	UBA	013	Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)	Daerah (ProvKabKota)	420	0	22	886.140.000	194.597.973	21,96
127	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	CM	6141	UBA	014	Daerah Dengan Proporsi Kontribusi BUMD Meningkat Dalam APBD	Daerah (ProvKabKota)	360	247	18	7.809.575.000	1.363.384.395	17,46

LAMPIRAN V

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I Per Satker

Kementerian Dalam Negeri

Periode 1 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	DESKRIPSI KODE PRIORITAS NASIONAL	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	%
128	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	CM	6141	UBA	015	Daerah Yang Melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah Secara Wajar	Daerah (ProvKabKota)	510	150	20	3.756.088.000	729.150.806	19,41
129	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	CM	6141	UBA	017	Daerah yang Difasilitasi Dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai atas Pengeluaran Daerah	Daerah (ProvKabKota)	220	100	43	1.286.585.000	551.486.242	42,86
130	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	CM	6141	UBA	018	Daerah yang Difasilitasi Dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai atas Penerimaan Daerah	Daerah (ProvKabKota)	220	165	51	1.442.475.000	733.539.430	50,85
131	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	CM	6141	UBA	019	Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD Meningkat	Daerah (ProvKabKota)	360	0	59	2.510.591.000	1.461.460.816	58,21
132	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	CM	6141	UBA	020	Daerah Dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat	Daerah (ProvKabKota)	360	292	47	1.308.148.000	616.457.370	47,12
133	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	11	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	403222	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	CM	6142	UBA	001	Daerah dengan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri berkategori "Baik"	Daerah (Provi/Kab/Kota)	3	0	7.04	839.249.000	59.014.672	7,03
134	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	11	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	403222	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	CM	1283	UBA	001	Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik	Daerah (ProvKabKota)	2	0	2	387.533.000	-	-
135	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	11	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	403222	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	CM	1283	UBA	002	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	Daerah (ProvKabKota)	546	0	5	1.443.178.000	16.320.375	1,13
136	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	027114	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	CM	1285	PBL	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Kapasitas Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	Rekomendasi Kebijakan	2	0	18.07	341.494.000	61.693.788	18,07
137	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	027177	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	CM	1285	PBL	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Kapasitas Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	Rekomendasi Kebijakan	1	0	42.65	188.247.000	14.034.142	7,46
138	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	CM	1285	PBL	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Kapasitas Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	Rekomendasi Kebijakan	2	0	18	386.460.000	64.829.762	16,78
139	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	CM	1285	PBL	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Kapasitas Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	Rekomendasi Kebijakan	1	0	35.52	251.054.000	89.162.990	35,52
140	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	CM	1285	PFA	001	Standarisasi Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri	NSPK	7	3	75	563.100.000	406.172.050	72,13
141	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	CM	6144	UAC	003	Camat yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pembangunan	Orang	60	60	100	260.306.000	203.688.265	78,25
142	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	CM	6144	UAC	004	Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah	Orang	180	0	89.98	715.776.000	644.049.000	89,98
143	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	CM	6144	UAC	005	Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada	Orang	90	74	85	236.388.000	169.701.992	71,79
144	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	CM	6144	UAC	007	Pejabat Fungsional Penata Perizinan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	120	120	100	240.232.000	220.660.000	91,85
145	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	CM	1285	PBL	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Kapasitas Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	Rekomendasi Kebijakan	2	0	50.1	369.221.000	-	-
146	08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	CR	1233	UBA	002	Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar dan Intra Suku , Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan, Ras dan Golongan	Daerah (Provi/Kab/Kota)	38	38	100	1.178.469.000	1.163.963.330	98,77
147	08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	6136	UBA	002	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Kebakaran berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (ProvKabKota)	546	44	2.89	45.224.398.000	1.305.110.476	2,89
148	08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	6136	UBA	004	Daerah yang menerapkan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	Daerah (ProvKabKota)	38	0	4.91	1.162.971.000	57.152.000	4,91
149	08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	CM	6136	UBA	005	Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pasca bencana	Daerah (ProvKabKota)	38	21	31.76	29.847.595.000	504.899.333	1,69
150	08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	004	Daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian pelaksanaan PBG berketahanan bencana	Daerah (ProvKabKota)	38	9	70	228.656.000	157.562.204	68,91
151	08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	302	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (ProvKabKota)	546	512	25	459.513.000	110.942.926	24,14
152	08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	CM	6139	UBA	408	Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Budaya Gemar Membaca	Daerah (ProvKabKota)	38	0	55	222.106.000	113.619.250	51,16
TOTAL													**2.653.148**	**1.352.021**	**-**	**537.931.660.000**	**218.571.592.517**	**40,63**

LAMPIRAN VI

KESALAHAN PENGANGGARAN BELANJA BARANG DAN MODAL

LAMPIRAN VI

KESALAHAN PENGANGGARAN BELANJA BARANG DAN MODAL

PERIODE 1 JANUARI S.D. 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ES I	SATKER	NAMA SATKER	KODE TRANSAKSI	AKUN BELANJA	NAMA AKUN	AKUN ASET	NAMA AKUN	SALDO
12	027177	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	101	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	109.890.000
12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI	101	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	31.133.322
12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI	101	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	585.309
12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI	101	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	27.302.292
BELANJA BARANG MENJADI EKSTRAKOMPTABEL								**168.910.923**
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	101	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132111	Peralatan dan Mesin	23.666.150
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	101	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132111	Peralatan dan Mesin	4.656.000
BELANJA BARANG MENJADI ASET								**28.322.150**
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	101	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134113	Jaringan	257.453.400
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	101	536111	Belanja Modal Lainnya	132111	Peralatan dan Mesin	31.651.000
ANTAR BELANJA MODAL								**289.104.400**

LAMPIRAN VII

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN, SERTA KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER SATKER

LAMPIRAN VII

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN SERTA KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER SATKER
PER 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 30 JUNI 2026	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DES 2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP PER 30 JUNI 2026	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP PER 31 DES 2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 30 JUNI 2026	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 31 DES 2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 30 JUNI 2026	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DES 2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH 30 JUNI 2026	KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH 31 DES 2025	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	6.060.000.000	-	6.060.000.000	-	-	-	-	-	-	765.097.350	-	765.097.350	-	-	-
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	400.000.000	-	400.000.000	115.392.000		115.392.000	-	-	-	192.475.751	14.722.146	177.753.605	16.152.129.200	-	16.152.129.200
4	01	483005	KD	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	90.798.175	-	90.798.175	-	-	-
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	180.000.000	-	180.000.000	-	-	-	-	-	-	326.700.898	-	326.700.898	-	-	-
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	210.000.000	-		-	-	-	-	-	-	20.236.792	-	20.236.792	-	-	-
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	297.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	120.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	126.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	480.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	900.000.000	-		3.257.904.043	-	3.257.904.043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.200.000.000	-	1.200.000.000	-	777.785	(777.785)	-	-	-	166.149.228	409.679.343	(243.530.115)	-	-	-
14	04	484205	DK	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-	-
15	04	484208	DK	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-
16	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	227.162.361	-	227.162.361	-	-	-
17	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	90.000.000	-	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	45.000.000	-	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	20.878.856	-	20.878.856	-	-	-
20	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	103.526.063	130.000	103.396.063	14.384.908.731	14.384.908.731	-
21	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	144.158.300	-	144.158.300	-	-	-
22	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	1.954.930.625	-	1.954.930.625	-	-	-
23	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	300.000.000	-	300.000.000	1.304.169.560	-	1.304.169.560	-	-	-	255.824.872	-	255.824.872	-	-	-
24	11	403222	KP	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	210.000.000	-	210.000.000	-	-	-	-	-	-	38.250.000	-	38.250.000	-	-	-
25	12	027114	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	270.000.000	-	270.000.000	457.383.268	-	457.383.268	-	-	-	22.456.000	-	22.456.000	-	-	-
26	12	027177	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	300.000.000	-	300.000.000	568.895.000	-	568.895.000	43.926.100	-	43.926.100	-	11.342.378	(11.342.378)	-	-	-
27	12	403216	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	300.000.000	-	300.000.000	126.910.000	-	126.910.000	-	-	-	11.390.000	-	11.390.000	-	-	-
28	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	500.000.000	-	500.000.000	-	-	-	35.677.000	-	35.677.000	28.560.000	-	28.560.000	-	-	-
29	12	506137	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	195.000.000	-	195.000.000	-	-	-	-	-	-	66.359.056	-	66.359.056	-	-	-
30	12	506138	KD	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	86.000.000	-	86.000.000	-	-	-	-	-	-	23.000	-	23.000	-	-	-
TOTAL					**14.369.000.000**	**-**	**12.236.000.000**	**5.830.653.871**	**777.785**	**5.829.876.086**	**79.603.100**	**-**	**79.603.100**	**4.434.987.387**	**435.883.927**	**3.999.103.460**	**30.537.037.931**	**14.384.908.731**	**16.152.129.200**

LAMPIRAN VIII

REKAPITULASI PERSEDIAAN PER SATKER MENURUT AKUN

LAMPIRAN VIII

REKAPITULASI PERSEDIAAN PER SATKER MENURUT AKUN
PER 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	KODE KEWENANGAN	NAMA SATKER	AKUN PERSEDIAAN												SALDO PERSEDIAAN PER 30 JUNI 2026
					117111	117113	117114	117122	117124	117125	117126	117127	117128	117129	117131	117199	
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	598.167.684	491.712.131	40.141.403	-	-	-	-	-	-	-	-	703.091.406	1.833.112.624
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	886.387.761	1.196.431.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.587.226	2.503.406.416
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	386.871.432	13.862.285	-	-	-	-	-	-	-	-	398.000	2.334.321	403.466.038
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	43.212.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.080.000	85.292.433
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	21.280.558	655.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.252.795	75.188.353
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	170.674.368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.105.515	267.779.883
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	18.540.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.734.932	37.274.992
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	17.478.067	-	9.599.062	-	-	-	-	-	-	-	-	57.305.333	84.382.462
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	13.828.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.422.312	62.250.312
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	184.424.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.424.237
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	45.015.500	4.431.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.446.500
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	-	-	-	9.937.682.563	23.114.706.811	3.177.105.294	-	-	9.327.461.812	26.075.558.063	-	-	71.632.514.543
14	04	240270	DK	BADAN PENGELOAL PERBATASAN DAERAH KAB BELU	-	-	-	865.762.700	-	-	-	-	-	-	-	-	865.762.700
15	04	356000	DK	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU	-	-	-	1.570.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570.910.000
16	04	417936	DK	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	-	-	-	1.879.281.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.879.281.000
17	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	376.897.776	-	-	-	-	-	-	12.112.702.631	515.355.000	-	-	195.925.412	13.200.880.819
18	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	39.621.854	172.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589.391	40.383.245
19	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	21.374.969	2.913.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.288.519
20	05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	1.230.620	411.719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.642.339
21	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	414.264.160	4.069.930	11.299.000	1.897.536.691	31.596.932.384	25.408.511.400	135.560.257.780	106.420.451.233		1.599.201.550	-	42.960.072	302.955.484.200
22	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	348.028.227	16.857.004	-	-	-	-	-	1.088.228.700	-	-	-	-	1.453.113.931
23	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	493.892.106	22.398.300	-	-	-	-	-	3.533.932.806	52.679.030.862	-	-	-	56.729.254.074
24	09	662766	KP	DITJEN KEUANGAN DAERAH	198.663.220	27.005.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.668.340
25	11	403222	KP	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	39.363.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.026.377	340.389.437
26	12	027114	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	25.929.844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.929.844
27	12	027177	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	12.553.834	585.500	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.639.334
28	12	403216	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	11.722.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.115.400	19.837.400
29	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	208.495.090	4.812.516	966.810	-	-	-	-	-	-	-	-	48.835.280	263.109.696
30	12	506137	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	22.338.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.338.385
31	12	506138	KD	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	56.773.512	46.765.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.538.922
TOTAL					**4.657.028.757**	**1.833.082.894**	**64.506.275**	**16.151.172.954**	**54.711.639.195**	**28.585.616.694**	**135.560.257.780**	**123.155.315.370**	**62.521.847.674**	**27.674.759.613**	**398.000**	**2.040.365.772**	**456.955.990.978**

LAMPIRAN IX

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER ESELON I

LAMPIRAN IX

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	Kode Transaksi	Setjen	Itjen	Ditjen Polpum	Ditjen BAK	Ditjen Bina Pemdes	Ditjen Bina Bangda	Ditjen Otda	Ditjen Dukcapil	Ditjen Bina Keuda	BSKDN	BPSDM	TOTAL
Saldo 31 Desember 2025		**8.229.987.946**	**127.342.800**	**5.500.000**	**39.977.444.163**	**13.217.368.956**	**302.779.465.018**	**1.488.915.033**	**4.826.752.463**	**144.973.170**	**243.177.093**	**218.794.768**	**371.259.721.410**
Pembelian	M02	25.875.194.797	114.969.155	406.561.195	36.232.390.341	1.843.915.348	804.438.495	304.135.482	178.827.060.947	342.831.975	305.535.050	944.124.074	246.001.156.859
Reklasifikasi Masuk	M10	40.145.041	-	-	-	-	-	-	-	-	640.000	18.128.865	58.913.906
Koreksi Nilai Tambah	M98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.960.000	-	3.960.000
Koreksi Kuantitas Tambah	M99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Hasil Opname Fisik	P01	3.296.706	-	-	-	-	1.496.300	-	-	-	-	-	4.793.006
Mutasi Tambah		**25.918.636.544**	**114.969.155**	**406.561.195**	**36.232.390.341**	**1.843.915.348**	**805.934.795**	**304.135.482**	**178.827.060.947**	**342.831.975**	**310.175.050**	**962.252.939**	**246.068.863.771**
Habis Pakai	K01	(23.302.391.666)	(57.887.718)	(362.614.695)	(261.366.261)	(1.380.254.702)	(625.950.133)	(339.936.584)	(126.924.559.336)	(262.136.805)	(208.322.706)	(712.525.261)	(154.437.945.867)
Hibah Keluar	K03	(4.825.310.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.825.310.000)
Usang	K04	(3.011.935)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.011.935)
Catat Persediaan tak Dikuasai	K09	-	-	-	-	(413.834.680)	-	-	-	-	-	-	(413.834.680)
Reklasifikasi Keluar	K10	(40.145.041)	-	-	-	-	-	-	-	-	(640.000)	(18.128.865)	(58.913.906)
Koreksi Kuantitas Kurang	K99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(400.000)	-	(400.000)
Koreksi Nilai Tambah	M98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.600.000)	-	(3.600.000)
Hasil Opname Fisik	P01	(625.612.335)	-	-	-	-	(3.965.480)	-	-	-	-	-	(629.577.815)
Mutasi Kurang		**(28.796.470.977)**	**(57.887.718)**	**(362.614.695)**	**(261.366.261)**	**(1.794.089.382)**	**(629.915.613)**	**(339.936.584)**	**(126.924.559.336)**	**(262.136.805)**	**(212.962.706)**	**(730.654.126)**	**(160.372.594.203)**
Saldo 30 Juni 2026		**5.352.153.513**	**184.424.237**	**49.446.500**	**75.948.468.243**	**13.267.194.922**	**302.955.484.200**	**1.453.113.931**	**56.729.254.074**	**225.668.340**	**340.389.437**	**450.393.581**	**456.955.990.978**

LAMPIRAN X

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER AKUN

LAMPIRAN X

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER AKUN

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	Kode Transaksi	Barang Konsumsi (117111)	Bahan untuk Pemeliharaan (117113)	Suku Cadang (117114)	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117122)	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117124)	Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat (117125)	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (117126)	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat (117127)	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat (117128)	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses (117129)	Bahan Baku (117131)	Persediaan Lainnya (117199)	TOTAL
Saldo 31 Desember 2025		**3.505.124.319**	**619.739.631**	**81.679.487**	**16.151.172.954**	**54.136.639.215**	**28.585.616.694**	**135.560.257.780**	**121.569.579.244**	**8.196.420.722**	**1.599.201.550**	**-**	**1.254.289.814**	**371.259.721.410**
Pembelian	M02	6.746.391.901	2.123.901.993	343.303.912	-	574.999.980	-	-	10.537.421.307	197.461.097.312	26.075.558.063	129.167.438	2.009.314.953	246.001.156.859
Reklasifikasi Masuk	M10	42.083.505	14.840.401	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000	640.000	58.913.906
Koreksi Nilai Tambah	M98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.960.000	3.960.000
Koreksi Kuantitas Tambah	M99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	40.000
Hasil Opname Fisik	P01	1.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.018.006	4.793.006
Mutasi Tambah		**6.790.250.406**	**2.138.742.394**	**343.303.912**	**-**	**574.999.980**	**-**	**-**	**10.537.421.307**	**197.461.097.312**	**26.075.558.063**	**130.517.438**	**2.016.972.959**	**246.068.863.771**
Habis Pakai	K01	(5.087.334.628)	(925.249.151)	(359.347.124)	-	-	-	-	(8.537.850.501)	(138.310.360.360)	-	(86.104.037)	(1.131.700.066)	(154.437.945.867)
Hibah Keluar	K03	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.825.310.000)	-	-	-	(4.825.310.000)
Usang	K04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.011.935)	(3.011.935)
Catat Persediaan tak Dikuasai	K09	-	-	-	-	-	-	-	(413.834.680)	-	-	-	-	(413.834.680)
Reklasifikasi Keluar	K10	(359.640)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44.015.401)	(14.538.865)	(58.913.906)
Koreksi Kuantitas Kurang	K99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(400.000)	(400.000)
Koreksi Nilai Tambah	M98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.600.000)	(3.600.000)
Hasil Opname Fisik	P01	(550.651.700)	(149.980)	(1.130.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	(77.646.135)	(629.577.815)
Mutasi Kurang		**(5.638.345.968)**	**(925.399.131)**	**(360.477.124)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(8.951.685.181)**	**(143.135.670.360)**	**-**	**(130.119.438)**	**(1.230.897.001)**	**(160.372.594.203)**
Saldo 30 Juni 2026		**4.657.028.757**	**1.833.082.894**	**64.506.275**	**16.151.172.954**	**54.711.639.195**	**28.585.616.694**	**135.560.257.780**	**123.155.315.370**	**62.521.847.674**	**27.674.759.613**	**398.000**	**2.040.365.772**	**456.955.990.978**

LAMPIRAN XI

DAFTAR PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI PER 30 JUNI 2026

LAMPIRAN XI

DAFTAR PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI PER 30 JUNI 2026

NO	KODE	URAIAN ESELON I	KODE	URAIAN SATKER EKS-TP	KODE	URAIAN AKUN	URAIAN BARANG	NILAI
1	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179317	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN 179317	1.132.438.140
			170010	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA (TP)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	RUMAH DINAS CAMAT MIANGAS	702.568.212
					117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	KANTOR CAMAT PERBATASAN	692.439.632
			SUBTOTAL					**2.527.445.984**
2	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	029367	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN PASAR RAISER IKAN HIAS	166.000.000
			029472	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI PASAR PERMANEN	80.925.000
			139335	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. KUBU RAYA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG KOPERASI PASAR	533.658.780
			239273	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. SUMBAWA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	604.669.664
					117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI PASAR PERMANEN	79.869.240
			039438	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	170.461.250
			069280	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN	80.776.430
			309247	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN	162.597.000
			SUBTOTAL					**1.878.957.364**
3	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	141019	DINAS KIMPRASWIL KAB. GUNUNG MAS (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	4.249.178.699
							BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN	218.912.400
							MESS WISMA BUNGALOW TEMPAT PERISTIRAHATAN PERMANEN	522.762.740
			SUBTOTAL					**4.990.853.839**
3	07	DITJEN OTDA	120730	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	UNINTERUPTED POWER SUPPLY (UPS)	7.728.000
			SUBTOTAL					**7.728.000**
TOTAL PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI								**9.404.985.187**

LAMPIRAN XII

REKAPITULASI ASET TETAP PER SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2026

Lampiran XII

REKAPITULASI ASET TETAP PER SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	KODE KEWENANGAN	NAMA SATKER	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN DAN JEMBATAN	IRIGASI	JARINGAN	ASET TETAP RENOVASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PERLATAN DAN MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA
ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL																			
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	2.443.605.071.000	690.246.735.063	584.374.329.360	1.487.045.700	-	26.763.748.222	947.724.994	826.108.058	99.021.990	(475.055.105.642)	(116.933.289.513)	(1.337.025.160)	-	(14.722.969.620)	(107.247.358)
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	7.311.653.653.121	194.080.012.675	602.002.009.140	13.626.682.038	8.175.960.585	9.857.862.736	-	11.592.349.756	687.480.617	(144.206.442.450)	(173.125.873.210)	(10.574.325.274)	(3.710.840.328)	(8.352.949.321)	(1.291.167.642)
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	-	28.699.268.695	-	-	-	-	5.597.607.638	-	-	(17.833.409.558)	-	-	-	-	-
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	29.609.419.000	17.706.765.284	100.675.887.944	4.792.195.000	202.033.000	15.439.902.461	-	2.314.510.500	178.864.574	(16.786.422.197)	(19.889.659.212)	(4.792.195.000)	(50.508.252)	(6.500.870.526)	(1.385.202.000)
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	19.427.487.290	33.555.506.945	186.025.657.874	3.691.287.000	201.896.000	14.647.395.453	-	2.230.891.200	-	(31.704.325.543)	(37.111.036.714)	(3.322.158.300)	(53.443.062)	(6.644.837.928)	(1.119.292.250)
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	67.384.464.000	31.055.995.623	127.141.045.579	7.971.764.000	572.395.560	14.895.342.304	-	2.607.266.515	932.423.670	(30.587.162.828)	(27.156.884.195)	(7.971.764.000)	(407.277.104)	(7.021.689.725)	(1.186.642.240)
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	120.548.358.000	16.660.965.788	201.516.450.260	19.588.249.120	3.984.743.385	8.523.454.530	-	2.228.949.090	20.615.135.645	(14.362.805.094)	(27.295.291.256)	(11.470.214.885)	(1.656.079.790)	(1.823.807.760)	(1.025.898.500)
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	231.199.726.000	37.997.601.550	134.922.899.320	8.086.188.000	29.786.903.000	28.159.224.989	-	2.361.784.565	-	(36.236.765.777)	(25.541.937.971)	(6.422.922.275)	(24.779.991.758)	(13.211.501.077)	(1.127.615.190)
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	84.455.622.000	43.621.786.518	197.508.321.388	4.101.699.325	49.942.712	25.705.464.617	-	1.161.876.215	1.971.474.477	(43.421.900.416)	(35.692.361.634)	(3.552.314.731)	(7.990.832)	(8.426.905.122)	(377.293.000)
PER ESELON I					**10.307.883.800.411**	**1.093.624.638.141**	**2.134.166.600.865**	**63.345.110.183**	**42.973.874.242**	**143.992.395.312**	**6.545.332.632**	**25.323.735.899**	**24.484.400.973**	**(810.194.339.505)**	**(462.746.333.705)**	**(49.442.919.625)**	**(30.666.131.126)**	**(66.705.531.079)**	**(7.620.358.180)**
ESELON I INSPEKTORAT JENDERAL																			
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	142.267.725.000	29.584.970.807	46.320.276.833	-	-	-	-	-	-	(20.203.432.664)	(9.435.231.575)	-	-	-	-
PER ESELON I					**142.267.725.000**	**29.584.970.807**	**46.320.276.833**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(20.203.432.664)**	**(9.435.231.575)**	**-**	**-**	**-**	**-**
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM																			
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	-	23.430.566.749	-	-	-	-	-	32.190.000	-	(17.239.491.860)	-	-	-	-	-
PER ESELON I					**-**	**23.430.566.749**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.190.000**	**-**	**(17.239.491.860)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN																			
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	-	151.268.130.200	1.576.390.000	-	-	11.245.442.670	-	17.686.224.808	4.704.402.000	(134.940.515.941)	(323.097.055)	-	-	(4.498.172.658)	-
PER ESELON I					**-**	**151.268.130.200**	**1.576.390.000**	**-**	**-**	**11.245.442.670**	**-**	**17.686.224.808**	**4.704.402.000**	**(134.940.515.941)**	**(323.097.055)**	**-**	**-**	**(4.498.172.658)**	**-**
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA																			
14	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	483.090.835.000	84.909.684.419	117.506.143.485	637.667.000	17.967.000	1.369.558.074	-	13.380.368.830	24.997.200	(82.286.300.680)	(40.703.330.814)	(637.667.000)	(6.219.342)	(922.875.792)	(214.213.042)
15	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	34.042.849.000	10.398.602.725	39.822.425.497	-	-	526.026.800	-	13.230.000	-	(9.713.203.027)	(8.251.678.159)	-	-	(286.016.710)	(7.375.000)
16	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	62.457.627.000	5.623.124.261	23.039.415.000	-	-	-	-	800.000	-	(5.280.631.879)	(6.943.784.980)	-	-	-	-
17	05	613629	KP	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	33.642.823.493	3.289.413.630	9.170.797.000	308.907.000	-	198.734.000	-	73.365.000	-	(3.204.445.575)	(2.009.662.661)	(308.907.000)	-	(81.977.775)	-
PER ESELON I					**613.234.134.493**	**104.220.825.035**	**189.538.780.982**	**946.574.000**	**17.967.000**	**2.094.318.874**	**-**	**13.467.763.830**	**24.997.200**	**(100.484.581.161)**	**(57.908.456.614)**	**(946.574.000)**	**(6.219.342)**	**(1.290.870.277)**	**(221.588.042)**
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH																			
18	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	479.054.657.019	77.441.251.514	106.281.567.163	2.057.890.800	1.572.044.000	807.674.890	-	4.951.568.889	-	(67.817.418.853)	(23.523.131.692)	(2.057.890.800)	(372.326.209)	(554.671.012)	-
PER ESELON I					**479.054.657.019**	**77.441.251.514**	**106.281.567.163**	**2.057.890.800**	**1.572.044.000**	**807.674.890**	**-**	**4.951.568.889**	**-**	**(67.817.418.853)**	**(23.523.131.692)**	**(2.057.890.800)**	**(372.326.209)**	**(554.671.012)**	**-**
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH																			
19	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	21.308.481.768	-	-	-	-	-	-	-	(18.518.775.929)	-	-	-	-	-
PER ESELON I					**-**	**21.308.481.768**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(18.518.775.929)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
20	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35.098.225.956	2.996.826.417.855	36.606.283.783	-	2.084.000	2.861.849.000	7.621.133.861	46.194.500	34.571.325.713	(2.504.973.938.798)	(7.194.550.844)	-	(1.180.929)	(806.750.675)	(419.899.750)
PER ESELON I					**35.098.225.956**	**2.996.826.417.855**	**36.606.283.783**	**-**	**2.084.000**	**2.861.849.000**	**7.621.133.861**	**46.194.500**	**34.571.325.713**	**(2.504.973.938.798)**	**(7.194.550.844)**	**-**	**(1.180.929)**	**(806.750.675)**	**(419.899.750)**
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH																			
21	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	-	22.807.480.532	-	-	-	-	1.791.534.675	219.886.683	-	(19.637.686.451)	-	-	-	-	-
PER ESELON I					**-**	**22.807.480.532**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.791.534.675**	**219.886.683**	**-**	**(19.637.686.451)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ESELON I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																			
22	11	403222	KP	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	224.894.826.500	25.767.242.424	32.971.251.829	121.615.000	336.689.400	47.428.700	-	517.106.736	-	(23.366.307.016)	(11.413.919.703)	(109.453.500)	(75.755.115)	(20.750.056)	-
PER ESELON I					**224.894.826.500**	**25.767.242.424**	**32.971.251.829**	**121.615.000**	**336.689.400**	**47.428.700**	**-**	**517.106.736**	**-**	**(23.366.307.016)**	**(11.413.919.703)**	**(109.453.500)**	**(75.755.115)**	**(20.750.056)**	**-**
ESELON I BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																			
23	12	027114	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	347.284.531.000	17.993.886.345	30.800.116.114	981.978.400	123.391.000	623.374.000	-	206.819.000	1.042.432.100	(16.118.342.913)	(13.430.288.355)	(981.978.400)	(36.082.278)	(225.072.286)	-
24	12	027177	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	40.926.454.000	11.218.465.838	34.616.293.260	2.653.448.000	573.132.000	862.362.170	-	348.650.229	1.414.382.943	(8.868.976.810)	(7.557.791.380)	(2.318.489.800)	(492.378.803)	(290.332.101)	-
25	12	352588	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	-	-	75.632.942.000	-	-	-	-	-	-	-	(14.762.198.772)	-	-	-	-
26	12	403216	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	119.023.192.923	20.498.408.989	45.050.482.426	3.484.726.500	591.066.000	1.657.662.471	-	587.930.500	1.662.759.067	(16.498.924.746)	(10.791.517.443)	(2.690.637.646)	(70.257.803)	(756.791.920)	-
27	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	706.789.350.510	82.429.470.234	148.622.806.760	-	33.753.000	4.085.237.140	-	1.385.222.775	-	(66.577.318.056)	(42.249.355.692)	-	(14.014.602)	(2.261.926.851)	(7.150.000)
28	12	506137	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	44.475.536.000	15.836.888.049	47.086.335.407	2.219.407.537	587.061.000	1.921.508.468	-	289.207.750	-	(13.210.608.473)	(10.550.815.397)	(2.219.407.537)	(587.061.000)	(646.939.499)	(15.400.000)
29	12	506138	KD	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	198.386.414.000	24.792.198.925	37.333.053.533	1.910.925.134	1.231.749.000	546.531.335	-	148.395.500	2.730.429.689	(18.803.791.450)	(10.002.790.318)	(1.837.977.722)	(615.874.500)	(175.040.259)	-
PER ESELON I					**1.456.885.478.433**	**172.769.318.380**	**419.142.029.500**	**11.250.485.571**	**3.140.152.000**	**9.696.675.584**	**-**	**2.966.225.754**	**6.850.003.799**	**(140.077.962.448)**	**(109.344.757.357)**	**(10.048.491.105)**	**(1.815.668.986)**	**(4.356.102.916)**	**(22.550.000)**
MLAH					**13.259.318.847.812**	**4.719.049.323.405**	**2.966.603.180.955**	**77.721.675.554**	**48.042.810.642**	**170.745.785.030**	**15.958.001.168**	**65.210.897.099**	**70.635.129.685**	**(3.857.454.450.626)**	**(681.889.478.545)**	**(62.605.329.030)**	**(32.937.281.707)**	**(78.232.848.673)**	**(8.284.395.972)**

LAMPIRAN XIII

RINCIAN MUTASI PERALATAN DAN MESIN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XIII

RINCIAN MUTASI PERALATAN DAN MESIN PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	KODE TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	DITJEN POLPUM	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN OTDA	DITJEN DUKCAPIL	DITJEN BINA KEUDA	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Saldo per 31 Desember 2025		**1.056.233.020.029**	**26.437.852.827**	**19.041.914.546**	**150.741.481.206**	**104.190.956.230**	**68.715.386.757**	**18.946.883.882**	**2.995.205.902.037**	**20.974.352.229**	**24.317.018.668**	**154.401.076.836**	**4.639.205.845.247**
Pembelian	101	78.637.938.502	2.407.750.723	3.406.237.018	1.116.248.994	423.076.305	7.462.241.504	1.135.414.200	1.620.515.818	601.509.548	-	17.314.287.544	114.125.220.156
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	202	1.169.736.740	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.169.736.740
Perolehan Lainnya	112	34.578.720	-	354.629.996	-	-	-	-	-	-	-	-	389.208.716
Transfer Masuk	102	-	1.636.667.257	1.013.013.755	-	-	1.263.623.253	1.226.183.686	-	1.231.618.755	1.450.223.756	1.683.204.000	9.504.534.462
Mutasi Tambah		**79.842.253.962**	**4.044.417.980**	**4.773.880.769**	**1.116.248.994**	**423.076.305**	**8.725.864.757**	**2.361.597.886**	**1.620.515.818**	**1.833.128.303**	**1.450.223.756**	**18.997.491.544**	**125.188.700.074**
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(45.079.263)	-	(30.598.570)	-	-	-	-	-	-	-	-	(75.677.833)
Transfer Keluar	302	(9.504.534.462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.504.534.462)
Hibah Keluar	303	(3.775.955.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.775.955.000)
Koreksi Pencatatan	305	-	-	(354.629.996)	-	-	-	-	-	-	-	-	(354.629.996)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	401	(29.125.067.125)	(897.300.000)	-	(589.600.000)	(393.207.500)	-	-	-	-	-	(629.250.000)	(31.634.424.625)
Mutasi Kurang		**(42.450.635.850)**	**(897.300.000)**	**(385.228.566)**	**(589.600.000)**	**(393.207.500)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(629.250.000)**	**(45.345.221.916)**
Saldo per 30 Juni 2026		**1.093.624.638.141**	**29.584.970.807**	**23.430.566.749**	**151.268.130.200**	**104.220.825.035**	**77.441.251.514**	**21.308.481.768**	**2.996.826.417.855**	**22.807.480.532**	**25.767.242.424**	**172.769.318.380**	**4.719.049.323.405**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026		**(810.194.339.505)**	**(20.203.432.664)**	**(17.239.491.860)**	**(134.940.515.941)**	**(100.484.581.161)**	**(67.817.418.853)**	**(18.518.775.929)**	**(2.504.973.938.798)**	**(19.637.686.451)**	**(23.366.307.016)**	**(140.077.962.448)**	**(3.857.454.450.626)**
Nilai Buku per 30 Juni 2026		**283.430.298.636**	**9.381.538.143**	**6.191.074.889**	**16.327.614.259**	**3.736.243.874**	**9.623.832.661**	**2.789.705.839**	**491.852.479.057**	**3.169.794.081**	**2.400.935.408**	**32.691.355.932**	**861.594.872.779**

LAMPIRAN XIV

RINCIAN PEMBELIAN (101) PERALATAN DAN MESIN PER SATKER

LAMPIRAN XIV

RINCIAN PEMBELIAN (101) PERALATAN DAN MESIN PER SATKER

Es I	Kode	Nama Satker	Nilai
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	24.427.729.937
01	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	184.382.100
01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	328.940.001
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	47.530.803.244
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	1.394.148.900
01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	1.519.420.000
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	1.270.745.150
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	1.981.769.170
02	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	2.407.750.723
03	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	3.406.237.018
04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.116.248.994
05	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	11.016.000
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	94.240.110
05	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	191.269.095
05	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	126.551.100
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	7.462.241.504
07	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.135.414.200
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.620.515.818
09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	601.509.548
12	506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	508.232.875
12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.718.820.083
12	027114	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	440.055.404
12	403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	2.412.422.364
12	027177	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	687.719.370
12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI	1.547.037.448
TOTAL			**114.125.220.156**

LAMPIRAN XV

RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XV

RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN DUKCAPIL	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo per 31 Desember 2025		**2.108.572.437.456**	**45.925.502.780**	**1.576.390.000**	**189.538.780.982**	**105.804.494.380**	**36.606.283.783**	**32.971.251.829**	**418.690.373.611**	**2.939.685.514.821**
Pembelian	101	-	-	-	-	-	-	-	375.808.000	375.808.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	202	23.817.453.401	394.774.053	-	-	477.072.783	-	-	399.364.000	25.088.664.237
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	105	770.666.229	-	-	-	-	-	-	-	770.666.229
Pengembangan Melalui KDP	208	1.137.287.378	-	-	-	-	-	-	-	1.137.287.378
Mutasi Tambah		**25.725.407.008**	**394.774.053**	**-**	**-**	**477.072.783**	**-**	**-**	**775.172.000**	**27.372.425.844**
Koreksi Susulan	214	(19.955.820)	-	-	-	-	-	-	(323.516.111)	(343.471.931)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(111.287.779)	-	-	-	-	-	-	-	(111.287.779)
Mutasi Kurang		**(131.243.599)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(323.516.111)**	**(454.759.710)**
Saldo per Saldo per 30 Juni 2026		**2.134.166.600.865**	**46.320.276.833**	**1.576.390.000**	**189.538.780.982**	**106.281.567.163**	**36.606.283.783**	**32.971.251.829**	**419.142.029.500**	**2.966.603.180.955**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026		**(462.746.333.705)**	**(9.435.231.575)**	**(323.097.055)**	**(57.908.456.614)**	**(23.523.131.692)**	**(7.194.550.844)**	**(11.413.919.703)**	**(109.344.757.357)**	**(681.889.478.545)**
Nilai Buku per 30 Juni 2026		**1.671.420.267.160**	**36.885.045.258**	**1.253.292.945**	**131.630.324.368**	**82.758.435.471**	**29.411.732.939**	**21.557.332.126**	**309.797.272.143**	**2.284.713.702.410**

LAMPIRAN XVI

RINCIAN MUTASI JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XVI

RINCIAN MUTASI JALAN IRIGASI DAN JARINGAN PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	KODE TRANSAKSI	SETJEN	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN DUKCAPIL	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo per 31 Desember 2025		**250.139.405.354**	**11.245.442.670**	**3.058.859.874**	**4.437.609.690**	**2.863.933.000**	**505.733.100**	**23.174.634.155**	**295.425.617.843**
Pembelian	101	257.453.400	-	-	-	-	-	398.006.000	655.459.400
Pengembangan Nilai Aset	202	-	-	-	-	-	-	514.673.000	514.673.000
Mutasi Tambah		**257.453.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**912.679.000**	**1.170.132.400**
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(85.479.017)	-	-	-	-	-	-	(85.479.017)
Mutasi Kurang		**(85.479.017)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(85.479.017)**
Saldo per 30 Juni 2026		**250.311.379.737**	**11.245.442.670**	**3.058.859.874**	**4.437.609.690**	**2.863.933.000**	**505.733.100**	**24.087.313.155**	**296.510.271.226**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026		**(146.814.581.830)**	**(4.498.172.658)**	**(2.243.663.619)**	**(2.984.888.021)**	**(807.931.604)**	**(205.958.671)**	**(16.220.263.007)**	**(173.775.459.410)**
Nilai Buku per 30 Juni 2026		**103.496.797.907**	**6.747.270.012**	**815.196.255**	**1.452.721.669**	**2.056.001.396**	**299.774.429**	**7.867.050.148**	**122.734.811.816**

LAMPIRAN XVII

RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XVII

RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	KODE TRANSAKSI	SETJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	BANGDA	DUKCAPIL	KEUDA	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo per 31 Desember 2025		**31.579.222.008**	**-**	**17.686.224.808**	**13.467.763.830**	**4.951.568.889**	**7.667.328.361**	**2.011.421.358**	**517.106.736**	**2.966.225.754**	**80.846.861.744**
Pembelian	101	459.864.505	-	-	-	-	-	-	-	-	459.864.505
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	105	-	32.190.000	-	-	-	-	-	-	-	32.190.000
Mutasi Tambah		**459.864.505**	**32.190.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**492.054.505**
Penghentian Aset Dari Penggunaan	401	(170.017.982)	-	-	-	-	-	-	-	-	(170.017.982)
Mutasi Kurang		**(170.017.982)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(170.017.982)**
Saldo per 30 Juni 2026		**31.869.068.531**	**32.190.000**	**17.686.224.808**	**13.467.763.830**	**4.951.568.889**	**7.667.328.361**	**2.011.421.358**	**517.106.736**	**2.966.225.754**	**81.168.898.267**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026		**(7.620.358.180)**	**-**	**-**	**(221.588.042)**	**-**	**(419.899.750)**	**-**	**-**	**(22.550.000)**	**(8.284.395.972)**
Nilai Buku per 30 Juni 2026		**24.248.710.351**	**-**	**17.686.224.808**	**13.246.175.788**	**4.951.568.889**	**7.247.428.611**	**2.011.421.358**	**517.106.736**	**2.943.675.754**	**72.884.502.295**

LAMPIRAN XVIII

RINCIAN MUTASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XVIII

RINCIAN MUTASI KDP PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	KODE TRANSAKSI	SETJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	DUKCAPIL	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo per 31 Desember 2025		**19.348.330.223**	**-**	**-**	**24.997.200**	**-**	**-**	**19.373.327.423**
Perolehan Penambahan KDP	502	3.816.576.204	32.190.000	4.704.402.000	-	24.199.928.000	5.153.621.678	37.906.717.882
Pengembangan KDP	503	3.227.448.153	-	-	-	10.371.397.713	1.696.382.121	15.295.227.987
Koreksi Nilai KDP Bertambah	504	568.643.689	-	-	-	-	-	568.643.689
Reklasifikasi Masuk KDP	514	17.659.774	32.190.000	-	-	-	-	49.849.774
Mutasi Tambah		**7.630.327.820**	**64.380.000**	**4.704.402.000**	**-**	**34.571.325.713**	**6.850.003.799**	**53.820.439.332**
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	105	(770.666.229)	(32.190.000)	-	-	-	-	(802.856.229)
Pengembangan Melalui KDP	208	(1.137.287.378)	-	-	-	-	-	(1.137.287.378)
Reklasifikasi Keluar KDP	513	(17.659.774)	(32.190.000)	-	-	-	-	(49.849.774)
Koreksi Pencatatan KDP	517	(568.643.689)	-	-	-	-	-	(568.643.689)
Mutasi Kurang		**(2.494.257.070)**	**(64.380.000)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2.558.637.070)**
Saldo per 30 Juni 2026		**24.484.400.973**	**-**	**4.704.402.000**	**24.997.200**	**34.571.325.713**	**6.850.003.799**	**70.635.129.685**

LAMPIRAN XIX

RINCIAN MUTASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER SATUAN KERJA

LAMPIRAN XIX

RINCIAN KDP PER SATKER

No	Kode ES.I	Kode Satker	Nama Satker	Nomor Kontrak	Jangka Waktu	Nilai Kontrak	% Penyelesaian	Nilai KDP posisi 30 Juni 2026	Keterangan	Penjelasan Belum Selesai	Apakah akan dilanjutkan atau tidak?
1	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	000.4.2/12.24/PPK/II/BU/2026 TANGGAL 12 FEBRUARI 2026	30 hari kalender	99.021.990	100%	99.021.990	Konsultan Perencana Pembangunan Sarana Fitness Center Kemendagri Tahun Anggaran 2026	-	-
2	01	448302	IPDN JATINANGOR	EP-01KN26C2EJPYGJ2WFB5XB71MRH	90 hari	1.798.699.389	30%	539.609.817	Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Besar dan Ruang Kelas Kecil di IPDN	-	Akan Dilanjutkan
3	01	448302	IPDN JATINANGOR	-NPHD 29.U/04-C/2026 - 008.8.7.1/150/IPDN TANGGAL 15 Maret 2026	15 Maret sd 31 Maret 2026 2026	16.300.000.000.000	0%	147.870.800	Pengesahan Belanja Dana HLDN dalam bentuk Uang TA 2026 untuk kegiatan Jasa Konsultansi Survei Awal Penyelidikan Tanah dan Topografi dan Perencanaan Pembangunan Jagat Bali sesuai BAST Nomor.000.4.2/542/BAST/BEK/IV/2026; 00.4.2/ 614/BAST/BEK/V/2026 Tagl 20 April 2026	-	Akan Dilanjutkan
4	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	0%	17.997.390	Perjalanan Dinas	Dalam proses kontrak konstruksi fisik	Akan Dilanjutkan
5	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	0%	15.521.610	Perjalanan Dinas	Dalam proses kontrak konstruksi fisik	Akan Dilanjutkan
6	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	0%	23.612.385	Perjalanan Dinas	Dalam proses kontrak konstruksi fisik	Akan Dilanjutkan
7	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	0%	670.000	Perjalanan Dinas	Dalam proses kontrak konstruksi fisik	Akan Dilanjutkan
8	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	0%	1.610.000	Perjalanan Dinas	Dalam proses kontrak konstruksi fisik	Akan Dilanjutkan
9	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	0%	13.812.539	Perjalanan Dinas	Dalam proses kontrak konstruksi fisik	Akan Dilanjutkan
10	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	0%	5.060.400	Biaya Rapat dan ATK	Dalam proses kontrak konstruksi fisik	Akan Dilanjutkan
11	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	0%	4.086.500	Biaya Rapat dan ATK	Dalam proses kontrak konstruksi fisik	Akan Dilanjutkan
12	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	1%	17.659.774	Perjalanan Dinas	Dalam proses kontrak konstruksi fisik	Akan Dilanjutkan
13	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	000.4/184/SPK-KJK/IPDN.23.1.5	-	98.542.470	3%	78.833.976	Kontrak konsultan perencana jalan dan jembatan	Dalam proses kontrak konstruksi fisik	Akan Dilanjutkan
14	01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	-	-	5.300.400.000	1%	71.043.560	Rehabilitasi Gedung Administrasi Realisasi berupa dukungan kegiatan	Dilakukan pemangkasan anggaran terhadap pekerjaan dimaksud dikarenakan Surat Menteri Keuangan No. S-181/MK.03/2026 tanggal 1 april 2026 hal penajaman belanja Kementerian/Lembaga TA. 2026 sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 13 Maret 2026, mengalami pengurangan/pemotongan sebesar Rp5.247.378.000	Tidak Dilanjutkan
15	01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	1. Kontrak Konsultan Perencana : 000.4.3/187/Kontrak-Konsultansi/PPK/IPDN.22.1	7 April 2026 s.d 6 Mei 2026	2.281.300.000	14%	311.529.460	Rehabilitasi Gedung Angso Duo	Upaya tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/964/SJ Tanggal 24 Februari 2026 Hal Langkah Strategis Belanja Kemendagri TA 2026	Akan Dilanjutkan
16	01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	1. Kontrak Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi : 000.4.2/779/SPK/PPK/IPDN.22.1 2. Kontrak Pekerjaan Fisik : 000.4.3/775/Mi-Kom/SP-Ekatalog/PPK/IPDN.22.1	1 Juli 2026 sd 27 November 2026	1.245.450.000	9%	113.000.209	Rehabilitasi Gedung Menza Nusantara	Upaya tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/964/SJ Tanggal 24 Februari 2026 Hal Langkah Strategis Belanja Kemendagri TA 2026	Akan Dilanjutkan
17	01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	1. Kontrak Fisik : 000.4.2/322/SPK/PPK/IPDN.22.1 2. Kontrak Konsultasi Pengawas	24 April 2026 sd 23 Mei 2026	213.872.000	95%	202.677.121	Rehabilitasi Gedung Rumah Negara Blok A.1 dan A.2	Finalisasi Pekerjaan	Akan Dilanjutkan
18	01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	1. Kontrak Fisik : 000.4.2/326/SPK/PPK/IPDN.22.1 2. Kontrak Konsultasi Pengawas	24 April 2026 sd 7 Juni 2026	264.100.000	89%	234.173.320	Rehabilitasi Pagar IPDN	Finalisasi Pekerjaan	Akan Dilanjutkan

19	01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	027/020/SPK.MK/IPDN.28.2	10 Maret sd 3 April 2020	195.450.000	100%	195.450.000	Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi untuk 4 NUP Gedung dan Bangunan berupa 2 Unit Wisma Putri, 1 Unit Auditorium, dan 1 Unit Posko Pengasuhan	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Akan Dilanjutkan
20	01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	027/023/SPK.KP/IPDN.28.2	10 Maret sd 30 April 2020	231.200.000	100%	231.200.000	Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi untuk 4 NUP Gedung dan Bangunan berupa 2 Unit Wisma Putri, 1 Unit Auditorium, dan 1 Unit Posko Pengasuhan	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Akan Dilanjutkan
21	01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	-	-	-	100%	202.098.311	Honor Pengelola Kegiatan TA 2020 untuk 4 NUP Gedung dan Bangunan berupa 2 Unit Wisma Putri, 1 Unit Auditorium, dan 1 Unit Posko Pengasuhan	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Akan Dilanjutkan
22	01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	011/2711/PAKPA Tanggal 9 September	-	-	20%	5.429.180.237	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Akan Dilanjutkan
23	01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015	-	-	20%	6.488.726.913	Asrama Permanen	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Akan Dilanjutkan
24	01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015	-	-	20%	6.400.755.659	Asrama Permanen	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Akan Dilanjutkan
25	01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	-	1 Januari s/d 31 Desember 2022	-	-	400.919.103	Lanjutan Pembangunan Gedung IPDN Kampus Kalimantan Barat TA 2022 (Biaya Pengelola Kegiatan Gedung Perpustakaan dan Gedung Pos Jaga Permanen)	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Akan Dilanjutkan
26	01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	01KMPKX5A3CTJY6CXDKW3QGWC1 tgl.1/4/26, BAP No.000.4.2/342/BAP-	1 Januari s/d 31 Desember 2026	3.166.016.453	60%	1.266.805.422	Pembangunan Rumah Dinas	Sedang dalam proses pengerjaan	Akan Dilanjutkan
27	01	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	EP-01KKTNE28QBGJSC2TRDHS8JAFT	26 Maret 2026 s.d 23 Agustus 2026	3.285.790.795	85%	1.971.474.477	Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Tipe 45 sebanyak 8 Unit di IPDN Kampus Papua Tahun Anggaran 2026	Waktu Pekerjaan sesuai Kontrak Selesai pengerjaan 23 Agustus 2026	Akan Dilanjutkan
28	04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	EP-01KJYFXYSEN5E489EQZTWV11VH-AD01	1 April s/d 2 Juni 2026	3.104.448.000	100%	3.104.448.000	Pompa Pemadam Portable 13 Unit	-	-
29	04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	EP-01KNRQR3M8T6ZT0JT02PXQT2GK	10 April s/d 29 Juni 2026	1.599.954.000	100%	1.599.954.000	Kendaraan Water Supply	-	-
30	05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	6973/SPK/BPD/X/2023	1 TAHUN	24.997.200	100%	24.997.200	Perencanaan Gedung dan Bangunan	Ketersediaan Pagu Anggaran	Tidak Dilanjutkan
31	08	634082	Ditjen Dukcapil	900.1.4.8/1057/PMU.2026		24.199.928.000		24.199.928.000	Pengerjaan Paket Pekerjaan Penguatan Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAK Terpusat)	Sedang dalam proses penatausahaan BMN sebelum dilakukan penyelesaian KDP dan akan berkonsultasi dengan KPPN terkait menu dan tindak lanjut penyeleaian KDP pada Aplikasi SAKTI	Tidak Dilanjutkan
32	08	634082	Ditjen Dukcapil	900.1.4.8/1057/PMU.2026		10.371.397.713		10.371.397.713	Pengerjaan Paket Pekerjaan Penguatan Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAK Terpusat)	Sedang dalam proses penatausahaan BMN sebelum dilakukan penyelesaian KDP dan akan berkonsultasi dengan KPPN terkait menu dan tindak lanjut penyeleaian KDP pada Aplikasi SAKTI	Tidak Dilanjutkan
33	12	403216	BBPK APDN II	1. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Konstruksi Renovasi Pagar dan Pos Jaga di Kiarapayung Tahun 2026 berdasarkan SPK Nomor 000.4.2/0311/SPK-PL.06/BBPKA-PDN II/2026 tanggal 2 Februari 2026	-	99.871.000	100%	1.186.424.080	Sudah selesai realisasi anggaran kontrak pada pekerjaan jasa konsultan perencana pagar dan pos jaga BBPKA-PDN II	-	-
34	12	403216	BBPK APDN II	2. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Pagar dan Pos Jaga di Kiarapayung Tahun 2026 berdasarkan SPK Nomor 000.4.2/0732/SPK-PL.04/BBPKA-PDN II/2026 tanggal 17 Maret 2026 dan Addendum Surat Perjanjian Nomor : 000.4.2/1119/SPK.ADD-PL.04/BBPKA-PDN II/2026 Tanggal 28 April 2026	-	1.810.921.800	100%		Sedang dalam proses realisasi anggaran untuk pembayaran kontrak termin III pada pekerjaan konstruksi renovasi pagar dan pos jaga BBPKA-PDN II	-	-

35	12	403216	BBPK APDN II	3. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi Pagar Dan Pos Jaga Di Kiarapayung Tahun 2026 berdasarkan SPK Nomor 000.4.2/0731/SPK-PL.06/BBPKA-PDN-II/2026 tanggal 17 Maret 2026	-	79.732.000	100%		Sedang dalam proses realisasi anggaran untuk dibayarkan kontrak pada pekerjaan jasa konsultan pengawas renovasi pagar dan pos jaga BBPKA-PDN II	-	-
36	12	403216	BBPK APDN II	1. Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Konstruksi Renovasi Gedung Kantor Sukajadi Tahun 2026 berdasarkan SPK Nomor 000.4.2/0624/SPK-PL.04/BBPKA-PDN II/2026 tanggal 5 Maret 2026	-	474.902.400	100%	476.334.987	Pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan perencana renovasi loka kemendagri telah dibayar termin I 80% dan termin II sebesar 20% dibayarkan setelah pelaksaan pekerjaan jasa konstruksi selesai	Pelaksaaan konsultan perencana renovasi loka kemendagri akan dibayarkan setelah pekerjaan jasa konstruksi selesai dengan adanya BAST (Berita Acara Serah Terima)	Akan Dilanjutkan
37	12	403216	BBPK APDN II	2. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung Kantor Sukajadi Tahun 2026 berdasarkan SPK Nomor 000.4.2/1468/SPK.PL.06.BBPKA-PDN-II/2026 tanggal 18 Juni 2026	160 Hari Kalender	10.672.933.415			Pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi renovasi loka kemendagri masih dalam proses pekerjaan dan memasuki minggu ke-4	Pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi renovasi loka Kemendagri masih dalam proses pekerjaan dan memasuki minggu ke-4	Akan Dilanjutkan
38	12	403216	BBPK APDN II	3. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Kantor Sukajadi Tahun 2026 berdasarkan SPK Nomor 000.4.2/1450/SPK.PL.06.BBPKA-PDN-II/2026 tanggal 15 Juni 2026	180 Hari Kalender	377.661.516			Pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan pengawas renovasi loka Kemendagri masih dalam progress pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan pengawas renovasi loka Kemendagri masih dalam progress pekerjaan	Akan Dilanjutkan
39	12	403216	BBPK APDN II	4. Pelaksanaan Biaya Pengelolaan Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Sukajadi Tahun 2026 (Swakelola)	-	289.000.000	33.36%		Pelaksanaan biaya pengelolaan kegiatan renovasi gedung kantor sukajadi tahun 2026 telah terealisasi sebesar 33.36%	Pelaksanaan biaya pengelolaan kegiatan renovasi gedung kantor sukajadi tahun 2026 telah terealisasi sebesar 33.36%	Akan Dilanjutkan
40	12	027114	BBPK APDN III	000.4.3/945/PBJ/BBPKA-PDN 3	22 Juni 2026 s.d 18 November 2026	3.841.485.600	25%	960.371.400	Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Asthabrata Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III (BBPKA-PDN III)	Pekerjaan masih berjalan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dan Pembayaran baru dilakukan Termin I (Uang Muka) dari 6 Termin Pembayaran	Akan Dilanjutkan
41	12	027114	BBPK APDN III	000.4.2/225/PBJ/BBPKA-PDN 3	05 Maret 2026 s.d 28 April 2026	96.542.000	100%	82.060.700	Pekerjaan Konsultan Perencana Rehab Gedung Asthabrata Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III (BBPKA-PDN III)	Konsultan perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan berkala terhadap hasil karyanya selama pelaksanaan konstruksi fisik yang diperkirakan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender. Terhitung sejak tanggal 29 April 2026 s.d. 25 September 2026	Akan Dilanjutkan
42	12	027177	BBPK APDN IV	000.4/0182/PPK/BBPKAPDN-IV	30 hari kalender (16 februari s/d 17 maret 2026)	697.760.985	85%	593.096.837	termin I pekerjaan perencanaan rehabilitasi Gedung A	sisa kontrak sebesar 15% akan dilakukan pembatalan kontrak karena pekerjaan fisiknya tidak dilaksanakan	Tidak Dilanjutkan
43	12	027177	BBPK APDN IV	000.4/0180/PPK/BBPKAPDN-IV	30 hari kalender (16 februari s/d 17 maret 2026)	801.978.885	85%	681.682.052	termin I pekerjaan perencanaan rehabilitasi Gedung E dan F	sisa kontrak sebesar 15% akan dilakukan pembatalan kontrak karena pekerjaan fisiknya tidak dilaksanakan	Tidak Dilanjutkan
44	12	027177	BBPK APDN IV	MEKANISME GUP bendahara	-	-	-	139.604.054	Pembelanjaan ATK , biaya makan dan rapat , dan biaya perjalanan dinas Pokja	-	-
45	12	506138	Balai BPKF APDN Bidang Administrasi Kewilayahan	000.4/1514/SPK-PL/Balai-Bogor	25 Hari Kalender	99.749.725	100%	99.749.725	Konsultan Perencana	Menunggu Termin III Konstruksi Menara Refling Selesai	Akan Dilanjutkan
46	12	506138	Balai BPKF APDN Bidang Administrasi Kewilayahan	000.4/2771/SPK-PL/Balai-Bogor	120 Hari Kalender	99.749.725	30%	24.948.638	Konsultan Pengawas Termin I	Menunggu Termin III Konstruksi Menara Refling Selesai	Akan Dilanjutkan
47	12	506138	Balai BPKF APDN Bidang Administrasi Kewilayahan	EP01KNH71ZF1RVRR86RJ605B XCW2	120 Hari Kalender	3.947.405.393	30%	986.851.349	Pelaksana Konstruksi Termin I	Menunggu Termin III Konstruksi Menara Refling Selesai	Akan Dilanjutkan
48	12	506138	Balai BPKF APDN Bidang Administrasi Kewilayahan	000.4/2771/SPK-PL/Balai-Bogor	120 Hari Kalender	99.794.550	70%	39.917.820	Konsultan Pengawas Termin II	Menunggu Termin III Konstruksi Menara Refling Selesai	Akan Dilanjutkan
49	12	506138	Balai BPKF APDN Bidang Administrasi Kewilayahan	EP01KNH71ZF1RVRR86RJ605B XCW2	120 Hari Kalender	4.055.405.393	70%	1.578.962.157	Pelaksana Konstruksi Termin II	Menunggu Termin III Konstruksi Menara Refling Selesai	Akan Dilanjutkan
TOTAL						**16.384.926.440.407**		**70.635.129.685**			

LAMPIRAN XX

REKAPITULASI SALDO ASET LAINNYA SERTA AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2026

Lampiran XX

REKAPITULASI SALDO ASET LAINNYA SERTA AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	SOFTWARE	LISENSI	HASIL KAJIAN/ PENELITIAN	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	SDET LAINNYA YANG BELUM DIREGISTER	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE	AKUMULASI AMORTISASI LISENSI	AKUMULUASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	77.192.309.080	39.314.272.802	1.676.759.600	53.300.000	-	50.480.271.065	447.523.125	99.900.000	(48.231.789.455)	(52.376.653.783)	(9.434.276.866)	(447.523.125)
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	3.347.522.000	-	197.795.000	1.590.421.750	59.999.940	2.823.730.811	18.898.000	-	(2.551.477.600)	(2.661.583.625)	-	(18.898.000)
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	3.174.472.555	-	-	-	-	16.500.000	-	-	(16.500.000)	(2.924.472.555)		-
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	462.019.343	-	-	(462.019.343)	-	-	-
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	24.717.000	-	-	-	-	-	-	-	-	(24.717.000)	-	-
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	70.120.000	-	-	-	-	2.559.667.160	23.000.000	-	(2.559.667.160)	(70.120.000)	-	(23.000.000)
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	19.472.000	-	-	-	-	-	-	-	-	(19.472.000)	-	-
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	939.806.871	-	-	(939.806.871)	-	-	-
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	-	-	-	-	-	6.798.547.141	349.100.000	-	(6.798.547.141)	-	-	-
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	1.145.474.320	-	-	-	-	1.063.148.422	143.915.000		(1.063.148.422)	(895.586.820)	-	(143.915.000)
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	8.313.499.230	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.313.499.230)	-	-
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	3.560.846.610	198.090.600	-	-	-	2.713.589.380	-	-	(2.713.589.380)	(3.560.846.610)	(79.236.240)	-
14	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	16.862.160.880	-	397.210.000	299.605.000	-	255.073.247	200.343.000	-	(252.964.668)	(12.733.699.916)	-	(200.343.000)
15	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	25.000.000	-	-	-	-	393.207.500	-	-	(393.207.500)	(25.000.000)	-	-
16	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	-	-	-	-	-	210.270.000	-	-	(210.270.000)	-	-	-
18	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	708.280.140	-	-	-	-	28.587.138.289	19.957.152.092	-	(28.007.549.288)	(708.280.140)	-	(19.957.152.092)
19	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	3.812.370.550	-	-	-	-	70.399.269.621	28.336.414.427	-	(70.314.201.490)	(3.149.889.250)	-	(28.336.414.427)
20	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	582.680.792.571	54.327.055.876	-	219.764.000	-	24.464.669.220	69.898.942.449	-	(24.464.669.220)	(563.554.470.843)	(11.545.292.892)	(69.898.942.449)
21	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1.353.050.103	-	-	-	-	5.764.113.530	33.381.497.487	-	(5.591.842.103)	(1.353.050.103)	-	(33.381.497.487)
22	11	403222	KP	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	3.908.858.931	2.255.000	-	-	-	-	3.129.285.850	-	-	(3.908.858.931)	(2.255.000)	(4.620.000)
23	12	027114	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	-	-	-	-	-	2.698.000	-	-	(2.148.000)	-	-	-
24	12	027177	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	54.500.000	-	-	20.750.000	-	488.613.310	-	-	(488.613.310)	(54.500.000)	-	-
25	12	403216	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	-	-	-	-	-	672.600.000	-	-	(672.600.000)	-		-
26	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.971.059.443	-	-	99.678.000	-	6.664.760.539	-	-	(6.557.325.640)	(1.276.059.443)	-	-
27	12	506138	KD	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	218.948.400	-	-	(218.948.400)	-	-	-
28	12	506137	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	-	-	-	-	-	1.782.000	-	-	(1.782.000)	-	-	-
TOTAL					**709.224.505.413**	**93.841.674.278**	**2.271.764.600**	**2.283.518.750**	**59.999.940**	**205.980.423.849**	**155.886.071.430**	**99.900.000**	**(202.512.666.991)**	**(657.610.760.249)**	**(21.061.060.998)**	**(152.412.305.580)**

LAMPIRAN XXI

RINCIAN MUTASI ASET TAK BERWUJUD PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XXI

RINCIAN MUTASI ASET TAK BERWUJUD PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	KODE TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	KEUDA	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Saldo per 31 Desember 2025		**122.461.268.939**	**1.145.474.320**	**8.313.499.230**	**3.758.937.210**	**17.583.975.880**	**708.280.140**	**2.487.407.950**	**637.217.400.447**	**1.353.050.103**	**3.811.163.931**	**3.145.987.443**	**801.986.445.593**
Pembelian	101	278.577.000							10.212.000		-	-	288.789.000
Transfer Masuk	102	-			-			1.324.962.600					1.324.962.600
Pengembangan Nilai Aset	202	5.246.278.448			-				-		99.950.000		5.346.228.448
Mutasi Tambah		**5.524.855.448**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.324.962.600**	**10.212.000**	**-**	**99.950.000**	**-**	**6.959.980.048**
Transfer Keluar	302	(1.324.962.600)											(1.324.962.600)
Mutasi Kurang		**(1.324.962.600)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.324.962.600)**
Saldo per 30 Juni 2026		**126.661.161.787**	**1.145.474.320**	**8.313.499.230**	**3.758.937.210**	**17.583.975.880**	**708.280.140**	**3.812.370.550**	**637.227.612.447**	**1.353.050.103**	**3.911.113.931**	**3.145.987.443**	**807.621.463.041**
Akumulasi Amortisasi s.d 30 Juni 2026		**(67.511.295.829)**	**(895.586.820)**	**(8.313.499.230)**	**(3.640.082.850)**	**(12.758.699.916)**	**(708.280.140)**	**(3.149.889.250)**	**(575.099.763.735)**	**(1.353.050.103)**	**(3.911.113.931)**	**(1.330.559.443)**	**(678.671.821.247)**
Nilai Buku per 30 Juni 2026		**59.149.865.958**	**249.887.500**	**-**	**118.854.360**	**4.825.275.964**	**-**	**662.481.300**	**62.127.848.712**	**-**	**-**	**1.815.428.000**	**128.949.641.794**

LAMPIRAN XXII

REKAPITULASI DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

LAMPIRAN XXII

REKAPITULASI DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

No	EES 1	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Kekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga (163139) per 31 Desember 2025	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
					No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
1	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	5.083.783.190	02066T/403200/2025	259990302022715	2025-12-24	536111	721.305.750	815619	(721.305.750)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/5269/Pusdatin/2025 untuk Pengintegrasi Aplikasi ke SIPD RI	00070T/403200/2026	261330000003286	2026-01-21	825619	460.455.750	411211	(45.630.750)	145.678.500	-	Pembayaran Pengintegrasi Aplikasi ke SIPD RI sesuai BAST Nomor 000.4/8215/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025
2	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411124	(8.296.500)			
3	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL											00071T/403200/2026	261330000003285	2026-01-21	825619	260.850.000	425913	(260.850.000)			Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/5269/Pusdatin/2025 untuk Pengintegrasi Aplikasi ke SIPD RI
4	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02056T/403200/2025	259990302022596	2025-12-24	536111	610.115.940	815619	(610.115.940)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/6731/Pusdatin/2025 untuk Pengembangan Aplikasi Middleware Transaksi Perbankan	00047T/403200/2026	261330000002754	2026-01-19	825619	610.115.940	411211	(60.461.940)	538.660.920	-	Pembayaran Pengembangan Aplikasi Middleware Transaksi Perbankan sesuai BAST Nomor 000.4/8214/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025
5	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411124	(10.993.080)			
6	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02053T/403200/2025	259990302022709	2025-12-24	522191	163.180.192	815619	(163.180.192)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8366/Pusdatin/2024 untuk Pemeliharaan Perangkat Operasional LAN/WAN dan Data Center	00011T/403200/2026	261330000001234	2026-01-12	825619	163.180.192	411211	(16.171.010)	144.068.998	-	Pembayaran Pemeliharaan Perangkat Operasional LAN/WAN dan Data Center sesuai BAST Nomor 000.4/8208/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025
7	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411124	(2.940.184)			
8	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02050T/403200/2025	259990302022703	2025-12-24	522141	335.617.337	815619	(335.617.337)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8368/Pusdatin/2024 untuk Pengadaan Layanan Video Conference	00013T/403200/2026	261330000001241	2026-01-12	825619	335.617.337	411211	(33.259.375)	296.310.803	-	Pembayaran Pengadaan Layanan Video Conference sesuai BAST Nomor 000.4/8202/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025
9	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411124	(6.047.159)			
10	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02052T/403200/2025	259990302022714	2025-12-24	522191	120.374.604	815619	(120.374.604)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8378/Pusdatin/2024 untuk Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi dan Call Center	00012T/403200/2026	261330000001240	2026-01-12	825619	120.374.604	411211	(11.929.015)	106.276.677	-	Pembayaran Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi dan Call Center sesuai BAST Nomor 000.4/8205/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025
11	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411124	(2.168.912)			
12	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02051T/403200/2025	259990302022710	2025-12-24	522141	87.332.830	815619	(87.332.830)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8370/Pusdatin/2024 untuk Sewa Layanan Virtual Private Network	00010T/403200/2026	261330000001231	2026-01-12	825619	87.332.830	411124	(1.573.565)	85.759.265	-	Pembayaran Sewa Layanan Virtual Private Network sesuai BAST Nomor 000.4/8211/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025
13	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02049T/403200/2025	259990302022704	2025-12-24	522141	291.600.000	815619	(291.600.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8296/Pusdatin/2024 untuk Sewa Layanan Akses Internet Secondary	00033T/403200/2026	261330000001942	2026-01-14	825619	291.600.000	411124	(5.254.054)	286.345.946	-	Pembayaran Sewa Layanan Akses Internet Secondary sesuai BAST Nomor 000.4/8219/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025
14	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02057T/403200/2025	259990302022594	2025-12-24	536111	205.576.992	815619	(205.576.992)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/3266/Pusdatin/2025 untuk Pengelolaan Helpdesk dan Operasional Layanan Aplikasi	00048T/403200/2026	261330000002740	2026-01-19	825619	205.576.992	411211	(20.372.495)	181.500.407	-	Pembayaran Pengelolaan Helpdesk dan Operasional Layanan Aplikasi sesuai BAST Nomor 000.4/8213/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025
15	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411124	(3.704.090)			
16	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02048T/403200/2025	259990302022711	2025-12-24	522141	291.666.666	815619	(291.666.666)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8298/Pusdatin/2024 untuk Sewa Layanan Akses Internet	00032T/403200/2026	261330000001940	2026-01-14	825619	291.666.666	411124	(5.255.255)	286.411.411	-	Pembayaran Sewa Layanan Akses Internet sesuai BAST Nomor 000.4/8216/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025
17	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02058T/403200/2025	259990302022593	2025-12-24	522191	69.999.951	815619	(69.999.951)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 100/KU.ROPEG/II/2025 untuk Pelaksanaan Perawatan Mesin Fingerprint di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	00014T/403200/2026	261330000001493	2026-01-13	825619	69.999.951	411211	(6.936.932)	61.801.759	-	Pembayaran Pelaksanaan Perawatan Mesin Fingerprint di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai BAST Nomor 711/KU.BiroSDM/XII/2025 Tanggal 29 Desember 2025
18	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411124	(1.261.260)			
19	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02045T/403200/2025	259990302019363	2025-12-24	523111	846.132.928	815619	(846.132.928)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 602/189/PPK/I/BU/2025 untuk Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor Pusat, Rumah Dinas, Gedung Arsip dan Gedung Pertemuan Cipayung	00007T/403200/2026	261330000000657	2026-01-08	825619	846.132.928	411211	(83.851.011)	747.036.279	-	Pembayaran Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor Pusat, Rumah Dinas, Gedung Arsip dan Gedung Pertemuan Cipayung sesuai BAST Nomor 602/4945/PPK/XII/BU/2025 Tanggal 31 Desember 2025
20	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411124	(15.245.638)			
21	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02043T/403200/2025	259990302019361	2025-12-24	522191	97.680.000	815619	(97.680.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K9PCPPKFBE5AD98WDBKQDWXT untuk Pengelolaan dan Produksi Konten Winning Content Media Sosial Kemendagri	00009T/403200/2026	261330000001226	2026-01-12	825619	97.680.000	411211	(9.680.000)	88.000.000	-	Pembayaran Pengelolaan dan Produksi Konten Winning Content Media Sosial Kemendagri sesuai BAST Nomor 2425/BASTHP/PPK/Puspen.2 Tanggal 30 Desember 2025
22	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02044T/403200/2025	259990302019362	2025-12-24	522191	1.243.200.000	815619	(1.243.200.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K3QD3PK9QTWYJDEPTBZMRSWX untuk Pengelolaan Strategi Komunikasi dan Kampanye Publik Kemendagri	00031T/403200/2026	261330000001246	2026-01-12	825619	1.243.200.000	411211	(123.200.000)	1.097.600.000	-	Pembayaran Pengelolaan Strategi Komunikasi dan Kampanye Publik Kemendagri sesuai BAST Nomor 2437/BASTHP/PPK/Puspen.2 Tanggal 30 Desember 2025
23	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411124	(22.400.000)			

24	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	1.973.022.000	02319T/448302/2025	259990302022509	2025-12-24	534111	291.245.000	815619	(291.245.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1724.c/SPK/BEK/XII/2025 untuk Pekerjaan Paving Blok Trotoar Area Kesatrian dan Wisma Praja di IPDN Kampus Jatinangor	00013T/448302/2026	269991302001145	2026-01-05	825619	291.245.000	411211	(28.862.117)	257.135.225	-	Pembayaran Pekerjaan Paving Blok Trotoar Area Kesatrian dan Wisma Praja di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1782.d/BAST/BEK/XII/2025 Tanggal 29-12-2025
25	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(5.247.658)				
26	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		02275T/448302/2025	259990302020832	2025-12-23	523111	143.232.000	815619	(143.232.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1719.d/SPK/BEK/XII/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kolam Renang di IPDN Kampus Jatinangor	00009T/448302/2026	269991302001142	2026-01-05	825619	143.232.000	411211	(14.194.162)	126.457.081	-	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kolam Renang di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1784.b/BAST/BEK/XII/2025 Tanggal 29-12-2025
27	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(2.580.757)				
28	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		02300T/448302/2025	259990302020199	2025-12-24	523111	39.400.000	815619	(39.400.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1727.e/SPK/BEK/XII/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Kamar Mandi Blok Kelas FMP dan Blok Kelas FPP di IPDN Kampus Jatinangor	00011T/448302/2026	269991302001146	2026-01-05	825619	39.400.000	411211	(3.904.505)	34.785.585	-	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Kamar Mandi Blok Kelas FMP dan Blok Kelas FPP di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1797.b/BAST/BEK/XII/2025 Tanggal 29-12-2025
29	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(709.910)				
30	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		02294T/448302/2025	259990302022500	2025-12-24	523119	177.149.000	815619	(177.149.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1727.f/SPK/BEK/XII/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas B1 di IPDN Kampus Jatinangor	00018T/448302/2026	260870000000105	2026-01-05	825619	177.149.000	411211	(17.555.306)	156.401.820	-	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas B1 di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1788.c/BAST/BEK/XII/2025 Tanggal 30-12-2025
31	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(3.191.874)				
32	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		02291T/448302/2025	259990302020507	2025-12-24	523133	95.875.000	815619	(95.875.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1715.e/SPK/BEK/XII/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Grill Saluran Drainase di IPDN Kampus Jatinangor	00012T/448302/2026	269991302001143	2026-01-05	825619	95.875.000	411211	(9.501.126)	84.646.397	-	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Grill Saluran Drainase di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1792/BAST/BEK/XII/2025 Tanggal 30-12-2025
33	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(1.727.477)				
34	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		02285T/448302/2025	259990302020503	2025-12-24	523111	110.667.000	815619	(110.667.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1725.b/SPK/BEK/XII/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Kepegawaian, Ruangan VVIP Presiden, Ruang Warek 2, Ruang Warek 3 dan Ruangan Mushola ADM di IPDN Kampus Jatinangor	00010T/448302/2026	269991302001141	2026-01-05	825619	110.667.000	411211	(10.967.000)	97.706.000	-	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Kepegawaian, Ruangan VVIP Presiden, Ruang Warek 2, Ruang Warek 3 dan Ruangan Mushola ADM di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1784.c/BAST/BEK/XII/2025 Tanggal 29-12-2025
35	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(1.994.000)				
36	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		02276T/448302/2025	259990302019218	2025-12-23	533121	320.850.000	815619	(320.850.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1715.d/SPK/BEK/XII/2025 untuk Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Kanopi Taman Baca Sekolah Pascasarjana di IPDN Kampus Jatinangor	00020T/448302/2026	260870000000113	2026-01-06	825619	320.850.000	411211	(31.795.946)	281.394.122	-	Pembayaran Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Kanopi Taman Baca Sekolah Pascasarjana di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST Nomor 000.4.2/1782.b/BAST/BEK/XII/2025 Tanggal 29 Desember 2025
37	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411128	(7.659.932)				
38	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		02274T/448302/2025	259990302019217	2025-12-23	523111	194.226.000	815619	(194.226.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1723.b/SPK/BEK/XII/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas B3 di IPDN Kampus Jatinangor	00014T/448302/2026	260870000000127	2026-01-08	825619	194.226.000	411211	(19.247.622)	171.478.810	-	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas B3 di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1782.c/BAST/BEK/XII/2025 Tanggal 29-12-2025
39	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(3.499.568)				
40	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		02269T/448302/2025	259990302019439	2025-12-23	523119	156.880.000	815619	(156.880.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1717.c/SPK/BEK/XII/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas A1 dan Rumah Dinas A2 di IPDN Kampus Jatinangor	00008T/448302/2026	269991302001144	2026-01-05	825619	156.880.000	411211	(15.546.667)	138.506.666	-	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas A1 dan Rumah Dinas A2 di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1786.a/BAST/BEK/XII/2025 Tanggal 29-12-2025
41	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(2.826.667)				
42	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		02268T/448302/2025	259990302019437	2025-12-23	523111	63.993.000	815619	(63.993.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1723.a/SPK/BEK/XII/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Toilet Wisma DKI Jakarta, Wisma Jawa Barat, Wisma Sumatera Utara dan Wisma Jawa Timur di IPDN Kampus Jatinangor	00007T/448302/2026	269991302001139	2026-01-05	825619	63.993.000	411211	(6.341.649)	56.498.324	-	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Toilet Wisma DKI Jakarta, Wisma Jawa Barat, Wisma Sumatera Utara dan Wisma Jawa Timur di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1788/BAST/BEK/XII/2025 Tanggal 30-12-2025
43	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(1.153.027)				

44	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		02267T/448302/2025	259990302019438	2025-12-23	523111	220.392.000	815619	(220.392.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1721.d/SPK/BEK/XII/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Menza, Dapur Gedung Administrasi, Rumah Dinas A3 dan Ruang Kelas Klungkung, Raja Ampat dan Sriwijaya di IPDN Kampus Jatinangor	00006T/448302/2026	269991302001140	2026-01-05	825619	220.392.000	411211	21.840.649	246.203.676	-	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Menza, Dapur Gedung Administrasi, Rumah Dinas A3 dan Ruang Kelas Klungkung, Raja Ampat dan Sriwijaya di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1784.a/BAST/BEK/XII/2025 Tanggal 29-12-2025
45	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	3.971.027				
46	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		02242T/448302/2025	259990302014661	2025-12-22	523111	159.113.000	815619	(159.113.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8/IPDN.19 untuk Pemeliharaan Gedung dan Pertamanan IPDN Kampus Jakarta	00019T/448302/2026	260870000000111	2026-01-06	825619	159.113.000	411211	(15.767.955)	140.478.144	-	Pembayaran Pemeliharaan Gedung dan Pertamanan IPDN Kampus Jakarta sesuai BAST/BAPP Nomor 027/1082/BA-PP/Bek/XII/2025 Tanggal 31-12-2025
47	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(2.866.901)				
48	01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	438.709.749	00342T/483005/2025	259990302014375	2025-12-22	522191	308.709.749	815619	(308.709.749)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor #EP-01JW83G17FBY3VHZ1CPNXN2SJR untuk PENGADAAN TENAGA KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, TENAGA PENGEMUDI, DAN TEKNISI GEDUNG SEKRETARIAT DKPP RI BULAN JUNI - DESEMBER 2025	00006T/483005/2026	261330000000414	2026-01-06	825619	304.740.676	411211	(30.199.526)	265.081.254	-	Pembayaran PENGADAAN TENAGA KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, TENAGA PENGEMUDI, DAN TEKNISI GEDUNG SEKRETARIAT DKPP RI BULAN JUNI - DESEMBER 2025 sesuai BAST Nomor 134/BAST/PPK-DKPP/XII/2025 Tanggal 31-12-2025
49	01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU																411124	(5.490.823)				
50														00008T/483005/2026	261330000000415	2026-01-06	825619	3.969.073	425912	(3.969.073)				Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor #EP-01JW83G17FBY3VHZ1CPNXN2SJR untuk PENGADAAN TENAGA KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, TENAGA PENGEMUDI, DAN TEKNISI GEDUNG SEKRETARIAT DKPP RI BULAN JUNI - DESEMBER 2025
51	01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU		00341T/483005/2025	259990302013268	2025-12-19	522191	130.000.000	815619	(130.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 212/SP/PPK-DKPP/XII/2024 untuk JASA PENYEDIA ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER TERMASUK DOMAIN DAN COLLOCATION) KANTOR DKPP RI	00004T/483005/2026	261330000000348	2026-01-06	825619	130.000.000	411211	(12.882.883)	114.774.775	-	Pembayaran JASA PENYEDIA ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER TERMASUK DOMAIN DAN COLLOCATION) KANTOR DKPP RI sesuai BAST Nomor 131/BAST/PPK-DKPP/XII/2025 Tanggal 31-12-2025
52	01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU																411124	(2.342.342)				
53	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	516.227.214	00531T/677010/2025	259990302026074	2025-12-29	523133	164.240.061	815619	(164.240.061)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K9P4TZ7P8VYQP59B67DXBMWA untuk Pekerjaan Instalasi Jaringan Air Bersih IPDN Kampus Sulawesi Utara TA 2025	00011T/677010/2026	260490000000940	2026-01-14	825619	164.240.061	411211	(16.276.042)	145.374.649	-	Pembayaran Pekerjaan Instalasi Jaringan Air Bersih IPDN Kampus Sulawesi Utara TA 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4/324/BAST-PHOAB/IPDN.23/2025 Tanggal 29-12-2025 dengan jaminan pemeliharaan nomor 11614040126000687 tanggal 06-01-2026
54	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA																411128	(2.589.370)				
55	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA		00515T/677010/2025	259990302022995	2025-12-24	523111	141.500.000	815619	(141.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/303/SPK-PW4/IPDN.23/2025 untuk Pekerjaan pemeliharaan wisma nusantasa 4 IPDN Kampus Sulawesi Utara TA 2025	00009T/677010/2026	260490000001033	2026-01-14	825619	141.500.000	411211	(14.022.522)	124.927.929	-	Pembayaran Pekerjaan pemeliharaan Wisma Nusantara 4 IPDN Kampus Sulawesi Utara TA 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4/323/BAST-PHOW4/IPDN.23/2025 Tanggal 29-12-2025 jaminan pemeliharaan nomor 112001104012600051 tanggal 6 Januari 2026
56	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA																411124	(2.549.549)				
57	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA		00513T/677010/2025	259990302017854	2025-12-23	523111	80.991.741	815619	(80.991.741)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/003/E-PURCHASING/PPK-JHP/IPDN.23.1/2024 untuk Pemeliharaan Halaman Pertamanan IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun 2025	00004T/677010/2026	260490000000513	2026-01-12	825619	80.991.741	411211	(8.026.209)	71.506.221	-	Pembayaran Pemeliharaan Halaman Pertamanan IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4/330/ BAST-6/IPDN.23/2025 Tanggal 31-12-2025
58	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA																411124	(1.459.311)				
59	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA		00512T/677010/2025	259990302017855	2025-12-23	522113	67.288.825	815619	(67.288.825)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/004/E-PURCHASING/PPK-BLA/IPDN.23.1/2024 untuk Belanja Langganan Air Bersih IPDN Kampus Sulawesi Utara TA 2025	00010T/677010/2026	260490000000763	2026-01-13	825619	67.288.825	411124	(1.345.777)	65.943.048	-	Pembayaran Belanja Langganan Air Bersih IPDN Kampus Sulawesi Utara TA 2025 Termin ke-13 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4/332/BAST-13/IPDN.23/2025 Tanggal 31-12-2025
60	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA		00511T/677010/2025	259990302017856	2025-12-23	523111	62.206.587	815619	(62.206.587)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/002/E-PURCHASING/PPK-ICS/IPDN.23.1/2024 untuk Belanja Pemeliharaan Cleaning Service IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025	00007T/677010/2026	260490000000775	2026-01-13	825619	62.206.587	411211	(6.164.617)	54.921.131	-	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Cleaning Service IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4/331/BAST-13/IPDN.23/2025 Tanggal 31-12-2025
61	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA																411124	(1.120.839)				
62	01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	177.523.873	00282T/677024/2025	259990302013474	2025-12-19	523111	85.891.441	815619	(85.891.441)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.3/011/IPDN.24.1/2025 untuk PEMELIHARAAN GEDUNG SARANA DAN PRASARANA (JASA KEBERSIHAN TAMAN) IPDN KAMPUS SULSEL	00008T/677024/2026	260540000000453	2026-01-07	825619	85.891.441	411211	(8.511.764)	75.832.083	-	Pembayaran PEMELIHARAAN GEDUNG SARANA DAN PRASARANA (JASA KEBERSIHAN TAMAN) IPDN KAMPUS SULSEL sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.3/2179/BAST/IPDN.24.1/2025 Tanggal 31-12-2025

63	01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN															411124	(1.547.594)			
64	01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN		00283T/677024/2025	259990302013477	2025-12-19	523111	91.632.432	815619	(91.632.432)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.3/009/SPK/IPDN.24.1/2025 untuk PEMELIHARAAN GEDUNG SARANA DAN PRASARANA (JASA CS) IPDN KAMPUS SULSEL	00007T/677024/2026	260540000000452	2026-01-07	825619	91.632.432	411211	(8.083.818)	82.078.829	-	Pembayaran PEMELIHARAAN GEDUNG SARANA DAN PRASARANA (JASA CS) IPDN KAMPUS SULSEL sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.3/2183/BAST/IPDN.24.1/2025 Tanggal 31-12-2025
65	01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN															411124	(1.469.785)			
66	01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	186.281.000	00381T/677045/2025	259990302016774	2025-12-23	523111	49.631.000	815619	(49.631.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.3/80/SP-Chemical/PPK/IPDN.22.1 untuk Paket pengadaan Chemical dan Peralatan Pemeliharaan kebersihan (Cleaning service) dan Pertamanan/Halaman Keras Tahun 2025	00004T/677045/2026	260110000000113	2026-01-05	825619	49.631.000	411211	(4.918.387)	43.968.148	-	Pembayaran Paket pengadaan Chemical dan Peralatan Pemeliharaan kebersihan termin XII TA 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.3/308/BA-ST/IPDN.22.1 Tanggal 31-12-2025 atas Kontrak No:000.4.3/80/SP-Chemical/PPK/IPDN.22.1 tgl 31-12-2024 Nk.Rp.595.572.000
67	01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT															411124	(744.465)			
68	01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT		00380T/677045/2025	259990302016744	2025-12-23	523111	136.650.000	815619	(136.650.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.3/79/SP-CSTaman/PPK/IPDN.22.1 untuk Paket pengadaan Man power/Tenaga pemeliharaan kebersihan (Cleaning Service) dan pemeliharaan pertamanan/Halaman Keras Tahun 2025	00003T/677045/2026	260110000000112	2026-01-05	825619	136.650.000	411124	(2.733.000)	133.917.000	-	Pembayaran Paket pengadaan Man power dan pemeliharaan pertamanan termin XII Tahun 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.3/305/BA-ST/IPDN.22.1 Tanggal 31-12-2025 atas kontrak No:000.4.3/79/SP-CStaman/PPK/IPDN.22.1 tgl 31-12-2024 NK.1.639.800.000
69	01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	126.850.000	00682T/683070/2025	259990302017138	2025-12-23	523111	42.500.000	815619	(42.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/007/SP-J.TMN/KNR/IPDN.27.1 untuk Jasa Pertamanan dan Penebasan Rumput (Man Power) di Lingkungan IPDN Kampus Kalimantan Barat T.A 2025	00009T/683070/2026	260420000000173	2026-01-06	825619	42.500.000	411211	(4.211.712)	37.531.522	-	Pembayaran Jasa Pertamanan dan Penebasan Rumput (Man Power) di Lingkungan IPDN Kampus Kalimantan Barat T.A 2025 sesuai BAST Nomor 000.4.2/481/BAST-J.TMN/T.12/KNR/IPDN.27.1 Tanggal 31-12-2025
70	01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT															411124	(756.766)			
71	01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT		00683T/683070/2025	259990302017137	2025-12-23	523111	84.350.000	815619	(84.350.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/006/SP-J.CS/KNR/IPDN.27.1 untuk JASA CLEANING SERVICE (MAN POWER) DI LINGKUNGAN IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025	00008T/683070/2026	260420000000172	2026-01-06	825619	84.350.000	411211	(8.359.009)	74.471.171	-	Pembayaran JASA CLEANING SERVICE (MAN POWER) DI LINGKUNGAN IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 sesuai BAST Nomor 000.4.2/479/BAST-J.CS/T.12/KNR/IPDN.27.1 Tanggal 31-12-2025
72	01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT															411124	(1.519.820)			
73	01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	174.374.797	00361T/683084/2025	259990302013000	2025-12-19	523111	174.374.797	815619	(174.374.797)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 027/01/SP/IPDN.25/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Kebersihan Gedung dan Halaman IPDN Kampus NTB Tahun Anggaran 2025	00003T/683084/2026	269991302000699	2026-01-02	825619	174.374.797	411211	(17.280.386)	153.952.523	-	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Kebersihan Gedung dan Halaman IPDN Kampus NTB Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST No:000.2.8/65/BAST/IPDN.25/2025 Tgl 31-12-2025 dan Kontrak No:027/01/SP/IPDN.25/2025 Tgl 2-1-2025
74	01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT															411124	(3.141.888)			
75	05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	175.502.028	01207T/027753/2025	259990302023158	2025-12-24	523111	175.502.028	815619	(175.502.028)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/078/PRC/I/2025 untuk Pengadaan Jasa Kebersihan dalam rangka Belanja Pemeliharaan Gedung, Bangunan Ditjen Bina Pemdes T.A. 2025 melalui Pengadaan Langsung E-Purchasing e-Katalog LKPP ID Paket 5T4-P2412-11320092	00012T/027753/2026	261330000001406	2026-01-12	825619	175.502.028	411211	(2.213.974)	172.885.513	-	Pembayaran Pengadaan Jasa Kebersihan dalam rangka Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di liingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 5942/BAST-PPK/SEKRET/BPD/XII/2025 Tanggal 31-12-2025
76	05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA															411124	(402.541)			
77	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	24.509.677.072	02541T/039729/2025	259990302021695	2025-12-24	522131	90.011.210	815619	(90.011.210)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 2298/PRC/PPK-SET/V/2025 untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Bantuan Teknis Sekretariat Bersama DAK Tahun Anggaran 2025	00005T/039729/2026	261330000000181	2026-01-06	825619	90.011.210	411211	(8.920.030)	79.469.356	-	Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Bantuan Teknis Sekretariat Bersama DAK Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 5556/PRC/PPK-SET/XII/Bangda/2025 Tanggal 31-12-2025
78	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH															411124	(1.621.824)			
79	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		02512T/039729/2025	259990302018180	2025-12-22	522131	562.375.950	815619	(562.375.950)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 027/1106/PPK/DIT.PEIPD/2025 untuk BELANJA JASA KONSULTAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERAPAN SIPD SEBAGAI PLATFORM TUNGGAL PEMERINTAHAN DAERAH, FIELD SUPPORT DAN HELPDESK MODUL INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	00012T/039729/2026	261330000000413	2026-01-06	825619	562.375.950	411211	(55.730.950)	496.512.100	-	Pembayaran BELANJA JASA KONSULTAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERAPAN SIPD SEBAGAI PLATFORM TUNGGAL PEMERINTAHAN DAERAH,FIELD SUPPORT DAN HELPDESK MODUL INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH sesuai BAST No 900.1.3/1627/PPK/DIT.PEIPD/2025 Tgl 31-12-2025
80	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH															411122	(10.132.900)			
81	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		02509T/039729/2025	259990302017495	2025-12-22	522131	1.762.725.510	815619	(1.762.725.510)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 027/1027/PPK/DIT.PEIPD/2025 untuk JASA KONSULTAN DALAM RANGKA PENGUATAN DAN PENERAPAN MODUL INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM SIPD	00011T/039729/2026	261330000000410	2026-01-06	825619	1.762.725.510	411211	(174.684.510)	1.556.280.180	-	Pembayaran JASA KONSULTAN DALAM RANGKA PENGUATAN DAN PENERAPAN MODUL INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM SIPD sesuai BAST Nomor 900.1.3/1626/PPK/DIT.PEIPD/2025 Tanggal 31-12-2025

82	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH															411122	(31.760.820)			
83	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		02511T/039729/2025	2599903020175 34	2025-12-22	522131	1.168.182.000	815619	(1.168.182.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 800.1.2.5/137/PPK/DIT.PEIPD/2023 untuk Jasa Konsultan System Development for National Urban Development Project	00010T/039729/2026	261330000000411	2026-01-06	825619	1.168.182.000	-	-	1.168.182.000	-	Pembayaran Jasa Konsultan System Development for National Urban Development Project sesuai BAST Nomor 900.1.3/1624/PPK/DIT.PEIPD/2025 Tanggal 31-12-2025
84	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		02510T/039729/2025	2599903020181 13	2025-12-29	522131	7.551.611.438	815619	(7.551.611.438)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 900.1.4/111/PPK/DIT.PEIPD/2024. untuk JASA KONSULTAN CITY DEVELOPMENT PLANNING AND PROJECT MANAGEMENT CAPACITY	00009T/039729/2026	261330000000412	2026-01-06	825619	7.551.611.438	-	-	7.551.611.438	-	Pembayaran JASA KONSULTAN CITY DEVELOPMENT PLANNING AND PROJECT MANAGEMENT CAPACITY sesuai BAST Nomor 900.1.3/1625/PPK/DIT.PEIPD/2025 Tanggal 31-12-2025
85	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		02507T/039729/2025	2599903020181 12	2025-12-29	522131	12.361.100.000	815619	(12.361.100.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 1349/SD.IV/DIT.SUPD.II/2022 untuk Capital Investment Planning (CIP) Framework and Implementation for National Urban Development Project (NUDP) Loan 8976-ID	00007T/039729/2026	261330000000186	2026-01-06	825619	12.361.100.000	-	-	12.361.100.000	-	Pembayaran Capital Investment Planning (CIP) Framework and Implementation for National Urban Development Project (NUDP) Loan 8976-ID sesuai BAST Nomor 4156/SD.IV/DIT.SUPD.II/2025 Tanggal 31-12-2025
86	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		02508T/039729/2025	2599903020181 91	2025-12-22	522191	988.157.964	815619	(988.157.964)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 8210/SD.IV/DIT.SUPD.II/2020 untuk Jasa Lainnya Non-Consulting Services for Oversight Service Providers (OSP) for TMC Personnel in MoHA	00008T/039729/2026	261330000000179	2026-01-06	825619	988.157.964	-	-	988.157.964	-	Pembayaran Jasa Lainnya Non-Consulting Services for Oversight Service Providers (OSP) for TMC Personnel in MoHA sesuai BAST Nomor 4155/SD.IV/DIT.SUPD.II/2025 Tanggal 31-12-2025
87	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		02497T/039729/2025	2599903020159 11	2025-12-22	522131	20.000.000	815619	(20.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 3892/PRC/PPK-SET/IX/2025 untuk Tenaga Pendukung Pengendalian Risiko Keamanan Sistem Informasi pada Bagian Perencanaan TA.2025	00003T/039729/2026	261330000000173	2026-01-06	825619	20.000.000	-	-	20.000.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Pengendalian Risiko Keamanan Sistem Informasi pada Bagian Perencanaan TA.2025 sesuai BAST Nomor 5578/PRC/PPK-SET/XII/2025 Tanggal 31-12-2025
88	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		02506T/039729/2025	2599903020159 09	2025-12-22	522191	5.513.000	815619	(5.513.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 1147/PRC/PPK-SET/II/2025 untuk Pengadaan Tenaga Pendukung Pengolah Data SPM pada Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2025	00004T/039729/2026	261330000000172	2026-01-06	825619	5.513.000	-	-	5.513.000	-	Pembayaran Pengadaan Tenaga Pendukung Pengolah Data SPM pada Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 5580/PRC/PPK-SET/XII/2025 Tanggal 31-12-2025
89	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	189.865.461.345	02302T/634082/2025	2599903020282 02	2025-12-29	536111	171.000.000	815619	(171.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1917/BAKPS untuk Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Database Dukcapil Daerah	00120T/634082/2026	261330000002300	2026-01-15	825619	171.000.000	411211	(16.945.946)	151.743.243	-	Pembayaran Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Database Dukcapil Daerah sesuai BAST Nomor 900.1.3.3/2996/BAKPS Tanggal 31-12-2025
90	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411122	(2.310.811)			
91	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02317T/634082/2025	2599903020273 90	2025-12-31	522191	7.506.165.527	815619	(7.506.165.527)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K6CBZDPTD4TQEVQXB0FNACQA untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	00129T/634082/2026	261330000002533	2026-01-15	825619	7.506.165.527	411124	(135.246.226)	7.370.919.301	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16938/PIAK Tanggal 31-12-2025
92	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02305T/634082/2025	2599903020276 53	2025-12-29	521811	132.090.000	815619	(132.090.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KCRS0DAM6CTZ9A5D450RFBBA untuk Pengadaan Lisensi Zoom Meeting dan Microsoft Office 365	00115T/634082/2026	261330000002528	2026-01-15	825619	132.090.000	411211	(13.090.000)	117.215.000	-	Pembayaran Pengadaan Lisensi Zoom Meeting dan Microsoft Office 365 sesuai BAST Nomor 000.4/16868/PIAK Tanggal 31-12-2025
93	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411122	(1.785.000)			
94	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02303T/634082/2025	2599903020273 89	2025-12-31	522191	5.506.888.430	815619	(5.506.888.430)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/16255/PIAK.2025 untuk Pekerjaan Masa Transisi Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU Tahun 2025 Periode 1 Juni s.d 30 November 2025	00113T/634082/2026	261330000002574	2026-01-15	825619	5.469.836.087	411211	(542.055.828)	4.792.172.311	-	Pembayaran Pekerjaan Masa Transisi Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU Tahun 2025 Periode 1 Juni s.d 30 November 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16719/PIAK Tanggal 31-12-2025
95	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(98.555.605)			
96														00116T/634082/2026	261330000002578	2026-01-15	825619	37.052.343	425912	(37.052.343)			Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/16255/PIAK.2025 untuk Pekerjaan Masa Transisi Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU Tahun 2025 Periode 1 Juni s.d 30 November 2025
97	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02304T/634082/2025	2599903020277 33	2025-12-29	522191	592.567.942	815619	(592.567.942)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/16256/PIAK.2025 untuk Pekerjaan Masa Transisi Annual Technical Support Server dan Storage DRC Tahun 2025 Periode 1 s.d. 22 Januari 2025	00114T/634082/2026	261330000002530	2026-01-15	825619	592.567.942	411211	(58.722.949)	523.168.093	-	Pembayaran Pekerjaan Masa Transisi Annual Technical Support Server dan Storage DRC Tahun 2025 Periode 1 s.d. 22 Januari 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16708/PIAK Tanggal 31-12-2025
98	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(10.676.900)			
99	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02312T/634082/2025	2599903020269 48	2025-12-31	532111	11.267.056.800	815619	(11.267.056.800)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/41483/PMU.2025 untuk Replikasi Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAK Terpusat) Tahap I	00119T/634082/2026	261330000002360	2026-01-15	825619	11.267.056.800	-	-	11.267.056.800	-	Pembayaran Replikasi Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAK Terpusat) Tahap I sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45717/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
100	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02137T/634082/2025	2599903020266 88	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2441/PMU.2025 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025	00040T/634082/2026	261330000001525	2026-01-13	825619	7.500.000	411121	(18.750)	7.481.250	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025. sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45582/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025

101	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02135T/634082/2025	2599903020266690	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2440/PMU.2025 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025	00039T/634082/2026	261330000001524	2026-01-13	825619	7.500.000	-	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45576/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
102	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02130T/634082/2025	2599903020266734	2025-12-29	522131	2.481.705.006	815619	(2.481.705.006)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/29969/PMU.2025 untuk Project Management Consultant 2025	00042T/634082/2026	261330000002520	2026-01-15	825619	2.466.205.006	-	-	2.450.705.006	-	Pembayaran Project Management Consultant 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45619/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
103														00043T/634082/2026	261330000002521	2026-01-15	825619	15.500.000	425912	(15.500.000)	-		Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/29969/PMU.2025 untuk Project Management Consultant 2025
104	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02144T/634082/2025	2599903020266691	2025-12-29	522131	10.500.000	815619	(10.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/32969/PMU.2025 untuk Tenaga Ahli Manajemen Proyek Junior	00034T/634082/2026	261330000002160	2026-01-14	825619	10.500.000	-	-	10.500.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Manajemen Proyek Junior sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45625/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
105	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02143T/634082/2025	2599903020266543	2025-12-29	522131	20.000.000	815619	(20.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2484/PMU.2024 untuk Pengadaan Tenaga Ahli Budgeting dan Rencana Strategis	00015T/634082/2026	261330000002226	2026-01-15	825619	20.000.000	-	-	20.000.000	-	Pembayaran Pengadaan Tenaga Ahli Budgeting dan Rencana Strategis sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45606/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
106	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02139T/634082/2025	2599903020266693	2025-12-29	521111	5.513.000	815619	(5.513.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2454/PMU.2025 untuk Pramubakti Tahun Anggaran 2025	00013T/634082/2026	261330000002221	2026-01-15	825619	5.513.000	-	-	5.513.000	-	Pembayaran Pramubakti Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45673/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
107	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02142T/634082/2025	2599903020266689	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2444/PMU.2025 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025	00014T/634082/2026	261330000002223	2026-01-15	825619	7.500.000	-	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45649/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
108	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02141T/634082/2025	2599903020266542	2025-12-29	522131	20.000.000	815619	(20.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2483/PMU.2024 untuk Pengadaan Tenaga Ahli Budgeting dan Rencana Strategis	00020T/634082/2026	261330000002156	2026-01-14	825619	20.000.000	-	-	20.000.000	-	Pembayaran Pengadaan Tenaga Ahli Budgeting dan Rencana Strategis sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45612/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
109	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02140T/634082/2025	2599903020266735	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2445/PMU.2025 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025	00011T/634082/2026	261330000002218	2026-01-15	825619	7.500.000	-	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45643/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
110	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02138T/634082/2025	2599903020266692	2025-12-29	521111	5.513.000	815619	(5.513.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2452/PMU.2025 untuk Tenaga Kebesihan Tahun Anggaran 2025	00012T/634082/2026	261330000002219	2026-01-15	825619	5.513.000	-	-	5.513.000	-	Pembayaran Tenaga Kebesihan Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45667/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
111	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02132T/634082/2025	2599903020266695	2025-12-29	522191	6.065.000	815619	(6.065.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2435/PMU.2025 untuk Pengemudi Tahun Anggaran 2025	00021T/634082/2026	261330000002157	2026-01-14	825619	6.065.000	-	-	6.065.000	-	Pembayaran Pengemudi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45685/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
112	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02133T/634082/2025	2599903020266736	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2443/PMU.2025 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025	00022T/634082/2026	261330000002158	2026-01-14	825619	7.500.000	-	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45661/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
113	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02136T/634082/2025	2599903020266544	2025-12-29	522131	35.000.000	815619	(35.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2479/PMU.2024 untuk Pengadaan Tenaga Ahli Senior Budgeting dan Rencana Strategis	00010T/634082/2026	261330000002217	2026-01-15	825619	35.000.000	-	-	35.000.000	-	Pembayaran Pengadaan Tenaga Ahli Senior Budgeting dan Rencana Strategis sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45600/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
114	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02131T/634082/2025	2599903020266694	2025-12-29	522191	6.065.000	815619	(6.065.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2437/PMU.2025 untuk Pengemudi Tahun Anggaran 2025	00017T/634082/2026	261330000002153	2026-01-14	825619	6.065.000	-	-	6.065.000	-	Pembayaran Pengemudi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45679/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
115	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02134T/634082/2025	2599903020266738	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2442/PMU.2025 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025	00019T/634082/2026	261330000002155	2026-01-14	825619	7.500.000	-	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45631/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
116	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02306T/634082/2025	2599903020028190	2025-12-29	522191	1.359.920.552	815619	(1.359.920.552)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K8B7ENTW2DJYVE4Y6BYBHCSN untuk Pengadaan Jasa Kajian dan Revitalisasi Bangunan Gedung Command Center atau Data Center	00026T/634082/2026	261330000002790	2026-01-19	825619	1.359.920.552	411124	(24.503.073)	1.199.290.656	-	Pembayaran Pengadaan Jasa Kajian dan Revitalisasi Bangunan Gedung Command Center atau Data Center sesuai BAST Nomor 000.4.2/11985/Ses Tanggal 31-12-2025
117	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(134.766.902)			
118	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																425811	(1.359.921)			
119	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02307T/634082/2025	2599903020028188	2025-12-29	521211	119.880.000	815619	(119.880.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KC8CDP2TMW6EAGST6TG6BHNM untuk Pengadaan Cetakan kalender dinding, meja dan buku agenda Ditjen Dukcapil	00024T/634082/2026	261330000002235	2026-01-15	825619	119.880.000	411211	(11.880.000)	106.380.000	-	Pembayaran Pengadaan Cetakan kalender dinding, meja dan buku agenda Ditjen Dukcapil sesuai BAST Nomor 000.4.2/11980/Ses Tanggal 31-12-2025
120	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411122	(1.620.000)			
121	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02299T/634082/2025	2599903020027751	2025-12-29	522191	397.380.000	815619	(397.380.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KCTMB6G8GNV2TA4NW1PGVVRV untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas bagi Pegawai Ditjen Dukcapil dalam rangka Optimaliasi Penerapan PNBP.	00007T/634082/2026	261330000001483	2026-01-13	825619	397.380.000	411211	(39.380.000)	350.840.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas bagi Pegawai Ditjen Dukcapil dalam rangka Optimaliasi Penerapan PNBP. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6081/IDKN/2025 Tanggal 24-12-2025
122	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(7.160.000)			
123	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02298T/634082/2025	2599903020027702	2025-12-29	522191	397.380.000	815619	(397.380.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KCTFWS7S2J1PY9J4RRC1TZ7T untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas bagi Pegawai Ditjen Dukcapil dalam rangka Optimaliasi Penerapan PNBP.	00006T/634082/2026	261330000001481	2026-01-13	825619	397.380.000	411211	(39.380.000)	350.840.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas bagi Pegawai Ditjen Dukcapil dalam rangka Optimaliasi Penerapan PNBP. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6097/IDKN/2025 Tanggal 24-12-2025

124	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(7.160.000)				
125	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02277T/634082/2025	2599903020277 40	2025-12-29	522131	7.000.000	815619	(7.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/180/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Administrasi Tata Kelola Tahun Anggaran 2025	00112T/634082/2026	261330000002295	2026-01-15	825619	7.000.000	-	-	7.000.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Administrasi Tata Kelola Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16793/PIAK Tanggal 31-12-2025
126	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02276T/634082/2025	2599903020276 44	2025-12-29	522131	20.950.000	815619	(20.950.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/27/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Profesional Senior Tahun Anggaran 2025	00111T/634082/2026	261330000002304	2026-01-15	825619	20.950.000	-	-	20.950.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Profesional Senior Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16785/PIAK Tanggal 31-12-2025
127	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02275T/634082/2025	2599903020276 87	2025-12-29	522131	21.000.000	815619	(21.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/177/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Tata Kelola Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2025	00110T/634082/2026	261330000002064	2026-01-14	825619	21.000.000	-	-	21.000.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Tata Kelola Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16789/PIAK Tanggal 31-12-2025
128	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02273T/634082/2025	2599903020276 81	2025-12-29	522131	7.000.000	815619	(7.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/33/PIAK.2025 untuk Tenaga Desain Grafis	00108T/634082/2026	261330000002063	2026-01-14	825619	7.000.000	-	-	7.000.000	-	Pembayaran Tenaga Desain Grafis sesuai BAST Nomor 000.4/16755/PIAK Tanggal 31-12-2025
129	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02274T/634082/2025	2599903020277 50	2025-12-29	522191	1.087.840.000	815619	(1.087.840.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor #EP-QLITQBCBHBGDABE233NDFBP41X untuk Operasionalisasi Call Center Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	00109T/634082/2026	261330000002641	2026-01-19	825619	1.087.840.000	411211	(107.803.964)	960.435.315	-	Pembayaran Operasionalisasi Call Center Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai BAST Nomor 000.4/16797/PIAK Tanggal 31-12-2025
130	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(19.600.721)				
131	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02272T/634082/2025	2599903020276 80	2025-12-29	522131	7.000.000	815619	(7.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/30/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Programmer	00107T/634082/2026	261330000002062	2026-01-14	825619	7.000.000	-	-	7.000.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Programmer sesuai BAST Nomor 000.4/16763/PIAK Tanggal 31-12-2025
132	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02270T/634082/2025	2599903020276 84	2025-12-29	522131	19.000.000	815619	(19.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/501/PIAK.2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database	00105T/634082/2026	261330000002061	2026-01-14	825619	19.000.000	-	-	19.000.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database sesuai BAST Nomor 000.4/16751/PIAK Tanggal 31-12-2025
133	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02269T/634082/2025	2599903020276 76	2025-12-29	522131	19.000.000	815619	(19.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/651/PIAK.2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database	00104T/634082/2026	261330000002060	2026-01-14	825619	19.000.000	-	-	19.000.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database sesuai BAST Nomor 000.4/16898/PIAK Tanggal 31-12-2025
134	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02271T/634082/2025	2599903020276 77	2025-12-29	522131	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/36/PIAK.2025 untuk Tenaga Operator Database	00106T/634082/2026	261330000002301	2026-01-15	825619	7.500.000	-	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Operator Database sesuai BAST Nomor 000.4/16759/PIAK Tanggal 31-12-2025
135	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02267T/634082/2025	2599903020276 78	2025-12-29	522131	19.900.000	815619	(19.900.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/653/PIAK.2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Senior	00102T/634082/2026	261330000002059	2026-01-14	825619	19.900.000	-	-	19.900.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Senior sesuai BAST Nomor 000.4/16767/PIAK Tanggal 31-12-2025
136	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02266T/634082/2025	2599903020276 63	2025-12-29	522131	22.900.000	815619	(22.900.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1801/PIAK.2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Data Analis	00101T/634082/2026	261330000002058	2026-01-14	825619	22.900.000	-	-	22.900.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Data Analis sesuai BAST Nomor 000.4/16775/PIAK Tanggal 31-12-2025
137	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02268T/634082/2025	2599903020276 85	2025-12-29	522131	19.000.000	815619	(19.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/655/PIAK.2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Junior	00103T/634082/2026	261330000002292	2026-01-15	825619	19.000.000	-	-	19.000.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Junior sesuai BAST Nomor 000.4/16771/PIAK Tanggal 31-12-2025
138	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02263T/634082/2025	2599903020276 58	2025-12-29	522131	6.130.000	815619	(6.130.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/213/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2025	00098T/634082/2026	261330000001964	2026-01-14	825619	6.130.000	-	-	6.130.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16823/PIAK Tanggal 31-12-2025
139	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02265T/634082/2025	2599903020276 61	2025-12-29	522131	6.130.000	815619	(6.130.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/222/PIAK.2025 untuk Operator Data Center Tahun Anggaran 2025	00100T/634082/2026	261330000002291	2026-01-15	825619	6.130.000	-	-	6.130.000	-	Pembayaran Operator Data Center Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16829/PIAK Tanggal 31-12-2025
140	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02264T/634082/2025	2599903020276 60	2025-12-29	522131	6.130.000	815619	(6.130.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/216/PIAK.2025 untuk Operator Data Center Tahun Anggaran 2025	00099T/634082/2026	261330000001965	2026-01-14	825619	6.130.000	-	-	6.130.000	-	Pembayaran Operator Data Center Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16826/PIAK Tanggal 31-12-2025
141	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02262T/634082/2025	2599903020277 39	2025-12-29	522131	6.130.000	815619	(6.130.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/229/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2025	00097T/634082/2026	261330000001963	2026-01-14	825619	6.130.000	-	-	6.130.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16835/PIAK Tanggal 31-12-2025
142	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02261T/634082/2025	2599903020277 43	2025-12-29	522131	6.130.000	815619	(6.130.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/231/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2025	00095T/634082/2026	261330000002287	2026-01-15	825619	6.130.000	-	-	6.130.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16838/PIAK Tanggal 31-12-2025
143	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02259T/634082/2025	2599903020277 48	2025-12-29	522131	7.160.000	815619	(7.160.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/237/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Hukum Kontrak Tahun Anggaran 2025	00094T/634082/2026	261330000002289	2026-01-15	825619	7.160.000	-	-	7.160.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Hukum Kontrak Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16847/PIAK Tanggal 31-12-2025
144	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02260T/634082/2025	2599903020277 46	2025-12-29	522131	6.130.000	815619	(6.130.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/240/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2025	00096T/634082/2026	261330000002290	2026-01-15	825619	6.130.000	-	-	6.130.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16841/PIAK Tanggal 31-12-2025
145	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02256T/634082/2025	2599903020277 42	2025-12-29	522131	7.675.000	815619	(7.675.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/204/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2025	00091T/634082/2026	261330000002055	2026-01-14	825619	7.675.000	-	-	7.675.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16853/PIAK Tanggal 31-12-2025

146	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02258T/634082/2025	259990302027673	2025-12-29	522131	7.675.000	815619	(7.675.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/201/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2025	00092T/634082/2026	261330000002056	2026-01-14	825619	7.675.000	-	-	7.675.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16850/PIAK Tanggal 31-12-2025
147	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02257T/634082/2025	259990302027738	2025-12-29	522131	7.675.000	815619	(7.675.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/207/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2025	00093T/634082/2026	261330000002057	2026-01-14	825619	7.675.000	-	-	7.675.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16856/PIAK Tanggal 31-12-2025
148	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02254T/634082/2025	259990302027675	2025-12-29	522131	8.190.000	815619	(8.190.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/210/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Keamanan Jaringan Senior Tahun Anggaran 2025	00089T/634082/2026	261330000001961	2026-01-14	825619	8.190.000	-	-	8.190.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Keamanan Jaringan Senior Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16820/PIAK Tanggal 31-12-2025
149	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02255T/634082/2025	259990302027700	2025-12-29	522131	8.190.000	815619	(8.190.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/186/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Jaringan Teknologi Informasi Senior Tahun Anggaran 2025	00090T/634082/2026	261330000001962	2026-01-14	825619	8.190.000	-	-	8.190.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Jaringan Teknologi Informasi Senior Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16811/PIAK Tanggal 31-12-2025
150	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02252T/634082/2025	259990302027741	2025-12-29	522131	8.190.000	815619	(8.190.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/234/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Database Senior Tahun Anggaran 2025	00087T/634082/2026	261330000001960	2026-01-14	825619	8.190.000	-	-	8.190.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Database Senior Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16844/PIAK Tanggal 31-12-2025
151	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02253T/634082/2025	259990302027679	2025-12-29	522131	8.190.000	815619	(8.190.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/198/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Aplikasi Senior Tahun Anggaran 2025	00088T/634082/2026	261330000002139	2026-01-14	825619	8.190.000	-	-	8.190.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Aplikasi Senior Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16817/PIAK Tanggal 31-12-2025
152	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02251T/634082/2025	259990302027652	2025-12-29	522131	8.190.000	815619	(8.190.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/225/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Pengelola Data Center Tahun Anggaran 2025	00086T/634082/2026	261330000001959	2026-01-14	825619	8.190.000	-	-	8.190.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Pengelola Data Center Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16832/PIAK Tanggal 31-12-2025
153	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02250T/634082/2025	259990302027659	2025-12-29	522131	8.250.000	815619	(8.250.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/189/PIAK.2025 untuk Tenaga Ahli Infrastruktur Senior Tahun Anggaran 2025	00085T/634082/2026	261330000001958	2026-01-14	825619	8.250.000	-	-	8.250.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Infrastruktur Senior Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16814/PIAK Tanggal 31-12-2025
154	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02245T/634082/2025	259990302027651	2025-12-29	522191	1.096.731.489	815619	(1.096.731.489)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/15330/PIAK.2025 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU	00080T/634082/2026	261330000002649	2026-01-19	825619	1.096.731.489	411211	(108.685.103)	968.285.458	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU sesuai BAST Nomor 000.4/16737/PIAK Tanggal 31-12-2025
155	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(19.760.928)				
156	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02246T/634082/2025	259990302027754	2025-12-29	522191	963.303.341	815619	(963.303.341)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1407/PIAK.2025 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Perangkat Jaringan dan Perangkat Keamanan Jaringan Data Center Kependudukan dan DRC Tahun 2025	00081T/634082/2026	261330000002527	2026-01-15	825619	963.303.341	411211	(95.462.493)	850.484.031	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Perangkat Jaringan dan Perangkat Keamanan Jaringan Data Center Kependudukan dan DRC Tahun 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16731/PIAK Tanggal 31-12-2025
157	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(17.356.817)				
158	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02249T/634082/2025	259990302027664	2025-12-29	522191	106.320.000	815619	(106.320.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/30502/PIAK.2024 688/SPJ/A2/12/2024 untuk Layanan Managed Service DRC Batam Kerjasama Dengan BP Batam	00084T/634082/2026	261330000002345	2026-01-15	825619	106.320.000	-	-	106.320.000	-	Pembayaran Layanan Managed Service DRC Batam Kerjasama Dengan BP Batam sesuai BAST Nomor 000.4/16781/PIAK Tanggal 31-12-2025
159	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02247T/634082/2025	259990302027667	2025-12-29	521119	597.800.000	815619	(597.800.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KCGE15RW8DQ8G0DQKEETW3DS untuk Pengadaan Perangkat Monitoring NOC	00082T/634082/2026	261330000002200	2026-01-14	825619	597.800.000	411211	(59.241.441)	530.480.181	-	Pembayaran Pengadaan Perangkat Monitoring NOC sesuai BAST Nomor 000.4/16807/PIAK Tanggal 31-12-2025
160	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411122	(8.078.378)				
161	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02248T/634082/2025	259990302027655	2025-12-29	522191	363.625.965	815619	(363.625.965)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/708/PIAK.2025 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center Medan Merdeka Utara Tahun 2025	00083T/634082/2026	261330000002536	2026-01-15	825619	363.625.965	411211	(36.035.006)	321.039.140	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center Medan Merdeka Utara Tahun 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16803/PIAK Tanggal 31-12-2025
162	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(6.551.819)				
163	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02243T/634082/2025	259990302027744	2025-12-29	522191	2.990.000.340	815619	(2.990.000.340)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K744RNHT6T5DPJ3Y903VJ2Q6 untuk Annual Technical Support Perangkat Keamanan Informasi Ditjen Dukcapil	00078T/634082/2026	261330000002199	2026-01-14	825619	2.990.000.340	411211	(296.306.340)	2.639.820.120	-	Pembayaran Annual Technical Support Perangkat Keamanan Informasi Ditjen Dukcapil sesuai BAST Nomor 000.4/16725/PIAK Tanggal 31-12-2025
164	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(53.873.880)				
165	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02244T/634082/2025	259990302027734	2025-12-29	522191	2.788.275.912	815619	(2.788.275.912)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1001/PIAK.2025 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRC	00079T/634082/2026	261330000002650	2026-01-19	825619	2.788.275.912	411211	(276.315.631)	2.461.721.075	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRC sesuai BAST Nomor 000.4/16713/PIAK Tanggal 31-12-2025
166	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(50.239.206)				
167	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02241T/634082/2025	259990302027674	2025-12-29	522191	7.000.000	815619	(7.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/249/PIAK.2025 untuk Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2025	00076T/634082/2026	261330000001956	2026-01-14	825619	7.000.000	-	-	7.000.000	-	Pembayaran Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16862/PIAK Tanggal 31-12-2025
168	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02242T/634082/2025	259990302027671	2025-12-29	522191	7.000.000	815619	(7.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/243/PIAK.2025 untuk Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2025	00077T/634082/2026	261330000002198	2026-01-14	825619	7.000.000	-	-	7.000.000	-	Pembayaran Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16859/PIAK Tanggal 31-12-2025

169	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02239T/634082/2025	259990302027698	2025-12-29	522131	14.960.000	815619	(14.960.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/31063/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Junior	00074T/634082/2026	261330000001955	2026-01-14	825619	14.960.000	-	-	14.960.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Junior sesuai BAST Nomor 000.4/16745/PIAK Tanggal 31-12-2025
170	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02240T/634082/2025	259990302027672	2025-12-29	522191	7.000.000	815619	(7.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/252/PIAK.2025 untuk Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2025	00075T/634082/2026	261330000001957	2026-01-14	825619	7.000.000	-	-	7.000.000	-	Pembayaran Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16865/PIAK Tanggal 31-12-2025
171	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02236T/634082/2025	259990302027654	2025-12-29	522191	185.055.000	815619	(185.055.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2102/PIAK.2025 untuk Pemeliharaan Perangkat Pendukung Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan	00128T/634082/2026	261330000002576	2026-01-15	825619	185.055.000	411211	(18.338.784)	163.381.892	-	Pembayaran Pemeliharaan Perangkat Pendukung Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/1695Q/PIAK Tanggal 31-12-2025
172	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(3.334.324)			
173	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02237T/634082/2025	259990302027683	2025-12-29	522131	19.955.000	815619	(19.955.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/31070/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Senior	00072T/634082/2026	261330000002197	2026-01-14	825619	19.955.000	-	-	19.955.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Senior sesuai BAST Nomor 000.4/16742/PIAK Tanggal 31-12-2025
174	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02238T/634082/2025	259990302027747	2025-12-29	522131	19.600.000	815619	(19.600.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/704/PIAK.2025 untuk Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Professional IT Senior	00073T/634082/2026	261330000002138	2026-01-14	825619	19.600.000	-	-	19.600.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Professional IT Senior sesuai BAST Nomor 000.4/16748/PIAK Tanggal 31-12-2025
175	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02235T/634082/2025	259990302027703	2025-12-29	522191	327.672.000	815619	(327.672.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/31081/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	00127T/634082/2026	261330000002577	2026-01-15	825619	327.672.000	411124	(5.904.000)	321.768.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16941/PIAK Tanggal 31-12-2025
176	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02234T/634082/2025	259990302027753	2025-12-29	522191	570.318.000	815619	(570.318.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K7NPDHT3WS69BCG8PE90Q7M0 untuk Pemeliharaan Zimbra Mail Server	00071T/634082/2026	261330000002526	2026-01-15	825619	570.318.000	411211	(56.518.000)	503.524.000	-	Pembayaran Pemeliharaan Zimbra Mail Server sesuai BAST Nomor 000.4/16911/PIAK Tanggal 31-12-2025
177	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(10.276.000)			
178	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02233T/634082/2025	259990302027697	2025-12-29	522131	684.381.600	815619	(684.381.600)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/9901/PIAK.2025 untuk Layanan Keahlian Operasional Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan	00126T/634082/2026	261330000002532	2026-01-15	825619	684.381.600	411211	(67.821.600)	604.228.800	-	Pembayaran Layanan Keahlian Operasional Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/16932/PIAK Tanggal 31-12-2025
179	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(12.331.200)			
180	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02232T/634082/2025	259990302027696	2025-12-29	522191	816.300.000	815619	(816.300.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/31077/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	00070T/634082/2026	261330000002531	2026-01-15	825619	816.300.000	411124	(14.708.108)	801.591.892	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16944/PIAK Tanggal 31-12-2025
181	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02231T/634082/2025	259990302028220	2025-12-29	522191	1.307.169.522	815619	(1.307.169.522)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/31060/PIAK.2024 untuk Operasionalisasi dan Pemeliharaan SIAK Terpusat	00125T/634082/2026	261330000002569	2026-01-15	825619	1.307.169.522	411211	(129.539.322)	1.154.077.596	-	Pembayaran Operasionalisasi dan Pemeliharaan SIAK Terpusat sesuai BAST Nomor 000.4/16935/PIAK Tanggal 31-12-2025
182	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(23.552.604)			
183	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02230T/634082/2025	259990302028169	2025-12-29	522191	1.422.428.000	815619	(1.422.428.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K6HV6QTT09W5GV09GS8PXKCN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	00137T/634082/2026	261330000002570	2026-01-15	825619	1.422.428.000	411124	(25.629.333)	1.396.798.667	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16920/PIAK Tanggal 31-12-2025
184	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02229T/634082/2025	259990302028224	2025-12-29	522131	1.454.965.800	815619	(1.454.965.800)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/7755/PIAK.2025 untuk Pengembangan Aplikasi SIAK Terpusat	00124T/634082/2026	261330000002571	2026-01-15	825619	1.454.965.800	411211	(144.185.800)	1.284.564.400	-	Pembayaran Pengembangan Aplikasi SIAK Terpusat sesuai BAST Nomor 000.4/16923/PIAK Tanggal 31-12-2025
185	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(26.215.600)			
186	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02228T/634082/2025	259990302028227	2025-12-29	522191	1.520.549.928	815619	(1.520.549.928)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K6CA9BSGA27ZT2PREZT97FYR untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	00069T/634082/2026	261330000002535	2026-01-15	825619	1.520.549.928	411124	(27.397.296)	1.493.152.632	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16929/PIAK Tanggal 31-12-2025
187	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02227T/634082/2025	259990302028218	2025-12-29	522191	1.672.131.880	815619	(1.672.131.880)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KCG140H8E2HSMYTRTNWKY183 untuk Annual Technical Support Perangkat Server Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan	00068T/634082/2026	261330000002651	2026-01-19	825619	1.672.131.880	411211	(165.706.763)	1.476.296.615	-	Pembayaran Annual Technical Support Perangkat Server Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/16905/PIAK Tanggal 31-12-2025
188	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(30.128.502)			
189	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02225T/634082/2025	259990302028170	2025-12-29	522191	3.617.518.660	815619	(3.617.518.660)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/31073/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	00123T/634082/2026	261330000002534	2026-01-15	825619	3.617.518.660	411124	(65.180.516)	3.552.338.144	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16917/PIAK Tanggal 31-12-2025

190	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02226T/634082/2025	259990302028203	2025-12-29	536111	2.371.352.098	815619	(2.371.352.098)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KATSJMKYQVDB4DJTMNEKAP0D untuk Pengadaan Perangkat Lunak Pendukung Sistem SIAK Terpusat	00133T/634082/2026	261330000002579	2026-01-15	825619	2.371.352.098	411211	(234.998.857)	2.104.307.942	-	Pembayaran Pengadaan Perangkat Lunak Pendukung Sistem SIAK Terpusat sesuai BAST Nomor 000.4/16908/PIAK Tanggal 31-12-2025
191	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411122	(32.045.299)			
192	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02223T/634082/2025	259990302028334	2025-12-31	522191	5.448.574.029	815619	(5.448.574.029)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K6CW3N0GGVBM7HABYCVTZB3T untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	00066T/634082/2026	261330000002654	2026-01-19	825619	5.448.574.029	411124	(98.172.505)	5.350.401.524	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16926/PIAK Tanggal 31-12-2025
193	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02221T/634082/2025	259990302028331	2025-12-31	522191	8.192.452.000	815619	(8.192.452.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KA0STV03PMPZXWSDXM6J2DBN untuk Annual Technical Support Perangkat Server Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan	00064T/634082/2026	261330000002655	2026-01-19	825619	8.192.452.000	411211	(811.864.613)	7.232.975.639	-	Pembayaran Annual Technical Support Perangkat Server Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/16902/PIAK Tanggal 31-12-2025
194	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(147.611.748)			
195	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02222T/634082/2025	259990302028330	2025-12-31	522191	6.700.483.612	815619	(6.700.483.612)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/31056/PIAK.2024 untuk Pekerjaan Pengadaan Annual Technical Support Aplikasi Biometrik KTP-el Tahun 2025	00065T/634082/2026	261330000002652	2026-01-19	825619	6.700.483.612	411124	(120.729.434)	6.579.754.178	-	Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Annual Technical Support Aplikasi Biometrik KTP-el Tahun 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16703/PIAK Tanggal 31-12-2025
196	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02224T/634082/2025	259990302028332	2025-12-31	522191	5.110.191.600	815619	(5.110.191.600)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/31085/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	00067T/634082/2026	261330000002656	2026-01-19	825619	5.110.191.600	411124	(92.075.524)	5.018.116.076	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16947/PIAK Tanggal 31-12-2025
197	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02213T/634082/2025	259990302028185	2025-12-29	536111	470.640.000	815619	(470.640.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KCKEVD5WPN3T4FM15MTD0K72 untuk Pengadaan furnitur kantor lainnya berupa lantai, dinding, furnitur, pencahayaan, dan elemen dekoratif	00025T/634082/2026	261330000002236	2026-01-15	825619	470.640.000	411211	(46.640.000)	415.520.000	-	Pembayaran Pengadaan furnitur kantor lainnya berupa lantai, dinding, furnitur, pencahayaan, dan elemen dekoratif sesuai BAST Nomor 000.4.2/11981/Ses Tanggal 31-12-2025
198	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(8.480.000)			
199	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02155T/634082/2025	259990302030022	2025-12-30	532111	29.853.000.000	815619	(29.853.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/40569/PMU.2025 untuk Paket Pekerjaan Penambahan Kapasitas Penyimpanan Data Center Medan Merdeka Utara (DC MMU)	00063T/634082/2026	261330000002510	2026-01-15	825619	29.853.000.000	-	-	29.853.000.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Penambahan Kapasitas Penyimpanan Data Center Medan Merdeka Utara (DC MMU) sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45709/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
200	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02153T/634082/2025	259990302026959	2025-12-30	532111	10.188.000.000	815619	(10.188.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/38169/PMU.2025 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Keamanan Sistem dan Infrastruktur Administrasi Kependudukan	00047T/634082/2026	261330000002511	2026-01-15	825619	10.188.000.000	-	-	10.188.000.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Keamanan Sistem dan Infrastruktur Administrasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45699/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
201	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02154T/634082/2025	259990302030023	2025-12-30	532111	20.861.100.000	815619	(20.861.100.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/41171/PMU.2025 untuk Penambahan Server Biometrik Data Center Medan Merdeka Utara	00036T/634082/2026	261330000002359	2026-01-15	825619	20.861.100.000	-	-	20.861.100.000	-	Pembayaran Penambahan Server Biometrik Data Center Medan Merdeka Utara sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45693/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
202	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02152T/634082/2025	259990302026960	2025-12-30	532111	10.371.397.713	815619	(10.371.397.713)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/41485/PMU.2025 untuk Penguatan Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAK TERPUSAT)	00153T/634082/2026	261330000004528	2026-01-29	825619	10.371.397.713	-	-	10.371.397.713	-	Pembayaran Penguatan Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAK TERPUSAT) sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/1057/PMU.2026 Tanggal 13-01-2026
203	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02151T/634082/2025	259990302026951	2025-12-30	532111	24.199.928.000	815619	(24.199.928.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/41485/PMU.2025 untuk Penguatan Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAK TERPUSAT)	00152T/634082/2026	261330000004524	2026-01-29	825619	24.199.928.000	-	-	24.199.928.000	-	Pembayaran Penguatan Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAK TERPUSAT) sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/1057/PMU.2026 Tanggal 13-01-2026
204	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02149T/634082/2025	259990302028225	2025-12-29	522131	2.754.887.500	815619	(2.754.887.500)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/33371/PMU.2025 untuk Pengembangan Aplikasi IKD	00122T/634082/2026	261330000002358	2026-01-15	825619	2.754.887.500	-	-	2.754.887.500	-	Pembayaran Pengembangan Aplikasi IKD sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45730/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
205	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02207T/634082/2025	259990302027665	2025-12-29	522191	870.363.725	815619	(870.363.725)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/651/IDKN/2025 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Koneksitas Data Warehouse Kependudukan.	00044T/634082/2026	261330000002529	2026-01-15	825619	870.363.725	411211	(86.252.261)	768.429.235	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Koneksitas Data Warehouse Kependudukan. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6217/IDKN/2025 Tanggal 31-12-2025
206	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(15.682.229)			
207	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02205T/634082/2025	259990302027662	2025-12-29	536111	504.572.700	815619	(504.572.700)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/4077/IDKN/2025 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Manajemen Pemanfaatan Data Kependudukan.	00045T/634082/2026	261330000002698	2026-01-19	825619	504.572.700	411211	(50.002.700)	445.478.600	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Manajemen Pemanfaatan Data Kependudukan. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6225/IDKN/2025 Tanggal 31-12-2025
208	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(9.091.400)			
209	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02204T/634082/2025	259990302027701	2025-12-29	522191	2.855.475.500	815619	(2.855.475.500)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KA82JS8CAQV7D93097P6PKK0A untuk Paket Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Rekonsiliasi Transaksi PNBP.	00503T/634082/2026	261330000029137	2026-04-07	825619	2.855.475.500	411124	(51.450.009)	2.378.276.666	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Rekonsiliasi Transaksi PNBP. sesuai BASTNomor 000.4.2/2047/IDKN/2026 Tanggal 30-03-2026

210	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															425811	(142.773.775)			
211	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(282.975.050)			

212	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02206T/634082/2025	259990302027649	2025-12-29	536111	850.806.120	815619	(850.806.120)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/524/IDKN/2025 untuk Paket Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Koneksitas Data Warehouse Kependudukan untuk Lembaga Pengguna PNBP.	00008T/634082/2026	261330000001486	2026-01-13	825619	850.806.120	411211	(84.314.120)	751.162.160	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Koneksitas Data Warehouse Kependudukan untuk Lembaga Pengguna PNBP. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6090/IDKN/2025 Tanggal 24-12-2025
213	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(15.329.840)				
214	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02208T/634082/2025	259990302027656	2025-12-29	536111	607.551.575	815619	(607.551.575)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/506/IDKN/2025 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gateway/Midleware untuk Sistem Pengenalan Wajah (FR).	00009T/634082/2026	261330000001230	2026-01-12	825619	607.551.575	411211	(60.207.814)	536.396.886	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gateway/Midleware untuk Sistem Pengenalan Wajah (FR). sesuai BAST Nomor 000.4.2/6059/IDKN/2025 Tanggal 23-12-2025
215	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(10.946.875)				
216	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02209T/634082/2025	259990302027642	2025-12-29	522191	423.486.000	815619	(423.486.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/6818/IDKN untuk Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Telekomunikasi.	00046T/634082/2026	261330000002594	2026-01-15	825619	423.486.000	411211	(41.967.081)	373.888.541	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Telekomunikasi. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6237/IDKN/2025 Tanggal 31-12-2025
217	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(7.630.378)				
218	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02203T/634082/2025	259990302027737	2025-12-29	522191	231.840.000	815619	(231.840.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/4504/IDKN/2025 untuk Paket Pekerjaan Pengelolaan Koneksitas SAM Online.	00053T/634082/2026	261330000001899	2026-01-14	825619	231.840.000	411211	(22.975.135)	204.687.568	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengelolaan Koneksitas SAM Online. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6163/IDKN/2025 Tanggal 31-12-2025
219	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(4.177.297)				
220	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02199T/634082/2025	259990302027695	2025-12-29	522191	1.860.790.680	815619	(1.860.790.680)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KAWV2MXY2JVHHBKEBHVFCVZT untuk Paket Pekerjaan Survei Kepuasan dan Compliance Layanan Dukcapil dan Penerapan PNBP.	00048T/634082/2026	261330000002593	2026-01-15	825619	1.860.790.680	411211	(184.402.680)	1.642.860.240	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Survei Kepuasan dan Compliance Layanan Dukcapil dan Penerapan PNBP. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6167/IDKN/2025 Tanggal 31-12-2025
221	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(33.527.760)				
222	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02200T/634082/2025	259990302027650	2025-12-29	522191	26.999.999	815619	(26.999.999)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/04Q/IDKN/2025 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Pengelolaan dan Penerbitan Kartu SAM.	00050T/634082/2026	261330000001376	2026-01-12	825619	26.999.999	411211	(2.675.676)	23.837.837	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Pengelolaan dan Penerbitan Kartu SAM. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6231/IDKN/2025 Tanggal 31-12-2025
223	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(486.486)				
224	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02202T/634082/2025	259990302027657	2025-12-29	522191	447.552.000	815619	(447.552.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/409/IDKN/2025 untuk Paket Pekerjaan ATS Perangkat Key Management System (KMS) Blangko KTP el dan SAM.	00051T/634082/2026	261330000001888	2026-01-14	825619	447.552.000	411211	(44.352.000)	395.136.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan ATS Perangkat Key Management System (KMS) Blangko KTP el dan SAM. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6153/IDKN/2025 Tanggal 31-12-2025
225	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(8.064.000)				
226	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02201T/634082/2025	259990302027699	2025-12-29	522191	448.492.800	815619	(448.492.800)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/185/IDKN/2025 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Penerbitan Kartu SAM, Pemanfaatan Card Reader dan Key Management System (KMS).	00052T/634082/2026	261330000001898	2026-01-14	825619	448.492.800	411211	(44.445.232)	395.966.617	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pemeliharaan Penerbitan Kartu SAM, Pemanfaatan Card Reader dan Key Management System (KMS). sesuai BAST Nomor 000.4.2/6158/IDKN/2025 Tanggal 31-12-2025
227	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(8.080.951)				
228	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02196T/634082/2025	259990302027682	2025-12-29	522131	6.687.000	815619	(6.687.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/005/IDKN/2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli IT Support.	00060T/634082/2026	261330000001380	2026-01-12	825619	6.687.000	-	-	6.687.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli IT Support. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6196/IDKN/2025 Tanggal 31-12-2025
229	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02195T/634082/2025	259990302027686	2025-12-29	522131	6.687.000	815619	(6.687.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/007/IDKN/2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli IT Support.	00061T/634082/2026	261330000001381	2026-01-12	825619	6.687.000	-	-	6.687.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli IT Support. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6196/IDKN/2025 Tanggal 31-12-2025
230	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02194T/634082/2025	259990302027669	2025-12-29	522131	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/009/IDKN/2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staf.	00059T/634082/2026	261330000001379	2026-01-12	825619	7.500.000	-	-	7.500.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staf. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6192/IDKN/2025 Tanggal 31-12-2025
231	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02193T/634082/2025	259990302027670	2025-12-29	522131	6.900.000	815619	(6.900.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/017/IDKN/2025 untuk Paket Pekerjaan Tenaga Ahli Implementasi Aplikasi Koneksitas Data Warehouse Kependudukan.	00057T/634082/2026	261330000001377	2026-01-12	825619	6.900.000	-	-	6.900.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Tenaga Ahli Implementasi Aplikasi Koneksitas Data Warehouse Kependudukan. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6180/IDKN/2025 Tanggal 31-12-2025
232	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02192T/634082/2025	259990302027736	2025-12-29	522131	6.900.000	815619	(6.900.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/019/IDKN/2025 untuk Paket Pekerjaan Tenaga Ahli Implementasi Aplikasi Koneksitas Data Warehouse Kependudukan.	00058T/634082/2026	261330000001378	2026-01-12	825619	6.900.000	-	-	6.900.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Tenaga Ahli Implementasi Aplikasi Koneksitas Data Warehouse Kependudukan. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6184/IDKN/2025 Tanggal 31-12-2025
233	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02191T/634082/2025	259990302027643	2025-12-29	522131	18.400.000	815619	(18.400.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/002/IDKN/2025 untuk Paket Pekerjaan Tenaga Ahli Jaringan.	00056T/634082/2026	261330000001375	2026-01-12	825619	18.400.000	-	-	18.400.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Tenaga Ahli Jaringan. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6188/IDKN/2025 Tanggal 31-12-2025
234	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02186T/634082/2025	259990302027647	2025-12-29	522131	10.000.000	815619	(10.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/001/IDKN/2025 untuk Paket Pekerjaan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staf.	00055T/634082/2026	261330000001402	2026-01-12	825619	10.000.000	-	-	10.000.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staf. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6176/IDKN/2025 Tanggal 31-12-2025

235	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02190T/634082/2025	259990302026888	2025-12-29	522131	27.800.000	815619	(27.800.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/32974/PMU.2025 untuk Paket Pekerjaan Tenaga Ahli IKD Utilization Developer.	00041T/634082/2026	261330000001584	2026-01-13	825619	27.800.000	-	-	27.800.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Tenaga Ahli IKD Utilization Developer. sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45594/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
236	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02187T/634082/2025	259990302026906	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1235/PMU.2025 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025.	00018T/634082/2026	261330000002154	2026-01-14	825619	7.500.000	-	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45637/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
237	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02189T/634082/2025	259990302026902	2025-12-29	522131	30.000.000	815619	(30.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/35/PMU.2025 untuk Tenaga Ahli Individu utilization Cyber Security and Cryptography Tahun Anggaran 2025	00062T/634082/2026	261330000001585	2026-01-13	825619	30.000.000	-	-	30.000.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Individu utilization Cyber Security and Cryptography Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45588/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
238	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02188T/634082/2025	259990302026905	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/24366/PMU.2024 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025	00016T/634082/2026	261330000002151	2026-01-14	825619	7.500.000	-	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45655/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
239	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02185T/634082/2025	259990302026903	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/24364/PMU.2024 untuk Paket Pekerjaan Tenaga Pendukung Administrasi	00038T/634082/2026	261330000001523	2026-01-13	825619	7.500.000	411121	(206.250)	7.293.750	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Tenaga Pendukung Administrasi sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45570/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
240	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02124T/634082/2025	259990302026898	2025-12-29	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/154/IDKD/2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi :Tenaga IT Support	00029T/634082/2026	261330000001937	2026-01-14	825619	5.500.000	-	-	5.500.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi : Tenaga IT Support sesuai BAST Nomor 000.4.2/12806/IDKD/2025 Tanggal 31-12-2025
241	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02125T/634082/2025	259990302026900	2025-12-29	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/157/IDKD/2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi :Tenaga IT Support	00028T/634082/2026	261330000001935	2026-01-14	825619	5.500.000	-	-	5.500.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi :Tenaga IT Support sesuai BAST Nomor 000.4.2/12810/IDKD/2025 Tanggal 31-12-2025
242	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02126T/634082/2025	259990302026899	2025-12-29	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/160/IDKD/2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi : Tenaga IT Support	00027T/634082/2026	261330000001933	2026-01-14	825619	5.500.000	-	-	5.500.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi :Tenaga IT Support sesuai BAST Nomor 000.4.2/12814/IDKD/2025 Tanggal 31-12-2025
243	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02127T/634082/2025	259990302026897	2025-12-29	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/163/IDKD/2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi : Tenaga IT Support	00030T/634082/2026	261330000001938	2026-01-14	825619	5.500.000	-	-	5.500.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi : Tenaga IT Support sesuai BAST Nomor 000.4.2/12818/IDKD/2025 Tanggal 31-12-2025
244	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02128T/634082/2025	259990302026896	2025-12-29	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/166/IDKD/2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi : Tenaga IT Support	00031T/634082/2026	261330000001939	2026-01-14	825619	5.500.000	-	-	5.500.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi : Tenaga IT Support sesuai BAST Nomor 000.4.2/12802/IDKD/2025 Tanggal 31-12-2025
245	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		02129T/634082/2025	259990302026887	2025-12-29	522131	24.642.000	815619	(24.642.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/4263/IDKD/2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Analisis Keamanan Informasi	00032T/634082/2026	261330000001941	2026-01-14	825619	24.642.000	-	-	24.642.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Analisis Keamanan Informasi sesuai BAST Nomor 000.4.2/12822/IDKD/2025 Tanggal 31-12-2025
246	12	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	96.645.000	00485T/027177/2025	259990302014526	2025-12-19	522191	96.645.000	815619	(96.645.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/0005/PPK/PPSDM-2025 untuk Pengadaan Jasa Lainnya berupa penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar Tahun 2025	00003T/027177/2026	260540000000233	2026-01-06	825619	96.645.000	411211	(9.577.432)	87.067.568	-	Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya berupa penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar Tahun 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/1138/PPK/PPSDM-2025 Tanggal 31-12-2025
247	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.557.902.645	01462T/403231/2025	259990302030356	2025-12-31	533121	1.009.965.425	815619	(1.009.965.425)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K8WP5M9REHKW6V164W2772F7 untuk Renovasi Ruang Auditorium Gedung F pada BPSDM Kemendagri	00004T/403231/2026	261330000000211	2026-01-06	825619	1.009.965.425	411211	(100.086.664)	893.955.883	-	Pembayaran Renovasi Ruang Auditorium Gedung F pada BPSDM Kemendagri sesuai BAST Nomor 000.4.2/5480/BA-ST/XII/2025 Tanggal 31-12-2025
248	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																411128	(15.922.878)			
249	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		01461T/403231/2025	259990302029030	2025-12-29	521111	25.800.000	815619	(25.800.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 027/109/SP/I/2025 untuk Paket Pengadaan Jasa Langganan Internet (Backup Provider) pada BPSDM Kemendagri TA 2025	00006T/403231/2026	261330000000500	2026-01-07	825619	25.800.000	411211	(2.556.757)	22.778.378	-	Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Langganan Internet (Backup Provider) pada BPSDM Kemendagri TA 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/5477/BA-ST/XII/2025 Tanggal 31-12-2025
250	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																411124	(464.865)			
251	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		01456T/403231/2025	259990302027666	2025-12-29	521111	60.000.000	815619	(60.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 027/111/SP/I/2025 untuk Paket Pengadaan Jasa Langganan Internet pada BPSDM Kemendagri TA 2025	00003T/403231/2026	261330000000136	2026-01-05	825619	60.000.000	411211	(5.945.946)	52.972.973	-	Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Langganan Internet pada BPSDM Kemendagri TA 2025 sesuai BAST Nomor 000.4.2/5478/BA-ST/XII/2025 Tanggal 31-12-2025
252	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																411124	(1.081.081)			
253	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		01454T/403231/2025	259990302029028	2025-12-29	522191	462.137.220	815619	(462.137.220)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 027/185/SP/I/2025 untuk Sewa Jasa Petugas Kebersihan pada BPSDM Kemendagri TA 2025	00005T/403231/2026	261330000000216	2026-01-06	825619	462.137.220	411211	(45.797.382)	408.013.041	-	Pembayaran Sewa Jasa Petugas Kebersihan pada BPSDM Kemendagri TA 2025 sesuai BAST Nomor 000.4.2/5479/BA-ST/XII/2025 Tanggal 31-12-2025

254	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															411124	(8.326.797)				
255	12	506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	27.600.000	00401T/506137/2025	259990302014900	2025-12-22	523111	27.600.000	815619	(27.600.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/06/PPSDM-BKT untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Cleaning Service Asrama dan Aula Nusantara Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi Tahun 2025	00003T/506137/2026	260110000000122	2026-01-06	825619	27.600.000	411124	(552.000)	27.048.000	-	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Jasa Cleaning Service Bulan Desember Tahun 2025 sesuai dengan SPK No. 000.4.2/06/PPSDM-BKT tanggal 2 Januari 2025 dan BAST No.900.1.7.2/3474/PPSDM-BKT Tanggal 31 Desember 2025 NK.Rp.317.400.000,-
256	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	3.337.644.014	00387T/506138/2025	259990302020369	2025-12-24	533121	3.193.269.000	815619	(3.193.269.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K8ZBA264NY9064MPY2BQ0PJN untuk renovasi penambahan nilai gedung asrama	00012T/506138/2026	260230000001046	2026-01-14	825619	3.193.269.000	411211	(316.450.081)	2.826.474.588	-	Pembayaran renovasi penambahan nilai gedung asrama sesuai BAST Nomor 000.4/7158/e-CAT/BAST/Balai-KMG Tanggal 31-12-2025
257	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN															411128	(50.344.331)				
258	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		00384T/506138/2025	259990302020370	2025-12-24	522191	11.194.776	815619	(11.194.776)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/64/e-CAT/SP/Balai-KMG untuk pengadaan jasa pengemudi/driver	00011T/506138/2026	260230000001047	2026-01-14	825619	11.194.776	411211	(1.109.392)	9.883.676	-	Pembayaran pengadaan jasa pengemudi/driver sesuai BAST Nomor 000.4/7145/e-CAT/BAST/Balai-KMG Tanggal 31 Desember 2025
259	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN															411124	(201.708)				
260	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		00385T/506138/2025	259990302020371	2025-12-24	522191	83.960.820	815619	(83.960.820)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/61/e-CAT/SP/Balai-KMG untuk pengadaan jasa petugas kebersihan (cleaning service)	00004T/506138/2026	260230000000968	2026-01-13	825619	83.960.820	411211	(8.320.442)	74.127.570	-	Pembayaran pengadaan jasa petugas kebersihan (cleaning service) sesuai BAST Nomor 000.4/7144/e-CAT/BAST/Balai-KMG Tanggal 31 Desember 2025
261	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN															411124	(1.512.808)				
262	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		00386T/506138/2025	259990302020372	2025-12-24	533121	49.219.418	815619	(49.219.418)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/5943/SPK-PL/Balai-KMG untuk konsultan pengawas renovasi penambahan nilai gedung asrama	00013T/506138/2026	260230000001113	2026-01-14	825619	49.219.418	411211	(4.877.600)	43.454.982	-	Pembayaran konsultan pengawas renovasi penambahan nilai gedung asrama sesuai BAST Nomor 000.4/7155/BAST-PL/Balai-KMG Tanggal 31-12-2025
263	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN															411124	(886.836)				
Jumlah				**228.247.203.927**					**228.247.203.927**		**(228.247.203.927)**	-						**228.247.203.927**		**(7.955.896.913)**	**219.973.935.598**	-	

LAMPIRAN XXIII

RINCIAN MUTASI ASET LAIN-LAIN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XXIII

RINCIAN MUTASI ASET LAIN-LAIN PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	KODE TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	KEUDA	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo per 31 Desember 2025		**40.995.979.660**	**309.763.422**	**2.713.589.380**	**1.167.938.997**	**48.544.290.381**	**98.735.684.048**	**94.363.611.669**	**40.043.173.862**	**4.941.616.321**	**7.470.037.249**	**339.285.684.989**
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	401	29.295.085.107	897.300.000	589.600.000	393.207.500						629.250.000	31.804.442.607
Mutasi Tambah		**29.295.085.107**	**897.300.000**	**589.600.000**	**393.207.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**629.250.000**	**31.804.442.607**
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	911	(5.372.001.251)		(589.600.000)	(502.252.750)	-	-	-	(897.562.845)	(1.812.330.471)	(49.885.000)	(9.223.632.317)
Mutasi Kurang		**(5.372.001.251)**	**-**	**(589.600.000)**	**(502.252.750)**	**-**	**-**	**-**	**(897.562.845)**	**(1.812.330.471)**	**(49.885.000)**	**(9.223.632.317)**
Saldo per 30 Juni 2026		**64.919.063.516**	**1.207.063.422**	**2.713.589.380**	**1.058.893.747**	**48.544.290.381**	**98.735.684.048**	**94.363.611.669**	**39.145.611.017**	**3.129.285.850**	**8.049.402.249**	**361.866.495.279**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026		**(62.049.228.695)**	**(1.207.063.422)**	**(2.713.589.380)**	**(1.056.785.168)**	**(47.964.701.380)**	**(98.650.615.917)**	**(94.363.611.669)**	**(38.973.339.590)**	**(4.620.000)**	**(7.941.417.350)**	**(354.924.972.571)**
Nilai Buku per 30 Juni 2026		**2.869.834.821**	**-**	**-**	**2.108.579**	**579.589.001**	**85.068.131**	**-**	**172.271.427**	**3.124.665.850**	**107.984.899**	**6.941.522.708**

LAMPIRAN XXIV

REKAPITULASI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

LAMPIRAN XXIV

Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga

KODE ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	30 Juni 2026						31 Desember 2025			
			BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	BELANJA MODAL YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212113)	PENGELUARAN TRANSITO YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212144)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	4.159.502.518	117.083.341.688	4.559.446.847	-	765.097.350	126.567.388.403	5.919.119.318	-	4.822.933.190	10.742.052.508
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	6.538.718.034	1.014.570.459	-	-	191.124.200	7.744.412.693	6.146.866.051	-	1.987.744.146	8.134.610.197
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	571.164.608	533.872.000	-	-	90.798.175	1.195.834.783	114.619.045	56.440.706	434.740.676	605.800.427
01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	375.468.099	58.282.000	-	-	326.700.898	760.450.997	358.721.757	-	516.227.214	874.948.971
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	866.086.444	70.661.000	-	-	-	936.747.444	528.811.199	65.304.164	177.523.873	771.639.236
01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	341.399.701	42.462.000	21.037.000	-	-	404.898.701	485.281.771	45.596.616	186.281.000	717.159.387
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	294.384.146	1.014.687.276	136.754.847	-	-	1.445.826.269	409.435.151	53.643.407	126.850.000	589.928.558
01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	451.467.384	157.319.159	-	-	-	608.786.543	597.330.773	8.264.090	174.374.797	779.969.660
01	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	356.363.367	65.370.000	-	-	-	421.733.367	71.436.030	12.420.300	-	83.856.330
02	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	1.428.963.131	-	-	-	-	1.428.963.131	1.893.034.684	-	-	1.893.034.684
03	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1.409.165.165	460.151.150	-	285.282.150	(285.282.150)	1.869.316.315	1.503.900.890	-	-	1.503.900.890
04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.600.364.207	8.375.419.485	-	-	159.602.138	10.135.385.830	1.438.553.599	-	12.322.700	1.450.876.299
04	484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000	10.000
04	484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	-	-	-	-	60	60	-	-	60	60
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	1.806.398.451	6.358.492.173	-	-	227.162.361	8.392.052.985	2.393.855.518	255.910.062	175.502.028	2.825.267.608
05	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	305.983.439	54.274.000	-	-	-	360.257.439	328.045.789	-	-	328.045.789
05	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	251.966.727	77.508.000	-	-	-	329.474.727	310.483.102	2.997.000	-	313.480.102
05	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	268.471.611	53.377.860	-	-	-	321.849.471	291.128.944	21.570.402	-	312.699.346
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.958.780.910	1.327.806.992	-	-	103.526.063	3.390.113.965	1.560.732.950	-	24.509.677.072	26.070.410.022
07	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.412.402.560	150.341.339	-	-	144.158.300	1.706.902.199	1.861.409.493	-	-	1.861.409.493
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.571.281.305	6.588.833.989	-	-	1.954.930.625	10.115.045.919	-	-	154.527.714.414	154.527.714.414
09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1.476.410.242	662.136.757	-	394.266.343	(138.441.471)	2.394.371.871	1.790.040.312	-	-	1.790.040.312
11	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	860.203.390	454.645.758	-	-	38.250.000	1.353.099.148	-	-	-	-
12	027114	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	539.219.526	521.357.800	-	448.007.800	(425.551.800)	1.083.033.326	680.014.268	-	-	680.014.268
12	027177	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	363.185.435	1.065.769.432	-	536.565.000	(536.565.000)	1.428.954.867	455.411.229	-	107.987.378	563.398.607
12	403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	348.756.049	221.250.000	-	-	11.390.000	581.396.049	481.049.541	-	-	481.049.541
12	506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	346.037.166	197.569.000	-	-	-	543.606.166	-	-	27.600.000	27.600.000
12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.317.477.661	689.503.230	-	-	28.560.000	2.035.540.891	1.082.414.077	-	1.557.902.645	2.640.316.722
12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	168.898.119	71.400.000	-	-	23.000	240.321.119	129.091.479	-	3.337.644.014	3.466.735.493
JUMLAH			**31.388.519.395**	**147.370.402.547**	**4.717.238.694**	**1.664.121.293**	**2.655.492.749**	**187.795.774.678**	**30.830.786.970**	**522.146.747**	**192.683.035.207**	**224.035.968.924**

LAMPIRAN XXV

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER SATKER

LAMPIRAN XXV

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER SATKER

ESELON I	SATKER	URAIAN	SALDO PER 30 JUNI 2026	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
Setjen	Kantor Pusat (403200)	Penempatan 1 (satu) unit mesin ATM Bank Mandiri	-	19.881.000
		Penempatan Kantor Kas Bank BRI	-	242.545.000
		Penempatan 2 (dua) unit mesin ATM Bank BRI		
		BNI Gedung B Lantai I (Bank)	-	269.517.967
		Penempatan 1 (satu) unit mesin ATM Bank BSI	-	18.458.917
		Koperasi P (Kantin Gedung C)	-	102.732.200
		Koperasi Prajamukti	-	131.013.900
		DPP PP PAUD	-	49.706.400
		PT. DTN	-	242.314.800
	IPDN Jatinangor (448302)	PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. (Kampus Jakarta)	-	36.257.222
		PT. BNI (PERSERO) Tbk. (Kampus Jakarta)	-	36.257.222
		Koprasi BBP (Kampus Jakarta)	-	28.194.444
		Café Praja (Kampus Jakarta)	-	30.265.889
		Bank BJB Jatinangor	-	56.414.400
		Bank BJB	-	39.550.000
		PT. STU	-	12.677.083
		PT. STU	-	13.893.722
		Dharma Wanita Persatuan IPDN	-	18.000.000
		CV. KMR	-	78.197.167
		Koperasi KDKS	-	4.103.667
		Koprasi BBP	-	4.505.667
		Koprasi BBP (Fitness Center)	-	9.313.333
		Koprasi BBP (Kantin samping menza)	-	3.949.889
		AYI cs	-	75.188
		Rizalul Fauzi	-	3.958.333
		Idin Bin Sobandi	-	73.458
		Amuh	-	246.125
		Bapak Uu	-	297.625
		Iim Abdul Rohim	-	246.125
		Jajang Dani	-	157.250
		PT. NDI	-	23.308.560
		CV. MITRA	-	130.241.295
		CV. BBS	-	47.270.583
		KAMPUS PASCASARJANA	-	4.801.340.244
Total Setjen			**-**	**6.454.964.676**
Itjen	Itjen (027203)	PT Bank Negara Indonesia	-	23.909.667
Total Itjen			**-**	**23.909.667**
Ditjen Bina Bangda	Ditjen Bina Bangda (039729)	PT Bank Negara Indonesia	-	38.958.667
		PT.Bank Mandiri	-	10.000.000
		PT. Bank BRI	-	11.250.000
		Sewa Gedung Serbaguna	-	198.906.000
		Sewa Koperasi PM	-	52.848.667
Total Ditjen Bina Bangda			**-**	**311.963.334**
Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil (634082)	Voucher Jasa Layanan Kependudukan	-	327.829.555.000
Total Ditjen Dukcapil			**-**	**327.829.555.000**
BPSDM	Kantor Pusat (403231)	PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.	-	40.036.806
		Koperasi PP-I Kemendagri	-	45.529.000
		PT. Bank BRI (PERSERO) Tbk.	-	261.743.000
		Said Fahrizal (Fotocopy)	-	15.002.500
		PT. MSD	-	461.711.000
	Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III (027114)	BPD DIY	-	26.819.683
		KPN MELATI	-	6.065.078
	Balai PK Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan (506138)	PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.	-	8.277.333
Total BPSDM			**-**	**865.184.400**
Total Keseluruhan			**-**	**335.485.577.077**

LAMPIRAN XXVI

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

LAMPIRAN XXVI

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
1	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	26-Aug-25	J01266	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	400.000	(400.000)
2	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	26-Aug-25	J01267	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1.936.000	(1.936.000)
3	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	3-Jun-26	B21261	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.817.454	2.817.454
4	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	29-Jun-26	B21262	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	796.174	796.174
5	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	29-Jun-26	B21263	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.062.614	1.062.614
6	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	29-Jun-26	B21264	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	78.622	78.622
7	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	29-Jun-26	B21265	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	603.791	603.791
8	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	29-Jun-26	B21266	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.566.816	1.566.816
9	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	29-Jun-26	B21267	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	724.838	724.838
10	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	21-Apr-26	B21261	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	241.103	241.103
11	1003	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	30-Jun-26	B21261	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	655.248	655.248
12	1003	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	30-Jun-26	B21262	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	280.966	280.966
13	1003	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	30-Jun-26	B21263	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	121.182	121.182
14	1003	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	30-Jun-26	B21264	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	176.012	176.012
15	1003	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	30-Jun-26	B21265	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.967.568	1.967.568
16	1003	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	30-Jun-26	B21266	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	230.630	230.630
17	1003	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	30-Jun-26	B21267	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	254.414	254.414
18	1003	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	30-Jun-26	B21268	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.209.209	2.209.209
19	1005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	2-Jul-25	J01262	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	6.490.000	(6.490.000)
20	1005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	2-Jul-25	J01262	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.543.000	4.543.000
21	1005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	2-Jul-25	J012622	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	8.000.000	(8.000.000)
22	1005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	2-Jul-25	J012622	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3.200.000	3.200.000
23	1005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	2-Jul-25	J012645	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3.150.000	(3.150.000)
24	1005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	2-Jul-25	J012645	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.953.125	2.953.125
25	1005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	2-Jul-25	J012646	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	6.750.000	(6.750.000)
26	1005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	2-Jul-25	J012646	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.725.000	4.725.000
27	1005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	2-Jul-25	J012647	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2.000.000	(2.000.000)
28	1005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	2-Jul-25	J012647	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	800.003	800.003
29	1005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	2-Jul-25	J012660	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	5.880.000	(5.880.000)
30	1005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	2-Jul-25	J012661	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	5.820.000	(5.820.000)
31	1005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	2-Jul-25	J012662	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	21.692.000	(21.692.000)
32	1005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	2-Jul-25	J012663	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	19.916.000	(19.916.000)
33	1012	403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	KD	13-Aug-25	J01261	911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	49.885.000	(49.885.000)
TOTAL														**(101.911.231)**

LAMPIRAN XXVII

RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK

LAMPIRAN XXVII

RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
1	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	132111	Peralatan dan Mesin	1.636.667.257	01002	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	1.636.667.257	-
2	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	132111	Peralatan dan Mesin	1.013.013.755	01003	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1.013.013.755	-
3	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	132111	Peralatan dan Mesin	1.263.623.253	01006	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.263.623.253	-
4	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	132111	Peralatan dan Mesin	1.226.183.686	01007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.226.183.686	-
5	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	162151	Software	1.324.962.600	01007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.324.962.600	-
6	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(496.860.975)	01007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(496.860.975)	-
7	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	132111	Peralatan dan Mesin	1.231.618.755	01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1.231.618.755	-
8	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	132111	Peralatan dan Mesin	1.450.223.756	01011	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	1.450.223.756	-
9	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	132111	Peralatan dan Mesin	1.683.204.000	01012	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.683.204.000	-
TOTAL						**10.332.636.087**	**TOTAL**			**10.332.636.087**	**-**

LAMPIRAN XXVIII

RINCIAN DESA YANG BELUM LENGKAP BUKTI PERTANGGUNGJAWABANNYA PER 30 JUNI 2026

LAMPIRAN XXVIII

RINCIAN DESA YANG BELUM LENGKAP BUKTI PERTANGGUNGJAWABANNYA PER 30 JUNI 2026

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BANTUAN	KETERANGAN	LPJ	BAST	NOTA	BUKTI PAJAK	FOTO	KET DOKUMEN	NOMOR SK
1	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pagar Jaya	50.000.000	Berkas LPJ sudah dikirim dan ada resi pengirimannya namun berkas tidak sampai dikarenakan salah nama sehingga diminta untuk dikirimkan ulang.	v	v	v	-	-	Kurang bukti pajak dan foto	SK PPK No. 140-257-Tahun 2019
2	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pulau Legundi	50.000.000	Berkas LPJ sudah dikirim dan ada resi pengirimannya namun berkas tidak sampai dikarenakan salah nama sehingga diminta untuk dikirimkan ulang.	v	v	v	v	-	Kurang bukti pajak	SK PPK No. 140-255-Tahun 2019
3	Papua	Supiori	Supiori Utara	Mbrurwandi	50.000.000	Berkas sudah diterima berupa soft file, info dr bnpp bukti pajaknya tidak ada.	v	v	v	-	v	Kurang bukti pajak	SK PPK No. 410-788-Tahun 2019
4	Papua	Merauke	Naukkenjerai	Kuler	50.000.000	Berkas berupa softfile.	-	-	v	-	v	Kurang LPJ, BAST dan bukti pajak	SK PPK No. 410-1001-Tahun 2019
5	Papua	Merauke	Naukkenjerai	Tomer	50.000.000	Berkas berupa softfile.	v	v	v	-	-	Kurang bukti pajak dan foto	SK PPK No. 410-1001-Tahun 2019

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
DITJEN BINA ADWIL											
1	01004	080054	TP	DINAS PRASJAL DAN TARUKIM PROPINSI SUMATERA BARAT	1.809.502.117	-	-	-	-	1.809.502.117	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
2	01004	130017	TP	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (TP)	1.575.601.236	1.629.744.712	(1.629.744.712)	-	-	1.575.601.236	INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL
											RAK KAYU
											TELEVISI
											PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA LAINNYA
3	01004	170420	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE	-	795.460.000	(795.460.000)	-	-	-	SEPEDA MOTOR
											PERAHU PENUMPANG
											UNIT TRANCIEVER SSB PORTABLE
											P.C UNIT
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
4	01004	170520	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN TALAUD	-	18.000.000	(18.000.000)	-	-	-	SEPEDA MOTOR
5	01004	240149	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KUPANG	2.837.269.543	248.875.000	(248.875.000)	-	-	2.837.269.543	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
											GEDUNG POS JAGA PERMANEN
											RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A SEMI PERMANEN
											RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE B PERMANEN
											BANGUNAN DERMAGA
											SEPEDA MOTOR
											UNIT TRANCEIVER SsB PORTABLE
											P.C UNIT
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
6	01004	240260	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. B E L U	291.825.605	174.900.000	(174.900.000)	-	-	291.825.605	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
											MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)
7	01004	240342	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA	762.374.061	175.000.000	(175.000.000)	-	-	762.374.061	GEDUNG POS JAGA PERMANEN
											RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE B PERMANEN
											TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI NEGARA
											MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)
8	01004	240351	TP	BAPPEDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	367.994.675	-	-	-	-	367.994.675	GEDUNG POS JAGA PERMANEN
9	01004	250026	TP	BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROVINSI PAPUA (TP)	567.007.449	1.074.129.737	(1.074.129.737)	-	-	567.007.449	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) LAINNYA
											TELEVISI
											HANDY TALKY (HT)
											ALAT KOMUNIKASI RASIO SsB LAINNYA
											STELATH DIGITAL REPEATER
											RADIO LINK
											PORTABLE REPORTER LINK
											PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA LAINNYA
											SWITCHER/MENARA ANTENA LAINNYA
											PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF STATIONARY
											UNINTERUPTED POWER SUPPLY (UPS)
10	01004	251514	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	197.937.405	-	-	-	-	197.937.405	GEDUNG POS JAGA PERMANEN
											BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA LAINNYA
11	01004	251907	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	3.917.569.440	-	-	-	-	3.917.569.440	BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
						-	-	-	-	-	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
12	01004	255161	TP	BADAN PENGELOLA PERBATASAN KOTA JAYAPURA	797.747.050	-	-	-	-	797.747.050	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
DITJEN BINA PEMDES											
13	01005	239250	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH	144.164.028	-	-	-	-	144.164.028	P.C UNIT
14	01005	029367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI	-	9.775.000	(9.775.000)	-	-	-	P.C UNIT
15	01005	029376	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BEKASI	499.000	9.800.000	(9.800.000)	-	-	499.000	P.C UNIT PENJEPIT KERTAS ORDNER DAN MAP KERTAS HVS
16	01005	029436	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TASIKMALAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
17	01005	029472	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA	-	10.120.000	(10.120.000)	-	-	-	P.C UNIT
19	01005	039438	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
20	01005	039443	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KENDAL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
21	01005	039452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DEMAK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
22	01005	039465	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEKALONGAN	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
23	01005	039470	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BATANG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
24	01005	039480	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEGAL	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
25	01005	039490	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI	161.028.000	-	-	-	-	161.028.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
26	01005	039490	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI	-	10.125.000	(10.125.000)	-	-	-	P.C UNIT
27	01005	039500	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUDUS	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
28	01005	039504	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEMALANG	-	10.145.000	(10.145.000)	-	-	-	P.C UNIT
29	01005	039514	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG	164.716.820	-	-	-	-	164.716.820	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
30	01005	039514	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG	-	10.147.500	(10.147.500)	-	-	-	P.C UNIT
31	01005	039519	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BLORA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
32	01005	039530	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas	37.850	9.900.000	(9.900.000)	-	-	37.850	P.C UNIT KERTAS HVS
33	01005	039538	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP	79.444.800	-	-	-	-	79.444.800	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
34	01005	039538	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
35	01005	039546	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA	82.910.360	-	-	-	-	82.910.360	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
36	01005	039546	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
37	01005	039554	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANJARNEGARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
38	01005	039562	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAGELANG	-	9.320.000	(9.320.000)	-	-	-	P.C UNIT
39	01005	039568	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEMANGGUNG	-	9.665.000	(9.665.000)	-	-	-	P.C UNIT
40	01005	039579	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. WONOSOBO	-	9.923.500	(9.923.500)	-	-	-	P.C UNIT
41	01005	039599	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
42	01005	039605	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN	74.629.350	-	-	-	-	74.629.350	PASAR DESA
43	01005	039605	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
44	01005	039612	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali	-	9.700.000	(9.700.000)	-	-	-	P.C UNIT
45	01005	039621	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SRAGEN	302.500	-	-	-	-	302.500	BUKU TULIS
											ORDNER DAN MAP
											ALAT TULIS KANTOR LAINNYA
											KERTAS HVS
46	01005	039639	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. WONOGIRI	134.000	10.065.000	(10.065.000)	-	-	134.000	P.C UNIT
											KERTAS HVS
47	01005	049147	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL	417.809.252	-	-	-	-	417.809.252	KANTOR DESA/PASAR DESA
48	01005	049147	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
49	01005	049173	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN & KB KAB. KULONPROGO	-	10.140.000	(10.140.000)	-	-	-	P.C UNIT
50	01005	059456	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GRESIK	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
51	01005	059464	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO	82.641.440	-	-	-	-	82.641.440	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
52	01005	059464	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO	-	10.162.900	(10.162.900)	-	-	-	P.C UNIT
53	01005	059478	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. JOMBANG	-	10.105.000	(10.105.000)	-	-	-	P.C UNIT
54	01005	059491	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. JOMBANG	160.704.000	-	-	-	-	160.704.000	KANTOR DESA
55	01005	059498	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. SUMENEP	-	9.750.000	(9.750.000)	-	-	-	P.C UNIT
56	01005	059527	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA KAB. BANYUWANGI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
57	01005	059560	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB.LUMAJANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
58	01005	059586	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGANJUK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
59	01005	059613	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MADIUN	165.438.090	-	-	-	-	165.438.090	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
											GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
60	01005	059620	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI	81.331.700	-	-	-	-	81.331.700	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
61	01005	059620	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI	-	9.915.000	(9.915.000)	-	-	-	P.C UNIT
62	01005	059623	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN	829.360.823	-	-	-	-	829.360.823	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
											BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
											BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
											GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
											GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
63	01005	059623	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
64	01005	059630	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. PONOROGO	172.474.830	-	-	-	-	172.474.830	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
65	01005	059652	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. TUBAN	-	9.780.000	(9.780.000)	-	-	-	P.C UNIT
66	01005	059661	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LAMONGAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
68	01005	069280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
69	01005	069284	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. PIDIE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
70	01005	069290	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH UTARA	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
71	01005	069303	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SELATAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
72	01005	069309	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
73	01005	069321	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ACEH TENGGARA	-	10.100.000	(10.100.000)	-	-	-	P.C UNIT
74	01005	069328	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIMEULEU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
75	01005	069334	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SINGKIL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
76	01005	069345	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KAB. ACEH BARAT DAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
77	01005	069352	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GAYO LUES	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
78	01005	069356	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA GAMPONG KAB. ACEH JAYA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
79	01005	069358	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. NAGAN RAYA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
80	01005	069362	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. ACEH TAMIANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
81	01005	069367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN PEREMPUAN KAB. BENER MERIAH	75.000	10.000.000	(10.000.000)	-	-	75.000	P.C UNIT KERTAS HVS
82	01005	069371	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PIDIE JAYA	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
83	01005	079353	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KARO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
84	01005	079359	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT	82.165.850	-	-	-	-	82.165.850	PASAR DESA
85	01005	079359	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
86	01005	079369	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH	83.000.000	-	-	-	-	83.000.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
87	01005	079369	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH	-	10.160.000	(10.160.000)	-	-	-	P.C UNIT
88	01005	079376	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH NAGORI KAB. SIMALUNGUN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
89	01005	079383	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN KAB. LABUHAN BATU	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
90	01005	079390	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DAIRI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
91	01005	079393	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. TAPANULI UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
92	01005	079395	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
93	01005	079413	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN KAB. NIAS	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
94	01005	079425	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA (BPMPOD) KAB. SAMOSIR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
95	01005	079438	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL	165.751.000	-	-	-	-	165.751.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
96	01005	079438	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
97	01005	079444	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PAK-PAK BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
98	01005	079447	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
99	01005	079450	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOBA SAMOSIR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
100	01005	079457	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERDANG BEDAGAI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
101	01005	079459	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATUBARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
102	01005	079463	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PADANG LAWAS	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
103	01005	079471	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU SELATAN	-	9.436.000	(9.436.000)	-	-	-	P.C UNIT
104	01005	079473	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA	494.680.000	-	-	-	-	494.680.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
											GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
						-	-	-	-	-	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
105	01005	079473	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
106	01005	089289	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LIMA PULUH KOTA	-	9.949.995	(9.949.995)	-	-	-	P.C UNIT
107	01005	089298	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK	-	9.965.000	(9.965.000)	-	-	-	P.C UNIT
108	01005	089305	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN	162.530.600	-	-	-	-	162.530.600	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
109	01005	089305	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
110	01005	089313	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN NAGARI, KELUARGA BERENCANA & PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN KAB. PESISIR SELATAN	-	10.155.000	(10.155.000)	-	-	-	P.C UNIT
111	01005	089319	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANAH DATAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
112	01005	089338	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA	82.116.050	-	-	-	-	82.116.050	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
113	01005	089338	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
114	01005	089345	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK SELATAN	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
115	01005	089356	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
116	01005	099452	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR	161.747.080	-	-	-	-	161.747.080	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
117	01005	099452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR	-	10.157.960	(10.157.960)	-	-	-	P.C UNIT
118	01005	099457	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKALIS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
119	01005	099476	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR	157.805.820	-	-	-	-	157.805.820	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
120	01005	099476	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR	-	9.845.000	(9.845.000)	-	-	-	P.C UNIT
121	01005	099484	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN	164.489.400	-	-	-	-	164.489.400	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
122	01005	099484	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
123	01005	099498	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ROKAN HULU	-	10.163.000	(10.163.000)	-	-	-	P.C UNIT
124	01005	099504	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK	159.489.000	-	-	-	-	159.489.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
125	01005	099504	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
126	01005	099510	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI	78.282.280	-	-	-	-	78.282.280	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
127	01005	099510	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
128	01005	109222	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI	152.031.100	-	-	-	-	152.031.100	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN BANGUNAN PASAR IKAN HIGIENIS/PIH
129	01005	109222	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
130	01005	109234	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
131	01005	109238	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO BUNGO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
132	01005	109247	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SAROLANGUN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
133	01005	109254	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KERINCI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
134	01005	109269	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
135	01005	109272	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO	173.071.600	-	-	-	-	173.071.600	BANGUNGAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
136	01005	109272	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
137	01005	109280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO JAMBI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
138	01005	119245	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. OGAN KOMERING ULU	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
139	01005	119252	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM	72.658.200	-	-	-	-	72.658.200	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
140	01005	119252	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
141	01005	119265	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI RAWAS	170.000	10.165.000	(10.165.000)	-	-	170.000	P.C UNIT
142	01005	119274	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMPEMERINTAHAN DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
143	01005	119288	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. OKU TIMUR	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
144	01005	119294	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN	171.565.320	-	-	-	-	171.565.320	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
145	01005	119294	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
146	01005	119299	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. EMPAT LAWANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
147	01005	129235	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG	71.678.000	-	-	-	-	71.678.000	ALAT TULIS ORDNER DAN MAP PENGGARIS ISI STAPLES BARANG CETAKAN KERTAS HVS BERBAGAI KERTAS CD/DVD BAHAN KOMPUTER LAINNYA
148	01005	129247	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN	245.032.600	-	-	-	-	245.032.600	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
149	01005	129247	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
150	01005	129266	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON KAB. LAMPUNG BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
151	01005	129270	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG	82.087.000	-	-	-	-	82.087.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
152	01005	129270	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
153	01005	129288	UB	KANTOR PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
154	01005	129292	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAY KANAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
155	01005	129296	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN	233.945.280	-	-	-	-	233.945.280	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPRASI/PASAR LAINNYA
156	01005	129296	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN	-	9.965.000	(9.965.000)	-	-	-	P.C UNIT
157	01005	139250	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALBAR	-	59.975.000	(59.975.000)	-	-	-	UPS (UNIT POWER SUPPLY)

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
				PROVINSI KALBAR							P.C UNIT
											LAPTOP
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
											SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
158	01005	139267	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	82.917.000	-	-	-	-	82.917.000	BANGUNAN INDUSTRI LAINNYA
159	01005	139267	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	754.500	10.165.000	(10.165.000)	-	-	754.500	P.C UNIT
											KERTAS HVS
160	01005	139274	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG	159.870.510	-	-	-	-	159.870.510	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
161	01005	139274	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
162	01005	139285	TP	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK	75.558.620	-	-	-	-	75.558.620	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
163	01005	139285	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
164	01005	139295	UB	BADAN PEMBERDAYAAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAPUAS HULU	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
165	01005	139313	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG	163.443.600	-	-	-	-	163.443.600	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
166	01005	139313	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
167	01005	139325	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MELAWI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
168	01005	139328	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT KESATUAN BANGSA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SEKADAU	-	9.965.000	(9.965.000)	-	-	-	P.C UNIT
169	01005	139330	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
170	01005	149235	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.BARITO UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
171	01005	149242	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.BARITO SELATAN	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
172	01005	149257	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KOTAWARINGIN BARAT	80.750.451	-	-	-	-	80.750.451	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
173	01005	149257	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KOTAWARINGIN BARAT	-	9.880.000	(9.880.000)	-	-	-	P.C UNIT
174	01005	149267	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.SERUYAN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
175	01005	149270	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SUKAMARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
176	01005	149278	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GUNUNG MAS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
177	01005	149285	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PULANG PISAU	-	9.750.000	(9.750.000)	-	-	-	P.C UNIT
178	01005	159202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANJAR	225.500	9.790.000	(9.790.000)	-	-	225.500	P.C UNIT
											KERTAS HVS
179	01005	159214	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAPIN	1.470.850	10.165.000	(10.165.000)	-	-	1.470.850	P.C UNIT
											KERTAS HVS
180	01005	159219	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
181	01005	159224	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI TENGAH	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
182	01005	159240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOTA BARU	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
183	01005	159245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI UTARA	-	9.700.000	(9.700.000)	-	-	-	P.C UNIT
184	01005	159250	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANAH BUMBU	82.709.500	-	-	-	-	82.709.500	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
185	01005	159255	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARARAKAT, PEREMPUAN, DAN KB KAB. BALANGAN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
186	01005	169192	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PASER	-	9.999.900	(9.999.900)	-	-	-	P.C UNIT
187	01005	169196	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BULUNGAN	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
188	01005	169202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. BERAU	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
189	01005	169206	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN	140.722.920	-	-	-	-	140.722.920	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
190	01005	169206	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
191	01005	169211	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. KUTAI BARAT	-	9.125.000	(9.125.000)	-	-	-	P.C UNIT
192	01005	169218	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PENAJAM PASER UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
193	01005	169223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KUTAI KARTANEGARA	87.547.620	-	-	-	-	87.547.620	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPRASI/PASAR LAINNYA SALURAN DRAINASE
194	01005	169226	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANA TIDUNG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
195	01005	179275	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
196	01005	179280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA TENGGARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
197	01005	179283	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
198	01005	179296	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	468.985.950	-	-	-	-	468.985.950	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
199	01005	179296	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
200	01005	189223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
201	01005	189223	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
202	01005	189229	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA	242.270.570	-	-	-	-	242.270.570	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
203	01005	189229	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
204	01005	189234	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOLI-TOLI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
205	01005	189240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
206	01005	189243	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BUOL	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
207	01005	189249	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI	162.000.000	-	-	-	-	162.000.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
208	01005	189249	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
209	01005	189254	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI KEPULAUAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
210	01005	189260	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG	995.592.470	-	-	-	-	995.592.470	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
211	01005	189260	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
212	01005	189271	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIGI	82.680.450	-	-	-	-	82.680.450	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA
213	01005	199398	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PINRANG	178.750	9.750.000	(9.750.000)	-	-	178.750	P.C UNIT
214	01005	199407	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GOWA	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
215	01005	199415	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO	162.893.000	-	-	-	-	162.893.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
216	01005	199415	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
217	01005	199421	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE	83.000.000	-	-	-	-	83.000.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
218	01005	199421	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
219	01005	199430	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBANG KAB. TANA TORAJA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
220	01005	199442	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS	149.400.000	-	-	-	-	149.400.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
221	01005	199442	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
222	01005	199452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LUWU	55.000	10.165.000	(10.165.000)	-	-	55.000	P.C UNIT
223	01005	199488	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTAENG	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
224	01005	199499	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. JENEPONTO	265.000	10.165.000	(10.165.000)	-	-	265.000	P.C UNIT
225	01005	199508	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
226	01005	199515	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAKALAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
227	01005	199522	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BARRU	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
228	01005	199530	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG	82.253.000	-	-	-	-	82.253.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
229	01005	199530	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
230	01005	199542	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
231	01005	199560	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ENREKANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
232	01005	199570	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara	840.500	10.115.000	(10.115.000)	-	-	840.500	P.C UNIT KERTAS HVS
233	01005	199574	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN DESA KAB. LUWU TIMUR	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
234	01005	199578	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TORAJA UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
235	01005	209209	UB	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BUTON	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
236	01005	209212	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUNA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
237	01005	209219	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA	157.950.000	-	-	-	-	157.950.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
238	01005	209219	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
239	01005	209227	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE SELATAN	82.975.930	-	-	-	-	82.975.930	BANGUNAN PASAR/RAISER IKAN HIAS
240	01005	209227	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE SELATAN	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
241	01005	209234	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAKATOBI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
242	01005	209239	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
243	01005	209244	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE	327.489.230	-	-	-	-	327.489.230	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA
244	01005	209244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
245	01005	209245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
246	01005	209250	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. BUTON UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
247	01005	219188	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
248	01005	219194	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
249	01005	219208	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KEPULAUAN ARU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
250	01005	219214	UB	BAGIAN KESRA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA KAB. SERAM BAGIAN BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
251	01005	219217	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	173.238.430	-	-	-	-	173.238.430	BANGUN GEDUNG KANTOR PERMANEN
252	01005	219217	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
253	01005	219222	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BURU SELATAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
254	01005	229177	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BULELENG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
255	01005	229189	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KLUNGKUNG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
256	01005	229193	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. GIANYAR	-	7.160.000	(7.160.000)	-	-	-	P.C UNIT
257	01005	229223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN	418.821.685	-	-	-	-	418.821.685	PAS
258	01005	229223	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN	-	9.800.000	(9.800.000)	-	-	-	P.C UNIT
259	01005	239244	UB	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
260	01005	239250	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
261	01005	239281	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. DOMPU	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
262	01005	239290	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
263	01005	239291	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK UTARA	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
264	01005	249309	TP	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG	86.670.000	-	-	-	-	86.670.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
265	01005	249309	UB	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
266	01005	249318	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BELU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
267	01005	249325	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TIMOR TENGAH UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
268	01005	249335	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ALOR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
269	01005	249344	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIKKA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
270	01005	249350	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. FLORES TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
271	01005	249357	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ENDE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
272	01005	249361	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. NGADA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
273	01005	249367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI	-	8.665.000	(8.665.000)	-	-	-	P.C UNIT
274	01005	249377	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SUMBA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
275	01005	249384	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
276	01005	249390	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LEMBATA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
277	01005	249395	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. ROTE NDAO	165.422.652	-	-	-	-	165.422.652	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
278	01005	249399	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
279	01005	249401	UB	BPMD,BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,PERLINDUNGAN ANAK,KB & KESBANG KAB. NAGEKEO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
280	01005	249405	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA TENGAH	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
281	01005	249409	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT DAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
282	01005	249414	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
283	01005	259277	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. YAPEN WAROPEN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
284	01005	259291	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MERAUKE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
285	01005	259305	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PANIAI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
286	01005	259312	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PUNCAK JAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
287	01005	259335	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. BOVEN DIGOEL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
288	01005	259339	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. SARMI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
289	01005	259345	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. KEEROM	82.834.000	-	-	-	-	82.834.000	PASAR DESA
290	01005	259354	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MAMBERAMO RAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
291	01005	259359	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAROPEN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
292	01005	259363	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. YAHUKIMO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
293	01005	259369	UB	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMBERAMO TENGAH	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
294	01005	269204	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASAYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
295	01005	269204	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASAYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
296	01005	269214	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN	78.112.130	-	-	-	-	78.112.130	P.C UNIT
297	01005	269214	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN	-	9.970.000	(9.970.000)	-	-	-	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
298	01005	269224	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG	169.009.580	-	-	-	-	169.009.580	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
299	01005	269224	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
300	01005	269227	UB	BADAN PMD, PEREMPUAN DAN KELUARGA BENCANA KAB. SELUMA	-	10.140.000	(10.140.000)	-	-	-	P.C UNIT

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
301	01005	269230	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
302	01005	269235	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. MUKO-MUKO	-	10.010.000	(10.010.000)	-	-	-	P.C UNIT
303	01005	269240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LEBONG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
304	01005	269245	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHIANG	165.677.960	-	-	-	-	165.677.960	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
305	01005	269245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHIANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
306	01005	289187	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TENGAH	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
307	01005	289187	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TENGAH	749.000	-	-	-	-	749.000	KERTAS HVS
308	01005	289190	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HALMAHERA UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
309	01005	289196	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA SELATAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
310	01005	289207	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
311	01005	289212	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
312	01005	290451	UB	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANGERANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
313	01005	299452	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. SERANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
314	01005	299468	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG	638.050.190	-	-	-	-	638.050.190	KANTOR DESA/PASAR DESA
315	01005	299468	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
316	01005	299477	TP	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK	79.792.050	-	-	-	-	79.792.050	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
317	01005	299477	UB	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
318	01005	299483	TP	BADAN KETAHANAN PANGAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TANGERANG	74.700.000	-	-	-	-	74.700.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
319	01005	299501	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG SELATAN	-	9.090.910	(9.090.910)	-	-	-	P.C UNIT
321	01005	309247	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
322	01005	319176	UB	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. POHUWATO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
323	01005	329122	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , PEREMPUAN DAN KB KAB. BINTAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
324	01005	329137	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.NATUNA	161.616.770	-	-	-	-	161.616.770	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
325	01005	329137	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.NATUNA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
326	01005	329144	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LINGGA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
327	01005	329146	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KEP. ANAMBAS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
328	01005	339176	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANOKWARI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
329	01005	339185	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SORONG	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
330	01005	339194	UB	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SORONG SELATAN	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
331	01005	339200	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. RAJA AMPAT	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
332	01005	339202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TELUK BINTUNI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
333	01005	339210	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAIMANA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
334	01005	340170	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI BARAT	-	78.930.200	(78.930.200)	-	-	-	P.C UNIT
											LAPTOP
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
											SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
											PERALATAN PERSONAL KOMPUTER LAINNYA
335	01005	340244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAMUJU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
336	01005	340448	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POLEWALI MANDAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
337	01005	340536	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA	165.869.690	-	-	-	-	165.869.690	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
338	01005	340536	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
DITJEN BINA BANGDA											
339	01006	052151	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB. BLITAR	1.877.956.850	-	-	-	-	1.877.956.850	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
340	01006	071519	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PAKPAK BARAT	1.595.071.168	-	-	249.500.000	(249.500.000)	1.595.071.168	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
341	1006	081021	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. DHARMAS RAYA (06)	1.229.483.605	-	-	193.634.400	(193.634.400)	1.229.483.605	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
342	01006	081219	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PASAMAN BARAT	2.473.039.371	-	-	370.670.000	(370.670.000)	2.473.039.371	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
343	01006	090256	TP	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB BENGKALIS	67.670.350	-	-	-	-	67.670.350	KONSSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KONTRAK PERENCANAAN)
344	01006	100729	TP	DINAS KIMPRASDA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	1.222.663.310	-	-	239.766.400	(239.766.400)	1.222.663.310	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
345	01006	100930	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MUARO JAMBI	2.213.241.257	-	-	349.459.800	(349.459.800)	2.213.241.257	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
346	01006	140645	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KATINGAN (06)	3.171.799.345	-	-	335.790.000	(335.790.000)	3.171.799.345	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
347	01006	140727	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERUYAN	2.260.972.450	-	-	267.560.000	(267.560.000)	2.260.972.450	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
348	01006	140920	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU	1.869.300.944	-	-	298.000.000	(298.000.000)	1.869.300.944	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
350	01006	141338	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BARITO TIMUR	2.851.322.966	-	-	448.853.000	(448.853.000)	2.851.322.966	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
351	01006	151126	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BALANGAN	1.246.208.645	-	-	153.659.600	(153.659.600)	1.246.208.645	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
352	01006	160626	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MALINAU	3.192.334.944	-	-	496.630.000	(496.630.000)	3.192.334.944	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
353	01006	160927	TP	DINAS KIMPRASWIL KAB. PENAJAM PASER UTARA	428.239.499	-	-	322.278.000	(322.278.000)	428.239.499	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
354	01006	180734	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN (06)	1.849.065.910	-	-	53.642.150	(53.642.150)	1.849.065.910	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
355	01006	180924	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA	1.095.340.500	-	-	-	-	1.095.340.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
356	01006	180925	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA (06)	1.419.376.840	-	-	172.341.800	(172.341.800)	1.419.376.840	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
357	01006	191426	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SELAYAR (06)	947.211.500	-	-	149.850.000	(149.850.000)	947.211.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
358	01006	191429	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SELAYAR	2.538.006.797	-	-	75.000.000	(75.000.000)	2.538.006.797	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
359	01006	192274	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LUWU UTARA	2.981.170.039	-	-	429.232.000	(429.232.000)	2.981.170.039	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
360	01006	200623	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOMBANA (06)	2.814.142.510	-	-	-	-	2.814.142.510	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
361	01006	200715	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAKATOBI (06)	1.888.382.030	-	-	239.551.500	(239.551.500)	1.888.382.030	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
362	01006	200816	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KOLAKA UTARA	2.241.171.436	-	-	324.751.850	(324.751.850)	2.241.171.436	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
363	01006	210156	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MALUKU TENGAH (06)	907.769.600	-	-	-	-	907.769.600	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
364	01006	210428	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PULAU BURU (06)	1.425.853.520	-	-	-	-	1.425.853.520	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
365	01006	210726	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	403.454.789	-	-	-	-	403.454.789	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
366	01006	210727	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR (06)	1.404.555.405	-	-	-	-	1.404.555.405	RUMAH NEGARA GOL.II TIPE A PERMANEN
367	01006	215128	TP	SEKRETARIAT DAERAH KOTA AMBON	446.822.000	-	-	-	-	446.822.000	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI
368	01006	240553	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. A L O R	233.085.375	-	-	-	-	233.085.375	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
369	01006	250936	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANIAI	1.638.600.005	-	-	234.500.000	(234.500.000)	1.638.600.005	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
370	01006	251128	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA	1.609.527.750	-	-	249.306.000	(249.306.000)	1.609.527.750	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
371	01006	251129	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA (06)	2.474.045.920	-	-	378.641.000	(378.641.000)	2.474.045.920	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
372	01006	251514	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	213.186.750	-	-	-	-	213.186.750	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
373	01006	251516	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOVEN DIGOEL	3.791.009.500	-	-	538.600.000	(538.600.000)	3.791.009.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
374	01006	251607	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SARMI (06)	3.573.969.688	-	-	469.761.000	(469.761.000)	3.573.969.688	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
375	01006	251717	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEEROM	2.636.985.383	-	-	405.882.950	(405.882.950)	2.636.985.383	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
376	01006	251721	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEEROM	264.262.500	-	-	-	-	264.262.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
377	01006	251812	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TOLIKARA	2.280.065.006	-	-	224.100.000	(224.100.000)	2.280.065.006	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
378	01006	251918	TP	BADAN PERBATASAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	5.357.304.290	-	-	703.999.885	(703.999.885)	5.357.304.290	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
379	01006	252318	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAROPEN	1.700.989.900	-	-	-	-	1.700.989.900	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN PERMANEN
380	01006	260830	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPAHIANG	2.530.783.703	-	-	398.350.000	(398.350.000)	2.530.783.703	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
381	01006	265156	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU	533.109.500	-	-	49.925.000	(49.925.000)	533.109.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
382	01006	280076	TP	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA (06)	5.774.912.835	-	-	-	-	5.774.912.835	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
383	01006	280253	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	1.039.440.340	-	-	-	-	1.039.440.340	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
384	01006	280322	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA	1.051.489.810	-	-	-	-	1.051.489.810	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
385	01006	280417	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HALMAHERA SELATAN	3.241.547.215	-	-	698.997.544	(698.997.544)	3.241.547.215	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
386	01006	280424	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	1.061.420.000	-	-	-	-	1.061.420.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
387	01006	280525	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA	1.062.666.110	-	-	-	-	1.062.666.110	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN

LAMPIRAN XXIX

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
388	01006	280621	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	1.626.293.274	-	-	-	-	1.626.293.274	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
389	01006	280723	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT	1.398.942.800	-	-	-	-	1.398.942.800	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
390	01006	285125	TP	SEKRETARIAT DAERAH KOTA TERNATE	331.568.877	-	-	-	-	331.568.877	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
391	01006	310224	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOALEMO	2.523.955.206	-	-	396.261.000	(396.261.000)	2.523.955.206	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
392	01006	310321	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. POHUWATO	2.541.268.140	-	-	399.585.000	(399.585.000)	2.541.268.140	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
393	01006	330620	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK BINTUNI (06)	2.170.532.366	-	-	348.786.000	(348.786.000)	2.170.532.366	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
394	01006	330721	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK WONDAMA	2.256.803.760	-	-	329.500.000	(329.500.000)	2.256.803.760	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
395	01006	436044	TP	KPU KABUPATEN TANAH LAUT / POLEWALI MANDAR	2.757.039.900	-	-	-	-	2.757.039.900	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
396	01006	436096	TP	KAB SERAM BAGIAN TIMUR	1.519.500.000	-	-	-	-	1.519.500.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
397	01006	436122	TP	KAB HALMAHERA TENGAH	1.380.000.000	-	-	-	-	1.380.000.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
DITJEN OTDA											
398	01007	060082	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.088.228.700	10.000.000	(10.000.000)	-	-	1.088.228.700	HARD DISK
											HASIL KAJIAN/PENELITIAN
399	01007	070244	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO	-	-	-	2.076.889.018	(2.076.889.018)	-	SOFTWARE KOMPUTER
400	01007	075133	TP	BAPPEDA KOTA MEDAN	-	-	-	2.825.836.000	(2.825.836.000)	-	RAK-RAK PENYIMPANAN
											FILING CABINET BESI
											LCD PROJECTOR/INFOCUS
											KURSI DORONG
											MEJA KERJA (ALAT LABORATORIUM LAINNYA)
											P.C UNIT
											NOTE BOOK
											HARD DISK
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
											SOFTWARE KOMPUTER
401	01007	110097	DK	BAPPEDA PROP. SUMATERA SELATAN	-	-	-	624.800.000	(624.800.000)	-	SOFTWARE KOMPUTER
402	01007	120730	TP	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	-	-	-	1.438.332.000	(1.438.332.000)	-	LEMARI PENYIMPANAN
											RAK BESI
											FILING CABINET BESI
											LCD PROJECTOR/INFOCUS
											MEJA KERJA BESI/METAL
											KURSI BESI/METAL
											KURSI KAYU
											WIRELESS
											P.C UNIT
											HARD DISK
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
											SERVER
											PERALATAN JARINGAN LAINNYA
											SOFTWARE KOMPUTER
403	01007	190223	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA	-	1.480.000.000	(1.480.000.000)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
404	01007	205205	TP	SEKDA KOTA BAU-BAU	-	-	-	2.494.545.455	(2.494.545.455)	-	SOFTWARE KOMPUTER
405	01007	234007	DK	BAPPEDA PROP. NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	1.652.400.000	(1.652.400.000)	-	SOFTWARE KOMPUTER
406	01007	290355	TP	DINAS BINA MARGA KAB. LEBAK	-	16.742.666.277	(16.742.666.277)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
407	01007	080444	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOLOK	-	9.980.125.000	(9.980.125.000)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
TOTAL					**135.039.128.845**	**34.982.092.591**	**(34.982.092.591)**	**22.109.168.352**	**(22.109.168.352)**	**135.039.128.845**	

LAMPIRAN XXX

TRANSAKSI DALAM KONFIRMASI SATKER INAKTIF KMEENTERIAN DALAM NEGERI

LAMPIRAN XXX

TRANSAKSI DALAM KONFIRMASI SATKER INAKTIF KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	BA Eselon I	Kode Kanwil DJPB	Kode KPPN	Kode Satker	Jenis Rekon	Kode Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Buku	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih	Keterangan
1	01004	K15	135	059663	PND	425143	5B6913CIG6OEJBGH	2026-04-13T17:00:00.000Z	(25.800)	-	(25.800)	
2	01004	K15	135	059663	PND	425143	4BE1F3CIG6R7SF5H	2026-05-06T17:00:00.000Z	(25.800)	-	(25.800)	
3	01004	K15	135	059663	PND	425143	5D1CF49001DHOUF3	2026-05-03T17:00:00.000Z	(258.000)	-	(258.000)	Bukan realisasi
4	01004	K15	135	059663	PND	425143	3FB4B55DFS2U4ACP	2026-06-10T17:00:00.000Z	(129.000)	-	(129.000)	pendapatan milik
5	01004	K15	135	059663	PND	425143	0C1440NA0N4EIMOI	2026-05-18T17:00:00.000Z	(25.800)	-	(25.800)	Kemendagri
6	01004	K15	135	059663	PND	425143	701ED6U8FH4OC9TS	2026-05-06T17:00:00.000Z	(25.800)	-	(25.800)	
7	01004	K15	135	059663	PND	425143	6CC542G50C8RHPBU	2026-05-06T17:00:00.000Z	(25.800)	-	(25.800)	

LAMPIRAN XXXI

SELISIH REKONSILIASI INTERNAL PIUTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LAMPIRAN XXXI

SELISIH REKONSILIASI INTERNAL PIUTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	BA Eselon I	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Nama Akun	Periode	Nilai Neraca	Nilai Subledger	Selisih	Keterangan
1	01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	06	12.335.760.819	12.388.825.594	- 53.064.775	Potongan SPM atas pengembalian belanja pegawai yang terbit SP2D nya pada bulan Juli Tahun 2026 sebesar Rp825.404,00 serta koreksi nilai dan pelunasan piutang Praja Tahun 2026 sebesar Rp40.228.105,00 dan pelunasan piutang Praja Tahun 2025 sebesar Rp12.836.670,00.
2	01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	115212	Piutang Lainnya	06	825.404	- 53.064.775	53.890.179	
3	01001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	06	368.768.795	-	368.768.795	Reklasifikasi piutang ke bagian lancar melalui jurnal manual pada modul Aklap.
4	01001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	06	-	368.768.795	- 368.768.795	
5	01012	506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	115212	Piutang Lainnya	06	888.882	-	888.882	Potongan SPM atas pembayaran sewa rumah dinas yang terbit SP2D nya pada bulan Juli Tahun 2026.

LAMPIRAN XXXII

KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LAMPIRAN XXXII

KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	BAES 1	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Keterangan
1	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTRAKTUAL	000.4/18.9/PPK/VI/BU/2026	18-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Kehumasan	3050104026	8	800.000	6.400.000	261330000065851	Ketidaksesuaian terjadi karena pada saat pembayaran terdapat pemotongan harga setiap unit menjadi Rp800.000,00 atau di bawah nilai kapitalisasi Rp1.000.000,00.
2	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST NONKONTRAKTUAL	00036	18-02-2026	536111	Belanja Modal Lainnya	Pembayaran pengadaan operasional satgas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di prov. aceh, prov. sumatera utara dan prov. sumatera barat berupa laptop tgl 10 februari 2026	3100102002	2	15.825.500	31.651.000	261330000015800	Realisasi pengadaan laptop menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak dapat dilakukan karena keterbatasan alokasi pada Mata Anggaran Kegiatan Penanganan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, yang hanya menyediakan pagu anggaran untuk akun Belanja Modal Lainnya.
3	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST NONKONTRAKTUAL	00437/R	07-04-2026	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran pemasangan karpet lantai dan plint rumah dinas wamnedagri I tgl 25 maret 2026	6070501001	1	90.337.300	90.337.300	261330000034603	Ketidaksesuaian tersebut terjadi karena adanya kesalahan pembebanan akun belanja. Realisasi pekerjaan pemasangan karpet dan plint pada Rumah Dinas Wakil Menteri Dalam Negeri berstatus sewa tersebut seharusnya dibebankan pada akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111), bukan pada akun Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121).
4	01001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	BAST NONKONTRAKTUAL	00001/R	13-03-2026	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	kdp jalan nup 1 nilai 17.659.774	7010101003	1	17.659.774	17.659.774	260490000015896	Telah dilakukan reklasifikasi Kode BMN berdasarkan Surat Keterangan Nomor 000.3.3.2/099/IPDN.23. Reklasifikasi tersebut mengubah kode BMN 7010101003 NUP 2 (Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan) menjadi 7010101004 NUP 1 (Jalan Dalam Pengerjaan)
5	01001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/220/BAST-PGTJG/M/IPDN.27.1	02-03-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN GENERATOR SET 500 KVA, TANGKI BBM DAN OTOMASI JARINGAN GENSET IPDN KAMPUS KALBAR TA 2026	5040202001	1	257.453.400	257.453.400	260420000007665	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 534131 (Belanja Modal Jaringan)
6	01001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	BAST NONKONTRAKTUAL	00002/UP_TUP/683070/2026	27-04-2026	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Belanja Keperluan Kantor Berupa Kursi Tamu	3050201004	2	11.833.075	23.666.150	260420000019403	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)
7	01001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	BAST NONKONTRAKTUAL	00003/UP_TUP/683070/2026	16-04-2026	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Belanja Keperluan Kantor Berupa Rak Sepatu	3050104003	2	2.328.000	4.656.000	260420000019403	
8	01012	027177	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	BAST KONTRAKTUAL	000.4/0534/PPK/BBPKAPDN-IV/2026	25-05-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair untuk Asrama dan Perkantoran BBPKAPDN-IV Tahun 2026	3050201003	110	999.000	109.890.000	260540000027002	Ketidaksesuaian antara akun belanja dan kode BMN terjadi karena pengadaan kursi besi dibayarkan dalam satu SPM bersama belanja modal lainnya sehingga menggunakan akun belanja modal. Setelah diidentifikasi, nilai satuan kursi besi tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap (kurang dari Rp1.000.000 per unit), sehingga pada modul aset telah diklasifikasikan sebagai BMN ekstrakomptabel. Perbedaan tersebut masih muncul karena akun belanja pada SPM belum dilakukan pemisahan atau koreksi ke akun ekstrakomptabel.

9	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3962/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	13-05-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaanperalatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	10	10	6.478.500	260230000027924	Penggunaan akun belanja modal untuk barang yang nilainya di bawah batas kapitalisasi terjadi karena pengadaan dilaksanakan dalam satu paket yang bersumber dari satu pagu anggaran dan dibayarkan melalui satu SPM. Akibatnya, akun belanja tidak dipisahkan berdasarkan nilai kapitalisasi barang, sehingga tetap tercatat sebagai belanja modal meskipun pada modul aset barang tersebut telah diklasifikasikan sebagai BMN ekstrakomptabel.
10	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3962/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	13-05-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaanperalatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	20	358.502	7.170.040	260230000027924	
11	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3962/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	13-05-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaanperalatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	4	293.888	1.175.552	260230000027924	
12	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3962/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	13-05-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaanperalatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	12	162.066	1.944.792	260230000027924	
13	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3962/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	13-05-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaanperalatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	12	135.140	1.621.680	260230000027924	
14	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3962/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	13-05-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaanperalatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	3	782.856	2.348.568	260230000027924	
15	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3962/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	13-05-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaanperalatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	10	656.316	6.563.160	260230000027924	

16	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	2	200.980	401.960	260230000027925	
17	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	1	535.945	535.945	260230000027925	
18	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	20	868.078	17.361.560	260230000027925	
19	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	12	265.047	3.180.564	260230000027925	Penggunaan akun belanja modal untuk barang yang nilainya di bawah batas kapitalisasi terjadi karena pengadaan dilaksanakan dalam satu paket yang bersumber dari satu pagu anggaran dan dibayarkan melalui satu SPM. Akibatnya, akun belanja tidak dipisahkan berdasarkan nilai kapitalisasi barang, sehingga tetap tercatat sebagai belanja modal meskipun pada modul aset barang tersebut telah diklasifikasikan sebagai BMN ekstrakomptabel.
20	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	1	652.302	652.302	260230000027925	
21	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	2	164.545	329.090	260230000027925	
22	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	3	296.180	888.540	260230000027925	

23	010125	061382	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	1	190.402	190.402	260230000027925	
24	010125	061382	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	3	276.818	830.454	260230000027925	
25	010125	061382	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	2	118.120	236.240	260230000027925	
26	010125	061382	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	3	519.021	1.557.063	260230000027925	Penggunaan akun belanja modal untuk barang yang nilainya di bawah batas kapitalisasi terjadi karena pengadaan dilaksanakan dalam satu paket yang bersumber dari satu pagu anggaran dan dibayarkan melalui satu SPM. Akibatnya, akun belanja tidak dipisahkan berdasarkan nilai kapitalisasi barang, sehingga tetap tercatat sebagai belanja modal meskipun pada modul aset barang tersebut telah diklasifikasikan sebagai BMN ekstrakomptabel.
27	010125	061382	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	2	72.879	145.758	260230000027925	
28	010125	061382	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	2	993.819	1.987.638	260230000027925	
29	010125	061382	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	2	695.319	1.390.638	260230000027925	

30	010125	061380	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	1	147.149	147.149	260230000027925	
31	010125	061380	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	1	533.595	533.595	260230000027925	Penggunaan akun belanja modal untuk barang yang nilainya di bawah batas kapitalisasi terjadi karena pengadaan dilaksanakan dalam satu paket yang bersumber dari satu pagu anggaran dan dibayarkan melalui satu SPM. Akibatnya, akun belanja tidak dipisahkan berdasarkan nilai kapitalisasi barang, sehingga tetap tercatat sebagai belanja modal meskipun pada modul aset barang tersebut telah diklasifikasikan sebagai BMN ekstrakomptabel.
32	010125	061380	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3965/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	04-06-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan dan mesin vertical rescue pemadam kebakaran dan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	12	63.702	764.424	260230000027925	
33	010125	061380	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/3968/e-CAT/BAST/Balai-Bogor	13-05-2026	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan inspeksi gedung/bangunan	3080141005	1	585.309	585.309	260230000027242	

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI TRANSAKSI RESIPROKAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI TRANSAKSI RESIPROKAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	Periode	BAES1 Pengirim	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	BELANJA	BAES1 Penerim	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Pendapatan	Selisih	Keterangan
1	06	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	0	08801	17220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	4.500.000	- 4.500.000	Per 30 Juni 2026, terdapat transaksi resiprokal dengan Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta (017720) senilai Rp4.500.000,00 dalam rangka penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara - Seleksi pengembangan karier pegawai Aparatur Sipil Negara di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara dengan NTPN ECD4B1JNGHMSCRMF tanggal 22 Mei 2026.
2	06	01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	0	08701	418934	PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.580.000	- 13.580.000	Terdapat selisih transaksi resiprokal pada akun Belanja–PNBP periode pelaporan sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp13.580.000,00 pada Satker Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Selisih tersebut berasal dari transaksi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang telah dilakukan pada 4 Mei 2026 dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan IV Tahun Anggaran 2026. Sampai dengan tanggal pelaporan, transaksi dimaksud belum dapat ditagihkan sebagai belanja APBN sehingga masih menimbulkan selisih transaksi resiprokal. Kondisi tersebut disebabkan proses penyelesaian administrasi masih berlangsung, yang meliputi revisi anggaran serta penyelesaian tahapan pelaksanaan dan administrasi Diklat Arsiparis. Setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi, transaksi tersebut akan segera diproses penagihannya pada APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	06	01006	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	0	08701	418934	PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.580.000	- 13.580.000	Terdapat selisih transaksi resiprokal pada akun Belanja-PNBP Periode Juni 2026 sebesar Rp13.580.000 yang tercatat pada Satker Ditjen Bina Bangda. Selisih tersebut disebabkan oleh transaksi pembayaran kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Bulan April 2026 dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan fungsional arsiparis angkatan III TA 2026. Atas transaksi tersebut telah dibayarkan melalui Transaksi GUP Bulan Juli 2026.

LAMPIRAN XXXIV

REKAPITULASI PAGU MINUS (BASIS SP2D) AKUN 51XXX KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LAMPIRAN XXXIV

REKAPITULASI PAGU MINUS (BASIS SP2D) AKUN 51XXX KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

NO	BAES1	Kode	Nama Satker	Program	Kegiatan	Output	Akun	Pagu	Revisi Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keterangan
1	01005	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	WA	6108	EBA	511625	379.192.000	27.086.000	201.212.935	- 174.126.935	
2	01002	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	WA	6094	EBA	511125	64.420.000	137.072.000	189.966.236	- 52.894.236	
3	01002	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	WA	6094	EBA	511623	-	38.500.000	44.000.000	- 5.500.000	
4	01012	027114	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	WA	6133	EBA	511625	11.153.000	11.153.000	12.395.890	- 1.242.890	
5	01005	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	WA	6108	EBA	511125	7.828.000	14.964.000	24.322.033	- 9.358.033	
6	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	WA	6133	EBA	511122	8.274.000	8.274.000	10.344.714	- 2.070.714	Pagu minus tersebut akan dilakukan revisi pada Semester II Tahun 2026.
7	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	WA	6133	EBA	511121	34.328.000	34.328.000	35.877.018	- 1.549.018	
8	01012	506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	WA	6133	EBA	511125	9.341.000	21.632.000	30.428.679	- 8.796.679	
9	01011	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	WA	6129	EBA	511125	31.444.000	67.444.000	82.674.357	- 15.230.357	
10	01011	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	WA	6129	EBA	511625	50.748.000	50.748.000	62.383.795	- 11.635.795	

LAMPIRAN XXXV

DAFTAR REKENING
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LAMPIRAN XXXV

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEs1		Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	00000008887988875	RPL 133 PS SETJEN KEMENDAGRI UTK DOM	BNI	30	S-1714/MK.5/2015	3/4/2015
2	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	1174197874	RKK SETJEN KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-514/WPB.12/KP.04/2021	2/10/2021
3	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	032901004322309	RKK SETJEN KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1403/WPB.12/KP.0404/2020	3/18/2020
4	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001000	BPG 133 SETJEN KEMENDAGRI	BRI	50	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	3/18/2020
5	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001001	BPP 133 BIRO HUKUM	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	3/18/2020
6	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001002	BPP 133 BIRO KEPEGAWAIAN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	3/18/2020
7	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001003	BPP 133 BIRO ORTALA	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	3/18/2020
8	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001005	BPP 133 BIRO UMUM	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	3/18/2020
9	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001006	BPP 133 PUSAT FASKERJASAMA	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	3/18/2020
10	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001007	BPP 133 BIRO KEUANGAN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	3/18/2020
11	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001008	BPP 133 PUSDATIN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	3/18/2020
12	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001009	BPP 133 BIRO ADMINISTRASI	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	3/18/2020
13	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001010	BPP 133 PUSAT PENERANGAN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	3/18/2020
14	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	650364830051000	BPG 133 DKPP	BRI	50	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	3/18/2020
15	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650714032001004	BPP 133 BIRO PERENCANAAN	BRI	51	S-4800/WPB.12/KP.0404/2021	11/19/2021
16	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	SEKRETARIAT JENDERAL	0154125132001	RKK SETJEN KEME	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	12/4/2025
17	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	018014483021000	BPG 087 IPDN	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	12/4/2025
18	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	018014483021001	BPP 087 Biro I	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	12/4/2025
19	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	018014483021002	BPP 087 Biro II	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	12/4/2025
20	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	018014483021003	BPP 087 Biro III	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	12/4/2025
21	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	018014483021004	BPP 087 Biro IV	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	12/4/2025
22	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	018014483021005	BPP 087 Kampus Jakarta	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	12/4/2025
23	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	018014483021006	BPP 087 Pascasarjana dan Profesi	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	12/4/2025
24	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	018014483021007	BPP 087 Fakultas	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	12/4/2025
25	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	0159255530001	RPL 087 PDHL IPDN 25R6LGRA	BJB	30	000375/KPN.1312/2026	10 Maret 2026
26	Manado	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	9891486770101000	BPG 049 IPDN KAMPUS SULUT	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	2/11/2021
27	Makassar I	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	00000001067702427	BPN 054 IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	BNI	10	001980/050	1/13/2021
28	Makassar I	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	9891486770241000	BPG 054 IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	2/11/2021
29	Bukittinggi	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	9891486770451000	BPG 011 IPDN KAMPUS BUKITTINGGI	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	2/11/2021
30	Pontianak	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	9891486830701000	BPG 042 IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	2/11/2021
31	Mataram	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	9891486830841000	BPG 038 IPDN KAMPUS NTB	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	2/11/2021
32	Jayapura	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	9891486830911000	BPG 063 IPDN KAMPUS PAPUA	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	2/11/2021
33	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	32901004326303	RKK ITJEN KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1163/WPB.12/KP.04/2020	3/6/2020
34	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650700272031000	BPG 133 ITJEN KEMENDAGRI	BRI	50	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	3/6/2020
35	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031001	BPP 133 INSPEKTORAT I	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	3/6/2020
36	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031002	BPP 133 Inspektorat II	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	3/6/2020
37	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031003	BPP 133 Inspektorat III	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	3/6/2020
38	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031004	BPP 133 Inspektorat IV	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	3/6/2020
39	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650700272031005	BPP 133 INSPEKTORAT KHUSUS	BRI	21	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	3/6/2020
40	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031006	BPP 133 SETITJEN KEMENDAGRI	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	3/6/2020
41	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	32901004346303	RKK DITJEN POLPUM KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	3/11/2020
42	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101000	BPG 133 DITJEN POLPUM KEMENDAGRI	BRI	50	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	3/11/2020
43	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101001	BPP 133 SEKRETARIAT	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	3/11/2020
44	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101002	BPP 133 DIREKTORAT WASBANG	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	3/11/2020
45	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101003	BPP 133 DIREKTORAT POLDAGRI	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	3/11/2020
46	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101004	BPP 133 DIREKTORAT EKOSOSBUD	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	3/11/2020
47	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101005	BPP 133 DIREKTORAT ORMAS	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	3/11/2020
48	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650870272101006	BPP 133 DIREKTORAT WASNAS	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	3/11/2020
49	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	019080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	9890240190801000	BPG 133 SETDA PROV DKI JAKARTA	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	3/17/2021
50	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	00000000967302571	RKK DITJEN BAK KEMENDAGRI OPS	BSI	Rekening Induk	S-1050/WPB.12/KP.04/2021/133	3/17/2021
51	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	8808000009	RKK DITJEN BINA ADWIL OPS	BNI	Rekening Induk	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
52	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861000	BPG 133 DITJEN BINA ADM. KEWILAYAHAN	BNI	50	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
53	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861001	BPP 133 SEKRETARIAT DITJEN ADWIL	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020

54	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861002	BPP 133 DIR. DEKONSENTRASI TP	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
55	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861003	BPP 133 DIREKTORAT WASKOBAN	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
56	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861004	BPP 133 DIR. POLPP DAN LINMAS	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
57	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861005	BPP 133 DIREKTORAT TOPOBAD	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
58	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861006	BPP 133 DIREKTORAT MPBK	BNI	51	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
59	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	9890240291341000	BPG 022 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
60	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	039667	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	9890240396671000	BPG 026 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
61	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	049061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	9890240490611000	BPG 030 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DIY 04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
62	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	8100710690841000	BPG 001 SEKDA PROVINSI ACEH 04	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
63	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	079078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	9890240790781000	BPG 123 SETDAPROVSU	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
64	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	089106	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	9890240891061000	BPG 010 SETDA PROV SUMBAR	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
65	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	099438	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	9890240994381000	BPG 008 SETDA PROV RIAU 04 DK	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
66	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	109074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	9890241090741000	BPG 012 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
67	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	119082	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890241190821000	BPG 014 SEKRETARIAT DAERAH PROV SUMSEL 2	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
68	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	129074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	9890241290741000	BPG 017 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
69	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	129098	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	9890241290981000	BPG 017 DPMPTSP LAMPUNG PROV LAMPUNG	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
70	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	139078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890241390781000	BPG 042 SETDA PROV. KALBAR 139078	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
71	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890241490721000	BPG 043 SETDA PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
72	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890241491301000	BPG 043 DPMPTSP PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
73	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	159071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890241590711000	BPG 045 SEKDA PROV KAL SEL	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
74	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	160552	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN	9890241605521000	BPG 152 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH NUNUKAN	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
75	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	169185	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890241691851000	BPG 046 SETDA PROV KALTIM	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
76	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179088	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	9890241790881000	BPG 049 DINAS PENANAMAN MODAL PTSPD PROV SULUT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
77	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179223	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	9890241792231000	BPG 049 SEKDA PROV SULUT BIRO PEMERINTAHAN HUMAS	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
78	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	189087	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890241890871000	BPG 051 SETDA PROV SULTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
79	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	199080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890241990801000	BPG 054 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
80	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890242090711000	BPG 060 SETDA PROV. SULTRA DK 04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
81	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890242090951000	BPG 060 DPMPTSP PROV SULTRA 04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
82	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	219062	SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	9890242190621000	BPG 061 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKI 219062	BNI	50	S-1625/WPB.12/KP.04/2021	4/19/2021
83	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	229068	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	9890242290681000	BPG 037 SEKDA PROVINSI BALI	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
84	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	239236	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890242392361000	BPG 038 SETDA PROV NTB	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
85	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	240270	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. BELU	9890242402701000	BPG 172 BPPD kab belu	BNI	50	S-1469/KPN.1204/2024	9 Agustus 2024
86	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	249136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890242491361000	BPG 039 SEKDA PROV NTT	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	4 Juni 2021
87	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	249174	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890242491741000	BPG 039 DPMPTSP PROV NTT 249174	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
88	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	9890242590841000	BPG 063 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. PAPUA	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
89	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	269093	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	9890242690931000	BPG 016 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
90	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	289095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	9890242890951000	BPG 062 DINAS PMPTSP PROV MALUT	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
91	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	289174	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	9890242891741000	BPG 062 SEKERETARIAT DAERAH PROV MALUKU UTARA 04 DK	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
92	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	299348	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	9890242993481000	BPG 020 SETDA PROV BANTEN	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
93	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	309148	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	9890243091481000	BPG 015 SETDA PROV.BABEL-04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021

94	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	9890243190611000	BPG 050 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
95	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	329116	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890243291161000	BPG 009 SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAUES04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
96	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	339161	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	9890243391611000	BPG 065 SETDA PROV PAPUA BARAT	BNI	50	S-2115WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
97	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	340166	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	9890243401661000	BPG 178 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
98	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	349011	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	9890243490111000	BPG 178 DINAS PMPTSP SULAWESI BARAT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
99	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	356000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU	9890243560001000	BPG 185 DPUPRPKP KAB MALINAU	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
100	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	359002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890243590021000	BPG 185 DPMDPTSP PROV KALTARA 359002	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
101	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890244176971000	BPG 185 SEKDA KALTARA 04 417697	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
102	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433316	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	9890244333161000	BPG 010 DPMPTSP PROV SUMBAR	BNI	50	S-1625/WPB.12/KP.04/2021	4/19/2021
103	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433317	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	9890244333171000	BPG 008 DINAS PMPTSP PROV RIAU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
104	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890244333181000	BPG 009 DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BNI	50	S-1730/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
105	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433341	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	9890244333411000	BPG 012 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI JAMBI	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
106	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433342	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890244333421000	BPG 014 DINAS PMPTSP SUMSEL	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
107	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433343	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANGKA BELITUNG	9890244333431000	BPG 015 DPMPTSP BABEL	BNI	50	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
108	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433344	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	9890244333441000	BPG 016 DINAS PMPTSP PROV BENGKULU	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
109	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433345	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	9890244333451000	BPG 020 DINAS PMPTSP PROV BANTEN	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
110	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433347	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	9890244333471000	BPG 037 DINAS PMPTSP PROV BALI	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
111	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433348	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890244333481000	BPG 042 DINAS PMPTSP PROV KALBAR	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
112	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433349	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	9890244333491000	BPG 050 DPM-ESDM-TRANS GORONTALO	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
113	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433350	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890244333501000	BPG 051 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PROV SULTENG 433350	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
114	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433351	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890244333511000	BPG 054 DPMPTSP SULSEL	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
115	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890244333521000	BPG 038 DPMPT SATU PINTU PROV NTB	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
116	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433353	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	9890244333531000	BPG 061 DINAS PMPTSP PROV MALUKU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
117	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484101	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH	8100714841011000	BPG 001 DPM DAN PTSP PROV	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
118	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484102	BAPPEDA PROVINSI ACEH	8100714841021000	BPG 001 BAPPEDA PROV ACEH	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
119	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484103	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	8100714841031000	BPG 001 INSPEKTORAT PROV ACEH	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
120	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484105	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA	9890244841051000	BPG 004 DPMPTSP SUMUT	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
121	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484107	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	9890244841071000	BPG 123 INSPEKTORAT PROVINSI SUMUT	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
122	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484109	BAPPEDA PROVINSI RIAU	9890244841091000	BPG 008 BAPPEDA RIAU	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
123	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484110	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU	9890244841101000	BPG 008 INSPEKTORAT PROV RIAU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
124	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484112	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890244841121000	BPG 009 BAPPEDA PROV KEPRI	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
125	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484113	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890244841131000	BPG 009 INSPEKTORAT PROV KEPRI	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
126	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484115	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	9890244841151000	BPG 012 BAPPEDA PROVINSI JAMBI	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
127	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484116	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	9890244841161000	BPG 012 INSPEKTORAT PROV JAMBI	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
128	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484118	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	9890244841181000	BPG 010 BAPPEDA PROV SUMBAR	BNI	50	S-2115//WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
129	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484119	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	9890244841191000	BPG 010 INSPEKTORAT PROV SUMBAR	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
130	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484121	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890244841211000	BPG 014 BAPPEDA PROV SUMSEL	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
131	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484122	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890244841221000	BPG 014 INSPEKTORAT SUMSEL	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
132	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484124	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	9890244841241000	BPG 017 BAPPEDA PROV LAMPUNG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
133	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484125	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	9890244841251000	BPG 017 INSPEKTORAT LAMPUNG	BNI	50	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
134	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484127	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	9890244841271000	BPG 016 BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
135	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484128	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	9890244841281000	BPG 016 INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021

136	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484131	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9890244841311000	BPG 015 BAPPEDABABEL 484131	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
137	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484132	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9890244841321000	BPG 015 INSPEKTORAT PROV. BABEL	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
138	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484134	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	9890244841341000	BPG 020 BAPPEDA PROV BANTEN	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
139	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484135	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN	9890244841351000	BPG 001 INSPEKTORAT BANTEN	BNI	50	S-2115//WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
140	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484137	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	9890244841371000	BPG 022 DINAS PMPTSP JABAR	BNI	50	S-2115//WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
141	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484138	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	9890244841381000	BPG 022 BAPPEDA PROV JABAR	BNI	50	S-2115//WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
142	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484139	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	9890244841391000	BPG 022 INSPEKTORAT DAERAH PROV JABAR	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
143	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484145	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	9890244841451000	BPG 026 DINAS PMPTSP PROV JATENG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
144	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484146	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	9890244841461000	BPG 026 BAPPEDA PROV JATENG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
145	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484147	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	9890244841471000	BPG 026 INSPEKTORAT PROVINSI JATENG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
146	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484149	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY	9890244841491000	BPG 030 DPMPTSP PROVINSI D.I YOGYAKARTA	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
147	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484150	BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	9890244841501000	BPG 030 BAPPEDA PROVINSI DI. YOGYAKARTA	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	3/17/2021
148	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484151	INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA	9890244841511000	BPG 030 INSPEKTORAT PROV DIY	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	3/17/2021
149	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484153	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	9890244841531000	BPG 135 DINAS PMPTSP JATIM	BNI	50	S-2115//WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
150	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484154	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	9890244841541000	BPG 135 BAPPEDA PROV JATIM	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
151	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484157	BAPPEDA PROVINSI BALI	9890244841571000	BPG 037 BAPPEDA PROV BALI	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
152	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484158	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	9890244841581000	BPG 037 INSPEKTORAT BALI	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	4/19/2021
153	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484160	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890244841601000	BPG 038 BAPPEDA PROV NTB	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
154	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484161	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890244841611000	BPG 038 INSPEKTORAT PROV NTB	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
155	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484163	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890244841631000	BPG 039 DEKON BAPPELITBANGDA	BNI	50	S-3391/WPB.12/KP.04/2021	24 Agustus 2021
156	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484164	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890244841641000	BPG 039 INSPEKTORAT PROV NTT	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	4/23/2021
157	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484166	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890244841661000	BPG 042 BAPPEDA PROVINSI KALBAR 484166	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
158	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890244841671000	BPG 042 INSPEKTORAT KALBAR	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
159	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484169	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890244841691000	BPG 043 BAPPEDA PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
160	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484170	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890244841701000	BPG 043 INSPEKTORAT PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
161	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484172	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890244841721000	BPG 045 PMPTSP PROV KALSEL	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
162	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890244841731000	BPG 045 BAPPEDA PROV KALSEL 484173	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
163	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484174	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890244841741000	BPG 015 INSPEKTORAT KALSEL	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	4/19/2021
164	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484176	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890244841761000	BPG 046 DINAS PMPTSP PROV KALTIM	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	4/23/2021
165	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484177	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890244841771000	BPG 046 BAPPEDA KALIMANTAN TIMUR	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
166	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484178	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890244841781000	BPG 046 INSPEKTORAT KALTIM	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
167	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484180	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890244841801000	BPG 185 BAPPEDA PROV KALUT	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
168	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484181	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890244841811000	BPG 185 INSPEKTORAT PROV KALIMANTAN UTARA	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	3/31/2021
169	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484183	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	9890244841831000	BPG 049 BAPPEDA PROV SULUT	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
170	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484184	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	9890244841841000	BPG 049 INSPEKTORAT PROV SULUT	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
171	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484187	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	9890244841871000	BPG 050 BAPPEDA PROVINSi GORONTALO	BSI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
172	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484188	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	9890244841881000	BPG 050 INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	BSI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
173	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484190	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	9890244841901000	BPG 178 BAPPEDA PROV SULBAR	BSI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
174	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484191	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	9890244841911000	BPG 178 INSPEKTORAT PROV SULBAR	BSI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
175	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484193	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890244841931000	BPG 054 BAPPEDA SULSEL	BSI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	4/19/2021
176	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484194	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890244841941000	BPG 054 INSPEKTORAT PROV SULSUL	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	4/23/2021
177	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484196	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890244841961000	BPG 051 BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	BRI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
178	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890244841971000	BPG 051 ITDA PROV SULTENG	BRI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
179	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484199	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890244841991000	BPG 060 BAPPEDA PROV SULTRA	BRI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
180	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484200	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890244842001000	BPG 060 INSPEKTORAT DAERAH PROV SULTRA (04)	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	3/17/2021
181	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484202	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	9890244842021000	BPG 061 BAPPEDA PROVINSI MALUKU	BNI	50	S-1730/WPB.12/KP.04/2021	4/23/2021
182	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484203	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	9890244842031000	BPG 061 INSPEKTORAT PROV MALUKU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	4/23/2021
183	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	9890244842051000	BPG 062 BAPPEDA PROV MALUT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	3/17/2021
184	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484206	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	9890244842061000	BPG 062 INSPEKTORAT PROV MALUT	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	3/31/2021
185	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	9890244842081000	BPG 063 BAPPEDA PROV PAPUA	BNI	50	S-2433/KPN.1204/2022	8/18/2022
186	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484209	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	9890244842091000	BPG 063 INSPEKTORAT PROV PAPUA	BNI	50	S-1247/KPN.1204/2022	4/8/2022
187	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484211	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	9890244842111000	BPG 065 DPMPTSP PABAR	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	3/17/2021
188	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484212	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT	9890244842121000	BPG 065 BAPPEDA PROV PABAR	BNI	50	S-2433/KPN.1204/2022	8/18/2022
189	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484213	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	9890244842131000	BPG 065 INSPEKTORAT PABAR	BNI	50	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	7/19/2021
190	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	240270	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. BELU	9890242402701000	BPG 172 BPPD KAB BELU	BNI	50	S-1469/KPN.1204/2024	8/9/2024

191	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	966535960	RKK DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1342/WPB.12/KP.04/2020	3/16/2020
192	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	032901004381303	RKK DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1344/WPB,12/KP.04/2020	3/16/2020
193	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	7187439398	RKK DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI OPS	BSI	Rekening Induk	S-364/WPB.12/KP.04/2022	1/18/2022
194	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531000	BPG 133 Ditjen Bina Pemdes Kemendagri	BSI	50	S-364/WPB.12/KP.04/2022	1/18/2022
195	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531001	BPP 133 Direktorat PAPD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	1/18/2022
196	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531002	BPP 133 Direktorat FPKAD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	1/18/2022
197	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531003	BPP 133 Direktorat FKAD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	1/18/2022
198	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531004	BPP 133 Direktorat KKD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	1/18/2022
199	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531005	BPP 133 Direktorat EPD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	1/18/2022
200	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531006	BPP 133 Sekretariat	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	1/18/2022
201	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	9890280284491000	BPG 030 BALAI PEMERINTAHAN DESA YK	BNI	50	S-1342/WPB.12/KP.04/2020	3/16/2020
202	Yogyakarta	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	1889064884	BPN 030 BALAI PEMERINTAHAN DESA YK	BNI	10	000078/030	9/23/2024
203	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	651560288301000	BPG 032 BBPMD MALANG	BRI	50	S-1343/WPB.12/KP.04/2020	3/16/2020
204	Malang	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	5101004792303	BPN 032 BBPD MALANG	BRI	10	S-431/KPN.1604/2025	4/8/2025
205	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	651566136291000	BPG 017 BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	BRI	50	S-1343/WPB.12/KP.04/2020	3/16/2020
206	Bandar Lampung	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	1140028362815	BPN 017 BALAI PEMERINTAH DESA LAMPUNG	MANDIRI	10	S-758/KPN.0801/2024	5/16/2024
207	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	967410258	RKK DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1559/WPB.12/KP.04/2020	4/3/2020
208	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291000	BPG: 133 DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI	BNI	50	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	4/3/2020
209	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291001	BPP: 133 SEKRETARIAT	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	4/3/2020
210	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291002	BPP: 133 DIREKTORAT PEIPD	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	4/3/2020
211	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291003	BPP: 133 Direktorat SUPD I	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	4/3/2020
212	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291004	BPP: 133 Direktorat SUPD II	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	4/3/2020
213	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291005	BPP 133: Direktorat SUPD III	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	4/3/2020
214	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291006	BPP: 133 Direktorat SUPD IV	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	4/3/2020
215	Khusus Pinjaman & Hibah	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1240012217528	RPL 140 PDHL BANGDA untuk 27YDNA6A	MANDIRI	30	WPB.12/KP00035608/2023	5/17/2023
216	Khusus Pinjaman & Hibah	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1380077714777	RPL 140 PDH BANGDA untuk 27YDNA6A	MANDIRI	30	WPB.12/KP00040708/2023	10/30/2023
217	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	7187436437	RPL 133 PDH BAPPEDA ACEH UTK 2C7EJQHA	BSI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	12/27/2021
218	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1600004285322	RPL 133 PDH BAPPEDA PABAR UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	12/27/2021
219	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	32901004310302	RKK DITJEN OTDA KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1234/WPB.12/KP.04/2020	3/9/2020
220	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921000	BPG : 133 DITJEN OTDA KEMENDAGRI	BRI	50	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	3/9/2020
221	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921001	BPP : 133 SEKRETARIAT	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	3/9/2020
222	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921002	BPP : 133 DIR.PENATAAN DAERAH	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	3/9/2020
223	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650406218921003	BPP 133 DIR.KEPALA DAERAH	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	3/9/2020
224	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921004	BPP : 133 DIR.KELEMBAGAAN	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	3/9/2020
225	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921005	BPP : 133 DIR.PRODUK HUKUM	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	3/9/2020
226	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921006	BPP : 133 DIR.EVALUASI KINERJA	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	3/9/2020
227	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	917164447	RKK DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1181/WPB.12/KP.04/2020	3/6/2020
228	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821000	BPG 133 DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI	BNI	50	S-1175/WPB.12/KP.0404/2020	06 Maret 2020
229	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821001	BPP 133 SEKRETARIAT PEMERINTAH	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.0404/2020	06 Maret 2020
230	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821002	BPP 133 INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN DAERAH	BNI	51	S-1316/KPN.1204/2023	12 Juni 2023
231	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821003	BPP 133 PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL	BNI	51	S-1316/KON.1206/2023	12 Juni 2023
232	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821004	BPP 133 INFORMASI	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06 Maret 2020
233	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821005	BPP 133 INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL	BNI	51	S-1316/KPN.1204/2023	12 Juni 2023
234	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821006	BPP 133 BINA APARATUR PEMERINTAH	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06 Maret 2020
235	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821008	BPP 133 DUKCAPIL PHLN	BNI	51	S-2841/KPN.1204/2023	04 Desember 2023
236	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821009	BPP 133 DUKCAPIL PHLN 2	BNI	51	S-1132/KPN.1204/2024	25 Juni 2024
237	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821010	BPP 133 DUKCAPIL PHLN 3	BNI	51	S-1132/KPN.1204/2024	25 Juni 2024
238	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821011	BPP 133 DUKCAPIL PHLN 4	BNI	51	S-1132/KPN.1204/2024	26 Juni 2024
239	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	32901004307309	RKK DITJEN BINA KEUDA KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1251/WPB.12/KP.04/2020	10-03-2020

240	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661000	BPG 133 DITJEN BINA KEUDA KEMENDAGRI	BRI	50	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	3/10/2020
241	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661001	BPP 133 SEKRETARIAT KEUDA	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	3/10/2020
242	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661002	BPP 133 DIREKTORAT PAD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	3/10/2020
243	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661003	BPP 133 DIREKTORAT PPKD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	3/10/2020
244	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650736627661004	BPP 133 DIREKTORAT PD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	3/10/2020
245	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661005	BPP 133 DIREKTORAT FDPPD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	3/10/2020
246	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661006	BPP 133 DIT BUMD BLUD BMD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	3/10/2020
247	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	32901004321303	RKK BALITBANG KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1305/WPB.12/KP.04/2021	3/13/2020
248	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221000	BPG 133 BALITBANG KEMENDAGRI	BRI	50	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	3/13/2020
249	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221001	BPP 133 PUSLITBANG OTDAPOLPUM	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	3/13/2020
250	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221002	BPP 133 PUSLITBANG ADWIL	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	3/13/2020
251	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221003	BPP 133 PUSLITBANG KEUDA	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	3/13/2020
252	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221004	BPP 133 PUSLITBANG INOVASI	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	3/13/2020
253	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	042601001412305	RKK BPSDM KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1114/WPB.12/KP.04/2020	4 Maret 2020
254	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	913758491	RKK BPSDM KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1116/WPB.12/KP.04/2020	4 Maret 2020
255	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311000	BPG 133 BADAN PENGEMB. SDM KEMENDAGRI	BRI	50	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	3/4/2020
256	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311001	BPP 133 Sekretariat	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	3/4/2020
257	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311002	BPP 133 Pusat I	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	3/4/2020
258	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311003	BPP 133 Pusat II	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	3/4/2020
259	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311004	BPP 133 Pusat III	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	3/4/2020
260	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311005	BPP 133 Pusat IV	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	3/4/2020
261	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1240009999484	BPN 133 BPSDM	MANDIRI	10	S-7197/WPB.12/KP.0404/2018	12/18/2018
262	Yogyakarta	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	650060271141000	BPG 030 BALAI BESAR PKAPDN III	BRI	50	S-400/KPN.1204/2026	2/18/2026
263	Yogyakarta	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	1370007202589	BPN 030 PUSDIKLAT REGIONAL YOGYAKARTA	MANDIRI	10	S-1156/WPB.15/KP/01/2015	2/26/2015
264	Makassar I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	7145711667	BPN 054 BBPK APDN-IV	BSI	40	001960/054	10/20/2020
265	Makassar I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	9890070271771000	BPG 054 BALAI BESAR PKAPDN IV	BNI	50	S-399/KPN.1204/2026	2/18/2026
266	Makassar I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	9890070271771001	BPP 054 PPSDM MAKASSAR PNBP	BNI	51	002433/054	8/8/2025
267	Makassar I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	9890070271771002	BPP 054 PPSDM MAKASSAR RM	BNI	51	002433/054	8/8/2025
268	Bandung I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	1320010408616	BPN 022 BBPKAPDN II	MANDIRI	10	S-401/KPN.1204/2026	2/18/2026
269	Bandung I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	8100124032161000	BPG 022 PPSDM REGIONAL BANDUNG	MANDIRI	50	S-1119/WPB.12/KP.04/2020	3/4/2020
270	Bandung I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	8100124032161001	BPP 022 BALAI BESAR PKAPDN II TATA USAHA	MANDIRI	51	S-401/KPN.1204/2026	2/18/2026
271	Bandung I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	8100124032161002	BPP 022 BALAI BESAR PKAPDN II KEGIATAN	MANDIRI	51	S-401/KPN.1204/2026	2/18/2026
272	Bukittinggi	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	650065061371000	BPG 011 BALAI BESAR PKAPDN I	BRI	50	S-400/KPN.1204/2026	2/18/2026
273	Bogor	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	650065061381000	BPG 023 BALAI PKFAPDN BIDANG ADWIL	BRI	50	S-400/KPN.1204/2026	18/2/206
274	Bogor	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	038701002020309	BPN 023 BPSDM SATPOLPP DAMKAR	BRI	10	000415	9/20/2024

II. DATA REKENING YANG AKAN DITUTUP

No	KPPN	BaEs1		Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
2	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	259291	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MERAUKE	4000106002128	BPG 068 BPMK KAB MERAUKE	BPD PAPUA	20	S-729/WPB.33/KP.0430/2015	8/3/2015

III. DATA REKENING YANG SUDAH DITUTUP

No	KPPN	BaEs1		Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1	Bogor	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1330033100876	RPL 023 KS BPKSP4K U DIKLAT II	MANDIRI	30	R05.UM/BOG/0196/2026	11 Maret 2026

2	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	650363525931000	BPG 133 IPDN KAMPUS JAKARTA	BRI	50	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020 Surat Penutupan Rekening: S-839/KPN.1204/2024	18/03/2020 Tanggal Surat Penutupan: 13/05/2024
3	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	033901003217300	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2M2DRLHA	BRI	50	900.1.7.3/16615/Ses	31 Desember 2025

IV. DATA REKENING YANG SUDAH DPINDAHBUKUKAN

No	KPPN	BaEs1		Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	00000000188380452	BPG 022 SEKDA PROV JABAR	BRI	50	S-2530/WPB.12/KP.04/2021	23 Juni 2021
2	Palangkaraya	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	024301000879308	BPG 043 SETDA PROV KALTENG	BRI	50	S-20006/WPB.12/KP.04/2021	11 Mei 2021
3	Gorontalo	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	202301000043307	BPG 050 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	BRI	50	S-20006/WPB.12/KP.04/2021	11 Mei 2021
4	Tanjung Pinang	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	00000000950679851	BPG 009 DPMPTSP PROV KEPRI	BRI	50	S-1899/WPB.12/KP.04/2021	5 Mei 2021
5	Gorontalo	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433349	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	1500013456239	BPG 050 DPM-ESDM-TRANS Gorontalo	BRI	50	S-20006/WPB.12/KP.04/2021	11 Mei 2021

V. BUKAN REKENING SATKER KEMENDAGRI

1	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661004	BPP 133 DIREKTORAT PD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	3/10/2020

NERACA PERCOBAAN AKRUAL (SALDO AWAL)

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2026 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 23/07/2026
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	777,785	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	435,883,927	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	14,384,908,731	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	1,078,586,075	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	34,616,450	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,445,738,924	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	37,825,032	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	375,796,795	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	11,665,738,888
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	189,125
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	1,878,984
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,505,124,319	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	619,739,631	0
0.0	117114	Suku Cadang	81,679,487	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	16,151,172,954	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	54,136,639,215	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	28,585,616,694	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	135,560,257,780	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	121,569,579,244	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	8,196,420,722	0
0.0	117129	Persediaan Dalam Proses	1,599,201,550	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	1,254,289,814	0
0.0	131111	Tanah	13,259,318,847,812	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,639,205,845,247	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,939,685,514,821	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	77,244,178,316	0
0.0	134112	Irigasi	47,693,107,897	0
0.0	134113	Jaringan	170,488,331,630	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	15,867,663,868	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	64,979,197,876	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	19,373,327,423	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,705,153,139,089
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	641,689,526,713
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	60,173,907,946
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	32,384,637,603
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	75,944,217,217
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	8,343,074,288
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	17,850,089,235	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2026 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 23/07/2026
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	17,850,089,235
0.0	162151	Software	703,634,528,415	0
0.0	162161	Lisensi	93,796,633,828	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	2,271,764,600	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	2,283,518,750	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	228,247,203,927	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	182,452,165,714	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	156,833,519,275	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	178,776,653,121
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	633,601,535,937
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	16,309,512,607
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	153,309,868,425
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	30,830,786,970
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	522,146,747
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	192,683,035,207
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	2,854,681,833
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	332,630,895,244
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	777,785
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	397,356,643
0.0	391111	Ekuitas	0	16,926,155,644,156
JUMLAH			**23,021,279,293,763**	**23,021,279,293,763**

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 23/07/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 23/07/26 6:55 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	14,369,000,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	5,830,653,871	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	79,603,100	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4,434,987,387	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	30,537,037,931	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	34,616,450	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,335,760,819	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,714,286	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	368,768,795	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	11,598,166,073
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan	0	1,843,844
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,657,028,757	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,833,082,894	0
0.0	117114	Suku Cadang	64,506,275	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	16,151,172,954	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	54,711,639,195	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada	28,585,616,694	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	135,560,257,780	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	123,155,315,370	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	62,521,847,674	0
0.0	117129	Persediaan Dalam Proses	27,674,759,613	0
0.0	117131	Bahan Baku	398,000	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	2,040,365,772	0
0.0	131111	Tanah	13,259,318,847,812	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,719,049,323,405	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,966,603,180,955	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	77,721,675,554	0
0.0	134112	Irigasi	48,042,810,642	0
0.0	134113	Jaringan	170,745,785,030	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	15,958,001,168	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	65,210,897,099	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	70,635,129,685	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,857,454,450,626
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	681,889,478,545
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	62,605,329,030
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	32,937,281,707
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	78,232,848,673
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	8,284,395,972

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 23/07/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 23/07/26 6:55 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	17,850,089,235	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan	0	17,850,089,235
0.0	162151	Software	709,224,505,413	0
0.0	162161	Lisensi	93,841,674,278	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	2,271,764,600	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	2,283,518,750	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	59,999,940	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	205,980,423,849	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	155,886,071,430	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang belum diregister	99,900,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	202,512,666,991
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	657,610,760,249
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	21,061,060,998
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	152,412,305,580
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	31,388,519,395
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	147,370,402,547
0.0	212113	Belanja modal yang masih harus dibayar	0	4,717,238,694
0.0	212144	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar	0	1,664,121,293
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	2,655,492,749
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	62,569,704,029
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	20,199,653,871
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	115,373,345
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,231,725,560,121
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	497,618,998,203	0
0.0	313211	Transfer Keluar	10,332,636,087	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	10,332,636,087
0.0	391111	Ekuitas	0	16,926,155,644,156
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	101,911,231	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	10,655,290	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	24,570,027,120
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	511,657,760
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	948,609,929
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	12,313,320
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,375,986,731
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	210,087,894
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	35,265,000
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	134,500,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	13,962,612,244

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 23/07/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 23/07/26 6:55 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian	0	2,538,800,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	304,759,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	60,656,787,100
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	1,830,079,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	730,565,742,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	288,848,360
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	325,357,405
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	13,132,155,295
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	314,599,064
3.0	425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN	0	2,482,427,391
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	24,400
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	170,696,255,373	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2,278,816	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	10,014,913,128	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	2,634,980,876	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	5,851,644,500	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	16,642,377,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,928,054,735	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	7,349,507,490	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	12,780,278,000	0
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	43,525,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	157,850,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	3,937,407,592	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	5,483,387,100	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	1,296,398,400	0
3.0	511194	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS	47,500,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,390,363,404	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	40,470,620,739	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	765,179	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,604,162,633	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	757,563,568	0
3.0	511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	49,500,000	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	689,484,888	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,552,617,915	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	4,539,307,550	0
3.0	511631	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	22,575,000	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	73,325,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	2,186,437,268	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 23/07/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 23/07/26 6:55 PM
Halaman : 4
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512211	Beban Uang Lembur	4,635,751,850	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	1,003,869,500	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	221,152,357,550	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	39,402,952,777	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	61,695,029,918	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	16,067,443,803	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1,240,400,779	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	207,540,406	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3,893,632,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	41,402,567,327	0
3.0	521211	Beban Bahan	59,609,017,815	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	5,798,110,000	0
3.0	521218	Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN	2,482,427,391	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	182,261,844,491	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	226,036,673	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	18,366,297,100	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	134,785,569	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,051,237,967	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	584,212,186	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	40,453,327,870	0
3.0	522141	Beban Sewa	140,524,929,712	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	18,670,237,561	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	385,893,398,831	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37,369,147,592	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,026,011,903	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17,608,948,945	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	4,489,926,326	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1,310,979,099	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	156,295,367,725	0
3.0	524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	769,628,199	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,175,385,211	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,878,009,059	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21,383,003,175	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3,022,905,074	0
3.0	526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	228,000,000,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	186,773,922,699	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	40,202,563,211	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2,433,279,872	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 23/07/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 23/07/26 6:55 PM
Halaman : 5
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	553,247,895	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	2,288,631,456	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	40,480,750	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	24,009,224,312	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	4,751,548,391	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	166,004,284	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	5,636,271,328	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,011,146,168	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	360,477,124	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada	8,951,685,181	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	143,135,670,360	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	297,000	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	1,206,328,195	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	56,917,525
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	189,125
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang –	0	35,140
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	993,278,641	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	3,011,935	0
JUMLAH			**26,080,602,804,613**	**26,080,602,804,613**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 23/07/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 23/07/26 6:59 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,231,873,430,921
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	497,618,998,203	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	948,609,929
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	12,313,320
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,521,304,898
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	205,272,012
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	35,265,000
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	135,250,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	9,230,272,000
3.0	425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian	0	2,538,800,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	304,759,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	60,581,111,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	1,830,079,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	402,736,187,000
3.0	425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	130,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	7,028,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	288,848,360
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	324,532,001
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	13,245,419,268
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	1,191,365,624
3.0	425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN	0	2,482,427,391
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	24,400
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	152,121,274,410	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	40,843,527
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,059,977	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	14,463
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	2,419,250
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	8,920,763,507	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,346,961,545	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	38,770
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	10,460,000
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	5,218,384,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	37,480,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	14,862,148,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,861,566,378	0
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	72,420
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	6,546,623,160	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	651,780

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 23/07/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 23/07/26 6:59 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	14,342,164,000	0
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	37,325,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	135,350,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	3,532,715,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	17,734,908
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,689,988,600	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	1,090,195,600	0
3.0	511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS	39,900,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,212,273,404	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	35,659,396,339	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	675,538	0
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	134
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,292,967,033	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	667,032,158	0
3.0	511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	44,000,000	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	609,754,888	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,248,309,075	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	5,177,296,000	0
3.0	511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	19,350,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	62,850,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,923,942,268	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	4,670,710,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1,020,866,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	245,326,899,797	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	2,163,835
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	43,268,417,816	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	56,716,887,791	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	6,004,668
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	15,883,015,143	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1,227,687,979	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	206,416,006	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,755,757,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	39,858,585,093	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	22,000,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	57,317,664,158	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	70,258
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5,758,160,000	0
3.0	521218	Belanja dalam Rangka Refund Dana PHLN	2,482,427,391	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 23/07/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 23/07/26 6:59 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	181,736,934,871	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	40,855,750	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18,630,571,461	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	18,764,411,080	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	134,674,569	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,974,270,645	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	582,652,186	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	33,181,172,066	0
3.0	522141	Belanja Sewa	135,631,975,569	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	1,175,000
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	17,151,184,561	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	324,789,240,339	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35,401,433,695	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	1,910,319,955	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3,908,533,703	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	21,470,272
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16,296,797,781	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	776,520,488	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4,483,816,326	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,310,979,099	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150,884,074,367	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	193,861,779
3.0	524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	763,788,199	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,059,723,211	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	543,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,582,257,059	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20,961,999,845	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	10,465,570
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	15,435,313
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3,002,788,435	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	9,823,658,730	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	206,788,559,125	0
3.0	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	116,000,000,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114,875,152,889	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	822,901,955	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8,037,686,440	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	25,938,628,522	0
3.0	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	96,493,750	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 23/07/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 23/07/26 6:59 PM
Halaman : 4
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	534121	Belanja Modal Irigasi	398,006,000	0
3.0	534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	514,673,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	5,796,840,143	0
JUMLAH			**2,729,853,334,071**	**2,729,853,334,071**

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA / AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/07/26 7:04 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	290,305,621,000	274,944,698,000	152,121,274,410	40,843,527	152,080,430,883	55.33	122,864,267,117
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,877,000	4,959,000	2,059,977	14,463	2,045,514	41.54	2,913,486
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	17,974,967,000	17,844,755,000	8,920,763,507	2,419,250	8,918,344,257	49.99	8,926,410,743
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,971,053,000	4,874,726,000	2,346,961,545	38,770	2,346,922,775	48.15	2,527,803,225
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	8,855,089,000	9,285,339,000	5,218,384,000	10,460,000	5,207,924,000	56.2	4,077,415,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	24,469,982,000	25,298,977,000	14,862,148,000	37,480,000	14,824,668,000	58.75	10,474,309,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,475,668,000	3,804,763,000	2,861,566,378	72,420	2,861,493,958	75.21	943,269,042
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	11,722,894,000	11,646,795,000	6,546,623,160	651,780	6,545,971,380	56.21	5,100,823,620
511129	Belanja Uang Makan PNS	38,235,852,000	38,229,500,000	14,342,164,000	0	14,342,164,000	37.52	23,887,336,000
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	93,800,000	93,800,000	37,325,000	0	37,325,000	39.79	56,475,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	328,860,000	328,860,000	135,350,000	0	135,350,000	41.16	193,510,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	7,090,439,000	6,868,299,000	3,532,715,000	17,734,908	3,514,980,092	51.44	3,353,318,908
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	8,418,864,000	8,418,864,000	4,689,988,600	0	4,689,988,600	55.71	3,728,875,400
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	2,314,104,000	2,389,946,000	1,090,195,600	0	1,090,195,600	45.62	1,299,750,400
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	93,800,000	93,800,000	39,900,000	0	39,900,000	42.54	53,900,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	417,355,870,000	404,128,081,000	216,747,419,177	109,715,118	216,637,704,059	53.63	187,490,376,941
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	2,493,260,000	2,493,260,000	1,212,273,404	0	1,212,273,404	48.62	1,280,986,596
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	2,493,260,000	2,493,260,000	1,212,273,404	0	1,212,273,404	48.62	1,280,986,596
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511514	Belanja Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau	0	928,727,000	0	0	0	0	928,727,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	0	928,727,000	0	0	0	0	928,727,000
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	69,194,971,000	72,283,983,000	35,659,396,339	0	35,659,396,339	49.33	36,624,586,661
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,629,000	2,751,000	675,538	134	675,404	24.56	2,075,596
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,531,850,000	5,623,443,000	2,292,967,033	0	2,292,967,033	40.78	3,330,475,967
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,869,870,000	1,923,678,000	667,032,158	0	667,032,158	34.67	1,256,645,842
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	61,250,000	99,750,000	44,000,000	0	44,000,000	44.11	55,750,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,445,493,000	1,453,168,000	609,754,888	0	609,754,888	41.96	843,413,112
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,265,717,000	4,417,321,000	2,248,309,075	0	2,248,309,075	50.9	2,169,011,925
511628	Belanja Uang Makan PPPK	13,916,041,000	14,242,885,000	5,177,296,000	0	5,177,296,000	36.35	9,065,589,000
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	66,000,000	66,000,000	19,350,000	0	19,350,000	29.32	46,650,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	224,400,000	224,400,000	62,850,000	0	62,850,000	28.01	161,550,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/07/26 7:04 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,128,266,000	3,743,976,000	1,923,942,268	0	1,923,942,268	51.39	1,820,033,732
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	100,706,487,000	104,081,355,000	48,705,573,299	134	48,705,573,165	46.8	55,375,781,835
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	18,604,370,000	17,320,692,000	4,670,710,000	0	4,670,710,000	26.97	12,649,982,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	3,126,964,000	3,226,076,000	1,020,866,000	0	1,020,866,000	31.64	2,205,210,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	21,731,334,000	20,546,768,000	5,691,576,000	0	5,691,576,000	27.7	14,855,192,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	462,597,518,000	466,856,230,000	245,326,899,797	2,163,835	245,324,735,962	52.55	221,531,494,038
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	94,647,416,000	97,237,758,000	43,268,417,816	0	43,268,417,816	44.5	53,969,340,184
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	557,244,934,000	564,093,988,000	288,595,317,613	2,163,835	288,593,153,778	51.16	275,500,834,222
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,099,531,885,000	1,096,272,179,000	560,952,159,493	111,879,087	560,840,280,406	51.17	535,431,898,594
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	135,658,140,000	123,327,475,000	56,716,887,791	6,004,668	56,710,883,123	45.99	66,616,591,877
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	46,218,498,000	42,171,975,000	15,883,015,143	0	15,883,015,143	37.66	26,288,959,857
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3,098,688,000	3,003,384,000	1,227,687,979	0	1,227,687,979	40.88	1,775,696,021
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	770,009,000	666,408,000	206,416,006	0	206,416,006	30.97	459,991,994
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	11,619,190,000	10,852,358,000	3,755,757,000	0	3,755,757,000	34.61	7,096,601,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	83,039,079,000	83,194,999,000	39,858,585,093	0	39,858,585,093	47.91	43,336,413,907
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	40,000,000	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	280,443,604,000	263,238,599,000	117,670,349,012	6,004,668	117,664,344,344	44.7	145,574,254,656
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	225,228,707,000	130,779,882,000	57,317,664,158	70,258	57,317,593,900	43.83	73,462,288,100
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	18,030,975,000	23,165,804,000	5,758,160,000	0	5,758,160,000	24.86	17,407,644,000
521218	Belanja dalam Rangka Refund Dana PHLN	0	2,482,428,000	2,482,427,391	0	2,482,427,391	100	609
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	245,095,830,000	218,238,959,000	181,736,934,871	0	181,736,934,871	83.27	36,502,024,129
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,000,000	0	0	0	0		0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	923,212,000	2,688,705,000	40,855,750	0	40,855,750	1.52	2,647,849,250
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	65,000,000	0	0	0	0		0
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	35,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	489,383,724,000	377,355,778,000	247,336,042,170	70,258	247,335,971,912	65.54	130,019,806,088
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	39,385,242,000	35,745,836,000	18,630,571,461	0	18,630,571,461	52.12	17,115,264,539
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	200,000	0	0	0	0		0
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	1,100,000,000	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/07/26 7:04 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	40,485,442,000	36,345,836,000	18,630,571,461	0	18,630,571,461	51.26	17,715,264,539
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	53,001,658,000	42,213,313,000	18,764,411,080	0	18,764,411,080	44.45	23,448,901,920
522112	Belanja Langganan Telepon	898,896,000	544,621,000	134,674,569	0	134,674,569	24.73	409,946,431
522113	Belanja Langganan Air	7,831,974,000	5,145,517,000	1,974,270,645	0	1,974,270,645	38.37	3,171,246,355
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,412,884,000	1,331,420,000	582,652,186	0	582,652,186	43.76	748,767,814
522131	Belanja Jasa Konsultan	235,283,639,000	217,784,106,000	33,181,172,066	0	33,181,172,066	15.24	184,602,933,934
522141	Belanja Sewa	138,121,302,000	189,521,288,000	135,631,975,569	0	135,631,975,569	71.57	53,889,312,431
522151	Belanja Jasa Profesi	95,950,455,000	56,552,440,000	17,151,184,561	1,175,000	17,150,009,561	30.33	39,402,430,439
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,669,279,404,000	1,582,972,569,000	324,789,240,339	0	324,789,240,339	20.52	1,258,183,328,661
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,201,780,212,000	2,096,065,274,000	532,209,581,015	1,175,000	532,208,406,015	25.39	1,563,856,867,985
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	98,489,212,000	85,900,772,000	35,401,433,695	0	35,401,433,695	41.21	50,499,338,305
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,601,073,000	4,788,498,000	1,910,319,955	0	1,910,319,955	39.89	2,878,178,045
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	6,840,774,000	6,787,488,000	3,908,533,703	0	3,908,533,703	57.58	2,878,954,297
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55,416,734,000	44,225,472,000	16,296,797,781	21,470,272	16,275,327,509	36.85	27,950,144,491
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,712,400,000	1,683,600,000	776,520,488	0	776,520,488	46.12	907,079,512
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120,000,000	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	821,720,000	1,008,000,000	0	0	0	0	1,008,000,000
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	8,026,743,000	6,646,694,000	4,483,816,326	0	4,483,816,326	67.46	2,162,877,674
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	2,858,773,000	2,108,886,000	1,310,979,099	0	1,310,979,099	62.16	797,906,901
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	177,887,429,000	153,209,410,000	64,088,401,047	21,470,272	64,066,930,775	41.83	89,142,479,225
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	471,112,710,000	298,359,430,000	150,884,074,367	193,861,779	150,690,212,588	50.57	147,669,217,412
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2,932,609,000	2,027,509,000	763,788,199	0	763,788,199	37.67	1,263,720,801
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,761,668,000	14,065,464,000	6,059,723,211	0	6,059,723,211	43.08	8,005,740,789
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	199,125,615,000	53,913,988,000	20,582,257,059	543,000	20,581,714,059	38.18	33,332,273,941
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	106,576,072,000	51,101,273,000	20,961,999,845	10,465,570	20,951,534,275	41.02	30,149,738,725
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	799,508,674,000	419,467,664,000	199,251,842,681	204,870,349	199,046,972,332	47.5	220,420,691,668
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	28,482,328,000	15,339,520,000	3,002,788,435	15,435,313	2,987,353,122	19.58	12,352,166,878
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1,109,473,000	698,098,000	0	0	0	0	698,098,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	29,591,801,000	16,037,618,000	3,002,788,435	15,435,313	2,987,353,122	18.72	13,050,264,878
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	0	36,458,064,000	9,823,658,730	0	9,823,658,730	26.95	26,634,405,270

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/07/26 7:04 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	0	36,458,064,000	9,823,658,730	0	9,823,658,730	26.95	26,634,405,270
5262	Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas							
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan	7,500,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262	7,500,000,000	0	0	0	0		0
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	1,376,400,000,000	284,960,350,000	206,788,559,125	0	206,788,559,125	72.57	78,171,790,875
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik	0	672,750,000,000	116,000,000,000	0	116,000,000,000	17.24	556,750,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	1,376,400,000,000	957,710,350,000	322,788,559,125	0	322,788,559,125	33.7	634,921,790,875
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,402,980,886,000	4,355,888,593,000	1,514,801,793,676	249,025,860	1,514,552,767,816	34.78	2,841,335,825,184
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	842,740,795,000	768,115,033,000	114,875,152,889	0	114,875,152,889	14.96	653,239,880,111
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,500,000,000	2,350,000,000	822,901,955	0	822,901,955	35.02	1,527,098,045
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	845,240,795,000	770,465,033,000	115,698,054,844	0	115,698,054,844	15.02	654,766,978,156
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,274,972,000	55,147,665,000	8,037,686,440	0	8,037,686,440	14.57	47,109,978,560
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	400,000,000	3,384,900,000	0	0	0	0	3,384,900,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	182,341,431,000	132,404,529,000	25,938,628,522	0	25,938,628,522	19.59	106,465,900,478
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	210,016,403,000	190,937,094,000	33,976,314,962	0	33,976,314,962	17.79	156,960,779,038
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2,521,733,000	10,977,056,000	96,493,750	0	96,493,750	0.88	10,880,562,250
534121	Belanja Modal Irigasi	100,000,000	398,006,000	398,006,000	0	398,006,000	100	0
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	1,125,100,000	515,381,000	514,673,000	0	514,673,000	99.86	708,000
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	300,000,000	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	4,046,833,000	12,040,443,000	1,009,172,750	0	1,009,172,750	8.38	11,031,270,250
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	196,088,153,000	171,478,278,000	5,796,840,143	0	5,796,840,143	3.38	165,681,437,857
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	42,095,045,000	29,922,236,000	0	0	0	0	29,922,236,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	238,183,198,000	201,400,514,000	5,796,840,143	0	5,796,840,143	2.88	195,603,673,857
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,297,487,229,000	1,174,843,084,000	156,480,382,699	0	156,480,382,699	13.32	1,018,362,701,301
	JUMLAH BELANJA	7,800,000,000,000	6,627,003,856,000	2,232,234,335,868	360,904,947	2,231,873,430,921	33.68	4,395,130,425,079

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	**PELAYANAN UMUM**							
01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**							
CM	**Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**							
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	391,328,000,000	237,096,594,000	88,157,081,404	23,742,474	88,133,338,930	37.17	148,963,255,070
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	148,768,032,000	56,681,506,000	21,940,365,020	35,044,212	21,905,320,808	38.65	34,776,185,192
1276	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	192,500,000,000	95,692,212,000	37,794,557,178	52,339,280	37,742,217,898	39.44	57,949,994,102
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	217,000,000,000	87,478,132,000	36,722,156,520	0	36,722,156,520	41.98	50,755,975,480
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	126,322,000,000	63,353,339,000	26,266,078,286	0	26,266,078,286	41.46	37,087,260,714
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	703,944,899,000	355,444,369,000	105,252,956,914	346,563,378	104,906,393,536	29.51	250,537,975,464
	JUMLAH PROGRAM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	**1,779,862,931,000**	**895,746,152,000**	**316,133,195,322**	**457,689,344**	**315,675,505,978**	**35.29**	**580,070,646,022**
CR	**Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum**							
1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	72,700,000,000	24,086,066,000	17,105,323,422	0	17,105,323,422	71.02	6,980,742,578
1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	57,000,000,000	26,433,870,000	14,542,626,936	0	14,542,626,936	55.02	11,891,243,064
6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	197,969,299,000	157,437,907,000	144,740,855,154	0	144,740,855,154	91.94	12,697,051,846
	JUMLAH PROGRAM Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	**327,669,299,000**	**207,957,843,000**	**176,388,805,512**	**0**	**176,388,805,512**	**84.82**	**31,569,037,488**
WA	**Program Dukungan Manajemen**							
4255	Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	2,313,533,948,000	1,755,159,098,000	649,575,759,206	429,606,782	649,146,152,424	36.99	1,106,012,945,576
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal	1,442,179,893,000	164,282,470,000	74,365,761,415	159,624,443	74,206,136,972	45.17	90,076,333,028
6084	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal	18,714,213,760,000	16,122,877,485,000	5,599,190,034,900	536,683,191	5,598,653,351,709	34.72	10,524,224,133,291
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal	4,585,486,356,000	3,685,695,948,000	258,840,232,475	15,829	258,840,216,646	7.02	3,426,855,731,354
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal	677,025,525,000	313,414,860,000	80,294,321,228	3,844,533	80,290,476,695	25.62	233,124,383,305
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	**27,732,439,482,000**	**22,041,429,861,000**	**6,662,266,109,224**	**1,129,774,778**	**6,661,136,334,446**	**30.23**	**15,380,293,526,554**
	JUMLAH SUBFUNGSI LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	**29,839,971,712,000**	**23,145,133,856,000**	**7,154,788,110,058**	**1,587,464,122**	**7,153,200,645,936**	**30.91**	**15,991,933,210,0**
03	**PELAYANAN UMUM**							
CM	**Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**							
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	343,848,148,000	78,849,260,000	29,171,749,740	576,415,980	28,595,333,760	36.27	50,253,926,240
	JUMLAH PROGRAM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	**343,848,148,000**	**78,849,260,000**	**29,171,749,740**	**576,415,980**	**28,595,333,760**	**37**	**50,253,926,240**
CP	**Program Tata Kelola Kependudukan**							
1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	907,805,884,000	826,915,538,000	440,846,620,764	0	440,846,620,764	53.31	386,068,917,236
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	493,095,832,000	474,904,646,000	342,100,003,784	0	342,100,003,784	72.04	132,804,642,216
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6,834,000,000	3,164,396,000	2,376,076,648	0	2,376,076,648	75.09	788,319,352

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
6997	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital	1,365,876,852,000	1,365,654,196,000	16,199,831,736	0	16,199,831,736	1.19	1,349,454,364,264
	JUMLAH PROGRAM Program Tata Kelola Kependudukan	**2,773,612,568,000**	**2,670,638,776,000**	**801,522,532,932**	**0**	**801,522,532,932**	**30.01**	**1,869,116,243,068**
WA	**Program Dukungan Manajemen**							
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	5,069,735,000	3,433,276,000	978,728,509	0	978,728,509	28.51	2,454,547,491
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	7,587,606,499,000	7,167,928,691,000	3,507,332,425,377	191,844,763	3,507,140,580,614	48.93	3,660,788,110,386
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	12,079,078,000	7,976,089,000	3,646,559,906	0	3,646,559,906	45.72	4,329,529,094
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	188,536,315,000	105,959,425,000	38,595,393,969	16,137,000	38,579,256,969	36.41	67,380,168,031
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	1,205,365,744,000	963,937,755,000	303,619,183,241	0	303,619,183,241	31.5	660,318,571,759
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	6,305,442,000	5,308,237,000	0	0	0	0	5,308,237,000
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	836,461,824,000	785,998,048,000	419,950,639,449	38,082,330	419,912,557,119	53.42	366,085,490,881
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	8,819,624,000	8,267,435,000	6,221,989,510	0	6,221,989,510	75.26	2,045,445,490
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	29,097,024,000	19,906,854,000	6,394,581,006	0	6,394,581,006	32.12	13,512,272,994
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	18,512,384,000	13,392,302,000	7,212,042,277	0	7,212,042,277	53.85	6,180,259,723
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	595,769,790,000	432,089,031,000	296,645,041,044	0	296,645,041,044	68.65	135,443,989,956
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	35,200,000,000	13,660,471,000	7,477,864,163	0	7,477,864,163	54.74	6,182,606,837
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	926,053,139,000	800,282,857,000	463,248,029,893	400,997,278	462,847,032,615	57.84	337,435,824,385
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	55,000,000,000	24,485,384,000	7,621,881,993	0	7,621,881,993	31.13	16,863,502,007
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	44,000,000,000	21,392,206,000	9,471,344,388	0	9,471,344,388	44.27	11,920,861,612
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	21,053,043,000	11,936,562,000	3,065,576,316	5,412,000	3,060,164,316	25.64	8,876,397,684
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	1,069,825,306,000	967,782,420,000	469,065,365,318	23,282,171	469,042,083,147	48.47	498,740,336,853
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	11,495,000,000	9,096,780,000	2,756,930,000	0	2,756,930,000	30.31	6,339,850,000
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	29,618,380,000	15,774,407,000	3,468,388,220	90,123,000	3,378,265,220	21.42	12,396,141,780
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	25,300,000,000	10,214,149,000	438,251,000	0	438,251,000	4.29	9,775,898,000
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	1,751,059,816,000	1,671,773,587,000	806,329,123,094	32,031,659	806,297,091,435	48.23	865,476,495,565
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	104,070,142,000	60,710,342,000	20,889,695,871	0	20,889,695,871	34.41	39,820,646,129
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	28,457,000,000	14,903,647,000	6,686,517,002	42,350,000	6,644,167,002	44.58	8,259,479,998
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	74,250,000,000	37,231,931,000	9,199,753,244	0	9,199,753,244	24.71	28,032,177,756
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	22,000,000,000	11,131,945,000	6,013,278,249	6,884,284	6,006,393,965	53.96	5,125,551,035
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	1,412,297,403,000	1,303,581,015,000	618,823,542,172	166,618,254	618,656,923,918	47.46	684,924,091,082

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	27,500,000,000	20,820,217,000	18,832,775,082	0	18,832,775,082	90.45	1,987,441,918
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	20,065,067,000	12,283,678,000	5,481,085,566	0	5,481,085,566	44.62	6,802,592,434
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	22,000,000,000	12,357,202,000	4,301,375,452	14,932,500	4,286,442,952	34.69	8,070,759,048
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	786,463,898,000	741,364,943,000	381,579,644,567	116,668,563	381,462,976,004	51.45	359,901,966,996
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	6,440,115,000	22,199,067,000	3,437,830,550	0	3,437,830,550	15.49	18,761,236,450
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	22,488,719,000	12,158,630,000	6,983,747,100	79,781,350	6,903,965,750	56.78	5,254,664,250
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28,140,530,000	14,586,286,000	1,243,377,993	0	1,243,377,993	8.52	13,342,908,007
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,789,307,091,000	1,402,053,147,000	518,461,108,726	72,284,993	518,388,823,733	36.97	883,664,323,267
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	42,454,841,000	28,133,138,000	9,631,238,694	0	9,631,238,694	34.23	18,501,899,306
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32,777,635,000	6,280,824,000	2,118,830,967	0	2,118,830,967	33.73	4,161,993,033
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	11,000,000,000	6,198,148,000	3,271,646,719	0	3,271,646,719	52.78	2,926,501,281
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	782,451,098,000	748,672,716,000	413,193,307,582	79,565,299	413,113,742,283	55.18	335,558,973,717
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	13,159,498,000	6,526,971,000	2,447,390,649	0	2,447,390,649	37.5	4,079,580,351
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	19,250,000,000	9,988,110,000	5,077,702,190	0	5,077,702,190	50.84	4,910,407,810
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	1,925,000,000	775,720,000	448,185,529	0	448,185,529	57.78	327,534,471
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	658,649,893,000	611,414,804,000	295,974,503,429	67,709,191	295,906,794,238	48.4	315,508,009,762
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	220,000,000	62,370,000	0	0	0	0	62,370,000
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	16,749,425,000	7,112,391,000	6,399,333,336	11,880,000	6,387,453,336	89.81	724,937,664
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,400,000,000	2,727,835,000	1,863,664,077	1,707,508	1,861,956,569	68.26	865,878,431
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,249,674,142,000	2,767,767,013,000	1,296,100,006,113	95,136,624	1,296,004,869,489	46.82	1,471,762,143,511
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	26,400,000,000	12,999,580,000	1,567,846,082	885,500	1,566,960,582	12.05	11,432,619,418
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	37,257,000,000	13,583,845,000	7,231,355,483	1,703,900	7,229,651,583	53.22	6,354,193,417
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	**23,702,076,640,000**	**20,948,221,481,000**	**10,010,798,081,097**	**1,556,018,167**	**10,009,242,062,930**	**47.79**	**10,938,979,418,070**
	JUMLAH SUBFUNGSI PELAYANAN UMUM	**26,819,537,356,000**	**23,697,709,517,000**	**10,841,492,363,769**	**2,132,434,147**	**10,839,359,929,622**	**45.75**	**12,858,349,587,3**
06	**PEMBANGUNAN DAERAH**							
CM	**Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**							
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	843,399,970,000	265,471,598,000	57,682,004,800	6,104,000	57,675,900,800	21.73	207,795,697,200
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	1,159,751,320,000	905,713,494,000	164,903,678,800	4,332,566	164,899,346,234	18.21	740,814,147,766

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	626,225,530,000	102,090,408,000	74,905,348,532	164,233,020	74,741,115,512	73.21	27,349,292,488
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	152,600,000,000	62,322,750,000	38,457,451,676	55,768,076	38,401,683,600	61.62	23,921,066,400
1283	Pembinaan inovasi daerah	59,500,000,000	25,629,954,000	228,485,250	0	228,485,250	0.89	25,401,468,750
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	973,362,460,000	1,256,636,836,000	336,427,815,066	1,386,000	336,426,429,066	26.77	920,210,406,934
6138	Penataan kelembagaan Desa	217,000,000,000	140,783,090,000	29,997,164,750	3,381,462	29,993,783,288	21.3	110,789,306,712
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	1,002,050,007,000	698,679,611,000	168,822,755,878	102,463,627	168,720,292,251	24.15	529,959,318,749
6142	Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	180,250,000,000	96,905,501,000	29,947,473,549	10,738,000	29,936,735,549	30.89	66,968,765,451
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	587,920,795,000	423,099,222,000	211,330,976,059	30,364,460	211,300,611,599	49.94	211,798,610,401
	JUMLAH PROGRAM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	**5,802,060,082,000**	**3,977,332,464,000**	**1,112,703,154,360**	**378,771,211**	**1,112,324,383,149**	**27.98**	**2,865,008,080,851**
	JUMLAH SUBFUNGSI PEMBANGUNAN DAERAH	**5,802,060,082,000**	**3,977,332,464,000**	**1,112,703,154,360**	**378,771,211**	**1,112,324,383,149**	**27.98**	**2,865,008,080,85**
90	**PELAYANAN UMUM LAINNYA**							
CM	**Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**							
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	837,620,000,000	382,220,804,000	106,366,082,158	0	106,366,082,158	27.83	275,854,721,842
	JUMLAH PROGRAM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	**837,620,000,000**	**382,220,804,000**	**106,366,082,158**	**0**	**106,366,082,158**	**27.83**	**275,854,721,842**
	JUMLAH SUBFUNGSI PELAYANAN UMUM LAINNYA	**837,620,000,000**	**382,220,804,000**	**106,366,082,158**	**0**	**106,366,082,158**	**27.83**	**275,854,721,842**
	JUMLAH FUNGSI PELAYANAN UMUM	**63,299,189,150,000**	**51,202,396,641,000**	**19,215,349,710,345**	**4,098,669,480**	**19,211,251,040,865**	**37.53**	**31,991,145,600,1**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATKER

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/07/26 7:06 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
010010100KP	BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA							
403200	SEKRETARIAT JENDERAL	2,310,809,594,000	1,844,206,433,000	546,608,213,638	63,651,636	546,544,562,002	29.64	1,297,661,870,998
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA	2,310,809,594,000	1,844,206,433,000	546,608,213,638	63,651,636	546,544,562,002	29.64	1,297,661,870,998
010010200KP	BA(010) ES1(01) JAWA BARAT							
448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	544,546,595,000	501,005,805,000	231,706,133,798	18,350,774	231,687,783,024	46.24	269,318,021,976
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) JAWA BARAT	544,546,595,000	501,005,805,000	231,706,133,798	18,350,774	231,687,783,024	46.25	269,318,021,976
010010800KD	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI							
677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	42,067,055,000	36,690,920,000	17,354,179,836	556,075	17,353,623,761	47.3	19,337,296,239
	JUMLAH BELANJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	42,067,055,000	36,690,920,000	17,354,179,836	556,075	17,353,623,761	47.3	19,337,296,239
010011300KD	SEKRETARIAT JENDERAL							
683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	44,111,550,000	40,822,656,000	19,979,458,043	0	19,979,458,043	48.94	20,843,197,957
	JUMLAH BELANJA SEKRETARIAT JENDERAL	44,111,550,000	40,822,656,000	19,979,458,043	0	19,979,458,043	48.94	20,843,197,957
010011700KD	BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA							
677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	57,360,865,000	48,087,980,000	13,376,908,824	78	13,376,908,746	27.82	34,711,071,254
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA	57,360,865,000	48,087,980,000	13,376,908,824	78	13,376,908,746	27.82	34,711,071,254
010011900KD	SEKRETARIAT JENDERAL							
677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	40,637,259,000	38,454,587,000	21,831,047,863	127	21,831,047,736	56.77	16,623,539,264
	JUMLAH BELANJA SEKRETARIAT JENDERAL	40,637,259,000	38,454,587,000	21,831,047,863	127	21,831,047,736	56.77	16,623,539,264
010012300KD	SEKRETARIAT JENDERAL							
683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	39,144,041,000	37,367,271,000	16,915,057,313	379	16,915,056,934	45.27	20,452,214,066
	JUMLAH BELANJA SEKRETARIAT JENDERAL	39,144,041,000	37,367,271,000	16,915,057,313	379	16,915,056,934	45.27	20,452,214,066
010012500KD	SEKRETARIAT JENDERAL							
683091	IPDN KAMPUS PAPUA	50,192,396,000	47,501,257,000	29,216,513,505	0	29,216,513,505	61.51	18,284,743,495
	JUMLAH BELANJA SEKRETARIAT JENDERAL	50,192,396,000	47,501,257,000	29,216,513,505	0	29,216,513,505	61.51	18,284,743,495
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	105,160,634,000	79,779,959,000	29,526,170,873	19,527,581	29,506,643,292	36.99	50,273,315,708
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	105,160,634,000	79,779,959,000	29,526,170,873	19,527,581	29,506,643,292	37.01	50,273,315,708
	JUMLAH BELANJA 01	3,234,029,989,000	2,673,916,868,000	926,513,683,693	102,086,650	926,411,597,043	34.65	1747505270957
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
010020100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI							
027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	135,906,008,000	114,996,537,000	66,947,663,026	3,462,030	66,944,200,996	58.21	48,052,336,004
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	135,906,008,000	114,996,537,000	66,947,663,026	3,462,030	66,944,200,996	58.22	48,052,336,004
	JUMLAH BELANJA 02	135,906,008,000	114,996,537,000	66,947,663,026	3,462,030	66,944,200,996	58.22	48052336004

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/07/26 7:06 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM							
010030100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI							
027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	359,205,948,000	260,863,413,000	204,912,023,100	36,454,298	204,875,568,802	78.54	55,987,844,198
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	359,205,948,000	260,863,413,000	204,912,023,100	36,454,298	204,875,568,802	78.55	55,987,844,198
	JUMLAH BELANJA 03	359,205,948,000	260,863,413,000	204,912,023,100	36,454,298	204,875,568,802	78.55	55987844198
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN							
010040100KP	BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA							
027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	362,032,974,000	317,109,670,000	103,265,769,649	11,435,561	103,254,334,088	32.56	213,855,335,912
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA	362,032,974,000	317,109,670,000	103,265,769,649	11,435,561	103,254,334,088	32.56	213,855,335,912
	JUMLAH BELANJA 04	362,032,974,000	317,109,670,000	103,265,769,649	11,435,561	103,254,334,088	32.56	213855335912
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA							
010050100KP	BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA							
027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	250,229,069,000	203,318,307,000	69,294,663,125	1,416,941	69,293,246,184	34.08	134,025,060,816
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA	250,229,069,000	203,318,307,000	69,294,663,125	1,416,941	69,293,246,184	34.08	134,025,060,816
010050400KD	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA							
028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	22,402,719,000	16,801,984,000	9,357,896,132	555,403	9,357,340,729	55.69	7,444,643,271
	JUMLAH BELANJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	22,402,719,000	16,801,984,000	9,357,896,132	555,403	9,357,340,729	55.7	7,444,643,271
010050500KD	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA							
028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	35,664,381,000	16,010,584,000	9,526,735,449	16,757,910	9,509,977,539	59.4	6,500,606,461
	JUMLAH BELANJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	35,664,381,000	16,010,584,000	9,526,735,449	16,757,910	9,509,977,539	59.5	6,500,606,461
010051200KD	BA(010) ES1(05) LAMPUNG							
613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	23,808,784,000	15,748,963,000	9,084,647,779	555,180	9,084,092,599	57.68	6,664,870,401
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) LAMPUNG	23,808,784,000	15,748,963,000	9,084,647,779	555,180	9,084,092,599	57.68	6,664,870,401
	JUMLAH BELANJA 05	332,104,953,000	251,879,838,000	97,263,942,485	19,285,434	97,244,657,051	38.62	154635180949
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH							
010060100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	295,514,771,000	230,176,524,000	86,714,536,871	34,394,053	86,680,142,818	37.66	143,496,381,182
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	295,514,771,000	230,176,524,000	86,714,536,871	34,394,053	86,680,142,818	37.67	143,496,381,182
	JUMLAH BELANJA 06	295,514,771,000	230,176,524,000	86,714,536,871	34,394,053	86,680,142,818	37.67	143496381182
07	DITJEN OTONOMI DAERAH							
010070100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI							
621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	148,250,900,000	107,926,687,000	50,266,920,273	23,415,632	50,243,504,641	46.55	57,683,182,359
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM	148,250,900,000	107,926,687,000	50,266,920,273	23,415,632	50,243,504,641	46.58	57,683,182,359

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/07/26 7:06 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	NEGERI							
	JUMLAH BELANJA 07	148,250,900,000	107,926,687,000	50,266,920,273	23,415,632	50,243,504,641	46.58	57683182359
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
010080100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI							
634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,241,806,537,000	2,150,060,431,000	457,175,232,914	6,571,363	457,168,661,551	21.26	1,692,891,769,449
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2,241,806,537,000	2,150,060,431,000	457,175,232,914	6,571,363	457,168,661,551	21.26	1,692,891,769,449
	JUMLAH BELANJA 08	2,241,806,537,000	2,150,060,431,000	457,175,232,914	6,571,363	457,168,661,551	21.26	1692891769449
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH							
010090100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI							
662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	189,391,793,000	127,738,920,000	56,280,297,669	60,480,783	56,219,816,886	44.01	71,519,103,114
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	189,391,793,000	127,738,920,000	56,280,297,669	60,480,783	56,219,816,886	44.06	71,519,103,114
	JUMLAH BELANJA 09	189,391,793,000	127,738,920,000	56,280,297,669	60,480,783	56,219,816,886	44.06	71519103114
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI							
010110100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI							
403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	91,594,938,000	71,980,289,000	31,823,805,636	8,769,381	31,815,036,255	44.2	40,165,252,745
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	91,594,938,000	71,980,289,000	31,823,805,636	8,769,381	31,815,036,255	44.21	40,165,252,745
	JUMLAH BELANJA 11	91,594,938,000	71,980,289,000	31,823,805,636	8,769,381	31,815,036,255	44.21	40165252745
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
010120100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	201,684,003,000	137,793,451,000	70,807,838,647	3,885,144	70,803,953,503	51.38	66,989,497,497
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	201,684,003,000	137,793,451,000	70,807,838,647	3,885,144	70,803,953,503	51.39	66,989,497,497
010120200KD	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	55,784,832,000	47,798,968,000	20,588,669,491	370,996	20,588,298,495	43.07	27,210,669,505
	JUMLAH BELANJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	55,784,832,000	47,798,968,000	20,588,669,491	370,996	20,588,298,495	43.07	27,210,669,505
010120400KD	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
027114	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	38,293,117,000	34,220,679,000	16,856,275,065	42,713,887	16,813,561,178	49.13	17,407,117,822
	JUMLAH BELANJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	38,293,117,000	34,220,679,000	16,856,275,065	42,713,887	16,813,561,178	49.26	17,407,117,822
010120800KD	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	31,005,252,000	27,833,350,000	13,919,954,218	1,305,251	13,918,648,967	50.01	13,914,701,033
	JUMLAH BELANJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	31,005,252,000	27,833,350,000	13,919,954,218	1,305,251	13,918,648,967	50.01	13,914,701,033

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
010121900KD	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
027177	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	56,465,525,000	47,971,166,000	15,417,198,176	2,765,934	15,414,432,242	32.13	32,556,733,758
	JUMLAH BELANJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	56,465,525,000	47,971,166,000	15,417,198,176	2,765,934	15,414,432,242	32.14	32,556,733,758
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	26,928,460,000	24,737,065,000	13,480,524,955	3,508,550	13,477,016,405	54.48	11,260,048,595
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	26,928,460,000	24,737,065,000	13,480,524,955	3,508,550	13,477,016,405	54.5	11,260,048,595
	JUMLAH BELANJA 12	410,161,189,000	320,354,679,000	151,070,460,552	54,549,762	151,015,910,790	47.16	169338768210
	JUMLAH BELANJA	7,800,000,000,000	6,627,003,856,000	2,232,234,335,868	360,904,947	2,231,873,430,921	33.68	4,395,130,425,079

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/07/26 7:07 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	477,863,386,000	475,576,342,000	236,859,166,405	30,900,722	236,828,265,683	49.8	238,748,076,317
52	BELANJA BARANG	2,193,127,607,000	1,720,449,725,000	581,734,076,323	71,185,928	581,662,890,395	33.81	1,138,786,834,605
53	BELANJA MODAL	563,038,996,000	477,890,801,000	107,920,440,965	0	107,920,440,965	22.58	369,970,360,035
	JUMLAH BELANJA (01) SEKRETARIAT JENDERAL	3,234,029,989,000	2,673,916,868,000	926,513,683,693	102,086,650	926,411,597,043	34.65	1,747,505,270,957
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	51,181,788,000	51,100,821,000	28,883,849,474	3,462,030	28,880,387,444	56.52	22,220,433,556
52	BELANJA BARANG	75,415,268,000	57,948,554,000	35,261,288,776	0	35,261,288,776	60.85	22,687,265,224
53	BELANJA MODAL	9,308,952,000	5,947,162,000	2,802,524,776	0	2,802,524,776	47.12	3,144,637,224
	JUMLAH BELANJA (02) INSPEKTORAT JENDERAL	135,906,008,000	114,996,537,000	66,947,663,026	3,462,030	66,944,200,996	58.22	48,052,336,004
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM							
51	BELANJA PEGAWAI	47,920,056,000	47,905,720,000	26,332,983,032	36,454,298	26,296,528,734	54.89	21,609,191,266
52	BELANJA BARANG	304,285,892,000	209,333,443,000	175,140,613,050	0	175,140,613,050	83.67	34,192,829,950
53	BELANJA MODAL	7,000,000,000	3,624,250,000	3,438,427,018	0	3,438,427,018	94.87	185,822,982
	JUMLAH BELANJA (03) DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	359,205,948,000	260,863,413,000	204,912,023,100	36,454,298	204,875,568,802	78.55	55,987,844,198
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN							
51	BELANJA PEGAWAI	55,902,363,000	55,902,363,000	29,087,633,541	741,261	29,086,892,280	52.03	26,815,470,720
52	BELANJA BARANG	301,333,589,000	217,843,088,000	68,357,485,114	10,694,300	68,346,790,814	31.37	149,496,297,186
53	BELANJA MODAL	4,797,022,000	43,364,219,000	5,820,650,994	0	5,820,650,994	13.42	37,543,568,006
	JUMLAH BELANJA (04) DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	362,032,974,000	317,109,670,000	103,265,769,649	11,435,561	103,254,334,088	32.56	213,855,335,912
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA							
51	BELANJA PEGAWAI	93,414,664,000	93,137,475,000	47,563,554,357	2,230,995	47,561,323,362	51.07	45,576,151,638
52	BELANJA BARANG	225,371,289,000	147,101,403,000	49,277,311,823	17,054,439	49,260,257,384	33.49	97,841,145,616
53	BELANJA MODAL	13,319,000,000	11,640,960,000	423,076,305	0	423,076,305	3.63	11,217,883,695
	JUMLAH BELANJA (05) DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	332,104,953,000	251,879,838,000	97,263,942,485	19,285,434	97,244,657,051	38.62	154,635,180,949
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	72,538,479,000	72,452,099,000	35,185,683,376	8,465,832	35,177,217,544	48.55	37,274,881,456
52	BELANJA BARANG	196,874,421,000	138,091,888,000	43,589,539,208	25,928,221	43,563,610,987	31.55	94,528,277,013
53	BELANJA MODAL	26,101,871,000	19,632,537,000	7,939,314,287	0	7,939,314,287	40.44	11,693,222,713
	JUMLAH BELANJA (06) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	295,514,771,000	230,176,524,000	86,714,536,871	34,394,053	86,680,142,818	37.67	143,496,381,182
07	DITJEN OTONOMI DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	50,764,127,000	50,667,086,000	26,985,474,503	7,003,733	26,978,470,770	53.25	23,688,615,230
52	BELANJA BARANG	95,671,693,000	55,790,037,000	22,146,031,570	16,411,899	22,129,619,671	39.67	33,660,417,329
53	BELANJA MODAL	1,815,080,000	1,469,564,000	1,135,414,200	0	1,135,414,200	77.26	334,149,800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/07/26 7:07 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA (07) DITJEN OTONOMI DAERAH	148,250,900,000	107,926,687,000	50,266,920,273	23,415,632	50,243,504,641	46.58	57,683,182,359
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
51	BELANJA PEGAWAI	54,895,852,000	54,797,287,000	29,451,328,075	6,571,363	29,444,756,712	53.73	25,352,530,288
52	BELANJA BARANG	1,626,766,877,000	1,558,838,196,000	426,352,360,019	0	426,352,360,019	27.35	1,132,485,835,981
53	BELANJA MODAL	560,143,808,000	536,424,948,000	1,371,544,820	0	1,371,544,820	0.26	535,053,403,180
	JUMLAH BELANJA (08) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	2,241,806,537,000	2,150,060,431,000	457,175,232,914	6,571,363	457,168,661,551	21.26	1,692,891,769,449
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	49,849,508,000	49,759,508,000	27,718,022,275	3,460,489	27,714,561,786	55.7	22,044,946,214
52	BELANJA BARANG	138,042,285,000	76,574,612,000	27,960,765,846	57,020,294	27,903,745,552	36.44	48,670,866,448
53	BELANJA MODAL	1,500,000,000	1,404,800,000	601,509,548	0	601,509,548	42.82	803,290,452
	JUMLAH BELANJA (09) DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	189,391,793,000	127,738,920,000	56,280,297,669	60,480,783	56,219,816,886	44.06	71,519,103,114
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI							
51	BELANJA PEGAWAI	35,642,499,000	35,531,199,000	15,885,180,862	6,155,381	15,879,025,481	44.69	19,652,173,519
52	BELANJA BARANG	55,664,939,000	36,180,340,000	15,938,624,774	2,614,000	15,936,010,774	44.05	20,244,329,226
53	BELANJA MODAL	287,500,000	268,750,000	0	0	0	0	268,750,000
	JUMLAH BELANJA (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM	91,594,938,000	71,980,289,000	31,823,805,636	8,769,381	31,815,036,255	44.21	40,165,252,745
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
51	BELANJA PEGAWAI	109,559,163,000	109,442,279,000	56,999,283,593	6,432,983	56,992,850,610	52.08	52,449,428,390
52	BELANJA BARANG	190,427,026,000	137,737,307,000	69,043,697,173	48,116,779	68,995,580,394	50.09	68,741,726,606
53	BELANJA MODAL	110,175,000,000	73,175,093,000	25,027,479,786	0	25,027,479,786	34.2	48,147,613,214
	JUMLAH BELANJA (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	410,161,189,000	320,354,679,000	151,070,460,552	54,549,762	151,015,910,790	47.16	169,338,768,210
	JUMLAH BELANJA	7,800,000,000,000	6,627,003,856,000	2,232,234,335,868	360,904,947	2,231,873,430,921	33.68	4,395,130,425,079

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 23/07/26 7:03 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	60,242,855,000	18,962,257,000	4,120,143,200	436,000	4,119,707,200	21.73	14,842,549,800
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	59,830,000,000	27,301,486,000	7,597,577,297	0	7,597,577,297	27.83	19,703,908,703
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	47,250,000,000	28,304,441,000	8,532,460,222	309,469	8,532,150,753	30.14	19,772,290,247
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	44,349,158,000	6,910,935,000	5,350,382,038	11,730,930	5,338,651,108	316.63	1,572,283,892
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	10,900,000,000	4,451,625,000	2,746,960,834	3,983,434	2,742,977,400	61.62	1,708,647,600
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	27,952,000,000	16,935,471,000	6,296,934,386	1,695,891	6,295,238,495	37.17	10,640,232,505
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	10,626,288,000	4,048,679,000	1,567,168,930	2,503,158	1,564,665,772	38.65	2,484,013,228
1276	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	13,750,000,000	6,835,158,000	2,699,611,227	3,738,520	2,695,872,707	39.44	4,139,285,293
1283	Pembinaan inovasi daerah	4,250,000,000	1,830,711,000	16,320,375	0	16,320,375	0.89	1,814,390,625
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	22,596,082,000	3,667,590,000	1,465,515,535	41,172,570	1,424,342,965	156.59	2,243,247,035
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	15,500,000,000	6,248,438,000	2,623,011,180	0	2,623,011,180	41.98	3,625,426,820
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	139,051,780,000	179,519,548,000	48,061,116,438	198,000	48,060,918,438	26.77	131,458,629,562
6138	Penataan kelembagaan Desa	31,000,000,000	20,111,870,000	4,285,309,250	483,066	4,284,826,184	21.3	15,827,043,816
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	73,024,483,000	29,685,855,000	11,715,342,251	14,470,941	11,700,871,310	39.42	17,984,983,690
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	18,046,000,000	9,050,477,000	3,752,296,898	0	3,752,296,898	41.46	5,298,180,102
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	100,563,557,000	47,380,585,000	13,817,039,355	41,703,484	13,775,335,871	29.07	33,605,249,129
6142	Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	25,750,000,000	13,843,643,000	4,278,210,507	1,534,000	4,276,676,507	30.89	9,566,966,493
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	48,056,990,000	18,535,892,000	13,709,313,685	3,157,600	13,706,156,085	428.8	4,829,735,915

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 23/07/26 7:03 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	**752,739,193,000**	**443,624,661,000**	**142,634,713,608**	**127,117,063**	**142,507,596,545**	**32.152**	**301,117,064,455**
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	453,902,942,000	413,457,769,000	220,423,310,382	0	220,423,310,382	53.31	193,034,458,618
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	246,547,916,000	237,452,323,000	171,050,001,892	0	171,050,001,892	72.04	66,402,321,108
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3,417,000,000	1,582,198,000	1,188,038,324	0	1,188,038,324	75.09	394,159,676
6997	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital	440,000,000	217,344,000	0	0	0	0	217,344,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CP	**704,307,858,000**	**652,709,634,000**	**392,661,350,598**	**0**	**392,661,350,598**	**60.159**	**260,048,283,402**
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum							
1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	36,350,000,000	12,043,033,000	8,552,661,711	0	8,552,661,711	71.02	3,490,371,289
1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	28,500,000,000	13,216,935,000	7,271,313,468	0	7,271,313,468	55.02	5,945,621,532
6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	197,969,299,000	157,437,907,000	144,740,855,154	0	144,740,855,154	91.94	12,697,051,846
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CR	**262,819,299,000**	**182,697,875,000**	**160,564,830,333**	**0**	**160,564,830,333**	**87.885**	**22,133,044,667**
WA	Program Dukungan Manajemen							
4255	Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	105,160,634,000	79,779,959,000	29,526,170,873	19,527,581	29,506,643,292	36.99	50,273,315,708
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal	131,107,263,000	14,934,770,000	6,760,523,765	14,511,313	6,746,012,452	45.17	8,188,757,548
6084	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal	1,701,292,160,000	1,465,716,135,000	509,017,275,900	48,789,381	508,968,486,519	34.72	956,747,648,481
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal	416,862,396,000	335,063,268,000	23,530,930,225	1,439	23,530,928,786	7.02	311,532,339,214
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal	61,152,000,000	28,096,485,000	7,184,310,748	349,503	7,183,961,245	25.57	20,912,523,755
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	460,885,000	312,116,000	88,975,319	0	88,975,319	28.51	223,140,681
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	688,684,314,000	634,231,786,000	318,664,434,307	17,440,433	318,646,993,874	341.59	315,584,792,126

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 23/07/26 7:03 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,098,098,000	725,099,000	331,505,446	0	331,505,446	125.88	393,593,554
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	17,139,665,000	9,632,675,000	3,508,672,179	1,467,000	3,507,205,179	227.2	6,125,469,821
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	95,345,806,000	73,397,807,000	23,610,772,607	0	23,610,772,607	268.03	49,787,034,393
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	573,222,000	482,567,000	0	0	0	0	482,567,000
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	76,041,984,000	71,454,368,000	38,177,330,859	3,462,030	38,173,868,829	53.42	33,280,499,171
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	801,784,000	751,585,000	565,635,410	0	565,635,410	75.26	185,949,590
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	2,645,184,000	1,809,714,000	581,325,546	0	581,325,546	32.12	1,228,388,454
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	1,682,944,000	1,217,482,000	655,640,207	0	655,640,207	53.85	561,841,793
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	54,160,890,000	39,280,821,000	26,967,731,004	0	26,967,731,004	68.65	12,313,089,996
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	3,200,000,000	1,241,861,000	679,805,833	0	679,805,833	54.74	562,055,167
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	84,186,649,000	72,752,987,000	42,113,457,263	36,454,298	42,077,002,965	57.84	30,675,984,035
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	5,000,000,000	2,225,944,000	692,898,363	0	692,898,363	31.13	1,533,045,637
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	4,000,000,000	1,944,746,000	861,031,308	0	861,031,308	44.27	1,083,714,692
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,913,913,000	1,085,142,000	278,688,756	492,000	278,196,756	25.64	806,945,244
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	97,256,846,000	87,980,220,000	42,642,305,938	2,116,561	42,640,189,377	48.47	45,340,030,623
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	1,045,000,000	826,980,000	250,630,000	0	250,630,000	30.31	576,350,000
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	2,692,580,000	1,434,037,000	315,308,020	8,193,000	307,115,020	21.42	1,126,921,980
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	2,300,000,000	928,559,000	39,841,000	0	39,841,000	4.29	888,718,000
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	159,171,656,000	151,963,817,000	73,302,647,554	2,911,969	73,299,735,585	210.43	78,664,081,415
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	9,460,922,000	5,519,122,000	1,899,063,261	0	1,899,063,261	34.41	3,620,058,739

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 23/07/26 7:03 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	2,587,000,000	1,354,877,000	607,865,182	3,850,000	604,015,182	230.76	750,861,818
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	6,750,000,000	3,384,721,000	836,341,204	0	836,341,204	24.71	2,548,379,796
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	2,000,000,000	1,011,995,000	546,661,659	625,844	546,035,815	53.96	465,959,185
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	128,390,673,000	118,507,365,000	56,256,685,652	15,147,114	56,241,538,538	47.46	62,265,826,462
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2,500,000,000	1,892,747,000	1,712,070,462	0	1,712,070,462	90.45	180,676,538
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1,824,097,000	1,116,698,000	498,280,506	0	498,280,506	44.62	618,417,494
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	2,000,000,000	1,123,382,000	391,034,132	1,357,500	389,676,632	34.69	733,705,368
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	71,496,718,000	67,396,813,000	34,689,058,597	10,606,233	34,678,452,364	51.45	32,718,360,636
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	585,465,000	2,018,097,000	312,530,050	0	312,530,050	15.49	1,705,566,950
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	2,044,429,000	1,105,330,000	634,886,100	7,252,850	627,633,250	56.78	477,696,750
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,558,230,000	1,326,026,000	113,034,363	0	113,034,363	8.52	1,212,991,637
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	162,664,281,000	127,459,377,000	47,132,828,066	6,571,363	47,126,256,703	36.97	80,333,120,297
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,859,531,000	2,557,558,000	875,567,154	0	875,567,154	34.23	1,681,990,846
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,979,785,000	570,984,000	192,620,997	0	192,620,997	33.73	378,363,003
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	1,000,000,000	563,468,000	297,422,429	0	297,422,429	52.78	266,045,571
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	71,131,918,000	68,061,156,000	37,563,027,962	7,233,209	37,555,794,753	55.18	30,505,361,247
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	1,196,318,000	593,361,000	222,490,059	0	222,490,059	37.5	370,870,941
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1,750,000,000	908,010,000	461,609,290	0	461,609,290	50.84	446,400,710
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	175,000,000	70,520,000	40,744,139	0	40,744,139	57.78	29,775,861
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	59,877,263,000	55,583,164,000	26,906,773,039	6,155,381	26,900,617,658	48.4	28,682,546,342

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 23/07/26 7:03 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	20,000,000	5,670,000	0	0	0	0	5,670,000
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	1,522,675,000	646,581,000	581,757,576	1,080,000	580,677,576	89.81	65,903,424
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	400,000,000	247,985,000	169,424,007	155,228	169,268,779	68.26	78,716,221
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	294,804,922,000	250,976,335,000	117,755,019,283	8,648,784	117,746,370,499	272.76	133,229,964,501
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,400,000,000	1,181,780,000	142,531,462	80,500	142,450,962	12.05	1,039,329,038
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,382,000,000	1,229,895,000	657,395,953	154,900	657,241,053	459.9	572,653,947
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**4,554,337,100,000**	**3,795,683,947,000**	**1,481,844,571,014**	**224,635,414**	**1,481,619,935,600**	**39.04**	**2,314,064,011,400**
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	**6,274,203,450,000**	**5,074,716,117,000**	**2,177,705,465,553**	**351,752,477**	**2,177,353,713,076**	**42.913**	**2,897,362,403,924**
02	**PINJAMAN LUAR NEGERI**							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	33,440,000,000	33,440,000,000	2,494,836,918	0	2,494,836,918	7.46	30,945,163,082
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	24,923,400,000	24,923,400,000	11,154,109,039	166,720	11,153,942,319	44.75	13,769,457,681
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	**58,363,400,000**	**58,363,400,000**	**13,648,945,957**	**166,720**	**13,648,779,237**	**23.386**	**44,714,620,763**
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
6997	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital	1,365,436,852,000	1,365,436,852,000	16,199,831,736	0	16,199,831,736	1.19	1,349,237,020,264
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CP	**1,365,436,852,000**	**1,365,436,852,000**	**16,199,831,736**	**0**	**16,199,831,736**	**1.186**	**1,349,237,020,264**
	JUMLAH BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI	**1,423,800,252,000**	**1,423,800,252,000**	**29,848,777,693**	**166,720**	**29,848,610,973**	**2.096**	**1,393,951,641,027**
04	**PNBP**							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	381,237,000	381,237,000	0	0	0	0	381,237,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 23/07/26 7:03 PM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	1,964,500,000	1,964,500,000	618,180,875	0	618,180,875	31.47	1,346,319,125
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	35,931,695,000	41,906,854,000	16,480,825,752	1,180,180	16,479,645,572	283.42	25,427,208,428
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	**38,277,432,000**	**44,252,591,000**	**17,099,006,627**	**1,180,180**	**17,097,826,447**	**38.64**	**27,154,764,553**
WA	Program Dukungan Manajemen							
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal	395,775,000	395,775,000	115,173,000	0	115,173,000	29.1	280,602,000
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	1,098,095,000	1,098,095,000	36,097,200	0	36,097,200	3.29	1,061,997,800
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	14,232,898,000	14,232,898,000	3,990,971,324	0	3,990,971,324	28.04	10,241,926,676
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	15,600,000	15,600,000	0	0	0	0	15,600,000
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	620,000,000	638,848,000	72,254,000	0	72,254,000	59.07	566,594,000
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**16,367,368,000**	**16,386,216,000**	**4,214,495,524**	**0**	**4,214,495,524**	**25.72**	**12,171,720,476**
	JUMLAH BELANJA PNBP	**54,644,800,000**	**60,638,807,000**	**21,313,502,151**	**1,180,180**	**21,312,321,971**	**35.148**	**39,326,485,029**
09	**HIBAH LUAR NEGERI**							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	2,149,380,000	2,949,380,000	751,537,060	0	751,537,060	25.48	2,197,842,940
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	45,202,118,000	45,202,118,000	1,248,085,264	0	1,248,085,264	2.76	43,954,032,736
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	0	3,397,182,000	1,219,097,347	7,805,570	1,211,291,777	35.66	2,185,890,223
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	**47,351,498,000**	**51,548,680,000**	**3,218,719,671**	**7,805,570**	**3,210,914,101**	**6.244**	**48,337,765,899**
	JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI	**47,351,498,000**	**51,548,680,000**	**3,218,719,671**	**7,805,570**	**3,210,914,101**	**6.244**	**48,337,765,899**
10	**HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI**							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
WA	Program Dukungan Manajemen							
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	0	16,300,000,000	147,870,800	0	147,870,800	0.91	16,152,129,200
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**0**	**16,300,000,000**	**147,870,800**	**0**	**147,870,800**	**0.907**	**16,152,129,200**
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	**0**	**16,300,000,000**	**147,870,800**	**0**	**147,870,800**	**0.907**	**16,152,129,200**
	JUMLAH	**7,800,000,000,000**	**6,627,003,856,000**	**2,232,234,335,868**	**360,904,947**	**2,231,873,430,921**	**33.68**	**4,395,130,425,079**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 23/07/26 7:01 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
51	**BELANJA PEGAWAI**							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	290,305,621,000	274,944,698,000	152,121,274,410	40,843,527	152,080,430,883	55.33	122,864,267,117
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,877,000	4,959,000	2,059,977	14,463	2,045,514	41.54	2,913,486
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	17,974,967,000	17,844,755,000	8,920,763,507	2,419,250	8,918,344,257	49.99	8,926,410,743
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,971,053,000	4,874,726,000	2,346,961,545	38,770	2,346,922,775	48.15	2,527,803,225
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	8,855,089,000	9,285,339,000	5,218,384,000	10,460,000	5,207,924,000	56.2	4,077,415,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	24,469,982,000	25,298,977,000	14,862,148,000	37,480,000	14,824,668,000	58.75	10,474,309,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,475,668,000	3,804,763,000	2,861,566,378	72,420	2,861,493,958	75.21	943,269,042
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	11,722,894,000	11,646,795,000	6,546,623,160	651,780	6,545,971,380	56.21	5,100,823,620
511129	Belanja Uang Makan PNS	38,235,852,000	38,229,500,000	14,342,164,000	0	14,342,164,000	37.52	23,887,336,000
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	93,800,000	93,800,000	37,325,000	0	37,325,000	39.79	56,475,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	328,860,000	328,860,000	135,350,000	0	135,350,000	41.16	193,510,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	7,090,439,000	6,868,299,000	3,532,715,000	17,734,908	3,514,980,092	51.44	3,353,318,908
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	8,418,864,000	8,418,864,000	4,689,988,600	0	4,689,988,600	55.71	3,728,875,400
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	2,314,104,000	2,389,946,000	1,090,195,600	0	1,090,195,600	45.62	1,299,750,400
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	93,800,000	93,800,000	39,900,000	0	39,900,000	42.54	53,900,000
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	2,493,260,000	2,493,260,000	1,212,273,404	0	1,212,273,404	48.62	1,280,986,596
511514	Belanja Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau Telah Berakhir Masa Jabatannya	0	928,727,000	0	0	0	0	928,727,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	69,194,971,000	72,283,983,000	35,659,396,339	0	35,659,396,339	49.33	36,624,586,661
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,629,000	2,751,000	675,538	134	675,404	24.56	2,075,596
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,531,850,000	5,623,443,000	2,292,967,033	0	2,292,967,033	40.78	3,330,475,967
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,869,870,000	1,923,678,000	667,032,158	0	667,032,158	34.67	1,256,645,842
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	61,250,000	99,750,000	44,000,000	0	44,000,000	44.11	55,750,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,445,493,000	1,453,168,000	609,754,888	0	609,754,888	41.96	843,413,112
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,265,717,000	4,417,321,000	2,248,309,075	0	2,248,309,075	50.9	2,169,011,925
511628	Belanja Uang Makan PPPK	13,916,041,000	14,242,885,000	5,177,296,000	0	5,177,296,000	36.35	9,065,589,000
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	66,000,000	66,000,000	19,350,000	0	19,350,000	29.32	46,650,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	224,400,000	224,400,000	62,850,000	0	62,850,000	28.01	161,550,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,128,266,000	3,743,976,000	1,923,942,268	0	1,923,942,268	51.39	1,820,033,732
512211	Belanja Uang Lembur	18,604,370,000	17,320,692,000	4,670,710,000	0	4,670,710,000	26.97	12,649,982,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	3,126,964,000	3,226,076,000	1,020,866,000	0	1,020,866,000	31.64	2,205,210,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	462,597,518,000	466,856,230,000	245,326,899,797	2,163,835	245,324,735,962	52.55	221,531,494,038
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	94,647,416,000	97,237,758,000	43,268,417,816	0	43,268,417,816	44.5	53,969,340,184
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	**1,099,531,885,000**	**1,096,272,179,000**	**560,952,159,493**	**111,879,087**	**560,840,280,406**	**51.17**	**535,431,898,594**
52	**BELANJA BARANG**							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	135,175,176,000	123,327,475,000	56,716,887,791	6,004,668	56,710,883,123	45.99	66,616,591,877
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	46,218,498,000	42,171,975,000	15,883,015,143	0	15,883,015,143	37.66	26,288,959,857
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3,098,688,000	3,003,384,000	1,227,687,979	0	1,227,687,979	40.88	1,775,696,021

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 23/07/26 7:01 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	765,209,000	664,638,000	206,416,006	0	206,416,006	31.06	458,221,994
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	11,356,090,000	10,589,258,000	3,646,132,000	0	3,646,132,000	34.43	6,943,126,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	83,039,079,000	82,602,337,000	39,858,585,093	0	39,858,585,093	48.25	42,743,751,907
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	40,000,000	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	100	0
521211	Belanja Bahan	206,762,636,000	111,739,288,000	50,766,699,442	70,258	50,766,629,184	45.43	60,972,658,816
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	14,198,075,000	19,420,276,000	4,620,200,000	0	4,620,200,000	23.79	14,800,076,000
521218	Belanja dalam Rangka Refund Dana PHLN	0	2,482,428,000	2,482,427,391	0	2,482,427,391	100	609
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	242,659,701,000	215,160,431,000	181,235,472,410	0	181,235,472,410	84.23	33,924,958,590
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,000,000	0	0	0	0	0	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	923,212,000	2,688,705,000	40,855,750	0	40,855,750	1.52	2,647,849,250
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	65,000,000	0	0	0	0	0	0
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	35,000,000	0	0	0	0	0	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35,036,464,000	31,394,585,000	18,619,679,801	0	18,619,679,801	59.31	12,774,905,199
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	200,000	0	0	0	0	0	0
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	1,100,000,000	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000
522111	Belanja Langganan Listrik	53,001,658,000	42,213,313,000	18,764,411,080	0	18,764,411,080	44.45	23,448,901,920
522112	Belanja Langganan Telepon	898,896,000	544,621,000	134,674,569	0	134,674,569	24.73	409,946,431
522113	Belanja Langganan Air	7,831,974,000	5,145,517,000	1,974,270,645	0	1,974,270,645	38.37	3,171,246,355
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,412,884,000	1,331,420,000	582,652,186	0	582,652,186	43.76	748,767,814
522131	Belanja Jasa Konsultan	54,303,777,000	48,699,420,000	6,935,699,882	0	6,935,699,882	14.24	41,763,720,118
522141	Belanja Sewa	121,117,216,000	166,432,681,000	133,747,656,769	0	133,747,656,769	80.36	32,685,024,231
522151	Belanja Jasa Profesi	81,083,030,000	35,797,807,000	9,857,294,561	0	9,857,294,561	27.54	25,940,512,439
522191	Belanja Jasa Lainnya	945,129,222,000	830,306,386,000	322,153,941,337	0	322,153,941,337	38.8	508,152,444,663
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	98,489,212,000	85,900,772,000	35,401,433,695	0	35,401,433,695	41.21	50,499,338,305
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,601,073,000	4,788,498,000	1,910,319,955	0	1,910,319,955	39.89	2,878,178,045
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	6,840,774,000	6,787,488,000	3,908,533,703	0	3,908,533,703	57.58	2,878,954,297
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55,416,734,000	44,225,472,000	16,296,797,781	21,470,272	16,275,327,509	36.85	27,950,144,491
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,712,400,000	1,683,600,000	776,520,488	0	776,520,488	46.12	907,079,512
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120,000,000	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	821,720,000	1,008,000,000	0	0	0	0	1,008,000,000
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	8,026,743,000	6,646,694,000	4,483,816,326	0	4,483,816,326	67.46	2,162,877,674
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	2,858,773,000	2,108,886,000	1,310,979,099	0	1,310,979,099	62.16	797,906,901
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	438,616,012,000	266,703,951,000	145,846,039,222	193,689,879	145,652,349,343	54.68	121,051,601,657
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2,932,609,000	2,027,509,000	763,788,199	0	763,788,199	37.67	1,263,720,801
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,157,298,000	13,471,914,000	5,990,193,211	0	5,990,193,211	44.46	7,481,720,789
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	192,001,471,000	47,738,495,000	19,748,297,059	543,000	19,747,754,059	41.37	27,990,740,941
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	90,494,090,000	38,971,038,000	19,379,889,298	2,660,000	19,377,229,298	49.73	19,593,808,702
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	22,218,957,000	9,300,793,000	2,621,279,635	15,435,313	2,605,844,322	28.18	6,694,948,678
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1,109,473,000	698,098,000	0	0	0	0	698,098,000
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	36,458,064,000	9,823,658,730	0	9,823,658,730	26.95	26,634,405,270

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 23/07/26 7:01 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	7,500,000,000	0	0	0	0	0	0
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1,360,466,000,000	284,960,350,000	206,788,559,125	0	206,788,559,125	72.57	78,171,790,875
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	672,750,000,000	116,000,000,000	0	116,000,000,000	17.24	556,750,000,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	**4,357,640,024,000**	**3,302,627,567,000**	**1,460,526,765,361**	**239,873,390**	**1,460,286,891,971**	**44.22**	**1,842,340,675,029**
53	**BELANJA MODAL**							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	389,740,363,000	327,563,720,000	114,769,181,689	0	114,769,181,689	35.04	212,794,538,311
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,500,000,000	2,350,000,000	822,901,955	0	822,901,955	35.02	1,527,098,045
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,274,972,000	38,847,665,000	7,889,815,640	0	7,889,815,640	20.31	30,957,849,360
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	400,000,000	3,384,900,000	0	0	0	0	3,384,900,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	181,284,599,000	131,347,697,000	25,938,628,522	0	25,938,628,522	19.75	105,409,068,478
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2,521,733,000	10,977,056,000	96,493,750	0	96,493,750	0.88	10,880,562,250
534121	Belanja Modal Irigasi	100,000,000	398,006,000	398,006,000	0	398,006,000	100	0
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	1,125,100,000	515,381,000	514,673,000	0	514,673,000	99.86	708,000
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	300,000,000	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
536111	Belanja Modal Lainnya	169,689,729,000	130,359,710,000	5,796,840,143	0	5,796,840,143	4.45	124,562,869,857
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	42,095,045,000	29,922,236,000	0	0	0	0	29,922,236,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	**817,031,541,000**	**675,816,371,000**	**156,226,540,699**	**0**	**156,226,540,699**	**23.12**	**519,589,830,301**
	JUMLAH RUPIAH MURNI	**6,274,203,450,000**	**5,074,716,117,000**	**2,177,705,465,553**	**351,752,477**	**2,177,353,713,076**	**42.91**	**2,897,362,403,924**
02	**PINJAMAN LUAR NEGERI**							
52	**BELANJA BARANG**							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	482,964,000	0	0	0	0	0	0
521211	Belanja Bahan	3,529,399,000	2,664,623,000	107,278,844	0	107,278,844	4.03	2,557,344,156
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	34,300,000	15,100,000	0	0	0	0	15,100,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	400,000	20,480,000	0	0	0	0	20,480,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,311,665,000	4,311,665,000	0	0	0	0	4,311,665,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	145,503,767,000	141,267,124,000	24,535,249,084	0	24,535,249,084	17.37	116,731,874,916
522141	Belanja Sewa	14,940,102,000	21,178,074,000	832,014,850	0	832,014,850	3.93	20,346,059,150
522151	Belanja Jasa Profesi	1,665,000,000	819,176,000	32,000,000	0	32,000,000	3.91	787,176,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	714,839,828,000	733,259,589,000	2,037,697,002	0	2,037,697,002	0.28	731,221,891,998
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,434,181,000	22,051,483,000	1,815,473,813	166,720	1,815,307,093	8.23	20,236,175,907
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,900,000	55,330,000	850,000	0	850,000	1.54	54,480,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,595,908,000	3,095,567,000	21,700,000	0	21,700,000	0.7	3,073,867,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,520,132,000	8,811,310,000	466,514,100	0	466,514,100	5.29	8,344,795,900
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	4,992,500,000	4,992,500,000	0	0	0	0	4,992,500,000
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	15,934,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	**944,813,046,000**	**942,542,021,000**	**29,848,777,693**	**166,720**	**29,848,610,973**	**3.17**	**912,693,410,027**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 23/07/26 7:01 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
53	**BELANJA MODAL**							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	452,588,782,000	440,139,663,000	0	0	0	0	440,139,663,000
536111	Belanja Modal Lainnya	26,398,424,000	41,118,568,000	0	0	0	0	41,118,568,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	**478,987,206,000**	**481,258,231,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481,258,231,000**
	JUMLAH PINJAMAN LUAR NEGERI	**1,423,800,252,000**	**1,423,800,252,000**	**29,848,777,693**	**166,720**	**29,848,610,973**	**2.1**	**1,393,951,641,027**
04	**PNBP**							
52	**BELANJA BARANG**							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,800,000	1,770,000	0	0	0	0	1,770,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	263,100,000	263,100,000	109,625,000	0	109,625,000	41.67	153,475,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	592,662,000	0	0	0	0	592,662,000
521211	Belanja Bahan	14,717,472,000	15,873,226,000	6,381,296,572	0	6,381,296,572	40.2	9,491,929,428
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,798,600,000	3,730,428,000	1,137,960,000	0	1,137,960,000	30.5	2,592,468,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,415,929,000	2,990,948,000	501,462,461	0	501,462,461	16.77	2,489,485,539
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	37,113,000	24,586,000	10,891,660	0	10,891,660	44.3	13,694,340
522141	Belanja Sewa	1,379,084,000	1,133,388,000	874,703,950	0	874,703,950	77.18	258,684,050
522151	Belanja Jasa Profesi	13,080,125,000	19,711,857,000	7,219,890,000	1,175,000	7,218,715,000	36.63	12,493,142,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	610,828,000	615,900,000	444,402,000	0	444,402,000	72.15	171,498,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,116,585,000	8,390,742,000	2,637,926,008	5,180	2,637,920,828	31.44	5,752,821,172
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	575,470,000	538,220,000	68,680,000	0	68,680,000	12.76	469,540,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,528,236,000	2,952,586,000	812,260,000	0	812,260,000	27.51	2,140,326,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,378,105,000	1,304,685,000	626,924,500	0	626,924,500	48.05	677,760,500
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,270,871,000	1,046,227,000	381,508,800	0	381,508,800	36.47	664,718,200
	JUMLAH BELANJA BARANG	**53,176,318,000**	**59,170,325,000**	**21,207,530,951**	**1,180,180**	**21,206,350,771**	**35.84**	**37,963,974,229**
53	**BELANJA MODAL**							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411,650,000	411,650,000	105,971,200	0	105,971,200	25.74	305,678,800
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,056,832,000	1,056,832,000	0	0	0	0	1,056,832,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	**1,468,482,000**	**1,468,482,000**	**105,971,200**	**0**	**105,971,200**	**7.22**	**1,362,510,800**
	JUMLAH PNBP	**54,644,800,000**	**60,638,807,000**	**21,313,502,151**	**1,180,180**	**21,312,321,971**	**35.15**	**39,326,485,029**
09	**HIBAH LUAR NEGERI**							
52	**BELANJA BARANG**							
521211	Belanja Bahan	219,200,000	502,745,000	62,389,300	0	62,389,300	12.41	440,355,700
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	19,800,000	67,100,000	0	0	0	0	67,100,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	35,476,095,000	27,817,562,000	1,710,223,100	0	1,710,223,100	6.15	26,107,338,900
522141	Belanja Sewa	684,900,000	777,145,000	177,600,000	0	177,600,000	22.85	599,545,000
522151	Belanja Jasa Profesi	122,300,000	223,600,000	42,000,000	0	42,000,000	18.78	181,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	8,699,526,000	18,790,694,000	153,200,000	0	153,200,000	0.82	18,637,494,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	945,932,000	1,213,254,000	584,635,324	0	584,635,324	48.19	628,618,676

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2026

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 23/07/26 7:01 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	127,340,000	0	0	0	0	127,340,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,183,745,000	2,014,240,000	488,671,947	7,805,570	480,866,377	24.26	1,533,373,623
	JUMLAH BELANJA BARANG	**47,351,498,000**	**51,548,680,000**	**3,218,719,671**	**7,805,570**	**3,210,914,101**	**6.24**	**48,337,765,899**
	JUMLAH HIBAH LUAR NEGERI	**47,351,498,000**	**51,548,680,000**	**3,218,719,671**	**7,805,570**	**3,210,914,101**	**6.24**	**48,337,765,899**
10	**HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI**							
53	**BELANJA MODAL**							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	16,300,000,000	147,870,800	0	147,870,800	0.91	16,152,129,200
	JUMLAH BELANJA MODAL	**0**	**16,300,000,000**	**147,870,800**	**0**	**147,870,800**	**0.91**	**16,152,129,200**
	JUMLAH HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	**0**	**16,300,000,000**	**147,870,800**	**0**	**147,870,800**	**0.91**	**16,152,129,200**
	TOTAL	**7,800,000,000,000**	**6,627,003,856,000**	**2,232,234,335,868**	**360,904,947**	**2,231,873,430,921**	**33.68**	**4,395,130,425,079**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 23/07/26 7:09 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	65,000,000	0	0	0	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	229,700,000	948,609,929	0	948,609,929	412.98
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	50,000,000	12,313,320	0	12,313,320	24.63
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,325,933,000	1,521,304,898	0	1,521,304,898	114.73
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	177,335,000	205,272,012	0	205,272,012	115.75
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	1,847,968,000	2,687,500,159	0	2,687,500,159	145.43
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	25,267,000	35,265,000	0	35,265,000	139.57
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	25,267,000	35,265,000	0	35,265,000	139.57
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	187,500,000	135,250,000	0	135,250,000	72.13
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	18,920,261,000	9,230,272,000	0	9,230,272,000	48.79
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	0	2,538,800,000	0	2,538,800,000	0
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	330,050,000	304,759,000	0	304,759,000	92.34
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	40,724,196,000	60,581,111,000	0	60,581,111,000	148.76
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	4,670,895,000	1,830,079,000	0	1,830,079,000	39.18
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	64,832,902,000	74,620,271,000	0	74,620,271,000	115.1
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	664,890,871,000	402,736,187,000	0	402,736,187,000	60.57
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	664,890,871,000	402,736,187,000	0	402,736,187,000	60.57
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	130,000	0	130,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	7,028,000	0	7,028,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	7,158,000	0	7,158,000	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	288,848,360	0	288,848,360	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	288,848,360	0	288,848,360	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	324,532,001	0	324,532,001	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	13,245,419,268	0	13,245,419,268	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,191,365,624	0	1,191,365,624	0
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN	0	2,482,427,391	0	2,482,427,391	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	24,400	0	24,400	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	17,243,768,684	0	17,243,768,684	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	731,597,008,000	497,618,998,203	0	497,618,998,203	68.02
	JUMLAH PENDAPATAN	731,597,008,000	497,618,998,203	0	497,618,998,203	68.02

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 23/07/26 7:10 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	**SEKRETARIAT JENDERAL**					
010010100KP	BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA					
403200	SEKRETARIAT JENDERAL	820,693,000	2,310,931,577	0	2,310,931,577	281.58
	JUMLAH PENDAPATAN 010010100KP BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA	820,693,000	2,310,931,577	0	2,310,931,577	281.58
010010200KP	BA(010) ES1(01) JAWA BARAT					
448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	19,986,117,000	14,084,313,738	0	14,084,313,738	70.47
	JUMLAH PENDAPATAN 010010200KP BA(010) ES1(01) JAWA BARAT	19,986,117,000	14,084,313,738	0	14,084,313,738	70.47
010010800KD	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI					
677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	0	2,285,192	0	2,285,192	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010010800KD INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	0	2,285,192	0	2,285,192	
010011300KD	SEKRETARIAT JENDERAL					
683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	0	106,087,408	0	106,087,408	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011300KD SEKRETARIAT JENDERAL	0	106,087,408	0	106,087,408	
010011700KD	BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA					
677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	0	204,761,554	0	204,761,554	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011700KD BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA	0	204,761,554	0	204,761,554	
010011900KD	SEKRETARIAT JENDERAL					
677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	0	82,388,770	0	82,388,770	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011900KD SEKRETARIAT JENDERAL	0	82,388,770	0	82,388,770	
010012300KD	SEKRETARIAT JENDERAL					
683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	0	13,242,000	0	13,242,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010012300KD SEKRETARIAT JENDERAL	0	13,242,000	0	13,242,000	
010012500KD	SEKRETARIAT JENDERAL					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
683091	IPDN KAMPUS PAPUA	0	64,203,776	0	64,203,776	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010012500KD SEKRETARIAT JENDERAL	0	64,203,776	0	64,203,776	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0	521,801,344	0	521,801,344	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	521,801,344	0	521,801,344	
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	20,806,810,000	17,390,015,359	0	17,390,015,359	83.58
02	**INSPEKTORAT JENDERAL**					
010020100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	0	37,825,032	0	37,825,032	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010020100KP SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	37,825,032	0	37,825,032	
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	0	37,825,032	0	37,825,032	
03	**DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**					
010030100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	0	69,848,619	0	69,848,619	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010030100KP SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	69,848,619	0	69,848,619	
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	0	69,848,619	0	69,848,619	
04	**DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**					
010040100KP	BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA					
027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0	358,827,072	0	358,827,072	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010040100KP BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA	0	358,827,072	0	358,827,072	
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0	358,827,072	0	358,827,072	
05	**DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA**					
010050100KP	BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	242,601,000	5,377,269,967	0	5,377,269,967	2216.51
	JUMLAH PENDAPATAN 010050100KP BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA	242,601,000	5,377,269,967	0	5,377,269,967	2,216.51
010050400KD	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA					
028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	171,890,000	36,243,050	0	36,243,050	21.09
	JUMLAH PENDAPATAN 010050400KD DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	171,890,000	36,243,050	0	36,243,050	21.09
010050500KD	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA					
028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	191,352,000	46,544,100	0	46,544,100	24.32
	JUMLAH PENDAPATAN 010050500KD DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	191,352,000	46,544,100	0	46,544,100	24.32
010051200KD	BA(010) ES1(05) LAMPUNG					
613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	175,305,000	16,168,740	0	16,168,740	9.22
	JUMLAH PENDAPATAN 010051200KD BA(010) ES1(05) LAMPUNG	175,305,000	16,168,740	0	16,168,740	9.22
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	781,148,000	5,476,225,857	0	5,476,225,857	701.05
06	**DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH**					
010060100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada					
039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	550,000,000	2,623,917,960	0	2,623,917,960	477.08
	JUMLAH PENDAPATAN 010060100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	550,000,000	2,623,917,960	0	2,623,917,960	477.08
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	550,000,000	2,623,917,960	0	2,623,917,960	477.08
07	**DITJEN OTONOMI DAERAH**					
010070100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	0	7,003,515	0	7,003,515	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010070100KP SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	7,003,515	0	7,003,515	
	JUMLAH PENDAPATAN 07 DITJEN OTONOMI DAERAH	0	7,003,515	0	7,003,515	
08	**DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
010080100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	664,890,871,000	408,437,049,053	0	408,437,049,053	61.43
	JUMLAH PENDAPATAN 010080100KP SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	664,890,871,000	408,437,049,053	0	408,437,049,053	61.43
	JUMLAH PENDAPATAN 08 DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	664,890,871,000	408,437,049,053	0	408,437,049,053	61.43
09	**DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH**					
010090100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	0	12,498,320	0	12,498,320	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010090100KP SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	12,498,320	0	12,498,320	
	JUMLAH PENDAPATAN 09 DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	0	12,498,320	0	12,498,320	
11	**BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI**					
010110100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	0	201,783,955	0	201,783,955	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010110100KP SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	201,783,955	0	201,783,955	
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	0	201,783,955	0	201,783,955	
12	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					
010120100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada					
403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21,377,376,000	11,808,310,475	0	11,808,310,475	55.24
	JUMLAH PENDAPATAN 010120100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	21,377,376,000	11,808,310,475	0	11,808,310,475	55.24
010120200KD	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	8,326,570,000	15,568,310,759	0	15,568,310,759	186.97
	JUMLAH PENDAPATAN 010120200KD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8,326,570,000	15,568,310,759	0	15,568,310,759	186.97
010120400KD	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
027114	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	5,457,930,000	7,012,025,685	0	7,012,025,685	128.47

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III					
	JUMLAH PENDAPATAN 010120400KD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5,457,930,000	7,012,025,685	0	7,012,025,685	128.47
010120800KD	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	2,625,248,000	11,912,588,542	0	11,912,588,542	453.77
	JUMLAH PENDAPATAN 010120800KD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2,625,248,000	11,912,588,542	0	11,912,588,542	453.77
010121900KD	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
027177	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	5,490,655,000	15,851,296,000	0	15,851,296,000	288.7
	JUMLAH PENDAPATAN 010121900KD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5,490,655,000	15,851,296,000	0	15,851,296,000	288.7
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1,290,400,000	851,472,000	0	851,472,000	65.99
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	1,290,400,000	851,472,000	0	851,472,000	65.99
	JUMLAH PENDAPATAN 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	44,568,179,000	63,004,003,461	0	63,004,003,461	141.37
	JUMLAH PENDAPATAN	731,597,008,000	497,618,998,203	0	497,618,998,203	68.02

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT ESELON I / AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3
Tanggal : 23/07/26 7:11 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	SEKRETARIAT JENDERAL					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	229,700,000	714,320,129	0	714,320,129	310.98
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	605,832,000	454,664,498	0	454,664,498	75.05
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	220	0	220	0
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	5,767,000	5,700,000	0	5,700,000	98.84
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	187,500,000	135,250,000	0	135,250,000	72.13
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	18,920,261,000	9,230,272,000	0	9,230,272,000	48.79
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	0	2,538,800,000	0	2,538,800,000	0
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	330,050,000	304,759,000	0	304,759,000	92.34
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	527,700,000	622,788,000	0	622,788,000	118.02
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	7,028,000	0	7,028,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	8,982,728	0	8,982,728	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	107,384,358	0	107,384,358	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,737,414,547	0	2,737,414,547	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	522,651,879	0	522,651,879	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	20,806,810,000	17,390,015,359	0	17,390,015,359	83.58
02	INSPEKTORAT JENDERAL					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	37,825,032	0	37,825,032	0
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	0	37,825,032	0	37,825,032	
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9,750,049	0	9,750,049	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	29,500,000	0	29,500,000	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	30,598,570	0	30,598,570	0
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN	0	69,848,619	0	69,848,619	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3
Tanggal : 23/07/26 7:11 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	35,839,800	0	35,839,800	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,005,408	0	1,005,408	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	321,981,864	0	321,981,864	0
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI	0	358,827,072	0	358,827,072	
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	65,000,000	0	0	0	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	54,587,000	0	54,587,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	50,000,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	170,101,000	140,803,400	0	140,803,400	82.78
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	19,707,000	0	0	0	0
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	19,500,000	29,565,000	0	29,565,000	151.62
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	456,840,000	0	0	0	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	32,340	0	32,340	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	555,150	0	555,150	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,768,255,576	0	2,768,255,576	0
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN	0	2,482,427,391	0	2,482,427,391	0
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	781,148,000	5,476,225,857	0	5,476,225,857	701.05
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	550,000,000	577,122,000	0	577,122,000	104.93
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	130,000	0	130,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	15,351,200	0	15,351,200	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,031,314,760	0	2,031,314,760	0
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	550,000,000	2,623,917,960	0	2,623,917,960	477.08

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3
Tanggal : 23/07/26 7:11 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
07	DITJEN OTONOMI DAERAH					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,113,515	0	1,113,515	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,890,000	0	5,890,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 07 DITJEN OTONOMI DAERAH	0	7,003,515	0	7,003,515	
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	664,890,871,000	402,736,187,000	0	402,736,187,000	60.57
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	279,727,092	0	279,727,092	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	123,593,351	0	123,593,351	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,982,942,546	0	4,982,942,546	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	314,599,064	0	314,599,064	0
	JUMLAH PENDAPATAN 08 DITJEN KEPENDUDUKAN DAN	664,890,871,000	408,437,049,053	0	408,437,049,053	61.43
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	12,313,320	0	12,313,320	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	185,000	0	185,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 09 DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	0	12,498,320	0	12,498,320	
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	143,863,000	0	143,863,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	37,749,035	0	37,749,035	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	20,171,920	0	20,171,920	0
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM	0	201,783,955	0	201,783,955	
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	348,715,000	0	348,715,000	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	157,628,000	205,271,792	0	205,271,792	130.23
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	40,267,356,000	60,581,111,000	0	60,581,111,000	150.45

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	4,143,195,000	1,207,291,000	0	1,207,291,000	29.14
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	106,200	0	106,200	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	27,844,935	0	27,844,935	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	310,123,023	0	310,123,023	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	323,516,111	0	323,516,111	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	24,400	0	24,400	0
	JUMLAH PENDAPATAN 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	44,568,179,000	63,004,003,461	0	63,004,003,461	141.37
	JUMLAH PENDAPATAN	731,597,008,000	497,618,998,203	0	497,618,998,203	68.02

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEMESTER I TAHUN 2026

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
SEMESTER I TA 2026

Kode dan Nama K/L : (010) Kementerian Dalam Negeri

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Pernyataan Tanggung Jawab	v		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	v		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	v		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	v		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	v		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	v		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	v		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	v		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	v		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan	v		Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	v		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		v	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		v	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		v	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		v	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	v		Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		v	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		v	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		v	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		v	Tidak
	a. Pagu/DIPA		v	Tidak
	b. Estimasi PNBP		v	Tidak
	c. Belanja		v	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	e. Pendapatan		v	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	g. Kas BLU		v	Tidak

	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		v	Tidak
	i. Kas Hibah		v	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		v	Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal	v		Tidak
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		v	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)	v		Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		v	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)	v		Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		v	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		v	Tidak
	PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		v	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		v	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		v	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	v		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	v		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	v		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	v		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	v		Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		v	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		v	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		v	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		v	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		v	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		v	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		v	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		v	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		v	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		v	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		v	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		v	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		v	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak

	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	v		Tidak

	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		v	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		v	Tidak

	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	v		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		v	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		v	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	-	-	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	-	-	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya

	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	v		Tidak

	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**	v		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		v	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	-	-	Ya

	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		v	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?	-	-	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			

	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		v	Tidak

PENGECEKAN NERACA

	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	v		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	v		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	N/A	N/A	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	-	-	Ya

6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		v	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		v	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		v	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		v	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang		v	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		v	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	v		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		v	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	v		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		v	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		v	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	v		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	v		Ya
	PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		v	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		v	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		v	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		v	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		v	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		v	Tidak
	TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	v		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	N/A		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		v	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	v		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	v		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	v		Ya

	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	v		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	v		Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	-	-	Ya

	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		v	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		v	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		v	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	v		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	v		Ya/Tidak

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

1 Terdapat Pagu Minus (Basis SP2D) Akun 51XXXX untuk periode Semester I Tahun 2026 pada satker Itjen (027203), Ditjen Pemdes (027753), Balai Pemdes Yogyakarta (028449), BSKDN (403222), Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I (506137), Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III (027114), dan Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan (506137) yang akan dilakukan revisi pada Semester II Tahun 2026.

2 Berdasarkan data pada Aplikasi MyIntress terdapat ketidaksesuain Akun Vs Kode BMN untuk periode Semester I Tahun 2026 sebagai berikut:

a. Terdapat ketidaksesuaian kode Akun vs Kode BMN pada satker Setjen (403200) pada akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) yang terjadi karena pada saat pembayaran terdapat pemotongan harga setiap unit menjadi Rp800.000,00 atau di bawah nilai kapitalisasi Rp1.000.000,00.

b. Terdapat ketidaksesuaian kode akun vs kode BMN pada satker Setjen (403200) karena realisasi pengadaan laptop menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak dapat dilakukan karena keterbatasan alokasi pada Mata Anggaran Kegiatan Penanganan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, yang hanya menyediakan pagu anggaran untuk akun Belanja Modal Lainnya.

c. Terdapat ketidaksesuaian kode akun vs kode BMN pada satker Setjen (403200) terjadi karena adanya kesalahan pembebanan akun belanja. Realisasi pekerjaan pemasangan karpet dan plint pada Rumah Dinas Wakil Menteri Dalam Negeri berstatus sewa tersebut seharusnya dibebankan pada akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111), bukan pada akun Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121).

d. Terdapat ketidaksesuaian kode akun vs kode BMN pada satker IPDN Kampus Sulut (677010) sebesar Rp17.659.774,00 yang telah dilakukan reklasifikasi Kode BMN berdasarkan Surat Keterangan Nomor 000.3.3.2/099/IPDN.23. Reklasifikasi tersebut mengubah kode BMN 7010101003 NUP 2 (Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan) menjadi 7010101004 NUP 1 (Jalan Dalam Pengerjaan)

e. Terjadi ketidaksesuaian antara kode Akun vs Kode BMN pada pengadaan generator set 500 KVA, tangki BBM, dan otomasi jaringan genset. Hal tersebut disebabkan karena akun yang digunakan pada saat penganggaran adalah akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin), seharusnya akun 534131 (Belanja Modal Jaringan) pada satker IPDN Kampus Kalbar (683070).

f. Terjadi ketidaksesuaian antara kode Akun vs Kode BMN pada satker IPDN Kampus Kalbar (683070) sebesar Rp28.322.150,00. Hal tersebut disebabkan karena akun yang digunakan pada saat penganggaran adalah akun 523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin), seharusnya akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin).

g. Terdapat ketidaksesuaian kode akun vs kode BMN pada satker Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV (027177). Hal tersebut terjadi karena pengadaan kursi besi dibayarkan dalam satu SPM bersama belanja modal lainnya sehingga menggunakan akun belanja modal. Setelah diidentifikasi, nilai satuan kursi besi tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap (kurang dari Rp1.000.000 per unit), sehingga pada modul aset telah diklasifikasikan sebagai BMN ekstrakomptabel. Perbedaan tersebut masih muncul karena akun belanja pada SPM belum dilakukan pemisahan atau koreksi ke akun ekstrakomptabel.

h. Terdapat ketidaksesuaian kode akun vs kode BMN pada satker Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan (506138) sebesar Rp59.020.923,00. Penggunaan akun belanja modal untuk barang yang nilainya di bawah batas kapitalisasi terjadi karena pengadaan dilaksanakan dalam satu paket yang bersumber dari satu pagu anggaran dan dibayarkan melalui satu SPM. Akibatnya, akun belanja tidak dipisahkan berdasarkan nilai kapitalisasi barang, sehingga tetap tercatat sebagai belanja modal meskipun pada modul aset barang tersebut telah diklasifikasikan sebagai BMN ekstrakomptabel.

3 Berdasarkan data pada Aplikasi MyIntress terdapat selisih rekonsiliasi internal piutang untuk periode Semester I Tahun 2026 sebagai berikut:

a. Terdapat selisih rekonsiliasi internal pada satker IPDN (448302) karena potongan SPM atas pengembalian belanja pegawai yang terbit SP2D nya pada bulan Juli Tahun 2026 sebesar Rp825.404,00 serta koreksi nilai dan pelunasan piutang Praja Tahun 2026 sebesar Rp40.228.105,00 dan pelunasan piutang Praja Tahun 2025 sebesar Rp12.836.670,00.

b. Reklasifikasi piutang ke bagian lancar melalui jurnal manual modul Aklap pada satker IPDN Kampus Sulut (677010) sebesar Rp368.768.795,00.

c. Terdapat potongan SPM atas pembayaran sewa rumah dinas yang terbit SP2D nya pada bulan Juli Tahun 2026 pada satker Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pmerintahan Dalam Negeri I (506137) sebesar Rp888.882,00.

4 Berdasarkan perhitungan selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk secara absolut sebesar Rp0,00. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp10.332.636.087,00 terdapat pada satker Inspektorat Jenderal (027203), Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (027210), Ditjen Bina Pembangunan Daerah (039729), Ditjen Otonomi Daerah (621892), Ditjen Bina Keuangan Daerah (662766), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (403222), dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (403231). Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar (Rp10.332.636.087,00) terdapat pada satker Sekretariat Jenderal (403200).

5 Berdasarkan data pada Aplikasi MyIntress terdapat selisih resiprokal untuk periode Semester I Tahun 2026 sebagai berikut:

a. Terdapat selisih transaksi resiprokal pada satker Setjen (403200) dengan Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta (017720) senilai Rp4.500.000,00 dalam rangka penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara - Seleksi pengembangan karier pegawai Aparatur Sipil Negara di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara dengan NTPN ECD4B1JNGHMSCRMF tanggal 22 Mei 2026.

b. Terdapat selisih transaksi resiprokal pada akun Belanja–PNBP periode pelaporan sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp13.580.000,00 pada Satker Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Selisih tersebut berasal dari transaksi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang telah dilakukan pada 4 Mei 2026 dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan IV Tahun Anggaran 2026. Sampai dengan tanggal pelaporan, transaksi dimaksud belum dapat ditagihkan sebagai belanja APBN sehingga masih menimbulkan selisih transaksi resiprokal. Kondisi tersebut disebabkan proses penyelesaian administrasi masih berlangsung, yang meliputi revisi anggaran serta penyelesaian tahapan pelaksanaan dan administrasi Diklat Arsiparis. Setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi, transaksi tersebut akan segera diproses penagihannya pada APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Terdapat selisih transaksi resiprokal pada akun Belanja-PNBP Periode Juni 2026 sebesar Rp13.580.000 yang tercatat pada Satker Ditjen Bina Bangda. Selisih tersebut disebabkan oleh transaksi pembayaran kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Bulan April 2026 dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan fungsional arsiparis angkatan III TA 2026. Atas transaksi tersebut telah dibayarkan melalui Transaksi GUP Bulan Juli 2026.

6 Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913) sebesar Rp876.766.560,00 yang terdapat pada 6 satker telah dilakukan koreksi aset tetap, kecuali satker Ditjen Dukcapil sebesar Rp314.599.064,00 yang disebabkan karena kesalahan pencatatan kode akun pada saat penganggaran yaitu akun 425913 (Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu) yang seharusnya akun 425811 (Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah). Atas kesalahan pencatatan kode akun tersebut telah dilakukan koreksi pada periode bulan Juli 2026.

Diperiksa oleh:
Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II,

[redacted]

Rahmad Akbar, S.STP, M.A.P
NIP. [redacted]

Jakarta, 28 Juli 2026
Penelaah,

[redacted]

Cicilia Eka Yunita, A.Md.Ak
NIP. [redacted]

Mengetahui
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan,

[redacted]

I Nengah Sandiyasa, M.Ak
NIP. [redacted]



LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEMESTER I

2026

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
https://kemendagri.go.id